

KILASAN KINERJA 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

November 2018 - Oktober 2019



KILASAN KINERJA 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Kilasan Kinerja 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelindung:

Didik Suhardi

Penanggung Jawab:

Hendarman

Pengarah Materi:

Rusprita Putri Utami

Kurniawan

Eka Nugrahini Ciptawati

Diana Damey

Kontributor Artikel dan Foto:

Seluruh unit utama Kemendikbud

Penulis Artikel

Dipo Handoko

Ahmad Fauzi Ramdani

Mukti Ali

Editor:

Annisa Dwi Astuti

De Rizky Kurniawan

Dwiyani Widhiharsi Kusuma Putri

Ian Iapoh Morda Rumbai Simamarta

Kosasih Ali Abu Bakar

Marista Rita Sinaga

Miftahussururi

Yulaika Ernawati

Abdul Rachman Pambudi

Shara Zakia Nissa

Rusydina Ayu Triastika

Prabaria Vesca Yulianandra

Kadek Jeny Femila Devi

Anditya Pratama

Rika Hidayat

Kepala Editor

Ananto Kusuma Seta

Arie Budhiman

James Modouw

Soeparto

Alfan Alfian

Hamid Muhammad

Paradhita Zulfa Nadia

Andreas Yoga Aditama

Rizki Muhammad Ramdhan

Editor Foto, Desain Sampul, dan Tata Letak

Prista Rediza

Muhammad Abdurrahman Aditama

Muhammad Firdaus Jubaedi

Sekretariat

Ana Arham

Yuliah Suwarni

Keuangan

Gigih Anggana Yuda

Diana Damey

Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat –
10270

paska@kemdikbud.go.id

KILASAN KINERJA 2019 KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAKRIF:

Sila hubungi surat elektronik di samping
untuk mendiskusikan isi buku ini lebih lanjut

ISBN 978-623-7096-37-5



Assalamuálaikum Wr.Wb

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam segala bidang merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia dalam memasuki era Industri 4.0. Untuk itu, pembangunan SDM Indonesia menjadi hal yang mutlak dilakukan agar bangsa Indonesia mampu bersaing secara global. Disinilah peran sentral Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyiapkan generasi unggul dengan yang berbekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Buku ini mengangkat kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode November 2018 hingga Oktober 2019 dengan mengambil tema “SDM Unggul Indonesia Maju” yang menjadi fokus pemerintah saat ini dan kedepan. Hasil kinerja tersebut tidak terlepas dari kerja kita semua, seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat maupun daerah.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat, menghadirkan nuansa baru sebagai sumber informasi dan menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam berbagai khazanah pengembangan dan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Terima kasih, selamat membaca.

Wassalamuálaikum Wr. Wb

Jakarta, Oktober 2019

Muhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi



1 Bab I : Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Agen Transformasi Penguatan SDM

- 7 Membantu dan Mendorong Pemerintah Daerah Menata Guru
- 15 Membangun Generasi Unggul Melalui Apresiasi GTK
- 19 Menyiapkan Kepala Sekolah Berkompetensi Abad 21
- 25 Menuntaskan Sertifikasi Guru dalam Jabatan
- 30 Melindungi Pribadi dan Profesi Guru
- 33 Meningkatkan Kepiawaian Guru dalam Membuat Konten Pembelajaran Berbasis TIK
- 37 Menyiapkan Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualitas untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)
- 40 Menimba Ilmu dan Menyerap Wawasan Global



44 Bab II : Menyiapkan SDM Terampil Berdaya Saing

- 50 Menyiapkan Guru SMK Berketerampilan Global
- 52 Menyiapkan Lulusan SMK sebagai SDM Unggul dan Berkelas Dunia
- 57 Menyiapkan Siswa Berkebutuhan Khusus untuk Terampil, Mandiri dan Siap Kerja
- 64 Meningkatkan Kualitas Guru dalam Revitalisasi SMK
- 68 Memandirikan Masyarakat melalui Program PKK dan PKW



77

Bab III : Membangun Manusia Unggul dan Berkepribadian

- 80 Pendidikan Karakter Ruh Pembangunan SDM
- 83 Gerakan Literasi Wujudkan Masyarakat Literat
- 87 Kuis Siap-siap Aku Bisa, Tumbuhkan Anak Cerdas Berkarakter
- 90 Revitalisasi Pramuka, Hadapi Tantangan Zaman
- 94 Kawah Kepemimpinan Pelajar Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan
- 96 Momentum Bangkitnya PAUD
- 99 Pendidikan Keaksaraan Meningkatkan Kompetensi Warga
- 102 Olimpiade, Lomba dan Festival Siswa
- 106 Gala Siswa Indonesia Pembentuk Karakter Siswa
- 109 Pelibatan Keluarga dalam Pendidikan
- 113 Mengembangkan Karakter Siaga Bencana
- 115 Perubahan Fundamental Kurikulum 2013
- 118 Menumbuhkan Jiwa Cinta Laut
- 120 Agen Antikorupsi Anak dan Wanita



125

Bab IV : Menciptakan Ekosistem Pendidikan yang Berkeadilan

- 130 Zonasi Pendidikan: Percepatan Pemerataan Pendidikan yang Adil dan Berkualitas
- 136 Program Indonesia Pintar: Pemberian Kesempatan Belajar bagi Seluruh Anak Indonesia
- 144 Bantuan Operasional Sekolah: Perluasan Akses untuk Meningkatkan Mutu
- 158 Menyiapkan Kompetensi Guru Abad 21 Berbasis Zonasi
- 163 Mengembangkan SDM Unggul Melalui Akreditasi PAUD dan PNF
- 168 Menjaring Masyarakat Berprestasi hingga Daerah 3T
- 173 UNBK Upaya Peningkatan Integritas
- 175 Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
- 177 Pengawas: Pengawal Ujian Nasional yang Berintegritas



180

Bab V : Menjangkau yang Tak Terjangkau

- 184 Sekolah Berasrama dan ADEM
- 186 Berdayakan TNI untuk Pendidikan di Perbatasan
- 189 Berkilau di Perbatasan dengan Akses Internet
- 194 Menyongsong Pembelajaran Masa Kini
- 198 Program Digitalisasi Sekolah: Percepatan Akses Pelayanan Pendidikan di Wilayah 3T
- 202 Penanganan Gempa di Maluku dan Kerusuhan di Nduga, Papua



195

Bab VI : Pemajuan Kebudayaan Bahasa dan Perbukuan

- 211 Mengembangkan Budaya Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
- 216 Platform Indonesiana
- 220 Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Sebagai Warisan Budaya Dunia
- 224 Sinergi Seriman dan Peserta Didik Majukan Budaya Milik Negeri
- 227 Karavan Budaya Go Internasional
- 230 Bantuan Sarana Kesenian
- 233 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Film Indonesia Melalui Nonton Bareng
- 236 Gelar Karya Film Pelajar
- 238 Dialog Selesaikan Masalah Sensor Film
- 240 Workshop Perfilman Dalam Rangka Kompetensi Keahlian Produksi Film
- 242 Pemajuan Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Bantuan Perfilman
- 248 Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
- 250 Angkat Martabat Bangsa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
- 253 Pengembangan Istilah dan Kosakata

255	Pembinaan dan Cinta Bahasa dan Sastra
259	Mitra Komunitas Lindungi Bahasa Daerah
262	Pengembangan dan Penilaian Buku Pendidikan Berkualitas
266	Satuan Penelitian Arkeologi dan Rumah Peradaban



259

Bab VII : Tata Kelola Menuju Pemerintahan Kelas Dunia

276	Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud
281	Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi
284	Darmasiswa Menuju Indonesia Unggul
288	Mendikbud RI Menjadi Presiden SEAMEO Council
300	SiRenBaja
303	Layanan Elektronik Pendidikan
306	Katalog Sektoral
310	SIPLah: Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah
314	Unit Layanan Terpadu : Birokrasi Yang Melayani
317	Repositori Institusi
321	Pengadaan CPNS yang transparan, kompetitif dan bebas KKN
323	Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kemendikbud
328	Manajemen Talenta Mencetak PNS Berkualitas
331	Penilaian Kinerja Pegawai
334	Peningkatan Kinerja Melalui e-Kehadiran
337	Program Magang Menciptakan Pelayan Birokrasi di Era Industri 4.0
339	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
342	Tour of Duty dan Tour of Area
344	Kemendikbud Kembangkan Perizinan Terintegrasi Secara Online
346	Bekerjasama Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
349	Reformasi Digital dengan SIANGJAB
351	Menata Organisasi dengan SIEVO
353	Pelatihan Dasar Agenda Sikap Perilaku Bela Negara bangun ASN yang berintegritas
355	Melatih Birokrat yang Berjiwa Pemimpin Nasional
356	Pengembangan Program Pelatihan Moda Kombinasi (Blended Learning)
360	SIMREPA: Reservasi Gedung dan Asrama secara Daring
363	Satu Data Pendidikan Kebudayaan Dan Bahasa
367	Neraca Pendidikan Daerah sebagai Potret Mutu dan Komitmen Daerah

SDM Unggul, Indonesia Maju

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki ikhtiar mulia dalam menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan yang berorientasi kepada dinamika kemajuan zaman.

Ikhtiar ini termuat dalam Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Untuk itu berbagai upaya dalam mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional terus menerus dilakukan.

Mewujudkan “SDM Unggul, Indonesia Maju” sejalan dengan isi pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2019 yaitu “Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia

Maju. Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh mandiri.” Isi pidato Presiden juga mengisyaratkan bahwa pembangunan SDM Indonesia harus berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan.

Dalam rangka mendukung pembangunan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja melalui program-program prioritas pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam rangka membekali anak-anak Indonesia menghadapi berbagai tantangan global di era Revolusi Industri 4.0. Berbagai upaya yang telah ditempuh diantaranya:

Pertama, terus meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar untuk mencapai Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi Pendidikan anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan Pendidikan, serta meningkatkan

kesiapan siswa pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki pasar kerja. Pada tahun 2019 ini pemerintah mencairkan bantuan KIP sebesar 6,07 Triliun yang diperuntukkan untuk 17,92 juta siswa.

Kedua, Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Saat ini, pendidikan keterampilan dan kejuruan terus diperkuat sebagai upaya meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing bangsa. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia mengamanatkan Kemendikbud untuk melakukan penyesuaian kurikulum agar sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, dan menyesuaikan standar kompetensi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Pada tahun 2019 sebanyak 50.000 siswa telah mengikuti sertifikasi siswa SMK dan 1.957 SMK bidang kemaritiman, pariwisata, pertanian, industri kreatif dan bidang keahlian lainnya telah

direvitalisasi, serta pengembangan kerja sama *teaching factory* dan penguatan kerja sama dengan industri.

Ketiga, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Gerakan Nasional Revolusi Mental dan lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, mengamanatkan kepada kita semua untuk membentuk SDM yang memiliki karakter dan mengamalkan nilai Pancasila yaitu: Religiositas, Nasionalisme, Kemandirian, Gotong Royong, dan Integritas. Kemendikbud terus berupaya mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam membentuk SDM dengan keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahun 2019 sebanyak 89.182 satuan pendidikan mendapatkan pendampingan PPK oleh LPMP di 34 provinsi dan sampai dengan tahun 2019 seluruh satuan pendidikan sebanyak

218.989 telah mendapatkan intervensi serta telah menerapkan PPK.

Keempat, Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh pembangunan pendidikan nasional. Kemendikbud melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 objek Pemajuan Kebudayaan, melalui Pekan Kebudayaan Nasional, Indonesiana, Seniman Masuk Sekolah, Festival Seni Pertunjukkan, Gita Bahana Nusantara, Belajar Bersama Maestro, Konser Karawitan Anak Indonesia, Pekan Teater Tradisional serta dukungan Fasilitas Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan. Pada tahun 2019 sebanyak 2.438 satuan pendidikan telah mendapatkan fasilitasi sarana kesenian, 1.344 Seniman Masuk Sekolah dengan total 26.880 siswa, 300 peserta di 8 provinsi belajar bersama 20 maestro, Indonesiana dilaksanakan di 19 wilayah festival, 120 desa adat direvitalisasi, bantuan pemerintah untuk 235 komunitas budaya, dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia telah menghasilkan Strategi Kebudayaan yang terdiri dari 339 dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota dan 34 dokumen PPKD provinsi.

Kelima, Penguatan Tata Kelola Pembangunan Pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Kemendikbud telah menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang merupakan platform informasi potret

kinerja pendidikan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota. Melalui NPD diharapkan dapat menjadi basis informasi dalam pengambilan kebijakan dan acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. NPD mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBD murni.

Keenam, Kemendikbud mendorong sebuah reformasi paradigma pendidikan yang adaptif dengan perkembangan zaman melalui sistem zonasi. Kebijakan zonasi pendidikan diperlukan sebagai langkah awal untuk pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas. Kebijakan zonasi bukan berhenti pada PPDB saja melainkan akan meliputi penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, pengintegrasian pendidikan formal dan non formal, serta penataan ekosistem pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi, pendidikan yang berkualitas tidak hanya bisa didapatkan di kota-kota besar, tetapi juga di daerah, bahkan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Agar upaya pembangunan SDM ini dapat terwujud, Kemendikbud melakukan kolaborasi dan pelibatan publik, mendorong keterlibatan aktif tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbagai kebijakan prioritas tersebut semata-mata dalam rangka menyiapkan SDM unggul yaitu Generasi Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.

1. CAPAIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

APRESIASI GTK BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI



432
GURU



247
KEPALA
SEKOLAH



204
PENGAWAS
SEKOLAH



28
KATEGORI

PKP GURU BERBASIS ZONASI



110.000
GURU INTI



2.580
ZONA

BANTUAN PEMERINTAH



14.012
RIBU



280.240
GURU



PENGIRIMAN GTK BERPRESTASI KE LUAR NEGERI

7 BIDANG PROGRAM | 1.214 ISRANG | 15 NEGARA



81 GURU | 23 TENAGA KEPENDIDIKAN | 10 NEGARA

SELEKSI GTK SILM



PEMBELAJARAN BERBASIS TIK

28.624 GURU **LEVEL 1** | 13.015 GURU **LEVEL 2**



BIMTEK TRAUMA HEALING BENCANA SULTENG

4000 GURU | 200 GURU INTI | 5 LEMBAGA NON PEMERINTAH

2. CAPAIAN PENERAMPILAN MANUSIA INDONESIA

PROGRAM REVITALISASI SMK 2019

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi

SMK
Revitalisasi



90
SMK



90
SMK



162
SMK



50.000
Siswa



300
SMK



215
SMK



600
SMK



500
SMK



40
SMK



100
SEKOLAH

PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA (PKK) DAN PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSSAHA (PKW)



80.000 ORANG PROGRAM PKK



72.000 ORANG PROGRAM PKW

3. CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA UNGGUL BERKEPRIBADIAN

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

PEMBAHASAN PERANAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DALAM SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAHUN 2018-2019

2018 88.646 93,4%

2019 218.989 100%

(Pada tahun 2019, sebanyak 218.989 sekolah melaksanakan PKK)



PEMBAHASAN LKMP

89.182
SEKOLAH



PEMBAHASAN PKW SPAS

138
KAB/KOTA

93
FASILITATOR
NASIONAL

273
FASILITATOR
DAERAH

GERAKAN LITERASI MASYARAKAT

GERAKAN
REKREASI
MASYARAKAT

78
KAB/KOTA

GERAKAN
TBM

590
LEMBAGA

GERAKAN
TBM

33
KAB/KOTA

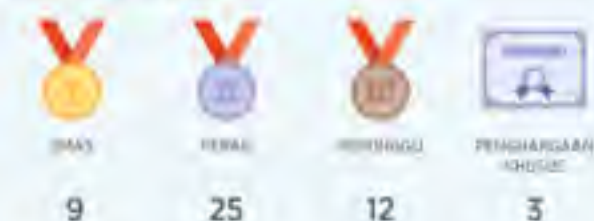
GERAKAN
TBM

80
LEMBAGA

GERAKAN
PENGUATAN
LITERASI

360
ORANG

PRESTASI SISWA



NANCY MCARDLETT / CLONING

[illegible]

RAGAM KEGIATAN



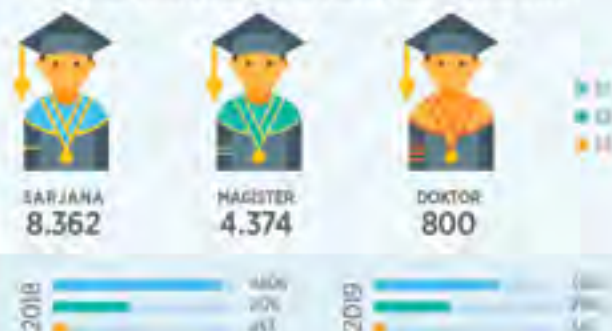
4. CAPAIAN EKOSISTEM PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN

KARTU INDONESIA PINTAR



BEASISWA UNGGULAN

TOTAL PENERIMA PER JENJANG TAHUN 2018-2019



5. CAPAIAN PENJANGKAUAN DAERAH 3T

PAPUA DAN PAPUA BARAT

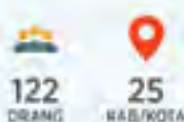
PROGRAM
AFIRMASI PENDIDIKAN
BERKUALITAS CLOMOT



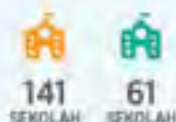
DIJALAT ONLINE
BISNIS PAPER DAN
PAPER BAKAT



PELATIHAN TIM
GURU PAJUBA DAN
PAJUBA BAKAT



PRASADAN SIVOLAN
SODASANA

PEMBELAJARAN
JADAR JARIF

PELIBATAN DAN PENGUATAN KOMPETENSI TNI AD DI DAERAH 3T



900
ORANG

450
ORANG

TNI AD BATALYON 602 RAIDERS BALSAPAH
TUGAS: MUNUKAN, KALIMANTAN UTARA

450
ORANG

TNI AD BATALYON 303 RAIDERS GARUT
TUGAS: MALINAU, KALIMANTAN UTARA



6. CAPAIAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN BAHASA



KEJARAN
PASIR SEKOLAH

1.344
SEKOLAH

26.880
SISWA



KEMERDEKAAN
KEKAWAIBATAN INDONESIA

339
DOKUMEN PERDI
KAB/KOTA

34
DOKUMEN PERDI
PROVINSI



KEKAWAIBATAN

379
SEKOLAH

10.102
SISWA

1.041
GURU



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN MAJESTRO

20
MAJESTRO

300
PESERTA

8
PROVINSI



Bahasa Indonesia
Bagi Masyarakat Umum

126
PENGALIH

21
NEGARA

82
LEMBAGA

9.785
PEMELAJAR



PERKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

53
LOKASI

5.704
PEMONTON



KEKAWAIBATAN
BAHASA INDONESIA

3.661
PESERTA

3.466
PESERTA
WNI

195
PESERTA
WNA



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

589
ORANG



KAMUS BESAR
BAHASA
INDONESIA

38.928
PENGUNA



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

18
PROVINSI



BANTUAN
KEKAWAIBATAN

235
KOMUNITAS
BUDAYA



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

2.438
SEKOLAH



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

7
KOTA
DI JERMAN



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

20
SEKOLAH

119
GURU



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

120
DESA



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

21
KALI



KEKAWAIBATAN
KEKAWAIBATAN

3.839
ORANG

7. CAPAIAN PENGUATAN TATA KELOLA



UNIT LAYANAN TERPADU
14.987
PENGUNJUNG



DARMASISWA
679 ORANG | 94 NEGARA | 70 KAMPUS



ASESMEN PEGAWAI
4.400
PESERTA



PROGRAM
MAGANG PENINGKATAN
KOMPETENSI PEGAWAI
32 PESERTA | 16 NEGARA



ZONA
INTEGRITAS
30
SATWIR
21-WSK | 3
SATWIR
WSDH



APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI:
NPD, DAPODIKBUD, SIMPROKA, SIRENBAJA,
SIPLAH, E-KATALOG, SBPE, E-SKP,
REPOSITORI KEMDIKBUD, E-KEHADIRAN,
SIANJAB, SIEVO



Rapat Koordinasi Kebijakan Zonasi

Mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Agen Transformasi Penguatan SDM



Guru Sebagai Pembangkit Inspirasi

"Guru adalah pembangkit inspirasi, memberikan ilmu kepada kita, membimbing anak-anak kita, membimbing kita semuanya agar kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya yang ada."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Ada tujuh agenda pembangunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, satu di antaranya ada pada Agenda Ketiga, yaitu “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda Ketiga tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan pada butir keempat, yakni “Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas” yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas diuraikan lagi ke dalam lima langkah strategis.



Langkah Strategis Pemerataan Layanan Pendidikan

“Redistribusi dan rotasi guru berbasis zonasi mendesak dilakukan sebagai langkah awal perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru di setiap daerah. Peningkatan kompetensi pembelajaran dilaksanakan berbasis zonasi yang memungkinkan guru tanpa harus meninggalkan sekolah serta menghidupkan komunitas guru. Penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan agar mereka mampu membangun tata kelola dan budaya mutu di sekolah.

Langkah strategis pertama dan ketiga sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Sepanjang tahun 2019, Direktorat Jenderal GTK sudah melaksanakan delapan kebijakan prioritas. Delapan kebijakan prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, redistribusi dan rotasi guru guna pemerataan pendidik yang dilaksanakan berbasis zonasi. Direktorat Jenderal GTK saat ini telah merancang sistem aplikasi pemetaan guru yang dapat digunakan sebagai dasar pemindahan guru bernama SIM RASIO. Sistem ini dapat melakukan analisis perhitungan kebutuhan guru setiap sekolah dan juga merekomendasikan guru yang jumlahnya berlebih di suatu daerah untuk dipindahkan ke daerah yang kekurangan guru.

Kedua, kebijakan penguatan kepala sekolah yang merupakan konsekuensi dari perubahan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ketentuan baru Peraturan Pemerintah tentang Guru tersebut menegaskan bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah tidak lagi dibebani tugas mengajar.

Ketiga, penuntasan program sertifikasi yang dilaksanakan melalui Program Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ). PPGDJ dirancang sebanyak 24 SKS atau setara dengan satu semester masa pendidikan. Pola pembelajarannya adalah *blended learning* atau *hybrid learning*, yaitu model pembelajaran yang menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur pendidikan jarak jauh (*online learning*) yang dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran tersebut diterapkan untuk guru-guru di daerah yang secara infrastruktur memungkinkan belajar daring.

Keempat, kebijakan tentang perlindungan guru yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2008 tentang Guru. Menurut aturan tersebut, perlindungan guru mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

Kelima, upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yakni melalui program Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK). Program yang digagas oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) ini bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik bidang TIK yang dipakai guru untuk pembelajaran. PembaTIK sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang di dalamnya guru-guru dituntut untuk memanfaatkan TIK pada penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.

Keenam, pemerintah berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik di sekolah Indonesia luar negeri (SILN). Untuk menjamin pendidikan berkualitas di luar negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menugasi guru dan tenaga pendidik yang berkualitas unggul dan profesional untuk mengajar warga negara Indonesia usia sekolah di luar negeri. Tujuan program tersebut adalah SILN dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul, dan siap menghadapi tantangan global. Salah satu upayanya adalah melalui seleksi bersama Kemendikbud dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Ketujuh, program Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirim guru dan tenaga kependidikan ke luar negeri sebagai jawaban untuk menghasilkan SDM yang unggul.

Tujuh Program Prioritas GTK Tahun 2019



DAFTAR ARTIKEL BAB 1

Membantu dan Mendorong Pemerintah Daerah Menata Guru	7
Membangun Generasi Unggul Melalui Apresiasi GTK	15
Menyiapkan Kepala Sekolah Berkompetensi Abad 21	19
Menuntaskan Sertifikasi Guru dalam Jabatan	25
Melindungi Pribadi dan Profesi Guru	30
Meningkatkan Kepiawaian Guru dalam Membuat Konten Pembelajaran Berbasis TIK	33
Menyiapkan Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualitas untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)	37
Menimba Ilmu dan Menyerap Wawasan Global	40

Membantu dan Mendorong Pemerintah Daerah Menata Guru

*“Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi.”
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)*

“Redistribusi dan rotasi guru” mendadak menjadi topik hangat perbincangan para guru di Tanah Air. Berbarengan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengulirkan kebijakan penataan guru berbasis zonasi. Usai PPDB, pemerintah daerah diharapkan melakukan redistribusi dan rotasi guru berbasis zonasi agar tidak terjadi ketimpangan komposisi guru di setiap sekolah.

Solusi persoalan kekurangan guru yang ditiadakan oleh sekolah memang bukan semata diselesaikan dengan pengangkatan guru baru. Sebelum menyampaikan usulan kebutuhan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), sebaiknya pemerintah daerah melakukan redistribusi dan rotasi guru antarsekolah. Kelebihan guru pada satu mata pelajaran pada satu sekolah harus dipindahkan ke sekolah lain yang membutuhkan guru tersebut sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

Setelah ada kebijakan redistribusi dan rotasi, barulah dilakukan perhitungan kebutuhan guru ASN untuk diusulkan sebagai formasi ke Kemen PANRB. Banyak daerah tidak memiliki perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pun kesulitan melakukan pemindahan dan perhitungan kebutuhan guru yang sesuai dengan kondisi sekolah. Padahal,

pengusulan formasi oleh pemerintah daerah perlu dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) telah merancang sistem aplikasi bernama SIM RASIO yang dapat melakukan pemetaan guru yang digunakan sebagai dasar pemindahan guru. Sistem aplikasi itu dapat melakukan analisis perhitungan kebutuhan guru setiap daerah dan merekomendasikan guru yang jumlahnya berlebih dapat dipindahkan ke daerah yang kekurangan guru.

"Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Perencanaan dan Penataan Kebutuhan Guru sudah digelar pada tahun 2019. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dinas pendidikan untuk mengetahui kekurangan guru-guru di sekolah-sekolah," kata Darlisman, peserta kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5-8 Agustus 2019. Darlisman yang menjabat sebagai Kasi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Padang Panjang ini mengakui data guru dari sekolah yang diberikan kepada Dinas Pendidikan ada yang tidak valid dan lengkap. Ia berharap operator sekolah memiliki kualitas yang makin baik agar data guru yang

diterimanya menjadi lebih valid.

Dengan bantuan aplikasi perencanaan dan penataan kebutuhan guru, diharapkan tugas pemerintah daerah selanjutnya adalah mengeksekusi hasil analisis tersebut.

Caranya adalah dengan melakukan pemindahan guru yang diikuti dengan penyesuaian Dapodik pada setiap sekolah, baik sekolah yang menerima guru pindahan maupun sekolah yang melepas guru berlebih. Pemutakhiran Dapodik akan diikuti dengan perubahan peta kelebihan dan kekurangan guru pada aplikasi. Begitu seterusnya sampai peta kebutuhan pada aplikasi menunjukkan setiap sekolah sudah

Tabel Kondisi Kebutuhan dan Jumlah Guru di Beberapa Daerah

Nama Kabupaten Kota	Kebutuhan				PNS			
	Bahasa Inggris	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Matematika	Bahasa Inggris	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Matematika
Kota Bontang		28	24			36	30	
Kota Samarinda			143				180	
Kab. Tana Tidung	11	13		13	18	22		18
Kab. Lampung Tengah		221	187			335	233	
Kab. Lampung Timur			143				150	
Kab. Pesawaran			81				87	
Kab. Tulang Bawang Barat			58				64	
Kota Bandar Lampung	172		172		176		182	
Kota Metro		46	39			58	67	
Kab. Mooka Tenggara			34				39	
Kota Ambon		95	70			120	120	
Kota Ternate	40	47			47	64		

tidak ada lagi kelebihan guru pada setiap mata pelajarannya.

Permasalahan Tata Kelola Guru

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa jika permasalahan guru dapat diselesaikan, 70% persoalan pendidikan akan selesai. Mendikbud berharap setelah proses PPDB selesai, segera diikuti kebijakan rotasi guru dalam satu zona.

“Pemerataan guru diprioritaskan di dalam zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika

penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

Tata kelola guru memang masih menyisakan permasalahan, baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitas. Hasil rerata Uji Kompetensi Guru (UKG) Tahun 2017 setidaknya bisa menjadi gambaran kemampuan guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Capaian rerata tertinggi diraih oleh guru SMA yang mencapai 69,55. Sementara itu, rerata UKG guru SD paling rendah, yakni 62,22. Capaian rerata UKG 2017 ini masih jauh di bawah standar kompetensi guru yang dipatok

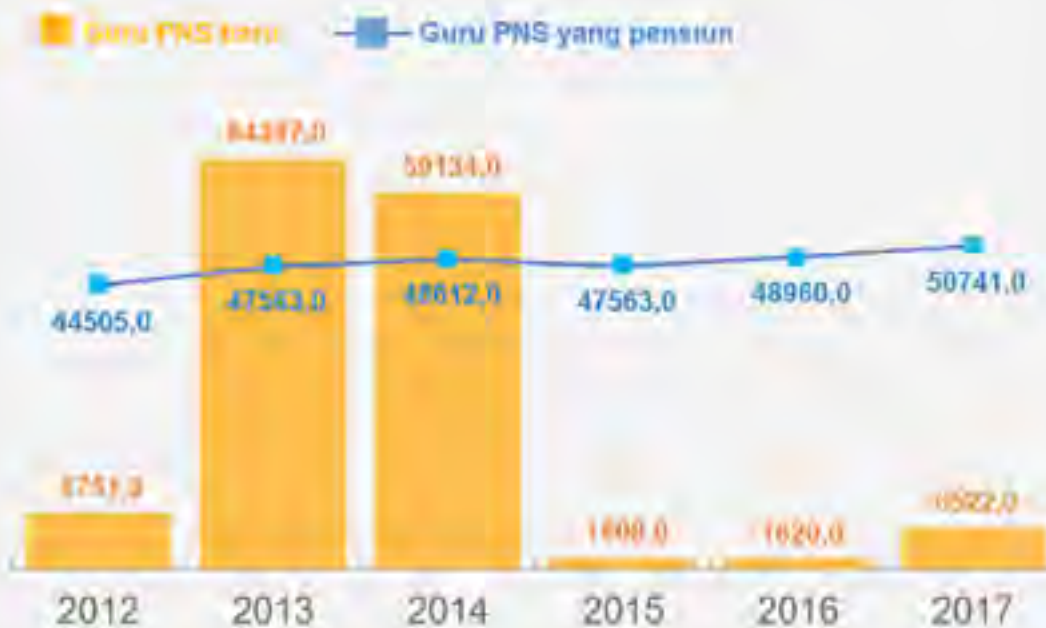
Kelebihan (Belum memperhitungkan CPNS 2018)				CPNS 2018			
Bahasa Inggris	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Matematika	Bahasa Inggris	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Matematika
	8	8					
		160					
5	9		3		5		
	14	46			4	2	
		7				8	
		8				4	
		6				34	
4		10		18			
	10	28			2	2	
		5					
	25	41					
7	17						

Maximally 34 CPNS Guru Baru padahal masih punya kelebihan 6 orang

Tabel Kondisi Kebutuhan dan Jumlah Guru yang Tersedia pada Beberapa Daerah



Jumlah Kebutuhan Guru yang perlu dipenuhi melalui Sistem Pengendalian Formasi (Kemdikbud, 2019)



Perbandingan Jumlah Guru PNS Pensiun dengan Guru PNS Baru (Kemdikbud, 2018)

80.

Persoalan aspek kuantitas guru bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah adanya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan belum ada pengangkatan guru PNS baru sebagai pengganti guru pensiun atau guru pindah jabatan struktural. Faktor lain adalah guru pensiun yang setiap tahun menyumbang angka kekurangan guru.

Berdasar Dapodik per Desember 2017 menunjukkan bahwa kekurangan guru sebanyak 988.133 orang. Kekurangan ini diperkecil menjadi 707.324 orang dengan kebijakan baru yang mengacu ke Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Guru Bersertifikat Pendidik yang sudah disempurnakan dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019. Kebijakan tersebut adalah penugasan guru *multisubject teaching* (guru yang mengajar mata pelajaran lain yang masuk dalam satu rumpun) dan *multigrade teaching* (guru yang mengajar lintas jenjang pada mata pelajaran yang sama). Kondisi ideal akan tercapai jika terpenuhinya kekurangan guru diperoleh dari proses yang terkendali mulai dari penentuan kebutuhan per sekolah dan per mata pelajaran sampai dengan penempatan guru yang sesuai dengan peta kebutuhan awal pada saat pengusulan formasi ASN.

Pelaksanaan rekrutmen pada tahun 2018 memunculkan permasalahan baru, yaitu daerah yang menerima guru baru hasil seleksi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat pengusulan

formasi tidak didasarkan pada peta kebutuhan riil sekolah. tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak kabupaten/kota yang mempunyai kelebihan guru mata pelajaran justru menerima tambahan guru baru hasil rekrutmen pada tahun 2018. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut apabila tidak dilakukan pengendalian formasi untuk memastikan usulan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Setidaknya, ada dua hal yang harus diselesaikan terkait distribusi guru yang tidak merata. Distribusi tidak merata mengakibatkan ada sekolah kelebihan guru dan di saat yang sama ada kekurangan guru. Kondisi itu terjadi akibat tingginya guru pensiun dan adanya kebutuhan guru akibat pendirian USB. Penafsiran tentang pengelolaan pendidikan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menganggap hal itu semata-mata menjadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Padahal, pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada ketentuan pembagian tugas konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dengan jelas mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Artinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan formasi, pemindahan, dan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan. Penyumbang kekurangan guru selanjutnya, adalah angka pensiun guru setiap tahun yang jumlahnya sangat tinggi dan terjadi hampir di semua jenjang, semua mata pelajaran, dan di

semua wilayah. Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2017, rata-rata jumlah guru PNS yang pensiun sebanyak 50.000 orang.

Di sisi lain, jumlah guru PNS yang diangkat pada tahun 2013 dan 2014 lebih sedikit daripada akumulasi guru PNS yang pensiun. Dengan banyaknya guru pensiun, akan terjadi kekosongan guru padahal proses belajar mengajar tidak boleh berhenti.

PERLU PENYEMPURNAAN APLIKASI

Aplikasi Analisis dan Penataan Guru masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Saat ini aplikasi baru bisa digunakan untuk melihat peta kelebihan dan kekurangan guru per mata pelajaran dan per sekolah. Aplikasi dapat memberikan alternatif sekolah tujuan mutasi guru yang akan dipindahkan dari sekolah yang kelebihan guru.

Untuk pengembangan selanjutnya perlu dibuatkan kriteria bagi seorang guru yang kompeten untuk dirotasi ke sekolah lain. Rotasi itu lebih banyak ditujukan kepada pemerataan mutu guru dengan cara memindahkan guru

kompeten ke sekolah yang gurunya masih belum kompeten. Diharapkan pada tahun 2019, kriteria seorang guru akan dipindah karena kompetensinya segera disusun. Kriteria tersebut akan masuk ke dalam sistem untuk menampilkan daftar guru berdasarkan urutan kompetensinya.

Diharapkan bahwa proses pemindahan guru hasil pemetaan aplikasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada bulan Juni-Juli 2020 sehingga pada saat dimulainya pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 kelak, guru hasil mutasi sudah mulai bertugas di sekolah baru. Keterbatasan lain dalam penerapan aplikasi ini ada pada peta zonasi yang masih terdapat tumpang tindih batas zonasinya. Hal itu mengakibatkan sekolah tempat tugas guru berada pada beberapa zonasi. Aplikasi perlu dikembangkan agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan terintegrasi dengan data ASN di Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, aplikasi dapat dikembangkan untuk dapat membantu proses rotasi guru yang bukan untuk pemerataan kuantitas guru tapi juga pemerataan kualitas guru.

Proses Pelaksanaan Rekrutmen Guru



Linimasa Penyempurnaan Aplikasi Analisis dan Penataan Guru



Kondisi Ideal Rekrutmen Guru PNS





Pemberian Piagam Penghargaan Pada Acara GTK Berprestasi oleh Sesjen Kemendikbud, Didik Suhardi

Membangun Generasi Unggul Melalui Apresiasi GTK

"Semoga dengan karya nyata ini bisa menginspirasi seluruh penilik di Indonesia untuk melakukan pembimbingan yang efektif bagi GTK di wilayahnya masing-masing."

(Ekawati Indrianingsih, Juara 1 Kategori Berprestasi Penilik PAUD dan Dikmas)

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rembuk Nasional Pendidikan 2019 di Sawangan Depok, Jawa Barat. "Kualitas SDM di semua jenis profesi harus ditingkatkan secara signifikan. Kualitas SDM di usia remaja juga harus ditingkatkan secara signifikan sehingga kita mampu menghadapi dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu sangat cepatnya," pesan Presiden Joko Widodo. Pada intinya, manusia unggul akan mampu menjawab tantangan zaman yang berubah begitu cepat.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui program pembinaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk dengan pemberian penghargaan. Dengan pemberian penghargaan kepada GTK, diharapkan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dalam rangka menyongsong era Revolusi Industri 4.0.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten memberikan apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi. Sejumlah kegiatan pemberian penghargaan kepada GTK adalah, antara lain, 1) penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana; 2) penghargaan guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium), guru berprestasi dan berdedikasi untuk semua jenjang pendidikan formal (TK, SD, SMP dan SMA); 3) penghargaan Inovasi

Pembelajaran; 4) Olimpiade Guru Nasional; dan 5) Anugerah Konstitusi Nasional

Rekomendasi Dunia

Apresiasi tinggi pada profesi guru bukan hanya merupakan fenomena lokal, melainkan sudah menjadi fenomena global. Apresiasi itu tampak amat nyata di banyak negara dan di dunia internasional. *International Labour Organization* (ILO) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), misalnya mengakui "status" profesi guru pada tempat tersendiri.

Kata "status" yang digunakan di dalam rekomendasi ILO/UNESCO mengenai Status Guru (*The Status of Teachers*) tahun 1966, bermakna bahwa kedudukan dan penghormatan yang diberikan kepada guru harus sesuai. Hal itu dibuktikan dengan tingkat penghargaan akan pentingnya fungsi dan kemampuannya melaksanakan fungsi, kondisi kerja, pengupahan dan keuntungan-keuntungan material lain yang diberikan kepada mereka dibandingkan dengan kelompok-kelompok profesi lain.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan satu bentuk penghargaan pemerintah atas penyandang profesi guru. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Demikian juga, guru yang gugur dalam melaksanakan tugas



Pemberian Apresiasi Guru Berprestasi oleh Guruh Soekarnoputra

di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.

Melalui pemilihan guru berprestasi ini telah terpilih guru-guru terbaik untuk jenjang Taman-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat. Sebutan guru berprestasi

mengandung makna sebagai guru unggul/ mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pada tahun 2019, Ditjen GTK menyelenggarakan Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 23-28 Juni 2019. Sebanyak 437 peserta dari 34 provinsi ikut berlomba dalam 21 kategori untuk menjangring terobosan dan karya terbaik bidang pendidikan.

Pemilihan GTK Berprestasi dan Berdedikasi Nasional diadakan di Jakarta pada tanggal 12-18 Agustus 2019. Acara tersebut melibatkan 432 guru, 274 kepala sekolah, dan 204 pengawas sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dari seluruh provinsi dengan 28 kategori lomba. Seluruh peserta hadir pada Sidang Paripurna di Gedung DPR pada tanggal 16 Agustus 2019. Mereka juga mengikuti Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia di halaman Kemdikbud pada tanggal 17 Agustus 2019. Dengan banyaknya ajang unjuk kompetensi bagi GTK ini turut mendorong lahirnya GTK unggul yang diharapkan menjadi agen perubahan di sekolah

dan daerah masing-masing. Ditjen GTK juga sudah melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap para juara GTK berprestasi dan berdedikasi dalam berbagai kegiatan, di antaranya menjadi narasumber dan instruktur nasional, untuk menyebarkan *best practices* prestasi mereka dan juga kegiatan peningkatan kompetensi lain. Seperti yang dirasakan oleh Ekawati Indrianingsih, juara 1 kategori Berprestasi Penilik PAUD dan Dikmas sebagai fasilitator dan pengarah di Kabupaten Semarang dan daerah lainnya melalui pembimbingan kolaboratif, inspiratif, empati, dan aspiratif *One Month One Book* kepada Kepala Sekolah.



Menyiapkan Kepala Sekolah Berkompetensi Abad 21

Salah satu kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendesak dituntaskan adalah menyiapkan kepala sekolah yang kompeten dan mampu berpikir visioner dalam memimpin dan mengelola sekolahnya. Target utamanya adalah membangun tata kelola dan budaya mutu di sekolah yang berdaya saing tinggi.

Lily Herliawati, S.Pd. (56 tahun), merasa senang mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan Kepala Sekolah yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. "Materi diklat sesuai dengan kebutuhan kinerja kepala sekolah, namun karena waktu sangat terbatas menyebabkan peserta kurang maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugas berkaitan dengan materi diklat," kata Kepala SD Negeri 2 Triwarno Kabupaten Kebumen ini.

Lily bahkan berharap dapat sering mengikuti kegiatan penyegaran untuk kepala sekolah yang diselenggarakan secara berkala. "Hal ini bermanfaat untuk memotivasi kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan memahami regulasi dan perkembangan terkini," katanya.

Lily diwajibkan mengikuti diklat penguatan kepala sekolah yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Ketentuannya adalah kepala sekolah yang menjabat sebelum tanggal 9 April 2018 wajib mengikuti dan lulus diklat penguatan kepala sekolah. Sementara itu, kepala sekolah yang menjabat setelah tanggal diundangkannya, harus mengikuti diklat calon kepala sekolah. Mereka harus memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) untuk dapat meneruskan jabatan kepala sekolah.

Kebijakan penguatan kepala sekolah itu sebagai konsekuensi dari perubahan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Ketentuan baru PP Guru menegaskan bahwa beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Artinya, kepala sekolah tidak lagi dibebani tugas mengajar.



Tugas Manajerial Kepala Sekolah

Pada aturan turunannya, Pasal 9 dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah diatur pula beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terdapat guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara, tetap, atau belum tersedianya guru yang mengampu pada mata pelajaran atau kelas tertentu.

MENYIAPKAN KEPALA SEKOLAH YANG BERKOMPETEN

Fokus pada tugas manajerial, kewirausahaan, dan supervisi sebenarnya memang sudah menjadi bagian dari kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, kepala sekolah yang profesional memang yang wajib memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial.

Permasalahannya adalah sejak era otonomi daerah yang kewenangan pengangkatan kepala sekolah berada di bawah kepala daerah, banyak terjadi penyimpangan terhadap Permendiknas Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Data Sistem

Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan (SIM Tendik) 2019, mencatat bahwa dari total 311.933 kepala sekolah, hanya 81.904 kepala sekolah yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).

Kepala sekolah yang memiliki NUKS berarti kepala sekolah yang sudah lolos diklat calon kepala sekolah dengan terbitnya sertifikat kepala sekolah. Artinya, lebih dari 230.000 kepala sekolah belum memenuhi standar kepala sekolah.

Salah satu kebijakan prioritas Kemendikbud yang mendesak dituntaskan adalah menyiapkan kepala sekolah yang kompeten dan mampu berpikir visioner dalam memimpin dan mengelola sekolahnya. Target utamanya adalah membangun tata kelola dan budaya

mutu di sekolah yang berdaya saing tinggi.

Kepala sekolah era kini harus mampu menjadi pemimpin Abad 21. Mereka harus mampu melihat peluang dan potensi sekolah yang dipimpinnya dengan mengidentifikasi permasalahan sebagai dasar pengembangan sekolah. Kepala sekolah juga harus mampu mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, maupun orang tua untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang dinamis sesuai dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0.

Selain hal tersebut, kepala sekolah harus memberikan dukungan semangat dan penghargaan kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang telah

Kondisi Kepala Sekolah Hingga Tahun 2019



Kompetensi Kepala Sekolah



mencapai hasil atas prestasi, inovasi, dan pencapaian lain yang membanggakan. Kepala sekolah dalam perannya sebagai supervisor harus mampu berperan sebagai pemimpin instruksional dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran Abad 21 sesuai dengan konsep pendekatan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Sebagai manajer, kepala sekolah bertugas mengelola sumber daya sekolah secara maksimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Agar dapat menjadi manajer yang baik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan-kemampuan dalam menyusun

program sekolah, menyusun organisasi sekolah, menggerakkan guru dan tenaga kependidikan di sekolah, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, serta mengawasi peserta didik mulai dari proses penerimaan, pelaksanaan belajar mengajar, sampai tamat sekolah (*output*).

MEMPERKUAT KOMPETENSI MANAJERIAL

Menuntaskan penguatan kompetensi kepala sekolah merupakan tugas yang tidak ringan bagi Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. Surat Edaran Dirjen GTK memberi tenggat masa transisi untuk menuntaskan penguatan kepala sekolah hanya dua tahun, sejak Permendikbud

Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan. Artinya, pada April 2020 seluruh kepala sekolah sudah harus memiliki kompetensi, setidaknya ditandai dengan STTPP atau ibaratnya sebagai SIM bagi para kepala sekolah.

Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah diawali dengan penyiapan Narasumber Nasional untuk Diklat Calon Kepala Sekolah dan Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Para narasumber nasional dibekali materi sebanyak 71 jam pelajaran (JP), dengan materi inti meliputi 1) integrasi nilai karakter dalam materi diklat; 2) pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tinggi (HOTS); 3) analisis modul kepemimpinan dan kewirausahaan; 4) analisis modul kompetensi manajerial; 5) analisis modul *monitoring* dan evaluasi; 6) analisis materi pengembangan sekolah berdasarkan 8 SNP dan rencana tindak lanjut; 7) Simulasi Fasilitasi IN-1 dan tatap muka; 8) Simulasi Fasilitasi OJL; dan 9) Simulasi Fasilitasi IN-2.

Para narasumber nasional tersebut yang akan melatih Instruktur Nasional (IN) pada diklat-diklat calon kepala sekolah dan penguatan kompetensi kepala sekolah. Pelaksana diklat kepala sekolah adalah Lembaga Pengembangan

dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), serta Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK-KPTK). Diklat juga dapat dilaksanakan lembaga penyelenggara diklat yang telah bekerja sama dengan LP2KS berdasarkan persetujuan dari Ditjen GTK.

Materi diklat penguatan kepala sekolah sebanyak 71 JP menitikberatkan penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kepemimpinan. Materi kompetensi manajerial meliputi, antara lain, teknik analisis manajemen, pengembangan RKS-RKAS, pengelolaan kurikulum, pengelolaan keuangan, pengelolaan PTK, pengelolaan peserta didik, dan pengelolaan sarana prasarana.

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan, diklat penguatan kompetensi kepala sekolah dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan zonasi, yaitu kepala sekolah dilatih di lembaga penyelenggara diklat yang memiliki jarak terdekat dengan tempat bertugas.



Kehadiran Siswa disambut oleh
Guru Sekolah

Menuntaskan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

“Saya ingin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan inpassing dan sertifikasi.”

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaannya melalui sejumlah pola sertifikasi. Tahun 2005-2010 merupakan tahun penggagas sertifikasi guru yang kini diteruskan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian.

Sejak tahun 2018 pelaksanaan sertifikasi guru tidak lagi menggunakan model PLPG, tetapi

menggunakan model Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam jabatan. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Pasal 3 ayat (1) dalam Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa “Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dilaksanakan melalui program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.” Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru Dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam 12 tahun perjalanan sertifikasi, guru yang belum mengantungi sertifikat profesi sekitar 1,62 juta guru (54%). Selebihnya, sekitar 1,39 juta guru (46%) yang sudah memiliki sertifikat

guru sebagai syarat guru profesional.

Jumlah guru yang belum bersertifikat lebih banyak didominasi guru-guru swasta, baik guru tetap yayasan (596.899 orang) maupun guru tidak tetap/guru honorer (719.354 orang). Menyimak diagram penuntasan program profesi guru dalam jabatan (2018-2022), betapa program profesi guru masih menjadi “pekerjaan rumah” berat. Setidaknya, terdapat lebih dari 555.000 guru berijazah S-1 yang belum menuntaskan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ).

Pada tahun 2019, sebanyak 61 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sanggup melakukan PPGDJ bagi 75.000 orang guru. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat membiayai 40.000 orang guru peserta PPGDJ. Pendanaan

selebihnya memerlukan komitmen daerah melalui APBD dan dana yayasan (swasta) bisa untuk menuntaskan pembiayaan.

Hingga lima angkatan PPGDJ sepanjang Semester I Tahun 2019 ini, program PPGDJ sudah merampungkan proses sertifikasi kepada 49.669 orang guru. Sebanyak 40.478 guru didanai APBN. Sisanya 9.129 guru didanai melalui APBD dari 156 kabupaten/kota.

“156 Kabupaten/Kota menganggarkan APBD untuk pelaksanaan sertifikasi guru.”

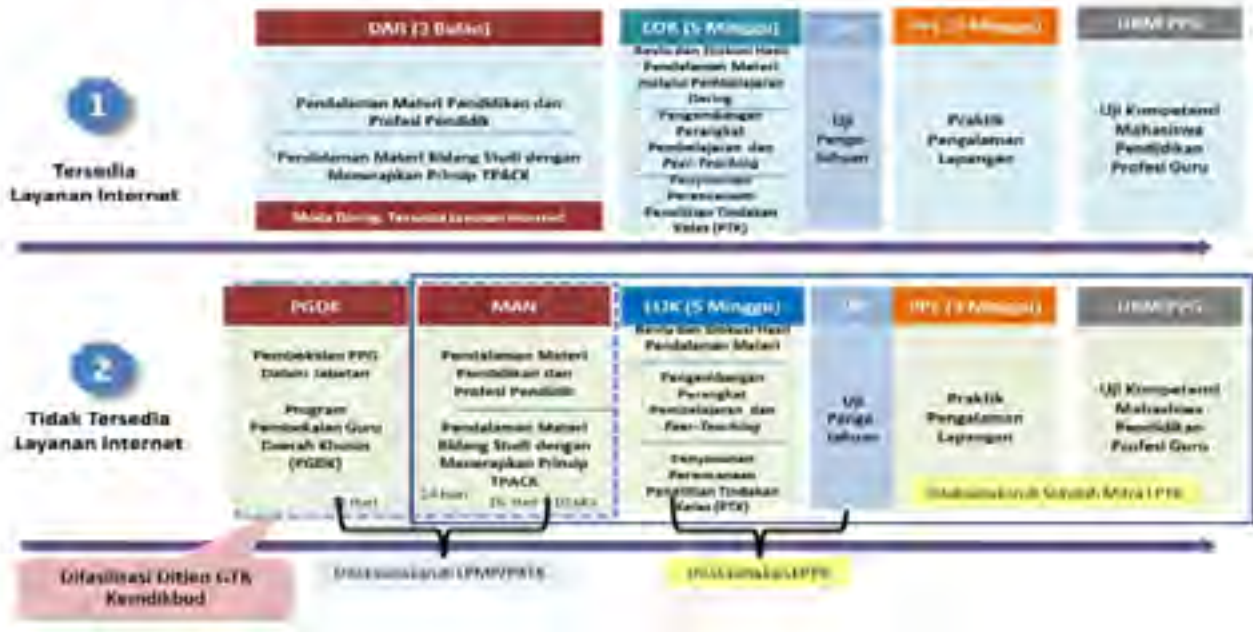
Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pelaksanaannya adalah melalui sejumlah pola sertifikasi. Rancangan awal yang digagas oleh

Jumlah Peserta PPGDJ



Data diambil per 21 Juli 2019

POLA PPG DALAM JABATAN



Ditjen GTK yang meliputi proses pelatihan dan asesmen untuk mengukur kembali kompetensi guru. Prosesnya pun direncanakan selama enam bulan, mulai dari pelatihan, penilaian langsung di sekolah, hingga rekomendasi dari kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota layak tidaknya diberikan sertifikat profesi guru.

Komisi X DPR RI pada tahun 2009 merekomendasikan adanya portofolio dan pelatihan bagi guru berprestasi dan guru yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun cukup penilaian portofolio. Sementara itu, guru lain yang tidak lulus penilaian portofolio wajib mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Pada tahun 2009 polanya bertambah lagi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S1 kependidikan dan nonkependidikan. Pada tahun 2011, pendaftaran sertifikasi sudah melalui sistem daring, demi menegakkan asas keadilan. Penentuan peserta sertifikasi langsung dilakukan oleh sistem dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang ditentukan.

Proses sertifikasi memberlakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) sebelum memasuki PLPG. Mulai tahun 2015 hingga sekarang, sertifikat guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ). PPGDJ dilaksanakan oleh Ditjen GTK bekerja sama

dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan LPTK. Adapun desain Program PPG Dalam Jabatan adalah sebagai berikut.

1. Desain Program PPG Dalam Jabatan *Blended Learning*

Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan adalah 24 SKS atau setara dengan satu semester. Realisasi beban belajar tersebut selanjutnya dikembangkan dalam model pembelajaran *blended learning/hybrid learning*, yaitu model pembelajaran yang menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur pendidikan jarak jauh yang antara lain menerapkan pembelajaran melalui jaringan (*online learning*) yang dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka. Model ini diterapkan untuk guru-guru yang melaksanakan tugas kependidikannya di daerah-daerah yang secara infrastruktur memungkinkan belajar dalam jaringan. Dengan menggunakan model ini, guru-guru sebagai mahasiswa PPG “dipaksa” untuk senantiasa belajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Model pembelajaran PPG *Blended Learning* yang semula diragukan oleh banyak

pihak, ternyata dapat dilaksanakan dengan baik, terutama bagi guru-guru yang terjangkau jaringan internet.

2. Desain Program PPG bagi Guru Daerah Khusus

Guru-guru di daerah khusus, sebagaimana guru-guru lainnya di Indonesia juga berhak atas pemenuhan kualifikasi dan sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru. Untuk itu, pelayanan pendidikan profesi bagi guru-guru yang melaksanakan tugas di daerah khusus dan tidak terjangkau jaringan internet tentu tidak mungkin menggunakan model *blended learning* tersebut, maka Program PPG bagi guru-guru daerah khusus akan dilaksanakan dengan menggunakan model belajar mandiri dan tatap muka yang secara substansi setara dengan program PPG *blended learning*.

Bagi guru-guru daerah khusus, sebelum mengikuti Program PPG diberikan pembekalan awal melalui PGDK, yaitu Pelatihan Guru Daerah Khusus selama 8 hari. Program ini dimaksudkan sebagai prakondisi bagi gurdasus agar gurdasus siap mengikuti Program PPG Dalam Jabatan.

Guru profesional
menciptakan pembelajaran
yang menyenangkan



Melindungi Pribadi dan Profesi Guru

“Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri. Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga.”
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Pemandangan di sebuah kelas tidak lazim. Tampak seorang siswa menarik kerah baju gurunya dan sempat memegang kepala sang guru. Siswa berseragam pramuka bertopi hitam itu tidak menerima teguran gurunya karena siswa tersebut merokok di dalam kelas. Itu bukan adegan dalam sinetron atau film layar lebar. Kejadian nyata di sebuah SMP di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, itu terekam dalam video berdurasi sekitar satu menit dan sempat viral pada Februari 2019.

Di mata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, siswa yang berani menantang ke guru sudah masuk kategori kenakalan kelas berat. “Harus ada tindakan *tapi* jangan sampai merampas masa depan dia,” kata Mendikbud. Mendikbud meminta kepada seluruh sekolah agar menindak tegas siswa yang berani melakukan kekerasan terhadap guru.

“Saya minta juga harus tegas, tidak boleh ringkih di depan mereka. Bagaimanapun kewibawaan guru harus dijaga.”

Kasus perundungan hingga kekerasan terhadap guru juga pernah dialami oleh seorang guru di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang berujung kematian. Di Kupang, seorang ibu guru dimaki, dipukul, dan ditendang perutnya oleh orang tua siswa. Sungguh miris. Mengingat kasus kekerasan terhadap guru, bahkan ada yang berujung kematian guru, terjadi di dalam ruang kelas.

Sejatinya guru sudah memiliki payung hukum kuat untuk perlindungan profesi guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sudah memuat ketentuan perlindungan profesi guru. Di tingkat kementerian juga sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tugas.



Pengabdian Guru untuk mencerdaskan Generasi Bangsa

Menurut Undang-Undang tentang Guru, perlindungan guru mencakupi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

Fakta di lapangan juga mencatat ada sejumlah peristiwa kecelakaan kerja yang dialami oleh guru yang belum mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan aturan. Pelindungan

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga mencakup gangguan keamanan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Dalam hal pelindungan terhadap kekayaan intelektual, banyak guru juga belum memahami. Kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap

kerja keras, pengabdian, dan kemampuan intelektual ilmiah yang meliputi hak cipta (*copyright*), hak paten (*patent*), merek dagang (*trademark*) dan rahasia dagang (*trade secret*).

RAGAM KEGIATAN PELINDUNGAN GURU

Bimbingan Teknis Pelindungan Kekayaan Intelektual Guru dipandang sangat penting dan diperlukan karena hal ini akan memacu guru untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi melalui karya intelektual. Pelindungan kekayaan intelektual guru diyakini dapat menggerakkan, menyemangati, dan mendorong guru untuk meningkatkan prestasi dan pada gilirannya berdampak pada kualitas proses dan hasil belajar siswa.

Bimbingan Teknis Pelindungan Keprofesian bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi tentang sejumlah hal keprofesian, yang

meliputi kekerasan serta praktik dan kreativitas pembelajaran yang ramah anak, batasan pelanggaran etika, pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM serta mampu mengintegrasikan prinsip HAM dalam pembelajaran. Selain itu, bimbingan teknis juga memberikan materi prosedur layanan dalam pelindungan hukum; serta bentuk disiplin asertif dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Materi pada Bimbingan Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Guru meliputi aspek K3 dari sisi pedagogik; kebijakan nasional dan peraturan perundangan-undangan K3; dasar-dasar kesehatan, keselamatan kerja; pelindungan jaminan sosial kesehatan, keselamatan kerja; rencana tindak tanggap darurat kebencanaan dan P3K; sanitasi dan pengelolaan limbah di laboratorium sekolah; potensi bahaya faktor biologi, kimia, dan fisika; implementasi pengelolaan bahaya dan risiko di laboratorium.

Kegiatan Perlindungan Guru oleh Ditjen GTK Tahun 2019



Meningkatkan Kepiawaian Guru dalam Membuat Konten Pembelajaran Berbasis TIK

“Guru tidak boleh berhenti untuk belajar, harus terus menerus belajar. Kalau tidak bisa nanti disalip oleh anak didik kita yang sekarang keingintahuan peserta didik semakin tinggi sekali.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

“Kegiatan PembaTIK yang diselenggarakan Pustekkom memberi saya pengalaman dan pengetahuan baru terutama mengenai bagaimana mengemas pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Kegiatan PembaTIK membuat saya yang seorang guru Fisika menjadi punya kompetensi baru di bidang TIK karena dalam tiap level kegiatan,” kata Luh Eka Yanthi, M.Pd, guru Fisika di SMK Negeri 3 Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali.

PembaTIK alias pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah program yang digagas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom). Sesuai dengan namanya, program PembaTIK bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogik bidang TIK untuk pembelajaran. PembaTIK sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, di mana guru dituntut untuk memanfaatkan TIK pada penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.

Program PembaTIK juga diadakan untuk menyosialisasikan laman Rumah Belajar (belajar.kemdikbud.go.id). Rumah Belajar sendiri merupakan portal yang telah dikembangkan sejak tahun 2011. Laman Rumah Belajar saat ini berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) sebagai sumber media pembelajaran. Dengan jargon barunya: [Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja](http://belajar.kemdikbud.go.id), Rumah Belajar sangat mudah diakses.

Program PembaTIK dilaksanakan berjenjang dari Level 1 hingga Level 4 untuk memberikan materi penguasaan kompetensi yang

menyeluruh. Guru memahami dulu dasar-dasar TIK hingga mampu mengembangkan konten pembelajaran dan membagikannya kepada guru-guru atau komunitas pendidikan di sekitarnya. Level 1 Literasi dan Level 2 Implementasi dilaksanakan secara daring melalui sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK ([http:// simpatik.belajar.kemdikbud.go.id](http://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id)). Dua level awal dilakukan secara daring untuk menjaring partisipasi guru lebih masif. Sistem seleksi juga memberikan gambaran sejauh mana suatu daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki guru yang dinilai kompeten dalam penguasaan TIK untuk pembelajaran. Level 3 Kreasi dan Level 4 Berbagi dilaksanakan secara tatap muka. Sistem *leveling* ini mengadopsi standar TIK bagi guru UNESCO pada tahun 2012.

"PembaTIK melatih saya untuk terus belajar dan berkembang mengenal pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Saat saya sampai pada Level 3, saya mampu berkreasi dalam menciptakan konten positif di dunia pendidikan. Terima kasih Pustekkom!" kata Luh Eka Yanthi menambahkan.

Program PembaTIK bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga untuk membangun tolok ukur pemetaan tingkat penguasaan TIK guru untuk pembelajaran. Pemetaan kompetensi TIK guru ini akan dipergunakan pula untuk menyusun kebijakan optimalisasi dan percepatan pemerataan kompetensi TIK guru.

MENUMBUHKAN AGEN DUTA RUMAH BELAJAR

Program PembaTIK ketika dirintis pada tahun 2017 belum menjaring peserta melalui daring. Peserta awal PembaTIK merupakan guru undangan yang merupakan pilihan dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Baru pada tahun 2018, PembaTIK dilaksanakan secara daring, melalui seleksi terbuka. Pustekkom menggabungkan program PembaTIK sekaligus seleksi Duta Rumah Belajar. Peserta yang berhak menjadi Duta Rumah Belajar merupakan guru terbaik provinsi dan berhasil lolos ke Level 4. Melalui Duta Rumah Belajar, diharapkan pengguna aplikasi pembelajaran daring Rumah Belajar dapat meningkat

Penyematan Duta Rumah Belajar menjadi magnet tersendiri untuk mendorong partisipasi. Guru yang dinobatkan sebagai Duta Rumah Belajar akan menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, terutama Rumah Belajar. Selain itu, mereka berhak mendapat peningkatan kompetensi, serta dilibatkan pada kegiatan dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, baik di daerah maupun di pusat.

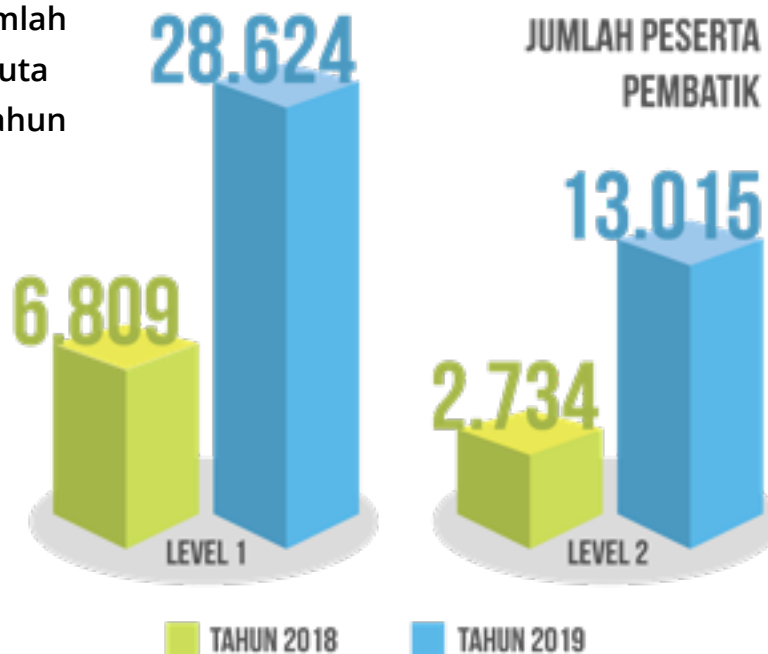
Peran Duta Rumah Belajar turut mendorong tingkat partisipasi program PembaTIK. Mereka sudah menjadi agen penyebaran informasi sekaligus pendorong tumbuhnya talenta guru-guru di daerah mereka masing-masing.

Level 3 (Kreasi TIK) dilakukan secara tatap muka di setiap provinsi. Pesertanya merupakan 30 terbaik Level 2. Tim Pustekkom datang ke

Levelling Seleksi Duta Rumah Belajar



Perbandingan Jumlah Peserta Seleksi Duta Rumah Belajar Tahun 2018 dan 2019



provinsi memberikan pembekalan kepada peserta level 3. Pelatihan diberikan oleh pengembang teknologi pembelajaran (PTP) terkait model-model pembelajaran inovatif dan pengembangan konten berbasis TIK.

Di Level 3, peserta mendapat kesempatan melakukan praktik implementasi teori pembuatan konten pembelajaran. Konten pembelajaran difokuskan berbasis video tutorial. Guru dilatih membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) terintegrasi dengan TIK, menulis naskah, hingga mengedit video dengan menggunakan perangkat sederhana, seperti ponsel. Dengan adanya program PembaTIK setidaknya ada 2.040 konten video tutorial selama dua tahun terakhir.

Pustekkom juga terbuka mengadakan peningkatan kompetensi guru menggandeng organisasi, lembaga, atau komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Di antaranya

dengan Yayasan Dharma Pertiwi, organisasi persatuan istri TNI yang membawahi sekolah. "Dengan kegiatan ini kami harap semua guru dan kepala sekolah di bawah naungan yayasan kami, bisa memanfaatkan konten dari Kemdikbud sehingga dapat memiliki kualitas yang sama dengan sekolah lain," kata Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi.

Dengan makin banyaknya partisipasi guru mengikuti PembaTIK, diperlukan pendamping yang lebih banyak pula. Pada pelaksanaan kelas daring di level awal, setidaknya perlu instruktur yang mendampingi kelas peserta. Saat ini, Pustekkom mengandalkan 30-40 orang pejabat fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) sebagai instruktur kelas daring. Apabila jumlah peserta makin besar, tentunya diperlukan SDM lebih banyak lagi. Harapan ke depan, program PembaTIK dapat didukung seluruh unit utama, unit pelaksana teknis daerah, dan juga pemerintah daerah.



Menyiapkan Guru dan Tenaga Kependidikan Berkualitas untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN)

SILN didirikan karena kebutuhan pendidikan bagi anak-anak keluarga Indonesia yang berada di luar negeri.

Keberadaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) tidak ubahnya merupakan keberuntungan yang disyukuri sebagian masyarakat Indonesia yang karena pekerjaan dan kepentingan lain harus tinggal berpindah-pindah di luar negeri. Di antaranya adalah pengalaman keluarga dari seorang diplomat yang bertugas di kantor kedutaan besar perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, juga para pekerja migran di luar negeri.

SILN pun didirikan karena kebutuhan pendidikan bagi anak-anak keluarga Indonesia yang berada di luar negeri. Sejarah awal SILN didirikan pada kurun tahun 1950-1960-an. Operasional SILN kini mengacu pada Peraturan Bersama antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri.

14 SILN di 10 negara



Bangkok
Thailand



Davao
Filipina



Den Haag
Belanda



Kairo
Mesir



Moskow
Rusia



Singapura
Singapura



Tokyo
Jepang



Yangon
Myanmar



**Jeddah, Mekkah
& Riyadh** Arab Saudi



Johor Bahru, Kota Kinabalu, & Kuala Lumpur
Malaysia



Penyiapan GTK Berkualitas sebagai Pendidik di SILN

Pemerintah berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik di SILN. Untuk menjamin pendidikan berkualitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menugasi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas unggul dan profesional untuk mendidik dan membina warga negara Indonesia usia sekolah di luar negeri agar mereka dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter dan unggul, serta siap menghadapi tantangan global. Salah satu upayanya adalah melalui seleksi bersama Kemendikbud dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Pada tahun 2015-2017, seleksi guru dan tenaga kependidikan SILN dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN). Mulai tahun 2018, pelaksanaan seleksi SILN dialihkan ke Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Pada awal tahun 2019 telah diumumkan hasil seleksi guru dan kepala SILN yang dilaksanakan pada akhir tahun 2018, yaitu Kepala Sekolah Indonesia Kairo, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Guru Seni Budaya/Seni Musik untuk Sekolah Indonesia Davao, Guru Bimbingan Konseling untuk Sekolah Indonesia Jeddah, dan Guru

Perhotelan untuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.

Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk memenuhi kebutuhan 36 orang guru dan 4 orang staf tata usaha (TU). Seleksi dilaksanakan pada bulan April-Juli 2019. Pengumuman secara terbuka melalui laman <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln>. Pendaftaran peserta seleksi secara daring mulai tanggal 18 April sampai dengan tanggal 8 Mei 2019. Peserta yang dikehendaki adalah bukan PNS dan sanggup bertugas di SILN selama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seleksi dilaksanakan di Jakarta mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019. Tercatat 81 orang guru berjuang memperebutkan 36 formasi untuk penempatan Sekolah Indonesia di Riyadh, Kairo, Yangon, Davao, Jeddah, Tokyo, Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, dan Kota Kinabalu. Sejumlah 23 orang tenaga kependidikan memperebutkan empat formasi staf tata usaha untuk penempatan Sekolah Indonesia di Kairo, Riyadh, Yangon, dan Kota Kinabalu.

Setiap pelamar guru wajib mengikuti psikotes, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), Tes Bahasa Inggris, *microteaching*, dan wawancara. Sementara itu, pelamar staf tata usaha wajib mengikuti psikotes, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI), Tes Bahasa Inggris,

dan wawancara.

Hasil seleksi tersebut dikonfirmasi kepada masing-masing Kepala Perwakilan RI di luar negeri untuk memperoleh persetujuan. Setelah disetujui oleh pimpinan Kemendikbud dan Kepala Perwakilan RI, hasil seleksi diumumkan melalui laman <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln>.

Pada bulan September 2019, Kemendikbud melaksanakan seleksi penerimaan Kepala SILN di Sekolah Indonesia Den Haag, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Davao, dan Sekolah Indonesia Bangkok. Setiap peserta wajib mengikuti tes psikologi, Uji Kemampuan Bahasa Indonesia (UKBI), Tes Bahasa Inggris, *leaderless group discussion*, presentasi dan wawancara. Hasil seleksi akan disampaikan kepada Kemenlu untuk memperoleh persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan pimpinan Kemendikbud dan Kemenlu, hasil seleksi diumumkan melalui laman <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln>.

Meskipun diumumkan secara terbuka, tidak mudah mendapatkan guru mata pelajaran tertentu, seperti tata boga, perhotelan, dan agama Kristen. Beberapa upaya dilaksanakan, antara lain, memperpanjang waktu penerimaan pendaftaran dan menyebarkan informasi melalui media sosial, tetapi masih tetap kurang peminat.

Menimba Ilmu dan Menyerap Wawasan Global

“Pengalaman ikut pelatihan dan melihat pendidikan di luar negeri diharapkan akan membuka wawasan para guru yang diperlukan di era Revolusi Industri 4.0.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

“Dari hasil pelatihan kepemimpinan dan supervisi di Tiongkok, saya ingin memberikan bekal pengalaman dalam pengembangan sekolah ramah anak,” kata Margono, S.Pd., Kepala SLB CD Untung Tuah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Gagasannya bertajuk Pengembangan SOP Sekolah Ramah Anak. Hal itu merupakan rencana tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan Margono setelah mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan di Luar Negeri, selama tiga pekan di Tiongkok pada bulan Maret 2019.

Margono, merupakan salah satu dari 67 kepala sekolah dan 35 pengawas sekolah yang diberangkatkan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Ditjen GTK ke Tiongkok, Thailand, dan Australia. Total sebanyak 1.214 guru dan tenaga kependidikan diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan selama tiga hingga lima pekan tersebar di 15 negara. Program pelatihan meliputi bidang pariwisata, pemasaran (*marketing*), industri kreatif, agrikultur, teknologi, *high order thinking skill*

(HOTS) dan *science, technology, engineering, mathematics* (STEM).

Sasaran pelatihan di luar negeri ini adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, widyaiswara, tutor, pendidik PAUD, instruktur kursus, penilik, dan pamong belajar yang berasal dari beragam jenjang dan tentu memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif. Program ini diadakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan juga merupakan apresiasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi dalam berbagai ajang kompetisi yang dilaksanakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal GTK.

BAGIAN DARI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

“Kemendikbud mengirim GTK ke luar negeri ini sebagai jawaban tantangan ke depan dalam persiapan untuk menghasilkan SDM yang lebih baik, karena guru adalah agen perubahan,” Hal itu disampaikan oleh Dirjen GTK, Supriano pada acara Pelepasan Program Pelatihan Pendidik



Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri

dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri Tahun 2019 yang dilaksanakan di Gedung A Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019.

Upaya Kemendikbud tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Undang-Undang Guru dan Dosen mewajibkan guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan memuat sejumlah ketentuan mengenai standar kualifikasi akademik dan

kompetensi bagi tenaga kependidikan. GTK diwajibkan selalu mengembangkan dirinya melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Program pelatihan ke luar negeri ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Pertumbuhan dunia usaha dan industri di Indonesia sangat membutuhkan tenaga terampil lulusan SMK. Oleh karena itu, peserta didik SMK perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Tentunya guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK harus

profesional juga, yang selalu meningkatkan kompetensinya, juga wawasan globalnya.

Pengalaman ikut pelatihan dan melihat pendidikan di luar negeri diharapkan akan membuka wawasan para guru yang diperlukan di era Revolusi Industri 4.0. Direktorat Jenderal GTK Supriano berharap bahwa selama di luar negeri, para guru dan tenaga kependidikan menyerap pengalaman nyata dan wawasan, khususnya pendidikan, di negara yang lebih maju. Selain itu, mereka juga menyaksikan langsung interaksi antarbudaya, memahami sistem pendidikan, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar peserta didik.

Guru, kepala, dan pengawas SMK khususnya juga terbuka wawasannya tentang kerja di industri, implementasi kerja sama sekolah-industri, juga pelaksanaan *link and match* Khusus

untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah diharapkan mendapat pengalaman baru tentang kepemimpinan, manajemen, dan supervisi sekolah.

Kegiatan pelatihan terbagi dalam tiga tahapan, yakni *predeparture*, pelatihan, dan *postdeparture*.

Predeparture dilakukan sebelum keberangkatan yang pesertanya diwajibkan mengikuti pembekalan. Pembekalan yang diwajibkan adalah pembekalan tentang tujuan pelatihan, target dan sasaran pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan individu dan tempat tugas masing-masing, informasi negara yang dituju (cuaca, budaya, bahasa pengantar, mata uang, kebiasaan), informasi materi pelatihan, tata tertib selama mengikuti pelatihan, hak dan kewajiban, dan *output* pelatihan.



Lokakarya
/Workshop



Kunjungan
Industri



Kerja
Kelompok



Praktik Kerja
Industri
(bagi guru SMK)



Diskusi
Kelompok



Observasi



Menyiapkan SDM Terampil Berdaya Saing



Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi mendorong Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menyiapkan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan agar memiliki bekal dalam wawasan keterampilan dan keahlian yang sesuai standar kompetensi. LKP harus mampu menumbuhkan keterampilan kerja dan sikap mental wirausaha.

“Kita masuk dalam era kompetisi antarnegara yang semakin sengit. Kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi.”

(Joko Widodo dalam Pidato Sidang Tahunan MPR 2019)

Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu agenda pokok pembangunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024, yakni Agenda Ketiga “Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menduduki posisi strategis untuk turut andil menjadi bagian utama penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Langkah penting yang selama ini sudah dan terus dilakukan Kemendikbud adalah menggulirkan kebijakan-kebijakan untuk menerampilkkan siswa, khususnya siswa SMK dan pemberian bekal kemandirian dan keterampilan untuk siswa pada pendidikan khusus. Tambahan keterampilan juga diberikan kepada guru-guru agar guru-guru memiliki kompetensi keahlian yang bersertifikat.

Pertama, hadirnya Pusat Keunggulan untuk Listrik, Otomasi, dan Energi Terbarukan (*Center of Excellence Electricity, Automation, and Renewable Energy (CoE EARE)*) menjadi langkah maju yang dilakukan Kemendikbud dengan menggandeng Pendidikan Tinggi dan Riset Prancis, *Schneider Electric Foundation* Prancis, serta Schneider Indonesia sehingga terwujudnya Pusat Keunggulan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (P4TK BMTI) di Kota Cimahi, Jawa Barat. Keberadaan CoE EARE akan menjadi tempat pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan SMK dalam bidang manajemen energi, otomatisasi bangunan, otomatisasi industri, instalasi bangunan, dan energi terbarukan. Program pelatihan dirancang sesuai dengan standar internasional yang menghubungkan akademik dengan kebutuhan dan penerapan di

bidang industri.

Kedua, Direktorat Pembinaan SMK telah menggulirkan kebijakan prioritas untuk pengembangan SMK sebagai bagian dari partisipasi menyiapkan SDM unggul dan berkualitas di Indonesia, yakni 1) Pengembangan Jejaring Kerja Sama Industri sebagai Tindak Lanjut Program *Link And Match* Vokasi Industri; 2) Pendidikan Karakter Kerja; dan 3) Kualifikasi Keahlian SMK Berkelas Dunia. Pengembangan jejaring kerja sama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMK. Sejumlah aspek yang meningkat dengan kerja sama ini adalah peningkatan kualitas pembelajaran dan praktik kerja pendidikan dan pelatihan siswa SMK sesuai dengan standar; pendampingan dan pembinaan kualitas unit produksi, *teaching factory*, dan *teaching industry* di sekolah; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di bidang industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan.

Ketiga, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus menggulirkan program revitalisasi pendidikan keterampilan/vokasi di satuan pendidikan khusus. Implementasi program revitalisasi pendidikan vokasi itu adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dan pendampingan usaha, pengembangan kewirausahaan serta penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi penyandang disabilitas. Sekolah luar biasa akan didorong untuk mampu mengembangkan kewirausahaan. Selain itu, akan ada pendampingan usaha dari DUDI/LKP atau instansi lain di bidang keterampilan. Harapannya sekolah luar biasa mampu melahirkan lulusan dengan pendidikan keterampilan berkualitas. Hal tersebut memicu sekolah untuk berperan aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Keempat, program Revitalisasi Guru Produktif SMK, yakni mendorong guru-guru produktif yang sudah mengajar bidang kejuruan harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian melalui Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dengan sertifikat keahlian, guru produktif SMK dapat meningkatkan kompetensinya untuk memenuhi kualifikasi Kerangka Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Level IV, dari sembilan level KKNI yang ditetapkan pemerintah. Sertifikat KKNI Level IV setara dengan ijazah pendidikan Diploma II yang dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis. Mereka memiliki kemampuan menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu, mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, memiliki inisiatif, dan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

Kelima, ada beragam kegiatan pemberian penghargaan oleh pemerintah kepada guru dan tenaga kependidikan (GTK), sebagai bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang memuat ketentuan bahwa "Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan". Pemberian penghargaan kepada GTK berprestasi dan berdedikasi itu meliputi a) pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana, b) penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium) berprestasi dan berdedikasi untuk semua jenjang pendidikan, dan juga penghargaan kepada GTK pada pendidikan nonformal: c) penghargaan lomba inovasi pembelajaran; d) Olimpiade Guru Nasional; dan e) penghargaan Anugerah Konstitusi Nasional.

Keenam, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menggulirkan program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKK dan PKW). Program PKK adalah

program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja. Waktu pembelajaran PKK disesuaikan dengan kurikulum dan level kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan DUDI. Di dalam program PKK sudah termuat pembelajaran teori dan praktik serta pendidikan karakter dan pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Mayoritas persentase pembelajaran PKK berupa pembelajaran praktik dan magang (70%), sisanya berupa teori (30%). Program PKW adalah pelayanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. *



DAFTAR ARTIKEL BAB 2

Menyiapkan Guru SMK Berketrampilan Global	50
Menyiapkan Lulusan SMK sebagai SDM Unggul dan Berkelas Dunia	52
Menyiapkan Siswa Berkebutuhan Khusus untuk Terampil, Mandiri,dan Siap Kerja	57
Meningkatkan Kualitas Guru dalam Revitalisasi SMK	64
Memandirikan Masyarakat melalui Program PKK dan PKW	68

Menyiapkan Guru SMK Berketrampilan Global

Melahirkan tenaga kerja terampil di bidang manajemen energi menjadi bagian penting dari pengembangan SDM bidang kejuruan

Center of Excellence Electricity, Automation, and Renewable Energy (CoE EARE) atau pusat keunggulan merupakan wujud kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pendidikan Tinggi dan Riset Prancis, *Schneider Electric Foundation* Prancis, serta Schneider Indonesia. Schneider Electric, perusahaan global yang fokus pada pengembangan keahlian ketenagalistrikan ini memang memiliki program *Access-to-Energy* yang bertujuan mendukung pelatihan tenaga profesional untuk mengembangkan keahlian berkelanjutan di seluruh dunia, sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang.

Schneider menargetkan melatih satu juta orang di seluruh dunia. Di CoE EARE Cimahi sendiri, CoE EARE akan melatih 240 orang guru dan menargetkan 10.800 siswa SMK siap kerja dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Upaya melahirkan tenaga kerja terampil di bidang manajemen energi menjadi bagian penting dari pengembangan SDM bidang kejuruan

yang menjadi salah satu program prioritas Kemendikbud. Kerja sama dilakukan dengan Schneider Electric dengan mendatangkan pelatih/tenaga ahli kelistrikan Prancis yang membawa kurikulum pelatihan yang diintegrasikan ke dalam Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKNI). Schneider Electric dan Kemendikbud juga akan merevitalisasi fasilitas laboratorium secara bertahap di 184 SMK di seluruh Indonesia hingga tahun 2022.

Guru dan tenaga kependidikan yang telah dilatih di CoE EARE akan kembali ke SMK masing-masing untuk melatih para siswa dengan peralatan dan kurikulum yang sama dengan yang diperoleh di Pusat Keunggulan. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi revolusi industri global yang akan menciptakan permintaan tenaga ahli kelistrikan dengan kombinasi keterampilan digital dan intuisi bisnis.

Penguatan SDM dan Revitalisasi Laboratorium

Sesuai dengan namanya, CoE EARE berfokus



Pelatihan grounding system

Pelatihan Solar System

pada bidang manajemen energi, otomatisasi bangunan, otomatisasi konsep industri, instalasi bangunan, dan energi terbarukan. Di P4TK BMTI Cimahi sudah ada lima laboratorium yang dijadikan sebagai tempat pelatihan, yaitu *Electrical Installation, Industrial Installation and Automation, Building Automation, Energy Efficiency and Energy Quality, dan Renewable Energy*.

Sampai dengan tahun 2019, Pusat Keunggulan sudah melakukan revitalisasi laboratorium di 40 SMK, melatih 78 orang guru. Pelatihan

bagi guru tersebut dilaksanakan dalam enam angkatan. Pelatihan bagi 40 orang teknisi sebanyak dua angkatan. Pelatihan bagi teknisi tersebut dilaksanakan selama enam minggu untuk masing-masing angkatan.

Direktorat Pembinaan SMK berharap kerja sama vokasi dapat diperluas dengan negara lain. Kerja sama yang perlu ditingkatkan adalah terkait pendirian dan penguatan jurusan-jurusan pada pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis *Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)*.

Perkembangan Pelatihan Guru SMK oleh BMTI Cimahi Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Peserta	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta	Bidang Pelatihan
2018	Guru	2	32	Electrical Installation
	Teknisi	2	40	Technical and Maintenance
2019	Guru	4	46	Electrical Installation, Renewable Energy, dan Industrial Automation

Menyiapkan Lulusan SMK sebagai SDM Unggul dan Berkelas Dunia

Di era Revolusi Industri 4.0, lulusan SMK diharapkan menjadi salah satu ujung tombak penyiapan tenaga kerja muda andalan SDM Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2019. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan mendorong investasi industri padat karya dalam mendukung program penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing.

Pengembangan Jejaring Kerja Sama Industri Tindak Lanjut Program *Link and Match* Vokasi Industri

Ada sejumlah langkah untuk meningkatkan peran dan kerja sama DUDI dengan SMK sebagai tindak lanjut program *link and match* vokasi industri, yaitu dengan penyesuaian program studi/bidang keahlian dan pembelajaran yang sesuai dengan iklim di industri. Langkah tersebut meliputi a) pengembangan program studi untuk mendukung pengembangan sektor unggulan nasional, daerah, dan kebutuhan DUDI; b) penguatan informasi pasar kerja; c) pengembangan standar kompetensi dan

penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri (ekstraktif, manufaktur, teknologi, informatika, geospasial, dan jasa); d) penyesuaian pola pembelajaran, termasuk praktik kerja dan magang; dan e) penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sistem ganda (*dual TVET system*) yang menekankan penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri.

Pengembangan jejaring kerja sama antara SMK dan DUDI melalui berbagai jenis kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMK. Sejumlah aspek yang meningkat dengan kerja sama ini adalah, antara lain, adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan praktik kerja pendidikan dan pelatihan siswa SMK sesuai dengan standar; pendampingan dan pembinaan kualitas unit produksi, *teaching factory*, dan *teaching industry* di sekolah; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/*teaching factory/teaching industry*; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan.

Program pengembangan jejaring kerja sama dengan DUDI ini diharapkan juga dapat mendongkrak kualitas dan kompetensi guru/ instruktur di SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Selain itu, ada keterlibatan instruktur/praktisi dari industri yang mengajar di SMK dan adanya pemagangan guru/ instruktur SMK di industri.

Dari sisi siswa SMK, pengembangan jejaring kerja sama DUDI juga menguatkan sistem sertifikasi kompetensi siswa dengan mengikutsertakan DUDI, terutama penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi. Sistem sertifikasi keahlian juga akan lebih sinkron di berbagai sektor industri.

Kualifikasi Keahlian SMK Berkelas Dunia

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan DUDI yang berstandar internasional dalam memenuhi kualifikasi keahlian SMK berkelas dunia juga perlu dilakukan. Peningkatan mutu kompetensi SMK berstandar internasional itu diwujudkan, antara lain, dalam program kerja sama vokasi bidang kuliner dan simulasi digital. Program ini merupakan kerja sama dengan Prancis. Harapannya lulusan SMK bidang kuliner dapat memenuhi kebutuhan industri pariwisata terutama perhotelan kelas dunia. Dipilihnya Prancis karena hotel bintang 4 dan 5 diwajibkan menghidangkan *pastry* dan *bakery* khas Prancis. Melalui program ini, *chef* dari Prancis langsung didatangkan memberi pelatihan kepada guru-guru dari 20 SMK terpilih.

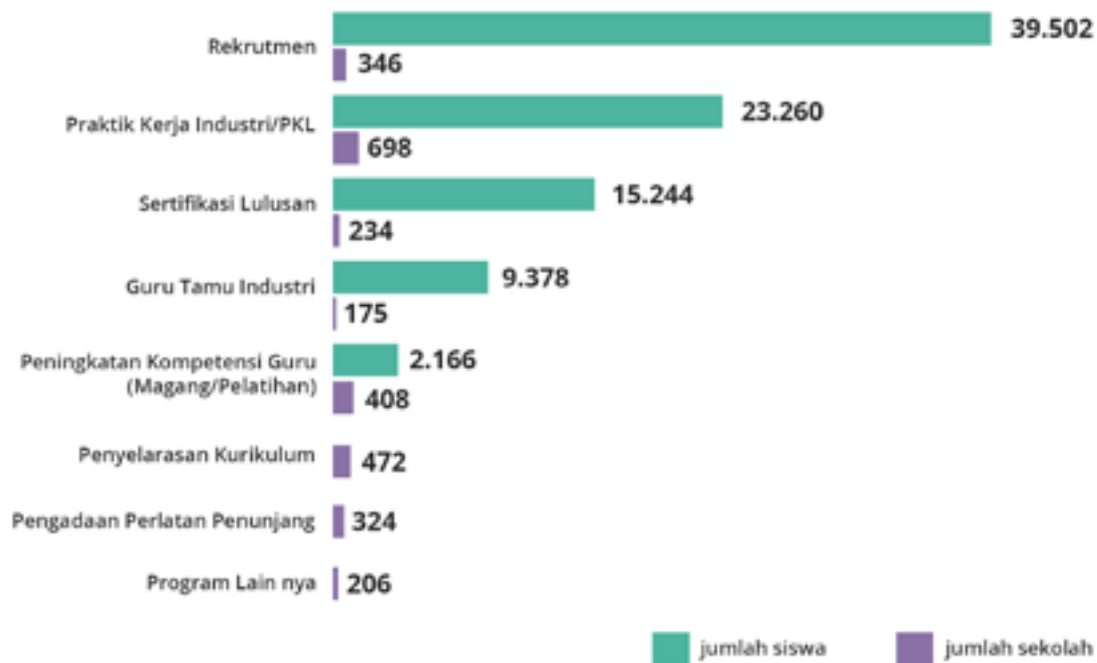
“Program pengembangan kerja sama vokasi bidang kuliner yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK yang bekerja sama dengan Institut Francais Indonesia (IFI) Prancis ini membuka cakrawala pembelajaran di sekolah kami untuk bidang kuliner. Di mana guru-guru mendapat pengetahuan tentang standar *bakery* dan *pastry* kelas dunia yang wajib terhidang di hotel berbintang melalui bimbingan *chef* dengan reputasi internasional,” kata Muharto, Kepala SMK Negeri 1 Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sebagai salah satu SMK terpilih.

Ahmad Berlian Ariansyah, Kepala SMK Muhammadiyah 5 Palembang juga sangat senang sekolahnya terpilih mengikuti kerja sama dengan IFI Prancis. “Program ini merupakan wadah *upgrading* kompetensi bagi pendidik-pendidik hebat di SMK, yang juga merupakan jembatan penghantar informasi mengenai peran SMK bidang kuliner, khususnya spesialis *bakery* dan *pastry* di dunia usaha dan dunia industri yang saat ini tengah berkembang pesat,” katanya.

Kerja sama lainnya adalah dengan menjaring industri dan lembaga pendidikan level regional dan internasional dengan target lulusan SMK yang mampu 1) bekerja; 2) mengembangkan diri/melanjutkan kuliah; dan 3) wirausaha muda sesuai dengan kompetensinya.

Kebutuhan DUDI secara internasional pun dapat diketahui melalui kegiatan WSC (*World Skill Competition*) yang merupakan kompetisi pendidikan menengah kejuruan terbesar

Program Capaian Pengembangan Jejaring Kerja Sama Industri



tingkat internasional yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Pada tahun 2019 sudah terdaftar 78 negara anggota WSC.

Pada ajang WSC Ke-45 Tahun 2019 di Kazan, Rusia, tim Indonesia menempati peringkat ke-15 dari 62 negara peserta WSC dengan memperoleh Peringkat 2 Dunia Bidang IT *Network System Administration*, Peringkat 2 Dunia Bidang IT *Software Solutions for Business*, Peringkat 3 Dunia Bidang *Plastic Die Engineering*, dan 12 *Medallion for Excellence* Bidang *Web Technologies*, *Automobile Technologies*, *CNC Milling*, *Welding*, *Restaurant Service*, *Graphic Design Technology*, *Mechanical Engineering CAD*, *Hairdressing*, *Electronic*, *Industrial Control*, *Mechatronics*, *Fashion Technology*. Dengan hasil tersebut, Indonesia berada satu tingkat di atas Australia yang menempati peringkat ke-16,

juga melewati prestasi siswa SMK Kanada yang menduduki posisi ke-17, Belanda yang berada di posisi ke-22, dan Norwegia yang berada di posisi ke-31.

Hengky Sanjaya, Peringkat 2 Dunia Bidang IT *Software Solutions for Business* menyatakan, "Tentunya saya sangat senang bisa mendapatkan medali. Dari ajang ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, dan bertemu pemuda-pemuda hebat. Saya berharap mengikuti ajang Internasional ini dapat terus dilakukan."

Pendidikan Karakter Kerja di SMK

Lulusan SMK yang berkompeten siap memasuki dunia usaha dan dunia industri, berkarakter unggul, dan berorientasi membangun karier masa depannya yang lebih baik menjadi tugas utama SMK. Selain itu, lulusan SMK juga memiliki karakter unggul dan mampu meraih

kesuksesan diri, karier, dan lingkungan sosial.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMK dilaksanakan dengan tiga basis pendekatan utama, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, dan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Tiga pendekatan ini merupakan pendekatan pendidikan karakter utuh dan menyeluruh yang diterapkan di SMK. Harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga ini perlu menjadi dimensi dalam setiap program dan kegiatan di SMK dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebaikan agar individu tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang sehat secara jasmani, rohani, dan moral.

Wujud keberhasilan penerapan PPK dapat dilihat pada karakter selama di sekolah hingga lulus, yakni karakter disiplin yang akan memantik lahirnya generasi yang mengutamakan karakter kekerjaan, baik sebagai karyawan DUDI maupun sebagai wirausahawan. Generasi

lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja juga dilandasi kekuatan ideologi Pancasila, membiasakan budaya prestasi, kreatif, dan inovatif, kerja sama saling menghargai, serta kerja berkualitas. Karakter lain yang dibutuhkan industri adalah terampil, cerdas, berjiwa pemimpin, bermental kuat, dan handal.

Program pendidikan karakter kerja di SMK boleh dikatakan menerapkan karakter kerja di DUDI ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Berbagai kegiatan industri disosialisasikan ke siswa SMK agar kelak mereka dapat cepat beradaptasi ke dalam lingkungan kerja industri. Sosialisasi program ini melalui media sosial, *video conference*, serta kegiatan yang langsung mengundang perwakilan sekolah, antara lain, Apresiasi Kebangsaan Siswa Indonesia (AKSI) dan Kemah Penguatan Karakter (KEPAK).

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) SMK rata-rata dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan nilai berkisar 0,5, dengan

Program Reguler Direktorat SMK Tahun 2019

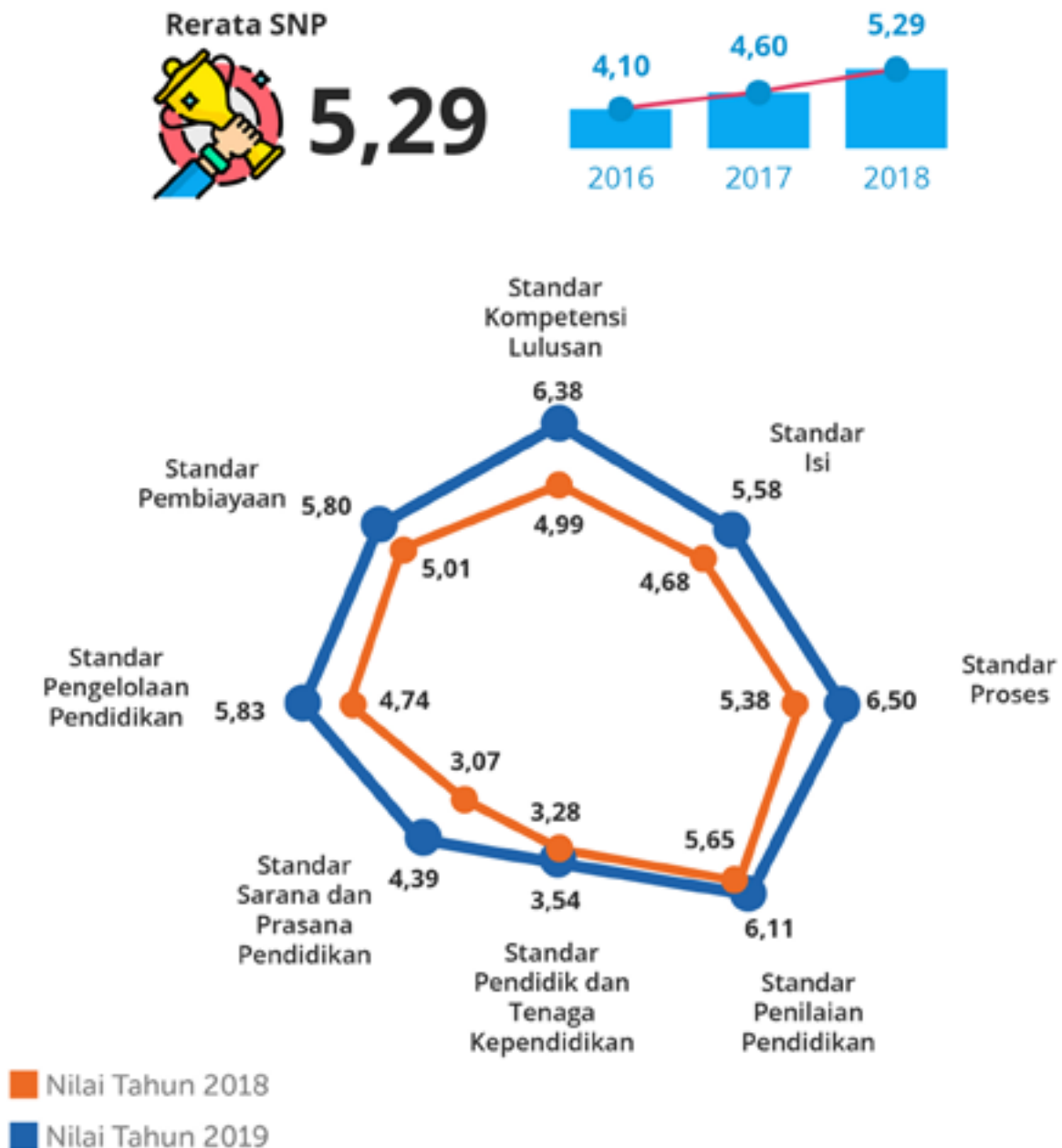


Keterangan: LSP-P1 adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

capaian terakhir untuk SNP SMK sebesar 5.29 dari total nilai 7 atau menuju SNP Level 4. Masih adanya dua standar dengan nilai capaian menuju SNP Level 3 (skor < 5.06), yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan

mendorong untuk meningkatkan program kerja sama antara SMK dan banyak DUDI. Beberapa SMK yang merupakan binaan DUDI menerapkan kelas industri untuk penilaian mutu SNP rerata sangat baik bahkan mampu menjadi lembaga sertifikasi mandiri bagi siswanya.

Nilai 8 Standar Pada SNP SMK



Menyiapkan Siswa Berkebutuhan Khusus untuk Terampil, Mandiri, dan Siap Kerja

“Mereka harus dibimbing dan diarahkan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Melalui ajang Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSNI) ini mereka telah menunjukkan kemampuannya dengan keterampilan terbaiknya. Hasil karya mereka tidak boleh dipandang sebelah mata.”

(Kusumadewi, Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo)

Dr. Kusumadewi Sutanto, M.Pd., Dipl.CID, dibuat takjub dengan kemampuan peserta Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSNI) 2019. “Setelah melihat kemampuan mereka, saya sangat kagum. Karya mereka seperti anak-anak pada umumnya,” kata Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mooryati Soedibyo, saat menjadi juri Lomba Kecantikan yang merupakan rangkaian dari LKSNI 2019 pada bulan Maret 2019.

Menurut Kusumadewi, anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang luar biasa jika potensi mereka terus digali. “Mereka harus dibimbing dan diarahkan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Melalui ajang LKSNI ini mereka telah menunjukkan kemampuannya dengan keterampilan terbaiknya. Hasil karya mereka tidak boleh dipandang sebelah mata,” kata Kusumadewi menambahkan. “Mereka bisa bekerja menjadi

make-up artist dan bekerja di dunia perfilman, karena kemampuan mereka di atas rata-rata.”

Unjuk kebolehan keterampilan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada LKSNI dapat dibanggakan. Prestasi siswa adalah salah satu bukti keberhasilan pendidikan di SLB. Namun, prioritas utama bagi satuan pendidikan, khusus sejatinya adalah memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada program keterampilan/vokasi kepada peserta didik penyandang disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Peserta didik berkebutuhan khusus secara umum mempunyai peluang yang relatif kecil untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga kurikulum pendidikan khusus dirancang berorientasi pada program vokasi. Dalam Struktur Kurikulum 2013 Pendidikan



Pembuatan Kriya Kayu oleh Siswa Tuna Rungu SLB 01 Jakarta

Khusus terdapat 20 jenis mata pelajaran keterampilan pilihan yang memiliki porsi besar dibandingkan dengan mata pelajaran umum/ akademik.

Pilihan keterampilan/vokasi yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus berupa keterampilan yang mayoritas dikembangkan oleh sekolah dan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik yang meliputi bidang pariwisata, bidang seni dan budaya, bidang mesin dan teknologi, serta bidang pertanian.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia tidak semata-mata ditujukan kepada siswa SMK. Kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi yang digulirkan Kemendikbud juga ditujukan untuk lembaga terkait, seperti SLB, LKP, dan politeknik serta fakultas vokasi pada perguruan tinggi lain.

Diharapkan dalam persaingan global ini, lulusan SLB juga mampu bersaing di dunia kerja. Peserta didik SLB pun perlu mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikat keahlian. Kompetensi yang diperlukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah kompetensi parsial yang tidak bisa utuh sehingga membutuhkan standar kompetensi kerja khusus yang mampu mengakomodasi kompetensi siswa SLB.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus menggulirkan program revitalisasi pendidikan keterampilan/vokasi di satuan pendidikan khusus. Implementasi program revitalisasi pendidikan vokasi itu adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dan pendampingan usaha, pengembangan kewirausahaan serta penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi penyandang disabilitas.

SLB didorong mampu mengembangkan kewirausahaan. Selain itu, akan ada pendampingan usaha dari DUDI/LKP atau instansi lain bidang keterampilan. Sebagai

harapannya, SLB mampu melahirkan lulusan dengan pendidikan keterampilan berkualitas. Hal tersebut memicu sekolah aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Mendorong Ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Disabilitas

Pengembangan program vokasi pada SLB diprioritaskan pada Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Revitalisasi program keterampilan/vokasi meliputi revitalisasi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dan kolaborasi dengan SMK, DUDI, lembaga kursus, dan instansi lain yang terkait.

Rendahnya angka lulusan SMALB yang masuk pada dunia kerja menjadi salah satu pentingnya pengembangan program keterampilan/vokasi di SMALB. Untuk memicu keberhasilan siswa SMALB dalam memiliki kompetensi keterampilan, dibutuhkan keberadaan guru SLB yang mumpuni. Sayangnya, mayoritas guru SLB bukan berlatar belakang keterampilan. Dalam jangka pendek, perlu meningkatkan kompetensi guru SMALB melalui program pelatihan keterampilan. Guru yang bersertifikasi keterampilan diharapkan mampu meningkatkan kualitas peserta didik berkebutuhan khusus.

Tamatan SLB, selain dapat hidup mandiri, juga harus siap memasuki dunia kerja. Saat ini, kebijakan pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengamanatkan pemerintah, juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang

disabilitas dari jumlah pegawai. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan.

Program keterampilan/vokasi juga telah merumuskan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penyusunan SKKNI bagi Penyandang Disabilitas bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berdasarkan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, pelaksanaan SKKNI mencakup pengembangan, penerapan, harmonisasi, pembinaan, dan pengendalian. Pengembangan SKKNI untuk Penyandang Disabilitas telah dimulai pada tahun 2018 dengan penyusunan rancangan SKKNI. Pada tahun 2019 telah dilakukan verifikasi, validasi, dan konvensi. Ditargetkan SKKNI bagi Penyandang Disabilitas dapat ditetapkan pada tahun 2020 oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenaker dan BNSP, terdapat alternatif lain dalam hal SKKNI, yaitu penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang dapat ditetapkan di level eselon 1 atau 2 di Kemendikbud.

Alternatif langkah ini akan mempercepat dimilikinya SKK Khusus bagi Penyandang Disabilitas sehingga dapat segera dilaksanakan



Lulusan SLB bekerja di Pabrik Sepatu PT. Youngtree Surabaya

penerapan, harmonisasi, serta pembinaan dan pengendalian. SKK Khusus ini akan menjadi rujukan untuk penyusunan skema uji kompetensi bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh sertifikat keahlian. Selain itu, SKK Khusus ini menjadi dasar pendirian LSP sebagai lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan.

Kebaruan Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Revitalisasi pendidikan keterampilan di SLB mencakup semua aspek pendukung, baik SDM, sarana prasarana, maupun perangkat pendukung kurikulum. Implementasi dari revitalisasi pendidikan vokasi di tingkat pusat adalah penyusunan SKKNI bagi Penyandang Disabilitas, termasuk penyusunan buku-buku keterampilan yang diperlukan dalam

mendukung pembelajaran di sekolah. Buku keterampilan disusun oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan serta Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bisnis dan Pariwisata, P4TK Pertanian, P4TK Mesin dan Industri, serta P4TK Otomotif dan Elektronika.

Saat ini sudah dirampungkan 20 bidang keterampilan yang dikembangkan pada SLB. Bidang keterampilan itu meliputi 5 subbidang Pariwisata, yaitu Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, *Massage*, dan Tata Graha; 3 subbidang Mesin dan Teknologi, yaitu TIK, Perbengkelan Sepeda Motor, Elektronika Alat Rumah Tangga; 9 subbidang Seni dan Budaya, yaitu Cetak Saring/Sablon, Teknik Penyiaran Radio, Desain Grafis, Fotografi, Seni Membatik, Seni Lukis, Seni Musik, Seni Tari, *Souvenir*; serta 3 subbidang pertanian, yaitu budi daya perikanan, budidaya peternakan, dan budi daya tanaman.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus juga menyediakan bantuan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi pendidikan keterampilan/vokasi di pendidikan khusus. Penyediaan sarana prasarana pendukung program keterampilan juga merupakan bagian dari program ini. Kemendikbud berusaha membantu melengkapi sarana dan prasarana pendidikan keterampilan pada satuan pendidikan khusus sesuai dengan bidang keterampilan yang dikembangkan.

Implementasi program revitalisasi pendidikan keterampilan pada level sekolah setiap satuan pendidikan khusus diharapkan memasukkan program pengembangan keterampilan dalam rencana pengembangan sekolah (*school development plan*). Program revitalisasi pendidikan vokasi di tingkat sekolah dapat berupa peningkatan kompetensi guru di bidang keterampilan, pengembangan kerja sama dengan lembaga kursus dan pelatihan, pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bentuk magang peserta didik atau guru, serta peningkatan kompetensi peserta didik melalui program kewirausahaan.

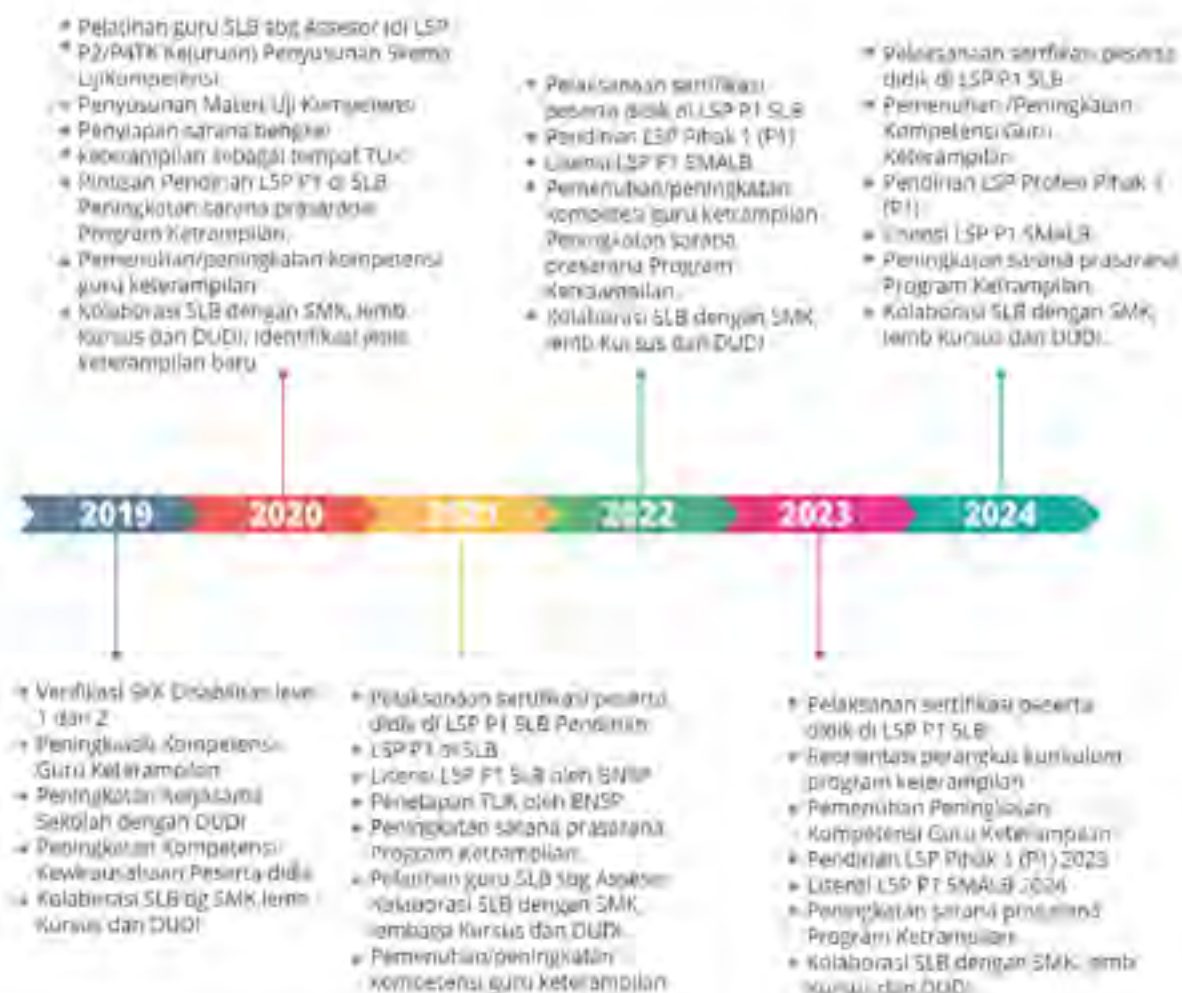
Sejumlah capaian program revitalisasi pendidikan vokasi pada pendidikan khusus di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- a. Evaluasi dan revaluasi Peta Jalan Program Revitalisasi Pendidikan Keterampilan/Vokasi pada Pendidikan Khusus.
- b. Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Penyandang Disabilitas.
- c. Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Program Vokasi/Keterampilan untuk Pendidikan Khusus untuk 100 sekolah.
- d. Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pengembangan Kewirausahaan pada Pendidikan Khusus untuk 86 sekolah.

Tabel Capaian Program Revitalisasi Vokasi Tahun 2019

Capaian Program	2019
Sekolah yang memiliki school development plan untuk Revitalisasi Pendidikan Vokasi/Keterampilan	100 sekolah
Peningkatan Kompetensi Guru di bidang keterampilan	1000 guru
Peningkatan Kompetensi Peserta Didik melalui pelatihan	860 Peserta Didik
Sekolah yang mendapat pendampingan usaha	86 sekolah
Sekolah yang melakukan kerjasama dengan DUDI/SMK/LKP/BLK/Dinas Pariwisata/Dinas Perindustrian, dan Lembaga yang berkaitan dengan magang peserta didik/guru/	100 sekolah
Dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Penyandang Disabilitas	Verifikasi dan Validasi Dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Penyandang Disabilitas
Peningkatan Pembangunan Ruang Keterampilan (sekolah)	-Bantuan Ruang Keterampilan masuk pada DAK
Alat Pendidikan (sekolah)	290 Sekolah

PETA JALAN PENDIDIKAN VOKASI/KETERAMPILAN PENDIDIKAN KHUSUS





Siswa Tuna Rungu SLB 01 Jakarta Sedang Membuat Kerajinan Tangan

Evaluasi dan Tantangan Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pada SLB

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi program pendidikan keterampilan/vokasi, terdapat beberapa masalah dan tantangan yang muncul, seperti berikut ini:

- a. Guru di sekolah luar biasa pada umumnya tidak berlatar belakang pendidikan keterampilan sehingga memerlukan program peningkatan pengetahuan dan kompetensi mereka di bidang keterampilan.
- b. Guru yang berlatar belakang pendidikan keterampilan yang mengajar di SLB tidak dapat melakukan sertifikasi guru karena peraturan yang ada belum mengakomodir hal tersebut.
- c. Peralatan praktik untuk mendukung pelaksanaan pendidikan keterampilan secara umum kurang memadai.
- d. Tingkat kepedulian dunia usaha dan dunia industri terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas masih rendah.
- e. Jenis keterampilan yang sesuai untuk penyandang disabilitas belum sepenuhnya teridentifikasi seluruhnya.

Sejumlah langkah rekomendasi untuk perbaikan program revitalisasi pendidikan vokasi untuk pendidikan khusus adalah sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan program revitalisasi pendidikan keterampilan di tingkat satuan pendidikan khusus harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, maupun masyarakat dan orang tua.
- b. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan vokasi pada satuan pendidikan khusus sangat penting dan urgen dipenuhi.
- c. Penyelarasan dan penguatan regulasi terkait pembinaan guru keterampilan di sekolah luar biasa, baik terkait latar belakang pendidikan, kompetensi, kesejahteraan, maupun hal lain yang relevan.

Meningkatkan Kualitas Guru dalam Revitalisasi SMK

“Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta bangsa.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

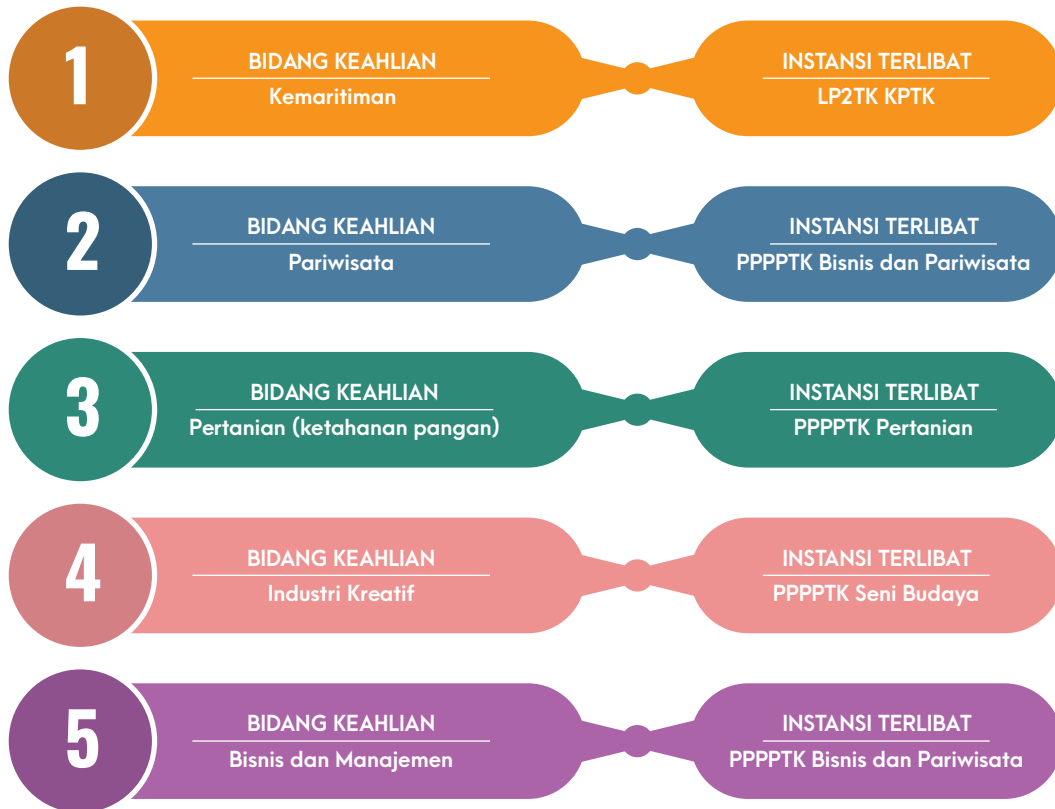
Kualitas pendidikan yang tinggi menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, seperti yang disampaikan pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, pada 12 Februari 2019. Presiden menegaskan pentingnya pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. “Pendidikan kita harus mampu memberikan bekal keterampilan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketika pembangunan SDM menjadi prioritas paling utama, peran guru akan semakin sentral, semakin utama, dan semakin strategis. Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta bangsa,” kata Presiden.

Pada beberapa kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menegaskan pentingnya revitalisasi SMK. “Salah satu poin program revitalisasi SMK adalah memperkuat kemampuan manajerial kepala SMK dan keterampilan guru-gurunya baik

secara pedagogik maupun substansi materi pelajaran keterampilan,” ujar Mendikbud.

Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK yaitu: 1) penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum; 2) inovasi pembelajaran; 3) pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan; 4) kemitraan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan perguruan tinggi; 5) standardisasi sarana dan prasarana utama; dan 6) penataan/pengelolaan kelembagaan. Butir ketiga, yakni pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), khususnya Direktorat Pembinaan Guru Dikmen dan Pendidikan Khusus. Direktorat PG Dikmen dan Diksus melaksanakan program jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan guru produktif SMK melalui Program Sertifikasi Keahlian.

Bidang Keahlian Prioritas SMK dan P4TK Terkait



Sertifikasi keahlian merupakan satu cara pemberian jaminan bahwa keahlian yang disertifikasi memenuhi persyaratan dengan mengacu kepada profil/pemaketan kompetensi yang ditetapkan pada jabatannya. Kegiatan Sertifikasi Keahlian ini mengacu pada skema Kerangka Kualifikasi Nasional Sertifikasi Keahlian Indonesia (KKNI) level IV bagi guru SMK yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Skema KKNI level IV dibagi menjadi beberapa klaster (kumpulan unit kompetensi) yang mengacu pada mata pelajaran produktif di SMK.

Bidang keahlian yang menjadi sasaran Program Revitalisasi SMK terdiri atas bidang keahlian sesuai prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian (ketahanan pangan), dan industri kreatif, serta bidang keahlian yang mendukung prioritas pembangunan nasional, yaitu teknologi dan rekayasa, serta bisnis dan manajemen.

Program selanjutnya adalah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan khusus untuk penambahan guru produktif SMK. Serta Program Pemenuhan Kebutuhan dan Kompetensi Guru Produktif SMK.

Manfaat Program

Para guru merasakan manfaat program revitalisasi guru SMK tersebut. Ruslanyu, Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo menyatakan kompetensi guru mengalami peningkatan setelah mengikuti pendidikan dan latihan baik di sekolah, di industri, maupun di P4TK Bispar. "Guru sebanyak 24 orang dari 6 kompetensi keahlian sudah lulus menjadi Asesor pada tahun 2018," katanya.

Sambutan positif juga disampaikan Dra. Sri Wirdani, M.Pd, Kepala SMK Negeri 6 Padang, Sumatera Barat. Sekolah ini menampung 1.200 siswa dengan jumlah tenaga pendidik 100 orang. "Program Revitalisasi khususnya bagi guru mempunyai banyak manfaat, antara lain meningkatkan produktivitas kerja dalam berinovasi dan mendorong guru untuk

meningkatkan kemampuan kerja mereka," katanya.

Kemudian, Dra. Euis Purnama, M. MPd, Kepala SMK Negeri 3 Kota Bandung, Jawa Barat menargetkan keterserapan kerja lulusan mencapai 80%. "Kami mengharapkan pembinaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta adanya kesepahaman antara pusat dan daerah. Sehingga tidak terjadi hambatan bagi SMK dalam melaksanakan program tersebut," katanya.



Revitalisasi SMK
Bidang Pariwisata





Pengembangan Keterampilan Kerja Peserta Didik

Memandirikan Masyarakat melalui Program PKK dan PKW

Peserta tampak antusias mengikuti Uji Kompetensi Massal untuk keahlian sulam level II yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Ar Rum Yogyakarta. LKP Ar Rum merupakan lembaga kursus yang sudah ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). Lembaga kursus yang didirikan Ratna Arum ini juga merupakan Sekretariat Bersama TUK Kota Yogyakarta bersama 10

LKP lain di Yogyakarta yang diresmikan oleh Harris Iskandar, Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

LKP Ar-Rum yang diawal pendiriannya hanya memberikan keterampilan menjahit ini, sudah berkembang dengan ragam keterampilan, seperti border, desain busana, hingga membuat kain jumputan. LKP Ar-Rum merupakan salah



satu lembaga kursus yang sudah menjalin kerja sama dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUD dan Dikmas, dalam melaksanakan Program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKK dan PKW). Program PKK dan PKW sudah terbukti menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki kompetensi untuk mencapai Indonesia Unggul.

Program PKK adalah program layanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja. Waktu pembelajaran PKK disesuaikan dengan kurikulum dan level kompetensi yang akan dicapai sesuai kebutuhan Dunia Usaha Dunia

Industri (DUDI), sudah termuat pembelajaran teori dan praktik serta pendidikan karakter dan pengetahuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Persentase pembelajaran PKK mayoritas berupa pembelajaran praktik dan magang (70%), sisanya berupa teori (30%).

Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. PKW diselenggarakan melalui proses kegiatan dengan menggunakan pendekatan “4 in 1” seperti terlihat pada diagram. Diawali dengan identifikasi, pembelajaran, evaluasi, hingga pendampingan wirausaha.

Kehadiran PKW berupaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Nawacita kelima, yakni berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sedangkan PKK merupakan wujud dari penerapan Nawacita keenam, yakni meningkatkan produktivitas rakyat. Harapannya, dengan program PKK dan PKW, dapat turut melahirkan masyarakat yang memiliki kompetensi, mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mencapai Indonesia Unggul di masa yang akan datang. Tahun 2019, sasaran penerima manfaat program PKK sebanyak 80.000 orang dan program PKW sebanyak 72.000 orang.



Sasaran Program PKW Tahun 2019

Kehadiran Program PKK dan PKW mendapatkan banyak tanggapan positif dari masyarakat. Menurut pimpinan LKP Cadre Ability Informatika (CAI) A. Hambali, LKP CAI menerima bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebanyak Rp110 juta pada tahun 2019. Bantuan tersebut diberikan untuk menjaring peserta didik sebanyak 40 orang. Mereka masih mengikuti tahapan pelatihan di LKP CAI. "Alhamdulillah, pembelajaran ini juga sangat membantu sekali sebagai usaha sampingan di rumah. Mereka diberi pembelajaran selama 150 jam tentang desain grafis dan aneka *souvenir*," kata Hambali.

Keberlanjutan program PKK dan PKW di masa mendatang perlu diimbangi dengan verifikasi langsung, melalui visitasi. Selama ini, keterbatasan anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tidak melakukan visitasi terhadap semua calon penyelenggara. Kelayakan lembaga untuk menyelenggarakan program PKK dan PKW dilihat dari proposal yang diajukan secara daring. Direktorat berpegang pada surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi kelayakan sebuah lembaga calon penyelenggara program PKK atau PKW. Pembinaan terhadap lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan selama ini masih kurang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Untuk mengoptimalkan program PKK dan PKW, diharapkan ke depan ada penambahan anggaran sehingga nominal bantuan bertambah

pula dan menjangkau jumlah sasaran lebih

Tujuannya adalah supaya proses pembelajaran bisa maksimal, mulai dari perekrutan hingga penempatan kerja atau membentuk rintisan usaha bisa benar-benar diawasi secara maksimal. ·

Sertifikasi Kompetensi Kursus dan Pelatihan

Terdapat tiga hal penting dalam peningkatan kualitas dan mutu penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yakni; 1) penyusunan dan pengembangan standar, 2) bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi proses pembelajaran, 3) sertifikasi kompetensi peserta didik.

Sertifikasi kompetensi diselenggarakan dalam rangka penjaminan mutu lulusan kursus dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu bidang dan jenjang kursus tertentu sesuai dengan kurikulum dan Standar Kompetensi Lulusan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah ditetapkan.

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Hal ini diamanatkan dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61, PP No. 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pasal 89, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008.



Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Cakrawala Komputer Norlaila Yuliyanti, di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan menyatakan bahwa, “Ada kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara program dan para peserta kursus yang bisa lulus *Computer Literate Certified Professional* (CLCP), karena diakui kompetensi mereka sebagai operator komputer, jadi kursus tidak hanya sekedar kursus tapi memiliki keahlian yang tersertifikasi secara nasional,”.

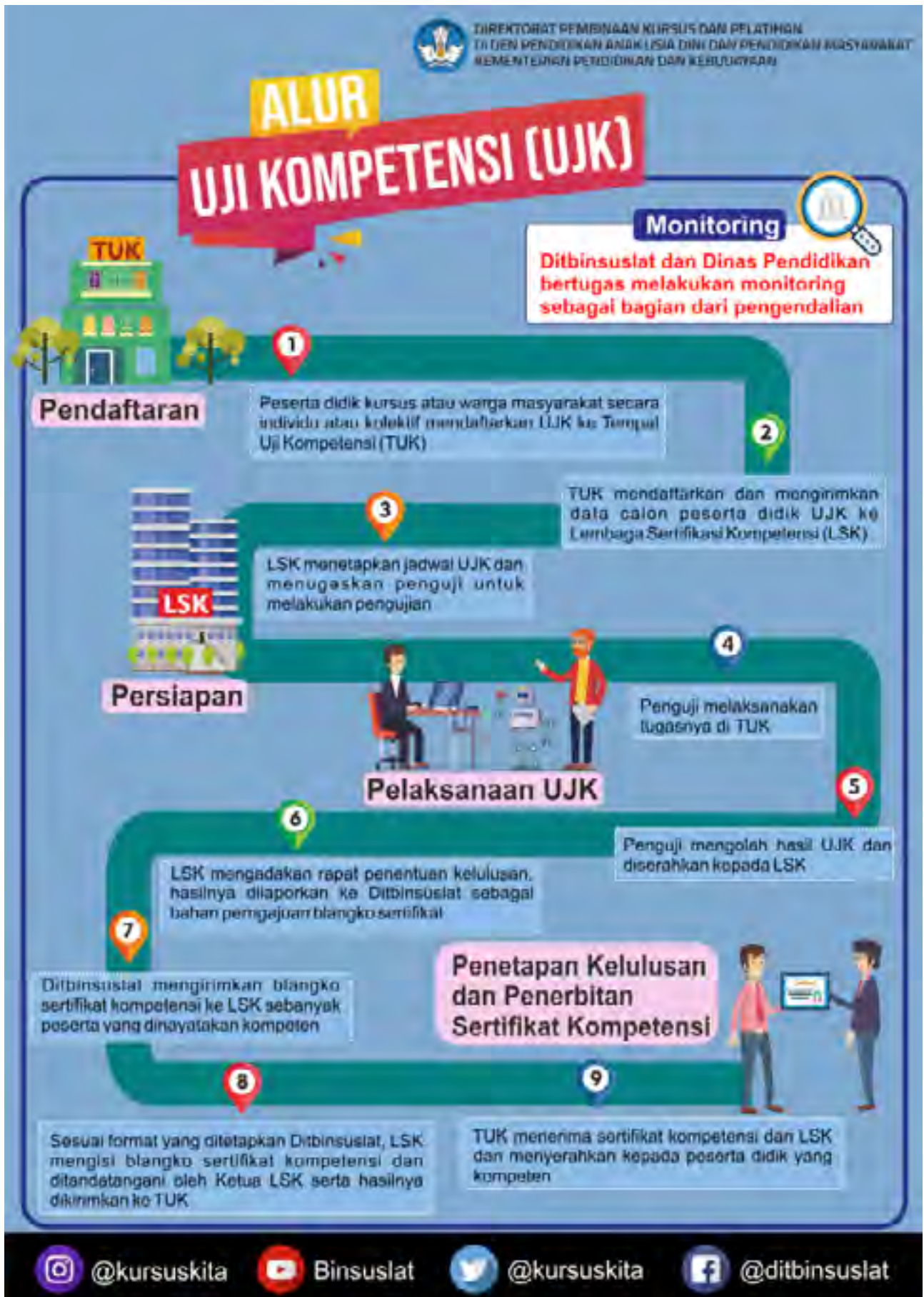
Pada tahun 2019, jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi untuk sertifikasi kompetensi adalah 48.802 peserta didik dengan persentase kelulusan 77% (37.512 peserta didik). Persentase kelulusan masih sangat rendah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kompetensi instruktur
2. Ketuntasan proses pembelajaran

3. Keterbatasan sarana prasarana pembelajaran

Uji kompetensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketuntasan belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itu, dalam rangka mendukung penyelenggaraan uji kompetensi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, setiap tahunnya memberikan bantuan dana uji kompetensi bagi peserta didik yang mengikuti Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan warga masyarakat yang karena alasan ekonomi tidak dapat membiayai sendiri keikutsertaannya dalam uji kompetensi.

Sebagai bentuk supervisi dan pengawasan penyelenggaraan uji kompetensi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam peningkatan mutu uji kompetensi, secara berkelanjutan telah melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi dan evaluasi kinerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi.





Peserta Didik Beradaptasi
dengan Perubahan Zaman
dan Teknologi

Membangun Manusia Unggul dan Berkepribadian



Anak Indonesia pemenang Olimpiade

"Perubahan zaman dan teknologi yang begitu cepat menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi. Tujuan pendidikan nasional tidak lagi mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang berketerampilan, memiliki skill, dan berkarakter."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebagai kapital intelektual, yang mampu beradaptasi dan memiliki keunggulan kompetitif di dalam era persaingan tersebut. Proses untuk menghasilkan generasi unggul harus dimulai sejak dini, bahkan dari dalam kandungan Ibu. Oleh karena itu, para ibu diharapkan memperhatikan proses tumbuh-kembang bayi dengan memberi asupan gizi kepada anak sejak dalam kandungan.

Langkah selanjutnya adalah para ibu mengirimkan anak-anak ke Pendidikan Usia Dini (PAUD). Di sana, anak-anak berlatih untuk mengembangkan kreativitas sesuai umur mereka. Setiap tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional PAUD (DAK BOP PAUD). Peningkatan anggaran setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan PAUD. Ditjen PAUD dan Dikmas juga terus menjalankan Program Penuntasan Satu Desa Satu PAUD di seluruh Indonesia.

Di tingkat sekolah dasar hingga menengah, anak-anak mendapat gemblengan agar mereka memiliki keterampilan dan karakter kuat dan siap bersaing setelah lulus. Pemerintah terus mendorong siswa untuk berkompetisi secara sehat demi menggapai prestasi tinggi. Kegiatan kompetisi berupa olimpiade berlangsung di berbagai bidang, antara lain, Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI), *National Debating Championship* (NSDC), Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), dan Festival Literasi Sekolah (FLS).

Para siswa yang menjadi juara di tingkat nasional dikirim ke ajang kompetisi di tingkat internasional, di antaranya pada lomba Olimpiade Matematika Internasional, Olimpiade Fisika Internasional, Olimpiade Kimia Internasional, Olimpiade Biologi Internasional,

Olimpiade Informatika Internasional, Olimpiade Astronomi dan Astrofisika Internasional, Olimpiade Kebumihan Internasional, Olimpiade Geografi Internasional, Olimpiade Ekonomi Internasional, Olimpiade Penelitian Sains tingkat Internasional, Kompetisi Karate tingkat Internasional, *International Karate Competition*, Juaraan Debat Siswa SMA Tingkat Dunia, Kompetisi Kejuruan tingkat Dunia, serta Festival Seni dan Budaya tingkat Internasional. Dalam berbagai arena internasional tersebut, para siswa Indonesia banyak meraih prestasi.

Penguatan Karakter

Selain unggul dalam keterampilan dan pengetahuan, generasi unggul harus memiliki karakter kuat. Di sinilah pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan oleh Pemerintah. PPK merupakan upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berakal cerdas, berkarakter, berdaya saing, serta berjiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.

Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah memiliki peran sentral dalam menyiapkan generasi unggul, yaitu generasi yang berbekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad ke-21. Kompetensi unggul itu adalah kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Hal itu merupakan bagian dari pembangunan karakter yang merupakan kebijakan prioritas pemerintah melalui agenda Nawacita ke-8 dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Kebijakan itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Kebijakan tentang pendidikan karakter tersebut menjadi landasan bagi sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai utama PPK, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Karakter utama tersebut dikembangkan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kreativitas sekolah. Untuk menunjang kegiatan tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

meluncur program Kuis Siap-Siap Aku Bisa (SSAB). Kuis SSAB sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan jumlah sekolah yang berpartisipasi sebanyak 300 SD dan melibatkan 18.000 siswa yang terbagi dalam 60 episode. Kuis ini ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta.

Masih banyak kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Kegiatan tersebut di antaranya adalah Lomba Gugus Unggul dan Festival Penggalang Ceria, Kawah Kepemimpinan Pelajar, Saya Anak Antikorupsi, Agen Saya Perempuan Antikorupsi, Menumbuhkan Jiwa Cinta Laut melalui Kurikulum Muatan Kemaritiman, serta program untuk mengembangkan karakter kesiagaan bencana.

Dengan berbagai program yang dijalankan oleh Kemendikbud tersebut, diharapkan generasi unggul yang terampil dan memiliki karakter kuat akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Dengan demikian, generasi penerus bangsa akan mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.



DAFTAR ARTIKEL BAB 3

Pendidikan Karakter Ruh Pembangunan SDM	80
Gerakan Literasi Wujudkan Masyarakat Literat	83
Kuis Siap-siap Aku Bisa, Tumbuhkan Anak Cerdas Berkarakter	87
Revitalisasi Pramuka Hadapi Tantangan Zaman	90
Kawah Kepemimpinan Pelajar Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan	94
Momentum Bangkitnya PAUD	96
Pendidikan Keaksaraan Meningkatkan Kompetensi Warga	99
Olimpiade, Lomba dan Festival Siswa	102
Gala Siswa Indonesia Pembentuk Karakter Siswa	106
Pelibatan Keluarga dalam Pendidikan	109
Mengembangkan Karakter Siaga Bencana	113
Perubahan Fundamental Kurikulum 2013	115
Menumbuhkan Jiwa Cinta Laut	118
Agen Antikorupsi Anak dan Wanita	120



Pembentukan Karakter Antre Anak

Pendidikan Karakter Ruh Pembangunan SDM

*"Kami berkeyakinan pendidikan karakter harus mengafirmasi realitas multikulturalisme bangsa. Pendidikan yang mengabaikan budaya akan kehilangan pijakannya."
(Romo Darmin Mbula, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katholik)*

Anak-anak SDK Napungliti, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) terlihat antusias saat duduk melingkar bersama guru. Mereka tengah menerapkan Spirit Kulababong atau dalam bahasa Sikka berarti bermusyawarah

untuk memecahkan satu masalah.

Kegiatan ini merupakan penerapan kearifan lokal dalam pendidikan karakter ini diprakarsai oleh Wahana Visi Indonesia (WVI). Metode

pendidikan ini mengajarkan setiap murid untuk memiliki harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam.

Metode Pendidikan Karakter dengan Spirit Kulababong ini terbukti berdampak positif. Anak-anak kelas 1 SD saja sudah lancar membaca. Mereka berani tampil di depan kelas. Para guru juga jadi lebih kreatif membuat modul pembelajaran di kelas.

Pelaksanaan pendidikan karakter kontekstual ini bukan hanya berlangsung di Sikka. Program ini dilaksanakan di 60 wilayah khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Bersama WVI, juga telah disusun Buku Panduan Praktis PPK Kontekstual yang menjadi salah satu rujukan bagi pegiat pendidikan khususnya di wilayah 3T.

Penguatan Pendidikan Karakter Kontekstual merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada kekayaan kearifan lokal untuk mempersiapkan generasi penerus agar siap menghadapi tantangan zaman. Pada 2019, Kemendikbud meluncurkan Buku Panduan Praktis Penguatan Pendidikan Karakter Kontekstual bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia. Program ini bertujuan untuk implementasi PPK kontekstual di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah konflik. Selain itu, Kemendikbud menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), dalam rangka mendorong peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, semangat bela negara yang dijiwai Pancasila, UUD 1945,

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kemendikbud melalui unit-unit utamanya telah melaksanakan sosialisasi implementasi PPK melalui pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, TOT, lokakarya, rakor, semiloka, sarasehan, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), pengimbasan, konsultasi, pendampingan, dan lain-lain.

Pada 2019, Kemendikbud juga melaksanakan pendampingan PPK oleh Tim Konsultasi dan Asistensi melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di 89.182 satuan pendidikan, baik sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan maupun yang belum mendapatkan pelatihan. Hingga 2019, sebanyak 218.989 sekolah telah mengimplementasikan PPK.

Program Bela Negara

Kemendikbud menjalin kerja sama dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dalam penyusunan Pedoman Bela Negara yang bisa digunakan oleh instansi/aparat pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lainnya.

Program penguatan pendidikan karakter ini mendapat sambutan positif. “Para kepala sekolah dan guru semakin bersemangat mendorong suasana belajar-mengajar yang menyenangkan, mencerahkan, serta mampu memacu kreativitas dan kompetensi peserta didik dalam rangka membangun Generasi Emas Indonesia 2045 yang dibekali keterampilan abad 21,” kata Dr. Ujang Syarip Hidayat, M.Pd., Pengawas SMP Dinas Pendidikan, Kabupaten



Anak Indonesia sebagai Pemenang

Sukabumi Jawa Barat.

Sementara itu, Dwi Atmi Sutarini, M.Pd., Kepala SDN 1 Ungaran Yogyakarta mengatakan dengan diimplementasikan PPK, anak-anak murid menjadi semakin toleran, menghargai keberagaman dan gotong royong. “Kami memiliki murid dengan 5 latar belakang agama yang berbeda, di mana di sekolah, kami pupuk nilai-nilai toleransi sejak awal, misalnya saat

pelaksanaan sholat Jumat, anak-anak non-muslim kami ajak untuk ikut mempersiapkan prasarana sholat Jumat untuk teman-temannya yang akan sholat. Efeknya, semisal ada acara keagamaan lain berlangsung di sekolah, anak-anak di luar anutan agamanya masing-masing akan dengan suka rela ikut membantu untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan pada acara keagamaan yang akan digelar.” katanya.



Gerakan Literasi

Wujudkan Masyarakat Literat

*"Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup Abad 21 melalui pendidikan terintegrasi."
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)*

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang literat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan berbagai program secara berkesinambungan. Masyarakat literat adalah masyarakat yang memahami literasi secara utuh sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Masyarakat literat memiliki kesadaran untuk belajar demi menguasai kecakapan hidup yang baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Mereka inilah yang bisa disebut sebagai generasi terdidik dan tercerahkan.

Generasi berkualitas tersebut akan menjadi pemegang kunci kemajuan bangsa menuju Indonesia Unggul. "Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup Abad 21, melalui pendidikan terintegrasi," kata Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketika memberi sambutan pada pembukaan bimbingan teknis untuk infrastruktur literasi baca-tulis, 13 April 2019. Muhadjir berharap gerakan literasi tidak sekadar membaca untuk memahami teks, tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Gerakan Literasi Masyarakat

Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran literasi adalah Gerakan Literasi Masyarakat (GLM). Untuk melaksanakan program ini, Direktorat Bindiktara berkolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), komunitas baca, penggiat literasi, serta pemerintah daerah.

Pada 2019, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) telah menghasilkan beberapa capaian. Capaian tersebut di antaranya adalah Gerakan Indonesia Membaca yang dilaksanakan di 13 kabupaten/kota, pembentukan Kampung Literasi di 21 lembaga, Penguatan TBM di 200 lembaga, Rintisan TBM di 13 lembaga, bantuan sarana TBM berbasis IT di 90 lembaga, residensi pegiat literasi melibatkan 180 orang, *workshop* penguatan TBM di SKB berlangsung di 7 lembaga, serta implementasi 6 literasi dasar di 6 lembaga.

menumbuhkan rasa haus akan
pengetahuan sejak dini



Gerakan Literasi Sekolah

Pada 2019, Kemendikbud memiliki target untuk membentuk satgas GLS (Gerakan Literasi Sekolah) di dua provinsi per tahun selama 2020-2024. Pada periode yang sama, Satgas GLS akan mendampingi 100 sekolah setiap tahun.

Program GLS ini mendapat dukungan pemerintah daerah, antara lain dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. "Komitmen kami untuk literasi di level teknis sangat kuat, bukan hanya basa-basi atau seremonial belaka," kata Ridwan Kamil pada penandatanganan Deklarasi Literasi, 20 April 2019.

Penyediaan Buku Bacaan Siswa dan Bimbingan Teknis Instruktur/Fasilitator Literasi Baca Tulis

Kegiatan literasi yang tak kalah pentingnya adalah penyediaan buku bermutu bagi peserta didik. Program ini mendukung gerakan membaca 15 menit sebelum belajar di sekolah. Saat ini, buku bacaan yang sesuai dengan kondisi anak-anak masih kurang. Untuk memecahkan masalah tersebut, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berikhtiar menyusun bahan bacaan literasi yang sesuai dengan konteks sosiokultural anak-anak Indonesia. Dengan adanya literasi baca-tulis yang andal, anak-anak di Indonesia diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan keenam literasi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pada 2019 telah dihasilkan 170 buku bacaan yang bertemakan sanitasi dan kesehatan lingkungan,

arsitektur tradisional, bahasa dan sastra, lanskap perubahan perdesaan dan perkotaan, aktivitas ekonomi kreatif, diversifikasi pangan dan tradisi kuliner, toleransi dan kebhinekaan, kebencanaan, kesenian, kecakapan hidup, antikorupsi, serta kemaritiman untuk pembaca dini dan kelas awal.

Dengan demikian, bahan bacaan literasi yang memuat karakter secara konkret diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia akan berpengetahuan, berkepribadian, berkarakter kuat, serta siap bersaing dengan anak-anak bangsa lain untuk menuju Indonesia unggul pada era globalisasi. Program ini juga diharapkan dapat menggali potensi penulis dari kalangan generasi muda untuk menghasilkan karya cerdas dan berkarakter melalui tema-tema yang terkait dengan pembangunan Indonesia.

Literasi baca-tulis tentu tidak terhenti pada penyediaan bahan bacaan berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Dalam rangka menyiapkan generasi muda Indonesia yang kompeten dan kompetitif pada Era Revolusi Industri 4.0, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melatih para guru, pegiat literasi, dan penyuluh bahasa dari seluruh Indonesia melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tenaga Literasi maupun Bimbingan Teknis Instruktur/Fasilitator Literasi Baca-Tulis Tingkat Nasional dan Regional. Setelah dilatih, mereka akan melatih para siswa Indonesia secara masif (baik di sekolah maupun di luar sekolah) untuk membaca dan menulis



Membaca bisa dilakukan di mana pun

tingkat tinggi. Dengan demikian, para siswa Indonesia akan terbiasa bernalar tingkat tinggi sehingga mereka akan tumbuh menjadi SDM Indonesia yang berkualitas guna mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi salah satu negara yang unggul di dunia.

Pada tahun 2019, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menargetkan untuk melatih 600 orang instruktur dan fasilitator literasi baca tulis dari 34 provinsi di Indonesia.

Perhatian terhadap tenaga literasi (pegiat gemar membaca se-Indonesia) diberikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei

2017 di Istana Negara. Beliau mengatakan, "Saya sudah mendengar kisah perjuangan bapak ibu (pegiat literasi) semuanya, terutama dalam mendorong masyarakat kita menjadi pintar, menjadi lebih cerdas, buat masyarakat kita lebih terbuka wawasannya dengan cara-cara memberikan bacaan".

Selanjutnya, Mendikbud mengatakan, "Indonesia membutuhkan instruktur literasi yang sudah terlatih guna mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup Abad 21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat".

Kuis Siap-siap Aku Bisa, Tumbuhkan Anak Cerdas Berkarakter

*"Program ini buah dari komitmen dan kerja keras kita semua agar kualitas sekolah di Banda Aceh bisa setara dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia bahkan mancanegara."
(H. Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh)*



Proses Penayangan Kuis Siap-Siap Aku Bisa di Salah Satu TV Swasta Nasional

"Sekolah Dasar, Cerdas Berkarakter, yeah!" Begitulah yel-yel para peserta Kuis Siap-siap Aku Bisa (SSAB). Para siswa Sekolah Dasar yang menjadi peserta kuis, bernyanyi dengan riang gembira. "Aku, kamu, dan mereka. Semua

kita bersaudara," terdengar dari salah satu penggalan lagu yang mengajak anak-anak untuk menjaga persatuan bangsa.

Mereka mengenakan busana daerah beraneka warna yang menggambarkan keanekaragaman



Kuis Siap-Siap Aku Bisa

Indonesia. Kuis bertajuk “Siap-Siap Aku Bisa” yang tayang di salah satu TV swasta nasional melaksanakan syuting di Kota Banda Aceh, tepatnya di bekas lahan Hotel Aceh, Taman Sari, Sabtu (3/8/2019).

Dengan berlatar belakang Masjid Raya Baiturrahman, panggung dengan konsep terbuka ditata rapi dan atraktif. Sebanyak 300 pelajar SD se-Banda Aceh yang menjadi pesertanya tampak begitu bersemangat.

“*Peuhaba* (apa kabar) anak-anak Aceh?” sapa Shahnaz Haque sang pembawa acara. “*Haba get* (kabar baik),” serempak jawab para peserta. Kehadiran Ria Enes bersama boneka Susan yang menjadi salah satu dewan juri, semakin menambah semarak suasana.

Materi dalam Uji Pengetahuan ini terdiri

dari Kenali Tokoh, Sikap Baikku, dan Negeri Tercinta. Metode dalam pemberian pertanyaan ini beraneka ragam, mulai dari dibacakan langsung oleh juri sampai pada tayangan video di monitor. Juri yang menemani dalam Kuis SSAB juga tidak kalah menarik, ada presenter sekaligus pemerhati anak yang biasa wira-wiri di stasiun televisi, yakni Shahnaz Haque, dan beberapa pakar pendidikan lainnya.

Setelah Sesi Uji Pengetahuan selesai, tiba saatnya Sesi Ayo Bermain. Para peserta bersiap-siap maju dan keluar dari podium mereka untuk menerima tantangan para dewan juri. Pada sesi ini, akan tampak peserta yang paling unggul dalam hal semangat, kreativitas, ketangguhan, kecekatan, dan kerja sama. Penghargaan diberikan kepada para peserta mulai dari terbaik 1 sampai dengan terbaik 5 sehingga semua peserta akan pulang dengan membawa hadiah.



Masyarakat sangat antusias menyambut Kuis SSAB. “Program ini buah dari komitmen dan kerja keras kita semua agar kualitas sekolah di Banda Aceh bisa setara dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, bahkan mancanegara,” kata Wali Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman.

Makin Banyak Peserta

Kuis SSAB yang dilaksanakan mulai 2018 ini merupakan wahana penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik. Pada 2019, program Kuis SSAB tetap dilanjutkan. Peserta tidak hanya terbatas dari Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera. Jumlah sekolah yang berpartisipasi sebanyak 150 SD melibatkan 9.000 anak yang terbagi dalam 30 episode. Pendaftaran peserta yang ingin mengikuti kompetisi juga dibuka dengan lebar. Sekolah dapat mengirim pengajuan untuk menjadi peserta melalui pos-

el ke panitia Kuis SSAB. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar juga menggandeng bupati/wali kota untuk turut serta memeriahkan Kuis SSAB.

Lokasi pengambilan gambar akan ditentukan dengan menunjukkan latar belakang khas dari setiap daerah. Selain di televisi, kuis juga bisa disaksikan pada berbagai platform dan media sosial, seperti Youtube. Dengan demikian, peserta didik seluruh Indonesia bisa melihat setiap Kuis SSAB secara lebih mudah.

Selama dua tahun berjalan, kuis SSAB menjangkau 450 SD dan 27.000 siswa di Pulau Jawa dan Sumatera. Harapannya di tahun-tahun yang akan datang, Kuis SSAB dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Revitalisasi Pramuka Hadapi Tantangan Zaman

*"Di masa sekarang gerakan Pramuka harus merevitalisasi dirinya agar terus dapat membentuk manusia-manusia Pancasila yang tangguh yang tahan banting, yang berakhlak mulia, dan yang inovatif, karena tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang sangat berbeda dengan apa yang dihadapi di masa lalu."
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)*



Pada acara Peringatan Ke-58 Tahun Pramuka pada 14 Agustus 2019 di Cibubur, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dewasa ini banyak masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan yang dihadapi itu di antaranya adalah penyalahgunaan narkoba, tawuran, sikap intoleransi, media sosial yang penuh hoaks, pornografi, dan ujaran kebencian. Gerakan Pramuka harus merevitalisasi diri karena tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi di masa lalu. Untuk mengimplementasikan konsep revitalisasi gerakan kepramukaan sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo, diperlukan gugus depan yang memiliki keunggulan. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mewujudkan hal tersebut melalui Lomba Gugus Depan Unggul dan Festival Penggalang Ceria yang kembali dilaksanakan pada September 2019.

Lomba Gugus Depan Unggul

Tahapan pertama untuk menentukan gugus depan unggul adalah seleksi portofolio calon peserta yang telah dikirim oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Tahap selanjutnya Direktorat Pembinaan SD memilih empat gugus depan di setiap provinsi sebagai sasaran visitasi. Tim visitasi menggunakan metode wawancara, observasi, pengamatan, dan uji petik

terhadap pembina dan peserta didik untuk mendapatkan gugus depan yang berhak maju ke tahap final.

Pada tingkat nasional, finalis mengikuti beberapa komponen lomba di antaranya pameran gugus depan, presentasi keberhasilan pengelolaan gugus depan, dan pengembangan gugus depan unggul. Pameran dikemas dalam tampilan menarik berisi tentang profil gugus depan, keunggulan gugus depan, prestasi, dan foto kegiatan menggunakan media yang sesuai dengan tema pameran yang dipilih.

Presentasi keberhasilan pengelolaan gugus depan menjadikan implementasi PPK di sekolah melalui pembinaan siswa sebagai aspek penilaian yang memiliki bobot paling tinggi, yakni 75%, sementara teknik presentasi memiliki bobot penilaian 25%. Pemenang ditentukan oleh tim juri berlandaskan keakuratan, keterbukaan, dan kejujuran.

Festival Penggalang Ceria

Festival Penggalang Ceria terdiri dari tiga jenis kegiatan, yakni Kegiatan Pembiasaan Praktik Baik, Seni Budaya dan Wisata, dan Perlombaan Keterampilan Kepramukaan. Pembiasaan Praktik Baik ini tidak dibalut dalam sebuah perlombaan, melainkan sebuah metode. Peserta didik diajarkan perilaku positif yang harus ditanamkan pada diri mereka masing-masing, seperti ibadah tepat pada





Lomba keterampilan pembuatan roket air dengan bahan daur ulang

waktunya, olahraga, upacara atau apel harian, dan permainan persaudaraan.

Festival Seni Budaya dan Wisata dikemas berupa peragaan seni budaya khas daerah yang menampilkan parade pakaian adat nusantara dan peragaan kesenian daerah. Peserta pada lomba ini juga mendapat kesempatan untuk wisata edukasi. Tidak kalah menariknya dengan perlombaan sebelumnya, perlombaan keterampilan kepramukaan merupakan salah satu acara yang ditunggu-tunggu karena pada lomba ini peserta didik diuji sesuai dengan jenis

keterampilan kepramukaan yang diminatinya. Meskipun dalam suasana kompetitif, perlombaan keterampilan dilaksanakan dalam nuansa keceriaan dan keakraban.

Salah satu bentuk perlombaan keterampilan adalah Lomba Tata Laksana Perkemahan. Pada lomba jenis ini peserta ditantang untuk mendirikan tenda, membuat kelengkapan tapak perkemahan, menyiapkan administrasi regu hingga membongkar dan merapikan kembali dalam waktu 120 menit. Jumlah peserta setiap regu adalah 8 orang. Peserta didik akan benar-



benar diuji kerja sama, kecekatan, kerapian, dan nilai karakter positif lainnya.

Jenis lomba keterampilan lainnya adalah *pionering project* yang berbentuk lomba kreasi tiang bendera *portable* dengan 10 tongkat pramuka, hasta karya yang berupa pembuatan roket air dari bahan bekas (*recycle*), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menyuguhkan kemampuan program MS-Word dan penggunaan pos-el, menggambar poster dengan tema “Indonesia Impianku”, sirkuit ketangkasan tempat peserta didik harus

mencapai waktu tercepat melewati lintasan halang rintang, dan yel-yel penggalan ceria.

Lomba lainnya adalah baris berbaris menggunakan tongkat, keterampilan menggunakan kompas, membuat sketsa panorama, Kemampuan Indera Manusia (KIM), pertolongan pertama pada korban kecelakaan, sandi dan isyarat, ilmu penaksiran, dan lomba menulis berita. Aneka ragam perlombaan ini dikemas dalam konsep kegiatan Rekreatif-Edukatif



Presiden dan Peserta Kawah Kepemimpinan Pelajar

Kawah Kepemimpinan Pelajar Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan

*Students today leaders tomorrow, hari ini pelajar, besok kamu adalah pemimpin.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)*

Program Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) dirancang sebagai wadah pembinaan kesiswaan kreatif, cerdas, inovatif, dan berwawasan kebangsaan. Inilah salah satu upaya nyata mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan di segala bidang. Setiap

tahunnya, KKP diikuti oleh para wakil siswa yang terlibat dalam kepengurusan OSIS, hasil seleksi dari seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa sekolah menengah atas untuk membentuk pola pikir pemimpin muda yang berkarakter

mulia, patriotik, dan berdaya guna bagi agama, nusa, dan bangsa. Peserta KKP merupakan para pengurus OSIS dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi mengirimkan 8 siswa (4 putra dan 4 putri) beserta pendamping. Para peserta mengikuti 5 rangkaian kegiatan utama dalam hal penggemblengan diri, yaitu Kawah Kepemimpinan, Kawah Kedisiplinan, Kawah Kebangsaan, Kawah Kreativitas, dan Kawah Kepedulian.

KKP dibuka secara resmi oleh Direktur Pembinaan SMA, Purwadi Sutanto, Senin (29/04/2019).

Purwadi Sutanto mengajak para siswa untuk menjadi agen-agen perubahan di daerah masing-masing dalam menghadapi era milenial. "Di sini tempat kalian dibina menjadi agen-agen perubahan yang hebat. Calon pemimpin masa depan yang siap bersaing menuju Abad ke-21," kata Purwadi.

Acara ini mendapat sambutan gembira dari peserta. Abrory, peserta asal SMAN 3 Bandar Lampung, mengakui bahwa materi-materi yang diperolehnya selama mengikuti KKP sangat menginspirasi peserta. Salah satunya materi tentang jurnalistik. Menurutnya pekerjaan jurnalistik tidaklah mudah dan membutuhkan keahlian khusus yang bisa diperoleh dengan rajin membaca dan menulis. "Setelah pulang dari KKP ini saya ingin mengajak teman-teman di sekolah untuk mulai belajar menulis dan

memberikan informasi positif dan terpercaya kepada masyarakat, dan tentunya no hoax," kata Abrory.

Peserta lain juga merasakan hal yang sama. "Sepulang dari sini, pengetahuan yang didapat bisa dibagikan kepada teman-teman di daerah karena kita akan menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar kita agar lebih baik lagi dari sebelumnya," ujar Yundari, siswi SMAN 6 Pontianak, Kalimantan Barat.

Jovanka yang saat ini menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA Taruna Nusantara, Magelang mengakui bahwa ia mendapatkan banyak ilmu kepemimpinan. "Menjadi pemimpin adalah seseorang yang mampu membawahi orang-orang yang dipimpinnya untuk mewujudkan kepentingan bersama," ujar Jovanka yang bercita-cita menjadi presiden ini.

Dalam pertemuan khusus dengan peserta KKP, Mendikbud Muhadjir Effendy berpesan agar para siswa membangun mimpi besar untuk menggapai cita-cita. "Bermimpilah selama bermimpi itu tidak dilarang. Tidak ada yang melarang saudara menjadi presiden, pengusaha, guru dan lainnya. Manfaatkan sebaik mungkin pengalaman Anda selama berada di sini dan bertemu dengan teman sebaya kalian dari seluruh daerah di Indonesia," pesan Mendikbud.



Momentum Bangkitnya PAUD

"Kami bertekad untuk menyukseskan penuntasan PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD."

(Zulkifli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)



Keingintahuan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional, yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) menyiapkan dana alokasi

husus bantuan operasional PAUD (DAK BOP PAUD). Anggaran meningkat setiap tahunnya disesuaikan kebutuhan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas layanan PAUD.

Anggaran Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tahun 2019 telah dialokasikan untuk rehabilitasi lembaga PAUD serta bantuan sarana dan prasarana termasuk bantuan alat permainan edukatif. Peningkatan akses dan



Mencetak Generasi Emas dimulai dari PAUD

layanan pendidikan PAUD terutama ditujukan pada daerah Tiga T atau desa yang jumlah anak usia dininya terbatas. Bantuan sebanyak Rp 54,5 miliar diabdikan untuk 215 lembaga PAUD.

Standar PAUD

Setiap lembaga PAUD harus memenuhi standar pendidikan nasional, di antaranya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Dalam hal anggaran, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik bantuan operasional pemerintah (BOP) PAUD dapat digunakan oleh satuan PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Anggarannya pada 2019 naik menjadi Rp 4,47 triliun dan dialokasikan untuk 3 kegiatan yaitu

kegiatan pembelajaran, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya.

Selain itu, pada tahun 2019, alokasi DAK Fisik untuk TK Negeri diberikan sebesar Rp200 miliar yang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat permainan edukatif, dan pengadaan buku.

Pemerintah daerah juga mendorong program PAUD. Zulkifli, Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memaparkan sebagian besar daerah di Kabupaten Bireuen sudah punya PAUD. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan dan 609 desa. Sebanyak 256 desa sudah ada satuan PAUD. "Kami bertekad untuk menyukseskan penuntasan PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD," ujarnya.



Menciptakan Anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter sejak dini

Sementara itu, Dendi Ramadhona, Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung, menyatakan bahwa program Satu Desa Satu PAUD perlu didukung. “Dengan adanya gebrakan program Satu Desa Satu PAUD ini, Pesawaran mengalami kemajuan signifikan. Pada tahun 2014 kabupaten memiliki 115 PAUD dan sekarang mempunyai 129 PAUD,” ujar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

Pencegahan Stunting

PAUD Holistik Integratif adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Ketika merespons hal tersebut, Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas telah melakukan penyesuaian materi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Pendidik PAUD (Diklat Berjenjang) dengan penambahan materi stunting dalam Bab Gizi dan Kesehatan. Pada 2019, diadakan Pelatihan Calon Pelatih Pendidik PAUD yang diikuti 2.000 pendidik PAUD dari 100 Kabupaten.

Selain itu, Direktorat Pembinaan PAUD memberikan bantuan Pemberian Makanan Sehat kepada 1000 lembaga PAUD yang diprioritaskan berada di 160 kabupaten/kota rawan stunting dengan anggaran sebesar Rp15 miliar.

Pelaksanaan PCP dan bantuan Pemberian Makanan Sehat menjadi salah satu prioritas utama dan dipantau langsung oleh Kantor Wakil Presiden melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pendidikan Keaksaraan

Meningkatkan Kompetensi Warga

Pemerintah Indonesia terus menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi jumlah buta aksara dan meningkatkan keberaksaraan masyarakat.



Keaksaraan Warga

“Pemerintah Indonesia terus menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi jumlah buta aksara dan meningkatkan keberaksaraan masyarakat.”

Data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

Kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia usia 15-59 tahun yang telah berhasil diberaksarakan mencapai 98,07%. Itu berarti tinggal 1,93% sekitar 3,29 juta orang yang masih buta aksara.



Kegiatan Belajar Mengajar pada Keaksaraan Papua

Secara nasional angka persentase buta aksara di Indonesia usia 15-59 tahun sebesar 1,93% (3.290.490 orang). Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 6 provinsi yang memiliki persentase buta aksara tertinggi (zona merah) di atas 4%, yaitu Papua sebesar 22,88% (484.592 orang), Nusa Tenggara Barat sebesar 7,51% (227.888 orang), Nusa Tenggara Timur sebesar 5,24% (173.466 orang), Sulawesi Barat sebesar 4,64% (39.098 orang), Sulawesi Selatan sebesar 4,63% (252.539 orang), dan persentase terendah adalah Kalimantan Barat sebesar 4,21% (133.988 orang).

Pemerintah Indonesia terus menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk mengurangi jumlah buta aksara dan meningkatkan keberaksaraan masyarakat,

di antaranya adalah program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar maupun keaksaraan lanjutan.

Pendekatan layanan program pendidikan keaksaraan dasar terdiri dari dua hal. Pertama, layanan pendidikan keaksaraan dasar daerah terpadat buta aksaranya di 6 provinsi yang peta buta aksaranya masih merah (> 4% buta aksara), yaitu Papua, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Kedua, pendidikan keaksaraan dasar pada masyarakat yang berada di Kawasan Adat Terpencil/Khusus (KD KAT). Tahun 2019, strategi penuntasan buta aksara, selain melibatkan Satuan Pendidikan Nonformal, Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI/Polri, serta organisasi yang bergerak di bidang

pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil pencapaian pada 2019 antara lain, BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Suku Terasing/Komunitas Adat Terpencil menjangkau 2.100 orang. BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (terpadat) menjangkau 80.190 orang. BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri menjangkau 25.740 orang dan BOP Keaksaraan Multikeaksaraan menjangkau 5.000 orang.

Pelaksanaan Program

Peserta didik pendidikan keaksaraan dasar untuk pemberantasan buta aksara adalah masyarakat usia 15-59 tahun, dengan kriteria mereka belum bisa membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara fungsional. Mereka merupakan *drop out* SD kelas 1, 2, 3. Para tutor harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator, tutorial, teman sebaya, supervisor, dan motivator.

Program bersifat partisipatif, berpusat pada peserta didik, *learning by doing*, kemanfaatan, dan asah asih asuh/tutor sebaya, dan *sharing*. Proses pembelajaran terdiri atas waktu fleksibel, kondisi dinamis, proses dialogis, dan membangun kebersamaan. Lamanya pembelajaran keaksaraan dasar sebanyak 114 jam.

Sementara itu, sasaran pendidikan keaksaraan lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multikeaksaraan) ditujukan bagi warga yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi. Mereka berusia

15-59 tahun dengan kriteria lulus pendidikan keaksaraan dasar, ditandai dengan kepemilikan SUKMA. Lama pembelajaran 86 jam.

Pendidikan Multikeaksaraan merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang menekankan peningkatan keragaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan. Tema Multikeaksaraan meliputi (a) profesi, keahlian, dan pekerjaan; (b) pengembangan seni dan budaya; (c) sosial, politik, dan kebangsaan; (d) kesehatan dan olahraga; dan (e) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program keaksaraan mendapat perhatian dari masyarakat. Maryati, salah satu peserta didik Keaksaraan Usaha Mandiri pada komunitas Adat Suku Asli/Laut yang tinggal di Desa Tanjung Batu Kecil, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, mengaku senang dapat mengikuti pembelajaran ini. Ia mengaku sudah dapat membaca, menulis, dan juga berhitung setelah mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di desanya. "Kalau sekarang saya bisa baca tulisan angka di uang itu, biasanya cuma tahu warna saja. Baca sedikit-sedikit di bungkus makanan juga sudah bisa," katanya.

Olimpiade, Lomba dan Festival Siswa

*"Tidak bisa berkata-kata, rasanya seperti belum percaya. Semua kerja keras saya dan tim bisa berbuah manis, dan tentunya juga berkat bimbingan para pembina olimpiade, guru dan khususnya orang tua kita semua."
(Kinantan Arya Bagaspati, Peraih Emas IMO 2019)*



Tim Kimia Indonesia dalam Ajang International Chemistry Olympiad (IChO) 2019

Indonesia memiliki lebih dari 44 juta siswa usia pendidikan dasar dan menengah. Mereka adalah generasi emas yang harus diberikan pengajaran dan pendidikan sekaligus perlindungan yang memadai agar menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan berbudi pekerti luhur.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, sejak lebih dari 2 dekade melakukan berbagai macam pembinaan peserta didik di semua lini bakat dan kecerdasan dari tingkat sekolah, tingkat daerah, tingkat nasional, hingga tingkat internasional.

Olimpiade Agenda Siswa Indonesia

Kegiatan kompetisi yang telah menjadi milik dan mimpi siswa Indonesia lalu berkembang

menjadi agenda tahunan anak-anak Indonesia diselenggarakan di bawah tajuk Olimpiade. Ditjen Dikdasmen menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI), *National Debating Championship* (NSDC), dan yang baru 3 tahun terakhir ini dikembangkan adalah Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) dan Festival Literasi Sekolah (FLS).

Mereka yang berprestasi di tingkat nasional, diikutsertakan dalam kompetisi di ranah internasional.

Berikut beberapa catatan prestasi mendunia aset-aset bangsa di Bidang Sains pada 2019.

Olimpiade Matematika

Tim Olimpiade Matematika Indonesia meraih prestasi pada *International Mathematical Olympiad* (IMO) ke-60 di Bath, Inggris, 11-22 Juli 2019. Kompetisi diikuti lebih dari 100 negara dengan 600 peserta. Pada IMO kali ini Indonesia mendapatkan 1 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu.

Indonesia menempati urutan ke-14 dari 110 negara peserta. Tim Olimpiade Matematika Indonesia mendapatkan prestasi yang lebih baik dibanding beberapa negara, seperti Australia, Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda. Perolehan medali emas pada IMO 2019 ini merupakan medali emas ketiga yang

pernah didapatkan oleh Indonesia. Dua medali sebelumnya didapat pada tahun 2013 dan 2018.

Olimpiade Fisika

Olimpiade Fisika Internasional (*International Physics Olympiad*/IPhO) ke-50 tahun 2019 digelar di Tel Aviv, Israel pada Juli 2019. Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan tim ke acara IPhO Israel karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebagai kompensasinya, Pemerintah Indonesia mengirimkan tim Fisika ke acara EuPhO (*European Physics Olympiad*). EuPhO tahun 2019 ini adalah event ke-3 yang diselenggarakan di Riga, Latvia. Kompetisi tahun ini diikuti 35 negara dengan jumlah peserta 250 orang.

EuPhO kali ini diikuti juga oleh 7 negara dari luar Eropa. Indonesia mendapat 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

Olimpiade Biologi

Tim Olimpiade Biologi Indonesia menorehkan prestasi terbaik di acara 30th *International Biology Olympiad*, 14-21 Juli di Szeged, Hungaria. Indonesia meraih 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

Olimpiade Informatika

Tim Olimpiade Komputer Indonesia 2019 yang terdiri dari empat siswa SMA terpilih, mempersembahkan 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu pada ajang *International Olympiad in Informatics* (IOI) ke-31 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 4-11 Agustus 2019. IOI



Kemenangan Siswa dalam Perlombaan Sekolah

ke-31 ini diikuti 327 peserta dari 87 negara. Indonesia menempati posisi ke-10 di antara seluruh negara peserta. Indonesia akan menjadi tuan rumah IOI ke-34 pada 2022 dan APIO 2020.

Olimpiade Kimia

Tim Indonesia meraih 2 perak dan 2 perunggu pada ajang bergengsi *International Chemistry Olympiad* (IChO 2019) Paris, Perancis. Kegiatan yang diikuti 86 negara tersebut berlangsung 21--31 Juli 2019.

Olimpiade Geografi

Tim Olimpiade Geografi Indonesia berhasil menorehkan prestasi sebagai Juara Umum dalam ajang *International Geography Olympiad* (IGeo) 2019 di Hong Kong pada 30 Juli-5 Agustus 2019. Kompetisi ini diikuti 176 peserta

dari 44 negara. Indonesia meraih 2 emas dan 2 perak.

Olimpiade Ekonomi

Pada *International Economics Olympiad* yang ke-2, Indonesia memperoleh 1 medali emas, 3 medali perak, dan 1 perunggu. Acara ini berlangsung 24-31 Juli 2019 di Saint Petersburg, Rusia.

Indonesia menduduki peringkat ke-4 besar dari 24 negara dengan jumlah peserta 133 orang.

Olimpiade Astronomi

Tim Indonesia juga ikut dalam *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics* (IOAA) 2019 yang berlangsung di Kota Keszthely, Hungaria awal Agustus 2019. Sekitar 270 siswa yang berasal dari 47 negara berpartisipasi pada IOAA kali ini. Indonesia

memperoleh 3 perunggu dan 2 perak, serta 1 *Honorable Mention*.

Debat Bahasa Inggris

Indonesia mengirimkan Tim Debat Bahasa Inggris tingkat Dunia (*World Schools Debating Championship*) pada 24 Juli-1 Agustus 2019 di Thailand. Tim Indonesia mendapatkan penghargaan khusus untuk *English Foreign Language (EFL) 4th Best Speaker, The Best Octo Finalist* dan *5th ESL Team*. Indonesia menempati peringkat 12 dari 62 negara yang berpartisipasi dalam WSDC tahun 2019.

Kesan Positif

Kinantan Arya Bagaspati, satu-satunya siswa peraih emas IMO 2019 menyatakan bangga

bisa memberi nama baik Indonesia di ajang dunia. Siswa Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah menangis terharu saat pengumuman skor dan meraih medali emas. "Ga bisa berkata-kata, rasanya kayak belum percaya. Semua kerja keras saya dan tim bisa berbuah manis, dan tentunya juga berkat bimbingan para pembina olimpiade, guru dan khususnya orang tua kita semua," katanya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung proses keberangkatan kami, khususnya pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud yang telah memfasilitasi dan mengapresiasi prestasi anak Indonesia. "Semoga Indonesia semakin baik," ucap Kinan, panggilan akrabnya.

Pencapaian Peserta Didik SMA Pada Kompetisi Sains, Seni, Penelitian, dan Bahasa Tingkat Internasional Tahun 2019

Nama Kompetisi / Olimpiade					Jumlah Medali
	Emas	Perak	Perunggu	Penghargaan Khusus	
<i>International Mathematical Olympiad (IMO)</i>	1	4	1		6
<i>International Physics Olympiad (IPhO)</i>	0	4	1		5
<i>Europe Physics Olympiad (EuPhO)</i>	1	2	2		5
<i>International Biology Olympiad (IBO)</i>	1	2	1		4
<i>International Chemistry Olympiad (IChO)</i>	0	2	2		4
<i>International Olympiad in Informatics (IOI)</i>	1	2	1		4
<i>International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)</i>	0	2	3	Honorable Mention	5
<i>International Geography Olympiad (IGeO)</i>	2	2	0		4
<i>International Economics Olympiad (IEO)</i>	1	3	1		5
<i>International Foundation for Arts and Culture (IFAC)</i>	1	0	0		1
<i>ASEAN Student Science Project Competition (ASPC)</i>	1	2	0	Special Award in Applied Science	3
<i>World Schools Debating Championship (WSDC)</i>	0	0	0	4th Best Speaker	0
Jumlah Medali	9	25	12		46

Gala Siswa Indonesia Pembentuk Karakter Siswa

*“Atas nama jajaran KONI menyambut baik dan mengapresiasi prakarsa dan inisiatif untuk menjadikan sepak bola sebagai ikon kemendikbud dalam pembinaan atlet Indonesia.”
(Mayjen TNI (Purn) Suwarno, Wakil I Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga dan Bidang Pembinaan Organisasi KONI)*





Pelaksanaan Gala Siswa

Sebagai bagian dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menggelar Gala Siswa Indonesia (GSI). Pelaksanaan GSI ini adalah salah satu program konkret yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling cocok untuk pembentukan karakter siswa karena banyak unsur karakter yang dibangun, antara lain sportivitas, disiplin, menghargai prestasi, berbagi peran, kerja tim,

dan mematuhi aturan. Hal ini sesuai dengan visi Kemendikbud dalam Rencana Strategis 2015-2019, yakni “terbentuknya insan serta ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”.

Gala Siswa Indonesia dilaksanakan berjenjang mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Pada 2019, GSI kembali digelar secara berjenjang yang pada tingkat nasional berlangsung 7-20 Oktober 2019 di Jakarta.

Antusias keikutsertaan peserta pada kompetisi Gala Siswa Indonesia yang memasuki tahun ke-2 ini begitu besar dilihat dari data pendaftaran daring (registrasi *online*), yaitu

diikuti oleh 34 provinsi dan 276 kabupaten/kota, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 247 kabupaten/kota. Partisipasi di tingkat kecamatan sebanyak 2.511 kecamatan, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.975 kecamatan.

Penghargaan

Apresiasi dan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di GSI telah dilaksanakan Kemendikbud dengan mengirimkan 18 siswa dan 4 ofisial di tingkat internasional ke Akademisi Juventus di Turin, Italia pada 27 November-5 Desember 2018. Selain itu, ada 21 siswa dan 3 pelatih terbaik berdasarkan Hasil *Talent Scouting* untuk mengikuti pelatihan sepak bola dan *Friendly Matches* pada Akademi Juventus di Tokyo, Jepang pada 13-22 Mei 2019.

Beberapa siswa yang telah berpartisipasi dalam GSI berhasil bergabung dengan tim Sepak bola nasional. Beberapa di antara mereka adalah Muhammad Valeroen, Diandra Diaz Dewari, Sheva El Vateeh, Dio Rizky Saputra, dan Aditya Daffa Al Haqi.

Saat mengikuti *Elite Camp* tahun kemarin yang merupakan pelatihan sebelum berlatih di Juventus, ilmu yang paling wajib diterapkan adalah disiplin ibadah, disiplin waktu dan *attitude* terhadap penonton, wasit, termasuk semua lingkungan yang berkaitan dengan kompetisi sepak bola. Tidak hanya peserta, pelatih juga harus mampu mengajarkan organisasi permainan yang baik dan mampu

meningkatkan karakter melalui sepak bola. Hal ini sangat penting dilakukan agar serangan-serangan yang dilakukan lebih efektif dan membuahkan hasil.

Salah seorang pelatih yang ikut ke Juventus, Nurul Huda, mengatakan bahwa dari program ini ada pesan yang sangat mendalam, yaitu di sana mereka belajar arti kebersamaan. Selama sepuluh hari mereka saling membantu sehingga kesan yang ditangkap mereka sudah merasa menjadi satu keluarga. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendikbud yang sudah memberikan perhatian serius terhadap pembinaan sepak bola di Indonesia," kata Nurul Huda.

Menurutnya dengan adanya ajang GSI SMP ini akan membuka kesempatan kepada anak-anak yang memiliki potensi untuk mengejar mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional.



Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak

Pelibatan Keluarga dalam Pendidikan

“Melalui keluarga, kita membentuk dasar-dasar karakter manusia terutama karakter dan kepribadian anak-anak kita, generasi penerus bangsa, penerima estafet kepemimpinan bangsa.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama memiliki peran penting dalam menyiapkan masa depan anak-anak di masa mendatang. Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui kemitraan dengan satuan pendidikan dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep Tri Sentra Pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara.

Untuk mewujudkan Tri Sentra Pendidikan beberapa langkah telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikkel) telah mengembangkan program-program pelibatan orang tua, di antaranya adalah Gerakan Mengantarkan Anak di Hari Pertama Sekolah, membentuk Paguyuban Orang Tua guna memperkuat komunikasi antara orang tua dan wali kelas. Peningkatan



Orang Tua Sebagai Guru Utama Siswa

kompetensi dan wawasan orang tua dalam mendidik serta mengasuh anak yang dimulai sejak dalam kandungan sampai anak usia remaja dilakukan melalui program Kelas Orang tua. Selain itu, sebagai wujud keterlibatan orang tua bisa dituangkan dalam sebuah kegiatan Pentas Akhir Tahun. Tujuannya untuk memberikan ruang berekspresi minat dan bakat anak sekaligus sebagai ajang untuk saling memberikan apresiasi kepada peserta didik, orang tua, dan pelaku pendidikan lainnya.

Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Salah satu program prioritas nasional adalah pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka menurunkan angka stunting. Pencegahan stunting telah menjadi program prioritas nasional. Hingga 2019, sosialisasi ini telah dilaksanakan di 160 kabupaten/kota dengan sasaran mencakup hampir 33 ribu desa atau sekitar 99 ribu orang.

Untuk mengimplementasikan program kelas orang tua (*parenting class*), Direktorat Bindikkel menjadikan pengasuhan 1.000 HPK sebagai materi yang diajarkan ke orang tua di PAUD untuk satuan pendidikan, desa dan kegiatan

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu, Direktorat Bindikkel juga mendistribusikan buku dan lembar balik seri pengasuhan sebagai bahan ajar dan pegangan bagi orang tua dan tenaga pendidik PAUD.

Mendorong Minat Baca Anak

Untuk mendukung inisiatif dan peran keluarga dalam meningkatkan minat baca anak melalui pembiasaan di rumah, di satuan PAUD, dan di masyarakat, serta meningkatkan *bonding* antara orang tua dan anak, Direktorat Bindikkel juga menyelenggarakan Gerakan Nasional Membacakan Buku (Gernas Baku). Sasaran Gernas Baku adalah orang tua, warga sekolah dan masyarakat. Direktorat Bindikkel menyelenggarakan Gernas Baku untuk anak usia dini.

Puncak acara kegiatan Gernas Baku untuk tahun 2019 diselenggarakan pada 27 Juli 2019. Pada acara puncak, orang tua membacakan buku kepada anak secara serentak di satuan PAUD seluruh Indonesia. Dirjen PAUD dan Dikmas Harris Iskandar membacakan buku berjudul “Piknik di Kumbinesia” kepada anak-anak PAUD KM 0 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sabtu, 27 Juli 2019.

Puncak peringatan Gernas Baku diselenggarakan secara bersamaan di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Mataram, dan Papua. Acara di ketiga provinsi ini terhubung melalui telekonferensi. Di Jakarta, Gernas Baku juga dihadiri Roslan Othman, Direktur *Malaysia Tourism Promotion Board*.

Kegiatan ini terbukti memberi manfaat bagi peserta. “Gernas Baku membuat saya makin akrab dengan anak. Kegiatan ini sangat positif dan dapat meningkatkan minat baca anak,” kata Hadi Listiana, orang tua peserta didik TK Universal Ananda, Kendal, Jawa Tengah.

Pendapat lainnya dikemukakan Ragil, orang tua peserta didik di BAI PAUD Rumah Cendikia, Bogor, Jawa Barat. “Acaranya seru meski Gernas Baku merupakan acara yang simbolik, acara itu penting. Realitasnya adalah kehidupan sehari-hari orang tua dan guru untuk rutin membacakan buku atau membiasakan baca pada anak,” katanya.

Apresiasi Pendidikan Keluarga

Pada tahun 2019 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga untuk kali ketiga akan memberikan apresiasi kepada 34 orang tua dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai inspirator pendidikan keluarga di Indonesia. Apresiasi ini diberikan kepada orang tua yang dinilai mampu mendidik anak-anaknya sehingga berprestasi dan berkarakter di tengah keterbatasan ekonomi, sosial, maupun fisik.

Selain itu, untuk memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan keluarga juga diberikan Apresiasi Sekolah Sahabat Keluarga.

Pendidikan Keluarga Melalui Daring

Seiring dengan perkembangan zaman di era digital, perilaku masyarakat modern menginginkan semua akses informasi diperoleh



Pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk mencegah *stunting*

dengan mudah dan cepat, termasuk dalam pendidikan keluarga. Untuk menjawab hal tersebut, laman sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id telah menyajikan berbagai konten artikel, video, buku pembelajaran, dongeng, dan lagu mengenai pengasuhan dan pendidikan anak yang bisa diakses oleh masyarakat khususnya para orang tua dengan cepat.

Konten-konten ini disajikan dengan kemasan yang sederhana dan ringkas untuk

memudahkan masyarakat memahami konten tersebut. Sebagai salah bentuk penerimaan masyarakat atas konten laman, pada tahun 2019 laman sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id mendapatkan penghargaan nomor tiga diajang *Indonesia Contents Marketing Award kategori The Best Content Marketing Implementation in Government & State Owned Enterprises*.



Siswa Semangat Mengikuti Proses Belajar Mengajar Pasca Bencana

Mengembangkan Karakter Siaga Bencana

*"Kita 100% mendukung kebijakan-kebijakan terkait program Penguatan Pendidikan Karakter karena memberikan hasil positif baik bagi prestasi dan kemandirian siswa."
(Jamaluddin Syarif, Ketua Komite SMPN 2 Kota Batam)*

Tsunami di Aceh pada tahun 2004, gempa Yogyakarta tahun 2006, gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018, banjir bandang di Papua, serta rentetan peristiwa bencana alam lainnya sepanjang tahun 2019 telah banyak

menelan korban jiwa dan merugikan banyak pihak baik materiel maupun moril terutama di bidang pendidikan. Mengingat kondisi Indonesia berada di kawasan rawan bencana, konsep Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

yang bersifat holistik dan fleksibel diperluas dengan memasukkan materi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara terintegrasi.

Program baru memiliki tujuan agar tercipta Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dalam hal ini, satuan pendidikan aman bencana ditandai dengan kondisi di tempat kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah memiliki pemahaman dan kemampuan dalam kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana diharapkan menjadi solusi dalam menanggulangi dampak bencana yang terjadi di suatu daerah.

Program Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi SPAB memiliki tujuan tercapainya upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat mengenalkan secara lebih dini kepada seluruh warga sekolah terutama peserta didik. Selain itu, PPK yang terintegrasi SPAB diharapkan dapat menjadi indikator untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan aman dari bencana dan bukan merupakan tempat yang dapat membahayakan kehidupan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Bimbingan Teknis

Pada 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengimbasan Program Penguatan Pendidikan Karakter bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah terintegrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di 140 kabupaten/

kota seluruh Indonesia. Peserta yang lulus pada bimtek ini selanjutnya difasilitasi untuk menyebarluaskan PPK ke satuan pendidikan yang lain di sekitarnya.

Muhammad Yusuf Pohan, Pengawas Sekolah Kabupaten Merauke, Papua, mengungkapkan apresiasinya untuk program ini. "Kegiatan ini selain sangat baik juga sangat inspiratif dan amat mungkin diterapkan di Merauke," ujarnya.

Sementara itu, Hadi Sudibjo, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menyatakan bahwa dengan adanya PPK diharapkan peserta didik mempunyai integritas dan kepercayaan diri sehingga tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang tidak baik di kemudian hari.

Lain lagi dengan Jamaluddin Syarif, Ketua Komite SMPN 2 Kota Batam, yang menyatakan bahwa mereka 100% mendukung kebijakan-kebijakan terkait program Penguatan Pendidikan Karakter karena memberikan hasil positif baik bagi prestasi dan kemandirian siswa.

Terkait dengan program pengimbasan PPK, Evy Purwati D, kepala sekolah di Malang, Jawa Timur, menyatakan bahwa dirinya bersemangat sekali untuk menularkan materi bimtek kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah yang belum dilatih melalui kegiatan di MKKS atau MKPS di kabupaten/kota. Dengan demikian, kesadaran warga sekolah tentang pentingnya kewaspadaan bencana semakin meningkat. Pada akhirnya, jika sebuah bencana terjadi, jatuhnya korban akan bisa dicegah.

Perubahan Fundamental Kurikulum 2013

Kompetensi Dasar dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti sebagai elemen dalam pengorganisasian kompetensi dasar untuk seluruh mata pelajaran pada tingkat kelas.



Perubahan fundamental Kurikulum 2013 terjadi pada tahun 2016 dan diimplementasikan sampai saat ini (2019). Secara umum, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan agar terjadi keselarasan antara ide, desain, dokumen, dan pelaksanaannya. Secara khusus, perbaikan Kurikulum 2013 bertujuan menyelaraskan KI-KD, silabus, inspirasi mata pelajaran, pembelajaran, penilaian, dan buku teks.

Perbaikan KI-KD Mata Pelajaran

Perbaikan KI-KD dilakukan melalui penataan sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran dan penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Berpikir tingkat tinggi yang selama ini hanya di SMA saat ini dimulai sejak SD.



Pembelajaran Spiritual, Pelaksanaan Kurikulum 2013

Selain itu, perbaikan juga dilakukan melalui reformulasi dan reorganisasi KD, antara lain (1) perubahan pendekatan pengembangan KD pada Bahasa Indonesia menjadi berbasis teks; (2) adanya penambahan KD; (3) pengurangan KD; (4) menyatukan dua atau lebih KD menjadi satu KD, atau mengembangkan satu KD menjadi beberapa KD; (4) pengaturan ulang urutan dan posisi KD pada kelas yang sama dan pada kelas yang berbeda; dan (5) perubahan

redaksional kalimat dan penyesuaian kata kerja kompetensi.

Perbaikan Silabus

Perbaikan silabus dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut. (1) penataan penulisan dan format sehingga mudah dipahami oleh guru; (2) penyajian yang lebih efisien (lebih dari 100 halaman menjadi rata-rata 20 halaman per mata pelajaran) tanpa mengurangi substansi

dan tetap konsisten memperhatikan lingkup serta urutan tatanan pengetahuannya; (3) pemberian eksplanasi yang lebih jelas terhadap karakteristik mata pelajaran, lingkup kompetensi, dan materi pembelajaran; (4) pernyataan pendekatan pembelajaran 5M tidak tertulis eksplisit, sehingga memberi ruang kepada guru yang kreatif dapat mengembangkannya lebih jauh sesuai kepentingan pembelajaran; (5) kontekstualisasi pembelajaran; dan (6) disusunnya silabus mata pelajaran di SD dari Kelas I – VI (sebelumnya semua berupa Silabus Tematik). Bagi sekolah dan guru yang kreatif memiliki ruang untuk mengembangkan pembelajaran tematik sesuai kebutuhan dan tingkat perkembangan anak.

Perbaikan Pembelajaran

Berdasarkan hasil *monitoring* pelaksanaan Kurikulum 2013 dan masukan publik terdapat kekeliruan pemahaman tentang penerapan pendekatan pembelajaran saintifik (5M), yakni Mengamati, Menanya, Mengumpulkan informasi/mencoba, Mengasosiasi, dan Mengomunikasikan dipahami sebagai prosedur baku dan digunakan sebagai satu-satunya pendekatan dalam melaksanakan pembelajaran untuk semua mata pelajaran.

Hal ini menyulitkan guru dalam penerapannya untuk mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, pada perbaikan dokumen Kurikulum 2013 ditekankan bahwa pendekatan saintifik bukan prosedur baku dan bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Pengalaman belajar dan kompetensi harus dilatih secara

terus menerus. Hal ini akan mendorong setiap peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bersikap ilmiah dalam kehidupan.

Guru diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menerapkan berbagai model, seperti model pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), pembelajaran penemuan (*discovery learning*) dan pembelajaran tematik terpadu. Dengan kata lain, guru menekankan pada variasi pengalaman-pengalaman belajar yang dilakukan peserta didik.

Perbaikan Penilaian

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu kepada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan nonkurikuler/ekstrakurikuler.

Penilaian sikap sesungguhnya bukan memberikan justifikasi pada posisi sikap peserta didik, melainkan sebagai dasar untuk pembinaan agar peserta didik memiliki sikap spiritual dan sosial sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum. Perbaikan penilaian dilakukan terhadap skala penilaian. Skala penilaian yang semula menggunakan skala 1 – 4 diubah menjadi 0 – 100.



Penumbuhan Jiwa Cinta Laut sejak dini

Menumbuhkan Jiwa Cinta Laut

Pada 2019, kurikulum kemaritiman lebih fokus kepada implementasi dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta budaya sekolah.

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemendikbud telah menyelenggarakan program “Model Rintisan Implementasi Kurikulum dan Pembelajaran Sesuai Konteks Daerah” sejak tahun 2018. Salah satu muatan yang dipilih adalah Kurikulum Muatan Kemaritiman. Muatan ini dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dan Kota Tegal, Jawa Tengah. Pada setiap kabupaten/kota

tersebut ditunjuk 6 satuan pendidikan terdiri dari 1 TK-PAUD, 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK.

Kurikulum muatan kemaritiman ini sudah dilaksanakan di 32 provinsi lainnya, yang merupakan hasil kerja sama antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Pada masing-masing provinsi dipilih 1 kabupaten/kota dengan 4 satuan pendidikan sebagai model rintisan

terdiri dari 1 TK-PAUD, 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA.

Program rintisan ini merupakan bagian dari rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia tahun 2016-2019, terkait dengan karakteristik geografi Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dan kemaritiman sebagai sumber kehidupan. Pada tahun 2019, pelaksanaan program ini lebih fokus kepada implementasi dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta budaya sekolah.

Implementasi Kurikulum Muatan Kemaritiman mendapat sambutan hangat dari Kepala SDN Pulau Kelapa 02 Pagi, Kepulauan Seribu Rustini. "Kurikulum muatan kemaritiman sesuai dengan karakteristik letak geografis sekolah kami, yakni di Kepulauan Seribu," katanya. Ia berharap kurikulum kemaritiman ini akan terus dipertahankan dan dikembangkan di masa mendatang.

Kurikulum kemaritiman merupakan kurikulum pendidikan yang berdasarkan wawasan sejarah maritim, nilai budaya maritim, dan potensi kemaritiman. Kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan cinta tanah air dan jiwa bela negara yang berkarakter maritim dalam rangka membangun manusia Indonesia unggul dan berdaya saing. Di masa mendatang, Indonesia ingin menjadi bangsa dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Secara khusus, kurikulum muatan kemaritiman bertujuan agar peserta didik memiliki sikap cinta tanah air dan berjiwa bela negara dengan

karakter maritim, yaitu tangguh, berpikir kritis, berjiwa pemimpin, bertanggung jawab, dan adaptif. Peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan kemaritiman dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi kemaritiman secara berkelanjutan. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu memahami sejarah maritim dan melestarikan budaya maritim Indonesia.

Kurikulum kemaritiman memiliki karakteristik, yaitu dimulai sejak usia dini, berlaku secara nasional, bersifat konstruktif karena membangun rasa percaya diri dan kemampuan pada peserta didik termasuk di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) untuk mengelola potensi kemaritiman di daerahnya. Karakteristik lainnya adalah memiliki kekhasan rakyat Nusantara karena didasarkan pada ideologi Pancasila serta sejarah dan budaya Indonesia sebagai bangsa maritim. Kurikulum bersifat inovatif dan berwawasan lingkungan. Kurikulum juga mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengelola potensi kemaritiman berbasis inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan. Proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Implementasi kurikulum kemaritiman terdiri atas empat model, yaitu kontekstualisasi/warna mata pelajaran, pengayaan/integrasi dalam mata pelajaran, ekstrakurikuler dan budaya sekolah, serta mata pelajaran tersendiri.



Anak-Anak Antikorupsi

Agen Antikorupsi Anak dan Wanita

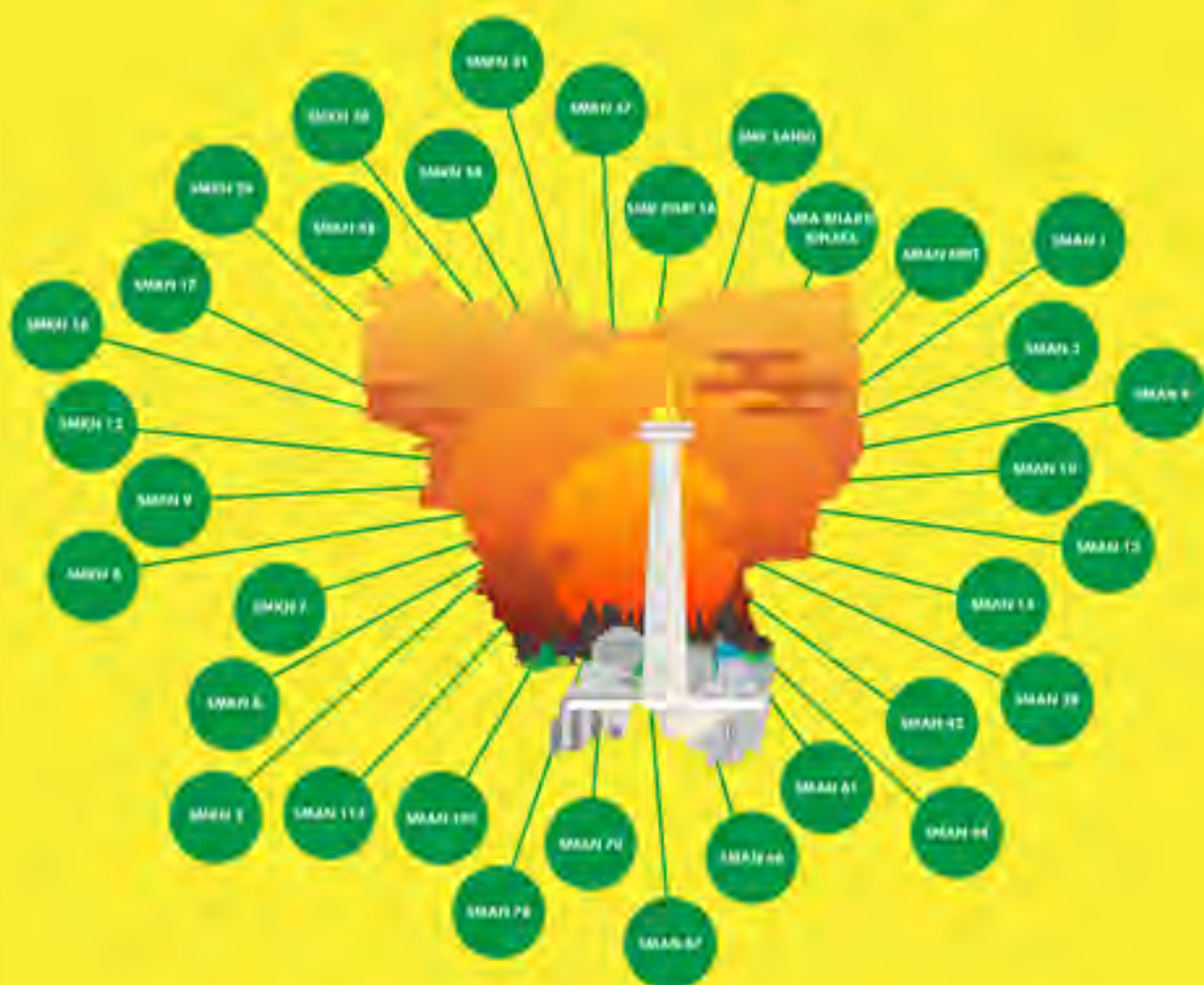
Gerakan antikorupsi dimulai sejak anak-anak usia dini yang melibatkan peran dari orang tua, sekolah, dan masyarakat secara umum.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tugas bersama dari seluruh komponen bangsa, termasuk oleh keluarga. Gerakan antikorupsi dimulai sejak anak-anak usia dini yang melibatkan peran dari orang tua, sekolah dan masyarakat secara umum. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan korupsi akan hilang dari bumi Indonesia.

Agen Anak Antikorupsi

Generasi muda memiliki potensi sebagai agen perubahan. Di masa mendatang generasi muda akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik, dan pembuat kebijakan di masa depan. Mereka juga bisa menjadi agen perubahan dalam pencegahan korupsi. Kemendikbud bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan

Agen SAAK Prov. DKI Jakarta



Korupsi membangun program “Saya Anak Antikorupsi” untuk mencegah korupsi lewat generasi muda.

Kegiatan ini bertujuan membentuk tunas-tunas antikorupsi di kalangan siswa/siswi di SMA dan SMK yang diharapkan dapat menjadi teladan/ contoh serta menularkan semangat antikorupsi di sekolah. Adapun sasaran kegiatan ini adalah siswa/siswi SMA dan SMK yang menjadi pengurus OSIS pada provinsi yang menjadi target kampanye yaitu sebanyak 70 orang siswa/siswi di Provinsi DKI Jakarta, 35 orang siswa/siswi di Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan) dan 35 Orang siswa/siswi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar). Aktivitas kegiatan ini adalah berupa:

- Memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa.
- Mengajak siswa untuk melakukan tindakan/ perbuatan antikorupsi
- Mengajarkan siswa cara menyiapkan program/kegiatan antikorupsi.
- Menyosialisasikan program/kegiatan antikorupsi di sekolah.

“Kesadaran generasi muda akan bahaya korupsi harus terus digalakkan. Ironisnya semakin sedikit generasi muda yang peduli soal antikorupsi. Regenerasi aktivis antikorupsi mengkhawatirkan,” ujar Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW.

Diharapkan kerja sama dari unit utama untuk

menyelenggarakan program SAAK. Setidaknya selalu menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan anak dari usia PAUD, dasar, dan menengah. Pada prinsipnya pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sedini mungkin dan seluas-luasnya. Dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan agar tercipta generasi cerdas, berintegritas, berakhlak mulia, dan berkarakter.

Dukungan Masyarakat

Program ini mendapat dukungan dari Meira Anastasia, penulis, sutradara, dan produser film, “Cara yang paling gampang untuk mendidik anak agar jujur adalah dengan menjadi orang tua yang jujur.” Ujarnya.

Karyaningsih, mantan Inspektur Itjen Kemendikbud memberi dukungan dengan pantun yang berbunyi “Sarapan pagi makan nasi, lauk ikan jadi rutinitas. Mari perempuan seluruh negeri, cegah korupsi dan jaga integritas”.

Wida Muhadjir Effendy (Istri Mendikbud Muhadjir Effendy) menyatakan bahwa peran perempuan dalam pendidikan antikorupsi di keluarga, yaitu memberi contoh/teladan, memotivasi anak untuk menerapkan nilai-nilai integritas serta mendisiplinkan anak untuk menerapkan nilai-nilai integritas.

Riawati Anggraeni, auditor Itjen Kemendikbud berharap agar ibu-ibu selalu menjaga diri dan keluarganya dari bahaya perilaku koruptif sehari-hari yang merupakan benih dari karakter anak-anak kita di masa mendatang.



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

SAYA, PEREMPUAN ANTI KORUPSI!



SEJARAH

Gerakan ini diluncurkan pada 11 April 2014. Pergerakannya dimulai dengan bentuk forum diskusi dan bedah buku. Mawarumbatannya adalah Ibu Mentha Hetta, dan Kartika Sim (Seksi KPI). Ibu Yoyah dan NTB perempuan yang berani menyuarakan tuntut pada praktek korupsi dalam pemerintahan. Buray Musaddas perempuan KPK saat itu, bedah buku 'Saya, Perempuan Anti Korupsi' dilakukan oleh Buray Musaddas dan Gandhi Laksamana Ramaputra (Seksi PM UI).

PEREMPUAN MAMPU MEMUTUS LINGKARAN KORUPSI



Lingkaran korupsi akan terputus dan berputar dengan cepat, jika ada anti korupsi, ada gerakan dengan perempuan dan masyarakat sebagai kesatuan.



Ada anggota memiliki terdapat atau masuk dalam lingkaran korupsi, artinya sudah ada ancaman dan tidak ada ancaman keluarga, maka tidak ada putaran lingkaran korupsi. Itu akan berhenti dan berbalik menjadi lingkaran integritas.

Korupsi cenderung berlingkar, sehingga membentuk lingkaran yang berputar makin cepat dan sulit untuk berhenti. Selain keluarga -istri, anak-anak, orang tua, kakak-adek- bisa masuk dalam lingkaran korupsi.



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ZI-WBK

KORWAS

ijepk.kemdikbud.go.id

@ijepk.kemdikbud

ijepk.kemdikbud

ijepk.kemdikbud



Menciptakan Ekosistem Pendidikan yang Berkeadilan



Sistem zonasi pendidikan merupakan proses reformasi dan restorasi pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. pemerintah melakukan program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, Beasiswa Unggulan untuk menjamin pendidikan yang berkeadilan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan akreditasi dan pengawasan ujian untuk menjamin pendidikan yang berkualitas.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015–2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berkeadilan, Kemendikbud telah melaksanakan sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada perluasan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Setidaknya ada enam hal yang telah dilaksanakan oleh Kemendikbud sebagai wujud dari upaya menciptakan ekosistem pendidikan berkeadilan. *Pertama*, sistem zonasi pendidikan—meminjam istilah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, merupakan “puncak reformasi dan restorasi pendidikan” dan juga merupakan cetak biru Kemendikbud dalam mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan, sekaligus mencari formula penyelesaiannya. Tujuan utama zonasi pendidikan adalah pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, baik pemerataan dari sisi kedekatan domisili siswa dengan sekolah, kemudahan akses pendidikan, maupun pemerataan guru berkualitas di semua sekolah. Kebijakan zonasi pendidikan juga memantik peran kebudayaan yang mengakar dan bertumbuh di lingkungan masyarakat

Kedua, Program Indonesia Pintar (PIP) yang digulirkan pemerintah adalah salah satu program prioritas dalam mendukung butir Kelima Nawacita, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar”. Dengan PIP diharapkan faktor sosial ekonomi tidak lagi menjadi kendala bagi rakyat dalam mendapatkan pendidikan. Makin banyaknya jumlah masyarakat berpendidikan menengah diharapkan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu sejajar dengan negara-negara lain di era persaingan global.

Ketiga, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikururkan Kemendikbud sejak tahun 2005. Mulai tahun 2019 bertambah lagi jenis bantuan dana BOS kepada sekolah-sekolah, yakni melalui BOS

Afirmasi dan BOS Kinerja. BOS afirmasi diberikan kepada sekolah-sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang akibat kondisi wilayahnya memerlukan biaya operasional yang relatif lebih tinggi dari sekolah di wilayah lain. Selain menerima BOS reguler, sekolah di daerah tertinggal/sangat tertinggal juga menerima BOS Afirmasi. Sementara itu, BOS Kinerja diberikan sebagai penghargaan kepada sekolah yang memiliki kinerja mutu pendidikan yang baik. Besaran BOS Kinerja yang diterima sekolah ditentukan juga berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Keempat, program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) yang merupakan bagian dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKP memberikan pemahaman dan keterampilan tentang pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembiasaan ini akan membuat peserta didik terbiasa berpikir kritis dan menjadi problem solver di lingkungan belajarnya apabila dilakukan secara terus menerus. PKP dilaksanakan berbasis zonasi yang memungkinkan guru meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan sekolah sehingga guru tetap bisa mengajar. Geliat pelatihan berbasis zonasi tersebut turut menghidupkan komunitas guru, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai komunitas belajar dan sarana komunikasi guru dalam bertukar pengalaman terbaik.

Kelima, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Pentingnya akreditasi satuan pendidikan menjadi pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Keberadaan Badan Akreditasi Nasional (BAN) merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah atas mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Keberadaan BAN PAUD dan PNF menyebabkan tersusunnya peta mutu pendidikan PAUD dan PNF.

Pemerintah dapat mengembangkan satuan pendidikan melalui program-program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Keenam, Program Beasiswa Unggulan merupakan wujud tanggung jawab Kemendikbud untuk menjamin masyarakat berprestasi yang tidak memiliki cukup biaya agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Pilihan kuliah mulai dari jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktor (S3), baik di perguruan tinggi dalam negeri (akreditasi minimal B) maupun luar negeri. Program Beasiswa Unggulan diselenggarakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan bantuan pendidikan dan pelatihan, baik melalui jalur gelar maupun nongelar. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, program ini diutamakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan sehingga pembiayaan diutamakan untuk bidang-bidang yang relevan dengan pengembangan pendidikan dan kebudayaan.

Ketujuh, Ujian Nasional (UN) adalah sistem evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan secara nasional. Pengawas ujian berperan sebagai penjaga integritas ujian. Ikhtiar Kemendikbud untuk menggunakan hasil UN sebagai salah satu instrumen peningkatan dan perbaikan mutu pembelajaran akan terkendala apabila pengawas ujian tidak menjalankan fungsi kepengawasannya dengan baik. Hal itu terindikasi dari masih adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta saat ujian berlangsung.



DAFTAR ARTIKEL BAB 4

Zonasi Pendidikan:	130
Percepatan Pemerataan Pendidikan yang Adil dan Berkualitas	
Program Indonesia Pintar:	136
Pemberian Kesempatan Belajar bagi Seluruh Anak Indonesia	
Bantuan Operasional Sekolah:	144
Perluasan Akses untuk Meningkatkan Mutu	
Menyiapkan Kompetensi Guru Abad 21 Berbasis Zonasi	158
Mengembangkan SDM Unggul Melalui Akreditasi PAUD dan PNF	163
Menjaring Masyarakat Berprestasi hingga Daerah 3T	168
UNBK Upaya Peningkatan Integritas	173
Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia	175
Pengawas: Pengawal Ujian Nasional Yang Berintegritas	177

Zonasi Pendidikan:

Percepatan Pemerataan Pendidikan yang Adil dan Berkualitas



*"Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan."
(Ki Hajar Dewantara)*

Ki Hajar Dewantara akan bangga dan senang andai dapat menyaksikan gagasannya tentang Tripusat Pendidikan diwujudkan dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang diterima anak berasal dari pergaulan anak di tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, perguruan, dan masyarakat. Lingkungan perguruan pada era saat ini kurang lebih sama dengan pendidikan formal melalui sekolah/madrasah.

Satu di antara kebijakan Kemendikbud yang merupakan implementasi dari Tripusat Pendidikan adalah zonasi pendidikan. Zonasi pendidikan memiliki prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak mendapatkan pengalaman belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat karena dekatnya lokasi rumah dan sekolah. Sekolah berperan besar mengelola dan mengintegrasikan pengalaman belajar anak di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.



Sistem Zonasi Pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang heterogen

Dekatnya domisili peserta didik dengan sekolah memiliki sejumlah manfaat, di antaranya, efisiensi biaya transportasi dan efisiensi waktu perjalanan rumah-sekolah sehingga anak memiliki waktu lebih banyak untuk bermain dan belajar di lingkungan rumahnya. Hal itu juga akan mendorong meningkatnya partisipasi, peran, dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan.

Keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik, akan makin menguat. Orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat akan makin mudah untuk berinteraksi dan bekerja sama untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik.

Zonasi: Puncak Reformasi dan Restorasi Pendidikan

Selama berpuluh-puluh tahun masyarakat terbiasa dengan pengelompokan sekolah favorit-nonfavorit dan sekolah unggulan-nonunggulan. Jauh sebelum era kemerdekaan, pada masa penjajahan Belanda, kesempatan anak dapat mengenyam pendidikan ditentukan

oleh kasta, kedudukan, status ekonomi, dan keturunan.

Langgengnya sekolah favorit dan sekolah unggulan tidak lepas dari bagusnya *input* calon siswa yang mayoritas memiliki prestasi bagus. Sementara itu, di sekolah lain yang berpredikat nonunggulan, sebagian besar siswanya merupakan lulusan dari sekolah nonunggulan dengan nilai UN yang rendah pula. Pemerintah, melalui sistem zonasi pendidikan, berupaya menghapus pengastan dan diskriminasi sekolah yang menjadikan penumpukan sumber daya manusia berkualitas di satu sekolah atau satu wilayah. Sistem zonasi menjadikan *input* siswa dalam satu sekolah lebih heterogen, baik prestasi akademis dan nonakademis, karakter, maupun sosial ekonomi keluarga siswa. Guru dan kepala sekolah dituntut lebih kreatif dan inovatif menangani siswa yang heterogen.

“Sistem zonasi pendidikan ini merupakan puncak reformasi dan restorasi pendidikan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi pendidikan merupakan cetak biru Kemendikbud dalam

Zonasi Pendidikan

STRATEGI PEMERATAAN PENDIDIKAN



mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan, sekaligus mencari formula penyelesaiannya.

Tujuan utama zonasi pendidikan adalah pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, baik pemerataan dari sisi kedekatan domisili siswa dengan sekolah, kemudahan akses pendidikan, maupun pemerataan guru berkualitas di semua sekolah.

Mengenai persoalan anak putus sekolah, misalnya, pemerintah daerah dapat mendeteksi lebih dini anak putus sekolah ini melalui terintegrasinya data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kerja sama Kemendikbud dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam data nasional tercatat sebanyak 223.882 anak putus sekolah (Neraca

Pendidikan Daerah, 2018). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah membuat sistem zonasi pendidikan dapat menurunkan angka anak putus sekolah secara signifikan.

Kebijakan zonasi pendidikan juga memantik peran kebudayaan yang mengakar dan berkembang di lingkungan masyarakat. Berbagai aktivitas kebudayaan dapat tetap hidup dan berperan besar memberikan pengalaman dan pembelajaran bermakna bagi pembentukan karakter anak. Aktivitas kebudayaan diharapkan dapat menumbuhkan cinta dalam diri siswa pada daerah tempat tinggalnya. Siswa tidak melupakan identitas dan jati dirinya sebagai individu yang tumbuh besar di wilayah itu.

Selain itu, zonasi pendidikan juga mendorong



Zonasi Pendidikan dapat Mendekatkan Jarak Sekolah dengan Rumah Anak

sekolah-sekolah untuk saling berbagi sumber daya pendidikan, seperti fasilitas laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta sarana dan prasarana lain yang dapat dipergunakan bersama antarsekolah dalam satu zonasi. Sebagian besar sarana dan prasarana sekolah adalah barang milik negara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sehingga pemanfaatannya tidak hanya oleh satu sekolah saja. Sekolah harus membuka diri dan mendorong pemanfaatan fasilitas secara bersama-sama yang tentunya disertai pengelolaan yang baik dan transparan.

Zonasi juga memungkinkan berbagi sumber daya guru. Selama ini banyak guru menumpuk di sekolah favorit sehingga sekolah nonfavorit kekurangan guru berkualitas. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan akan mengeluarkan kebijakan pertukaran guru sesuai dengan kebutuhan. Guru di sekolah favorit dapat ditugasi

mengajar di sekolah nonfavorit. Begitu juga sebaliknya, guru-guru di sekolah nonunggulan dapat mengajar di sekolah unggulan. Kualitas proses pembelajaran akan ditingkatkan melalui pelatihan guru dalam zonasi yang berfokus pada masalah dan kebutuhan tiap-tiap zonasi.

Integrasi Zonasi Mutu Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2019 Kemendikbud, telah mengembangkan laman zonasi pendidikan di semua daerah se-Indonesia yang terintegrasi dalam sistem yang dapat diakses bersama, yakni zonasi.kemdikbud.go.id. Pemangku kepentingan pendidikan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat melihat peta zona tiap-tiap daerah, kondisi siswa yang akan lulus, ketersediaan daya tampung, jumlah satuan pendidikan dalam satu zona, kebutuhan guru, sarana dan prasarana, prioritas pembinaan, dan intervensi program dan pendanaan.

Tujuan PPDB Berbasis Zonasi

- a. Mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekolah
- b. Meningkatkan keragaman peserta didik di suatu sekolah
- c. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri
- d. Meningkatkan akses layanan pendidikan pada kelompok rentan
- e. Mendorong kreativitas pendidik di kelas yang lebih heterogen
- f. Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru
- g. Membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran
- h. Mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan
- i. Mencegah penumpukan SDM berkualitas dalam satu wilayah



Badan Penelitian dan Pengembangan merumuskan integrasi data dan informasi pendidikan dan kebudayaan ke dalam sistem zona aktivitas pendidikan-kebudayaan-kebahasaan, yaitu melalui zonasi mutu pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan zonasi pendidikan dan kebudayaan dikembangkan dengan tiga strategi, yakni strategi percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan (integrasi pembangunan); strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten-kota-provinsi, sampai dengan pusat sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; serta strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.

Artinya, dalam konsep pengembangan yang lebih luas, zonasi bukan lagi merupakan suatu

sistem yang menjawab pertanyaan bagaimana penerimaan peserta didik baru, tetapi lebih ditekankan untuk menjawab pertanyaan bagaimana langkah selanjutnya setelah siswa menyebar dengan kondisi satuan pendidikan belum merata dari segi lokasi, kuantitas, dan kualitas, termasuk kompetensi guru-gurunya.

Untuk mencapai pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan, Balitbang menyusun dan mengembangkan tiga tahapan analisis yang saling terkait dengan penyusunan zona dan pengelolaan pendidikan berbasis zona. Tahapan tersebut adalah tahap klasifikasi, tahap peningkatan kapasitas, serta tahap pemantauan.

Tahap klasifikasi berpijak pada prioritas dengan indikator skala nasional, yakni akreditasi sekolah, hasil Ujian Nasional (UN) dengan pendekatan indeks UN, hasil penjaminan mutu pendidikan (PMP), serta hasil Uji Kompetensi

Guru (UKG). Dalam penentuan sekolah untuk masuk sebagai nominasi pusat zona diperhatikan empat indikator nasional tersebut, yakni akreditasi, penjaminan mutu pendidikan, hasil UN, dan hasil UKG. Keempat faktor tersebut merupakan indikator evaluasi capaian pengelolaan, pembinaan, pembelajaran, dan pendidikan yang diberikan pada setiap tahun, baik di tingkat peserta didik maupun sekolah.

Pada awalnya ditetapkan 1.927 zona dari 2.916 satuan pendidikan. Setelah adanya koordinasi dengan kabupaten/kota dan provinsi, ditetapkan 2.578 zona pendidikan. Tahap penentuan zonasi diawali dengan penentuan jumlah zona SMA dan SMA terpilih. Dalam penentuan wilayah zonasi diperhatikan pula jarak SMA lain. Zonasi SMA kemudian dikoreksi dengan sebaran SMP di kabupaten/kota. Zonasi SMA juga dikoreksi dengan sebaran SD di kabupaten/kota. Pada tahap akhir, hasil zonasi SMA dikoreksi dengan

sebaran SMP dan SD di kabupaten/kota.

Aplikasi atau laman zonasi pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan rujukan pemerintah untuk melakukan rotasi dan distribusi kebutuhan guru di sekolah. Pemenuhan ruang kelas juga dapat dihitung dan dipetakan berdasarkan aplikasi zonasi pendidikan. Hal itu akan mempermudah pembuatan kebijakan dan pemberian bantuan anggaran sesuai dengan prioritas.

Pada tahun 2019 Kemendikbud juga membentuk Tim Implementasi Zonasi atau Satuan Tugas Zonasi yang terdiri atas pejabat eselon I, II, dan III yang dibantu unit pelaksana teknis Kemendikbud untuk mendampingi pemerintah daerah. Tim tersebut memberikan masukan terkait dengan kebijakan pemenuhan guru, rotasi guru, dan redistribusi guru serta kebijakan pemberian bantuan pemenuhan sarana dan prasarana.

zonasi.data.kemdikbud.go.id/





Penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar: Pemberian Kesempatan Belajar bagi Seluruh Anak Indonesia

Target penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah 20,3 juta anak yang terdiri atas 17,9 juta anak yang berada di bawah tanggung jawab Kemendikbud dan sisanya 2,4 juta anak yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama

Drumben Siswa SD Negeri Kalipare 4, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, menyambut kedatangan sekaligus mengiringi kepulangan Syahrul Ramadhan pada lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional Tahun

2017. Ia sukses memboyong dua medali emas dari cabang lari katak dan lari sambung serta satu medali perak dari cabang lari zig-zag.

Kenangan Syahrul menjadi jawara O2SN itu begitu membekas. Apalagi, ia tidak seperti



Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

siswa lain yang memiliki banyak kesempatan bermain di luar jam sekolah. Sehari-hari Syahrul biasa naik dan turun gunung mencari rumput untuk pakan ternak milik warga desa. Selain itu, ia juga biasa menjadi tenaga panggul kayu. “Berkat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang saya dapatkan sejak tahun 2014, saya bisa terus sekolah hingga tamat sekolah dasar tahun ini,” kata Syahrul, salah satu dari sekitar 10,3 juta siswa SD penerima bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Anggraini Putri Maharani, Siswi SMPN 3 Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, juga merasa senang karena mendapatkan bantuan dana PIP. “Ikut terbantu dalam membeli alat sekolah dan seragam. Beban orang tua juga jadi lebih ringan,” kata Anggraini, salah satu dari sekitar 4,4 juta siswa SMP penerima PIP.

Di sisi lain, masih ada Tri Bunga Oktavia, Aditya Kusuma Wardana, dan Ahmad Zainuddin Mahfud. Mereka adalah siswa SMA/SMK penerima KIP dari total sekitar 1,5 juta anak SMA/SMK. Mereka sangat bersyukur atas kehadiran KIP bagi kelangsungan pendidikan mereka dari SMP hingga jenjang SMA/SMK. “Uang PIP sekarang saya gunakan untuk bayar sekolah. Kalau dulu waktu SMP, uang PIP untuk membeli buku pelajaran dan sepatu,” kata Bunga, Siswi SMK Dua Mei, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sementara itu, Aditya menggunakan bantuan dana PIP untuk biaya praktikum di sekolahnya, SMAN 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

“Uang PIP saya gunakan untuk membeli alat-alat tulis, perlengkapan sekolah, juga keperluan

tertentu, seperti untuk menunjang keikutsertaan saya di Olimpiade Sains Nasional dengan membeli buku-buku referensi geografi,” kata Zainuddin yang menerima KIP dari SMP hingga kini sebagai siswa SMA Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Zainuddin juga bersyukur karena pencairan PIP dipermudah dengan adanya ATM KIP. “Sebelumnya, orang tua saya harus datang ke bank terlebih dahulu, sekarang tidak perlu,” kata Zainuddin, Peraih Medali Emas Olimpiade Geografi dan Geosains Nasional 2019.

PIP Menyentuh Langsung Masyarakat

Keberhasilan PIP, dinilai lembaga survei nasional yang dirilis Januari 2019, menduduki peringkat kedua program paling menyentuh langsung kepada masyarakat, setelah Program Indonesia Sehat.

“Presiden Joko Widodo berpesan agar cakupan KIP diperluas kepada anak-anak yang mengikuti program pendidikan nonformal, tidak hanya pendidikan kesetaraan, tetapi juga program pendidikan kursus. Nanti ada skema melalui PIP atau skema lain agar dapat memperbesar jumlah peserta yang mengikuti program pendidikan kursus sehingga dapat memperkuat target pemerintah untuk penyiapan tenaga kerja berkompeten. Ke depan, PIP akan memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 12 Februari 2019.

PIP digulirkan pemerintah sebagai salah satu program prioritas dalam mendukung Butir Kelima Nawacita, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar”. Dengan PIP diharapkan faktor sosial ekonomi tidak lagi menjadi kendala dalam mendapatkan pendidikan bagi rakyat. Makin banyaknya jumlah masyarakat berpendidikan menengah diharapkan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara lain di era persaingan global.

Pada 3 November 2014, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7



Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

PIP menjadi program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Dalam RPJMN tersebut ditegaskan bahwa tujuan PIP adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dengan menekan angka putus sekolah dan mengajak kembali anak-anak putus sekolah untuk meneruskan pendidikannya; mengurangi kesenjangan partisipasi pendidikan

antarkelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin; dan meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

PIP diharapkan mengurangi perbedaan angka partisipasi sekolah antarkelompok masyarakat yang masih cukup tinggi. Angka partisipasi kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi tingkat partisipasi sekolahnya dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu.

Terjadinya kesenjangan tersebut, salah satunya, disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung.



Biaya langsung meliputi iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis. Sementara itu, biaya tidak langsung meliputi biaya transportasi, kursus, uang saku, dan biaya lain-lain yang harus ditanggung oleh peserta didik. Rendahnya angka partisipasi kelompok ekonomi tidak mampu untuk bersekolah menyebabkan angka siswa tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap APK.

Penyaluran KIP

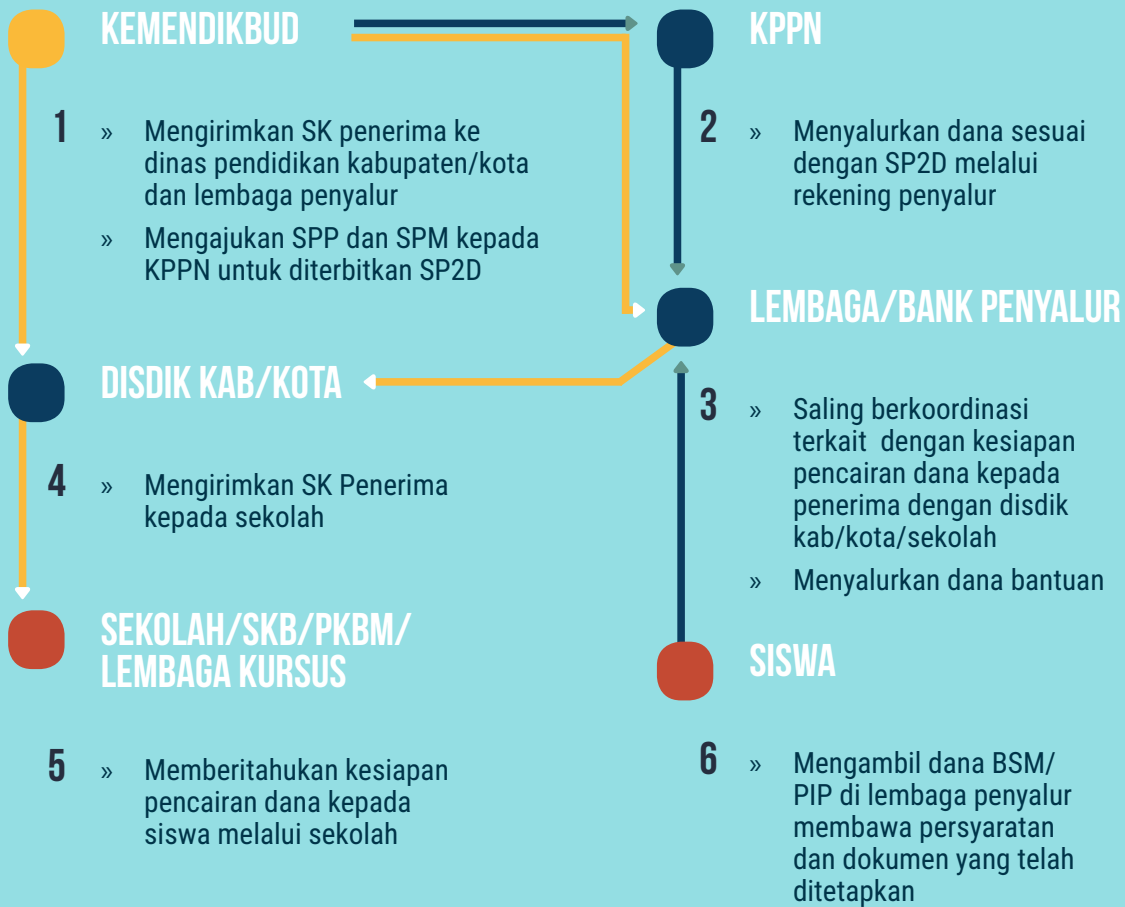
Sasaran KIP adalah anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin berusia 6 hingga 21 tahun. Penerima PIP terbagi menjadi beberapa kelompok: (1) peserta didik yang berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); (2) peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); (3) peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah atau panti asuhan; (4) peserta didik yang terkena dampak bencana alam; (5) peserta didik inklusi yang merupakan korban musibah, pemutusan hubungan kerja (PHK), di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), dan memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah; (6) peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; (7) peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13; dan (8) peserta didik SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Kemaritiman.

PIP juga merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang

sebelumnya dilaksanakan sejak akhir 2014. Penerima BSM akan mendapatkan KIP dengan syarat mereka sudah terdaftar di lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan nonformal (pondok pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat [PKBM], Paket A/B/C, lembaga pelatihan/kursus, dan lembaga pendidikan nonformal lain di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama).

Target penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah 20,3 juta anak, yang terdiri atas 17,9 juta anak di bawah tanggung jawab Kemendikbud dan sisanya 2,4 juta anak berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Pemerintah menggunakan basis data terpadu terbaru yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).





Alur Penyaluran KIP

BESARAN BANTUAN PIP PER TAHUN

- Sekolah Dasar
Rp450.000,00
- Sekolah Menengah Pertama
Rp750.000,00
- Sekolah Menengah Atas
Rp1.000.000,00
- Sekolah Menengah Kejuruan
Rp1.000.000,00





Mengembangkan Literasi Keuangan Siswa

Percepatan pencairan KIP juga ditandai dengan perubahan sistem pencairan. Mulai tahun ajaran 2017/2018, KIP bertransformasi ke dalam bentuk nontunai. KIP melalui anjungan tunai mandiri atau KIP-ATM ini merupakan bentuk pengembangan penyaluran dana pendidikan secara nontunai yang dapat digunakan untuk berbelanja keperluan belajar di toko yang ditunjuk bank atau di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin *electronic data capture* (EDC). Selain KIP, pemerintah mengintegrasikan berbagai bantuan sosial (bansos) lain secara nontunai, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS),

Beras Sejahtera (Rastr), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam satu kartu, yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Saat ini semua penerima KIP memiliki nomor rekening tabungan Simpanan Pelajar (Simpel). Simpel digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan bank umum dan bank syariah. Bank penyalur KIP yang menjalin kerja sama dengan Kemendikbud adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk jenjang SD dan SMP dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk jenjang SMA dan SMK. Dengan KIP-ATM tersebut, pengambilan dana PIP dapat dilakukan di ATM bank BRI dan BNI.

Kehadiran KIP melalui tabungan Simpel juga merupakan bagian dari amanah Kurikulum 2013 (K13). Sebagaimana diamanahkan dalam K13, selain program penguatan karakter dan juga literasi sekolah, kini juga diperlukan literasi keuangan sehingga siswa memahami pengelolaan keuangan.

Permasalahan dan Tantangan Ke Depan

Meski PIP berhasil menjangkau jutaan anak untuk keberlanjutan pendidikan mereka, ada sejumlah kendala. Di antaranya kendala tersebut adalah validasi data penerima KIP yang memerlukan waktu lama sehingga ada anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang belum mendapatkan KIP. Sebaliknya, ada sebagian anak dari keluarga mampu yang masuk dalam daftar penerima KIP.

Selain itu, pelaksanaan PIP di sejumlah daerah terkendala akses dan waktu yang lama. Daerah terpencil dengan keterbatasan akses menyebabkan informasi dan sosialisasi PIP oleh pemerintah daerah cukup sulit dilakukan sehingga menghambat penjangkauan siswa penerima KIP.

Sementara itu, berkaitan dengan pencairan

dana KIP, biaya transportasi yang cukup mahal dari daerah terpencil ke kota terdekat yang memiliki bank penyalur dan mesin ATM, bahkan melebihi dana PIP itu sendiri, menyebabkan penerima PIP enggan mengambil dana bantuan. Beberapa sekolah di daerah terpencil menyiasatinya dengan mengutus kepala sekolah untuk mencairkan dana PIP secara kolektif. Namun, hal itu juga terkendala dengan tidak seragamnya prosedur pencairan dana yang berlaku pada bank-bank penyalur. Ada yang menerapkan prosedur mudah, tetapi ada pula yang memberikan syarat tambahan di luar kesepakatan kerja sama dengan pihak Kemendikbud, seperti mensyaratkan tambahan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dalam pencairan kolektif.

Pencetakan kartu ATM KIP oleh bank penyalur ternyata juga menimbulkan masalah karena banyak siswa penerima manfaat PIP yang belum menerimanya. Pada akhirnya, yang paling utama adalah penggunaan dana tersebut setelah sampai kepada siswa yang berhak agar benar-benar digunakan untuk keperluan pendidikan siswa tersebut. Ke depan, Kemendikbud akan memperkuat koordinasi dengan bank penyalur agar pencairan dan penggunaan dana KIP bisa lebih mudah.



Perpustakaan Hasil Perwujudan BOS

Bantuan Operasional Sekolah: Perluasan Akses untuk Meningkatkan Mutu

Secara nasional, penyerapan dana BOS sudah cukup baik karena mencapai persentase lebih dari 95%. Informasi penyerapan ini didasarkan pada kebutuhan riil yang dilaporkan oleh setiap provinsi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bukan hal mudah bagi Anik Sulistyarini, S.Pd. SD, Guru Kelas V SDN Keniten 2, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, menyisihkan hari-harinya sebagai guru sekaligus sebagai bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Laporannya banyak. *Njlimet*," kata Anik, 33

tahun, yang mendapat honor Rp200.000,00/bulan sebagai bendahara BOS sejak tahun 2015.

Tugas bendahara BOS bukan hanya mengelola uang keluar dari rekening sekolah, melainkan



juga menyusun banyak laporan, seperti rencana penggunaan dana (RPD), rencana kerja anggaran sekolah (RKAS), dan laporan pertanggungjawaban, dan membuat perincian pajak pembelian serta administrasi pencairan dana setiap triwulan.

Sejak tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kediri meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (sipks.kedirikab.go.id). "Sekarang mudah banget. Semua pelaporan sudah ter-cover dalam aplikasi ini. Sekali entri, sudah otomatis. Buku kas umum, pembantu kas kuitansi, dll. semua terselesaikan," katanya.

"Waktu bikin laporan manual ya bisa enggak tidur. Bikin kuitansi saja mengetik manual yang jumlahnya lebih dari lima puluh lembar tiap triwulannya. Belum lagi Buku Kas Umum (BKU).

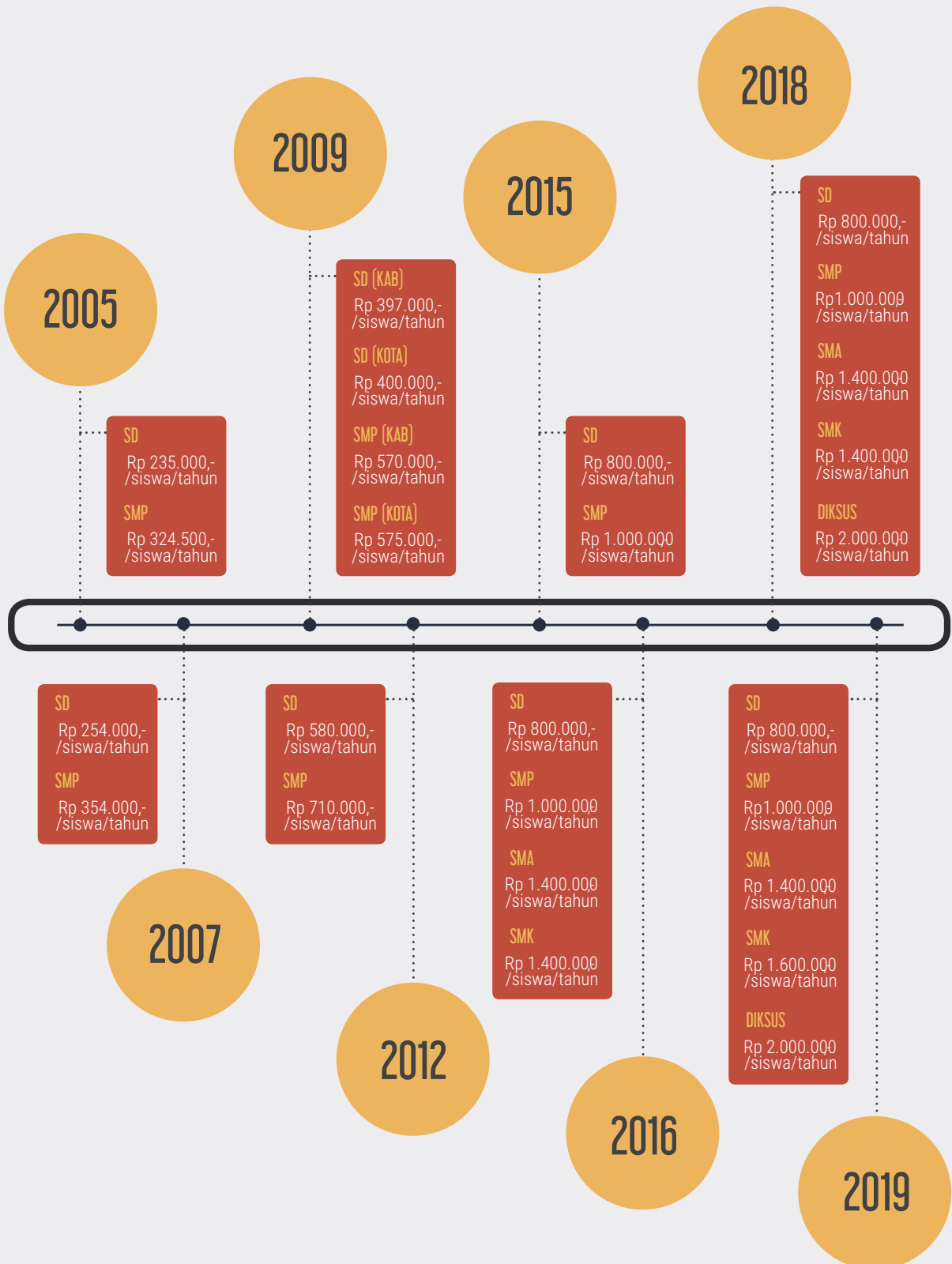
Pernah pulang dari dinas pendidikan untuk menyelesaikan laporan hingga jam sembilan malam," Anik menambahkan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri sudah berupaya membantu sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Salah satunya adalah dengan meluncurkan portal BOS (bos.kemdikbud.go.id). Portal BOS adalah layanan Kemendikbud yang dapat dipakai setiap sekolah penerima dana BOS dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan dana BOS secara daring (*online*). Dana yang dilaporkan adalah dana yang sesuai dengan alokasi yang diperoleh setiap triwulan. Artinya, dalam satu tahun anggaran sekolah diwajibkan melakukan pelaporan sebanyak empat kali.

Pada 25 Juni 2019 Kemendikbud juga meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Keduanya diluncurkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Katalog Sektoral Pendidikan dan SIPLah merupakan wujud komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BESARAN SATUAN BIAYA BOS SUDAH MENGALAMI BEBERAPA KALI PENINGKATAN:



Biaya Satuan BOS Afirmasi dan Kinerja

	 AFIRMASI	 KINERJA
<u>Akses Rumah Belajar</u>	Rp24.000.000/sekolah	Rp19.000.000/sekolah
<u>Tablet alat belajar</u>	Rp2.000.000/siswa (kelas 6, 7, dan 10)	Rp2.000.000/siswa

Kehadiran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Pada tahun 2019 Kemendikbud memberikan tambahan bantuan dana BOS kepada sekolah-sekolah, yakni melalui BOS afirmasi dan BOS kinerja. BOS afirmasi diberikan kepada sekolah-sekolah di desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang akibat kondisi wilayahnya memerlukan biaya operasional yang relatif lebih tinggi dari sekolah di wilayah lain. Artinya, selain menerima BOS reguler, sekolah di daerah tertinggal/sangat tertinggal juga menerima BOS afirmasi.

Sementara itu, BOS kinerja diberikan sebagai penghargaan kepada sekolah yang memiliki kinerja mutu pendidikan yang baik. Besaran BOS kinerja yang diterima sekolah ditentukan juga berdasarkan kinerja pemerintah daerah.

Kendala dan Tantangan Pelaksanaan BOS

Sejumlah kendala umum pelaksanaan dan penatalaksanaan BOS, di antaranya, adalah sebagai berikut.

1. Permasalahan utama pengelolaan keuangan BOS adalah masih kurangnya pengetahuan sekolah dalam mengikuti ketentuan. Petugas administrasi sekolah yang mumpuni masih sangat terbatas sehingga tugas penanggung jawab administrasi BOS ditangani oleh guru. Rangkap tugas sebagai bendahara/pengadministrasi BOS dan pengajar tidak sedikit mengganggu kinerja guru dalam mengajar.
2. Kedisiplinan dan ketelitian sekolah melakukan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih kurang. Akibatnya, ketidakakuratan

Dapodik dapat menimbulkan masalah pada penetapan alokasi BOS. Masih banyak sekolah yang belum memiliki tenaga operator Dapodik sehingga banyak yang menyerahkannya kepada pihak lain.

3. Penyaluran dana BOS terhambat karena keterlambatan penyampaian laporan dari provinsi. Pada umumnya, keterlambatan berakar pada kurangnya koordinasi internal di lingkungan dinas pendidikan provinsi dan kurang lancarnya komunikasi di antara pengelola keuangan provinsi.

Untuk meminimalkan kondisi di atas, perlu ditempuh langkah-langkah pencegahan sebagai berikut.

4. Kemendikbud memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih mengintensifkan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan BOS di sekolah dalam APBD, baik secara langsung maupun secara berjenjang.

5. Kemendikbud perlu membuat kebijakan tegas agar pemerintah daerah terdorong untuk mendisiplinkan sekolah dalam melakukan pemutakhiran data, baik dari sisi pembaruan data maupun ketepatan waktu.

6. Kemendikbud perlu bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih mendesak pemerintah daerah provinsi agar tertib menyampaikan laporan.

Sejumlah pihak juga memberikan masukan perlunya perbaikan pengelolaan BOS, khususnya penetapan besaran satuan biaya BOS. Besaran satuan biaya ditetapkan Kemendikbud berdasarkan dua kebijakan. Kebijakan pertama adalah dana BOS diberikan sebagai wujud tanggung jawab konstitusional pemerintah pusat dalam pendanaan pendidikan, yang tidak harus memenuhi seluruh kebutuhan biaya pendidikan di sekolah. Pembiayaan pendidikan lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Sementara itu, kebijakan kedua adalah pemerintah pusat berupaya memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan di daerah secara adil. Saat ini kebijakan keadilan dalam bentuk besaran sama rata di seluruh daerah. Kebijakan ini dinilai sejumlah pihak tidak tepat karena beban setiap sekolah di setiap daerah tidak sama. Kebijakan adil diharapkan sesuai dengan beban di tiap daerah secara proporsional.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Kemendikbud perlu menetapkan besaran kebutuhan biaya pendidikan setiap siswa di setiap daerah. Informasi biaya satuan pendidikan per siswa di setiap daerah sampai saat ini belum dimiliki secara lengkap. Untuk melengkapi data tersebut diperlukan studi wilayah sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



BOS dapat membantu terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler

Larangan Penggunaan Dana BOS



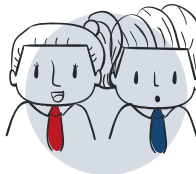
- 1 Menyimpan dana dengan maksud dibungakan
- 2 Meminjamkan dana kepada pihak lain
- 3 Membeli perangkat lunak (software) untuk pelaporan keuangan BOS SMA/ SMK atau software sejenis
- 4 Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding dan karyawisata
- 5 Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/ kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
- 6 Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
- 7 Membiayai akomodasi kegiatan, seperti sewa hotel dan sewa ruang sidang
- 8 Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
- 9 Melakukan rehabilitasi sedang dan berat
- 10 Membangun gedung/ruangan baru
- 11 Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- 12 Menanamkan saham
- 13 Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar
- 14 Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah
- 15 Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 16 Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait dengan program BOS SMA/SMK perpajakan program BOS SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Komponen Pembiayaan BOS pada SD, SDLB, SMP, SMPLB



Pengembangan
Perpustakaan



Kegiatan Penerimaan
Siswa Baru



Kegiatan
Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler



Kegiatan Evaluasi
Pembelajaran



Pengelolaan
Sekolah



Pengembangan
Profesi Guru



Berlangganan
Daya & Jasa



Perawatan
Sekolah



Pembayaran
Honor



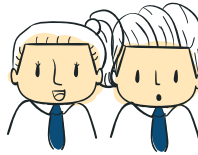
Pembelian atau
Perawatan Alat
Multimedia
Pembelajaran



Komponen Pembiayaan BOS pada SMA



Pengembangan
Perpustakaan



Kegiatan Penerimaan
Siswa Baru



Kegiatan
Pembelajaran dan
Ekstrakurikuler



Kegiatan Evaluasi
Pembelajaran



Pengelolaan
Sekolah



Pengembangan
Profesi Guru



Berlangganan
Daya dan Jasa



Perawatan
Sekolah



Pembayaran
Honor



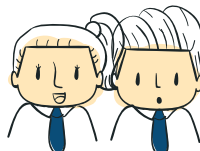
Pembelian atau
Perawatan Alat
Multimedia
Pembelajaran



Komponen Pembiayaan BOS pada SMK



Pengembangan Perpustakaan



Kegiatan Penerimaan Siswa Baru



Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler



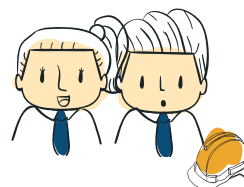
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran



Pengelolaan Sekolah



Pengembangan Profesi Guru



Kegiatan Praktik Kerja Industri/Praktik Kerja Lapangan (PKL)



Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan



Pembelian atau Perawatan Alat Multimedia Pembelajaran



Pembayaran Honor



Perawatan Sekolah



Berlangganan Daya dan Jasa



APA PENDAPAT MEREKA?

Novie Asnie Maulidda, S.Pd.

**Dinas Pendidikan
Kab. Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan**

“Program BOS adalah sumber pendapatan utama bagi sekolah negeri. Dengan adanya BOS sekolah dapat menjalankan program-program pendidikan yang ditujukan untuk proses pembelajaran sekolah. Dengan adanya BOS ini juga maka dapat menunjang proses pengelolaan sekolah. Namun, sebaiknya program BOS dapat ditinjau ulang dalam hal penggunaannya karena juknis yang terlalu banyak melarang penggunaan dana BOS sehingga mengakibatkan pihak sekolah harus membatasi penggunaannya. Selain itu, penyaluran dana BOS alangkah baiknya tidak lagi sering terlambat agar sekolah mampu mengatur keuangan sekolah dengan lancar dan baik.”

Dra. Nurul Kholifah

**Dinas Pendidikan
Kota Singkawang,
Kalimantan Barat**

“Sebagai pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang dan sebagai warga Kota Singkawang saya sangat mendukung dengan adanya BOS karena sangat membantu berjalannya kegiatan operasional sekolah. Ke depannya, kami berharap BOS semakin lebih baik lagi dalam setiap prosesnya dari awal hingga akhir karena BOS akan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang akan sangat memudahkan sekolah dan dinas pendidikan dan kebudayaan dalam proses pengerjaan dan juga pengawasan.”

Mursaid, S.Pd, M.Si.

**Dinas Pendidikan
Kab. Asahan,
Sumatera Utara**

“BOS banyak memberikan kontribusi dan manfaat bagi pelaksanaan pengelolaan operasional sekolah. Dengan adanya BOS Reguler, sekolah dapat melaksanakan program-program yang bersentuhan dengan kebutuhan sekolah dan ekspansinya. Kemendikbud dalam setiap tahunnya senantiasa melakukan perubahan dan penyempurnaan petunjuk teknis sehingga BOS semakin akuntabel, transparan, dan rasional dalam pertanggungjawaban bagi sekolah.”

Aryanto, S.Pd.

**Kepala SMKN 1 Toboali,
Kab. Bangka Selatan,
Kep. Bangka Belitung**

“Dana BOS sangat membantu sekali dalam operasional sekolah, kegiatan belajar mengajar, baik intra maupun ekstra sekolah. Adapun kendala selama ini adalah keterlambatan penyaluran dana BOS sehingga kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah menjadi terganggu. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban sekolah-sekolah juga berimbas dalam keterlambatan penyaluran dana BOS. Harapannya, sekolah-sekolah diinstruksikan agar tepat waktu menyerahkan laporan keuangan. Jumlah dana yang disalurkan ke sekolah sudah mencukupi.”

Murtini, S.Pd.

**Kepala SDN 3 Sermo,
Kab. Kulonprogo,
DI Yogyakarta**

“Program BOS sangat membantu dan mendukung kegiatan KBM dan pendidikan di sekolah. Untuk menjadi sekolah terbaik, besaran dana BOS saat ini masih sangat minim. Alangkah baiknya kalau dana BOS ditingkatkan lagi besaran satuan biayanya.”

Asnal Burhanuddin, S.Pd.

**Kepala SMP Nur Milad
Boading School, Kab. Wajo,
Sulawesi Selatan**

“Sangat membantu sekolah utamanya sekolah swasta dalam pengelolaan utamanya dalam melaksanakan kegiatan operasional yang sejalan dengan SNP. Dalam pemenuhan SNP, BOS sangat membantu mengembangkan sekolah dalam berbagai aspek utama, termasuk pemenuhan kebutuhan buku teks pelajaran, pemeliharaan dan pengadaan multi-media pembelajaran. Kami berharap ke depannya penyelenggaraan BOS untuk sekolah swasta tetap dilanjutkan sehingga kualitas pendidikan lebih baik lagi.”

Yusak, S.Pd.

**Kepala SMAN 4 Senayang,
Kab. Lingga, Kep. Riau**

“Dana BOS dapat membantu dana operasional sekolah, dapat meningkatkan proses belajar mengajar, dan dapat mendorong sekolah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Dana BOS juga dapat membantu kegiatan pengembangan diri siswa, serta dapat meningkatkan kinerja guru melalui kegiatan MGMP. Ke depan kami berharap dana BOS bisa juga digunakan untuk kegiatan seperti bimtek, *inhouse training*, *workshop* untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah, mengingat daerah kami yang *interline* jadi membutuhkan biaya yang besar untuk kegiatan guru melalui MGMP.”

Elisa Rosiana, S.Pd.

**Kepala SMP Islam Terpadu
Menara Fitrah, Kab. Ogan
Ilir, Sumatera Selatan**

“Bantuan BOS bagi sekolah swasta seperti halnya SMP IT Menara Fitrah, laksana pepatah ‘bagai ikan dalam air’, artinya sangat senang sekali. Kami cukup terbantu, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar karena jumlah siswa kami belum banyak. Dengan adanya dana BOS ini kami sangat berterima kasih karena dapat kami manfaatkan untuk mengakomodir pendanaan pelaksanaan beberapa kegiatan sekolah. Misalnya memfasilitasi proses pembinaan dan pengembangan potensi siswa melalui terselenggaranya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yang mana tutor/mentornya dihadirkan sesuai dengan keahlian masing-masing, sebagaimana petunjuk teknis penggunaan/pemanfaatan dana BOS”.

Drs. I Made Arya Kartawan, M.Pd.

**Kepala SMAN 2 Singaraja,
Kab. Buleleng, Bali**

“Pada prinsipnya, adanya bantuan BOS baik daerah maupun pusat sangat membantu operasional pendidikan di sekolah. Namun masih banyak mata rekening yang perlu disesuaikan dengan apa sesungguhnya menjadi kebutuhan riil sekolah. Terkadang banyak hal yang semestinya bisa didanai oleh BOS, namun mengingat tidak ada mata rekeningnya, maka program tidak bisa dieksekusi, sehingga ada sisa dana BOS. Mungkin perlu dikaji kembali juknis penggunaannya, dan perlu pemberian otonomi pengelolaan kepada sekolah. Justru pengawasan melekat dan konsistenlah yang lebih penting ditingkatkan, toh transaksi dilakukan **online** dan non tunai.”





BOS dapat membantu
terlaksananya kegiatan
Sekolah

Menyiapkan Kompetensi Guru Abad 21 Berbasis Zonasi

"Ajak siswa kita untuk berpikir kreatif dan kritis, membangun kerja sama atau berkolaborasi. Mohon Guru Inti jangan memberikan pendidikan yang tidak kreatif. Kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita,"
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada tahun ini berfokus pada Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP). PKP dilaksanakan berbasis zonasi yang memungkinkan guru meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan sekolah sehingga mereka tetap bisa mengajar

Manfaat PKP



Tambahan ilmu tentang merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), mendesain pembelajaran hingga mempraktikkan pembelajaran berkonsep *high order thinking skill* (HOTS) menjadi menu yang sangat menarik bagi Noor Syamsu Riza. Guru IPA SMP Negeri 1 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ini antusias mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

"Program PKP sangat bagus dan sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan meningkatkan penguasaan materi siswa. Guru dilatih bagaimana caranya membuat siswa berpikir kritis. Guru juga dilatih bagaimana menyusun pembelajaran yang dapat merangsang berpikir kritis siswa," kata Noor Fitri Hasanuddin yang juga bangga mengikuti program PKP. Guru



Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Guru

IPA SMPN 04 Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatra Selatan ini menilai bahwa dengan mengikuti program PKP, ia dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. "Narasumbernya ahli di bidang sehingga kami bisa dengan sangat mudah menyerap ilmu yang mereka transfer. Melalui pembelajaran HOTS yang kami terima, harapannya akan meningkatkan pembelajaran, siswa di daerah dapat meningkat pula kualitas dan nilai mereka," katanya.

Program PKP tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan (Ditjen GTK). PKP merupakan bagian dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). PKP memberikan pemahaman dan keterampilan tentang pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembiasaan ini akan membuat peserta didik terbiasa berpikir kritis dan menjadi *problem solver* di lingkungan belajarnya apabila dilakukan secara terus menerus.

Program PKP yang dilaksanakan berbasis zonasi memungkinkan guru meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan sekolah

sehingga guru tetap bisa mengajar. Geliat pelatihan berbasis zonasi turut menghidupkan komunitas guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai komunitas belajar dan sarana komunikasi guru dalam bertukar pengalaman terbaik.

Guru yang mengikuti PKP hanya mempelajari dua unit pembelajaran selama 82 jam pelatihan (JP). Guru harus tuntas mempelajari dan menguasai materi, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Unit pembelajaran sangat membantu guru untuk mengetahui target kompetensi yang diharapkan dari sebuah kompetensi dasar. Demikian pula dengan cara merumuskan indikator pendukung, kunci dan pengayaan sehingga guru bisa menentukan materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana cara mengevaluasinya.

Program PKP juga membuat guru cermat dalam menentukan target belajar peserta didik serta merancang pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kelebihan lain PKP adalah mengharuskan guru membuat *best practices*. Guru pun mendokumentasikan praktik baik selama pembelajaran di sekolah. Hal itu memantik kebiasaan guru untuk menulis dan membuat karya tulis, praktik, serta tagihan yang harus dikerjakan oleh peserta sesuai dengan daftar tagihan yang terdapat pada pedoman program PKP.

FOKUS PADA PROSES PEMBELAJARAN

Desain program PKP menitikberatkan pada proses pembelajaran, yakni bagaimana guru mampu mengembangkan proses pembelajaran berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Pembelajaran HOTS adalah pembelajaran yang melibatkan tiga aspek, yakni bagaimana guru sebagai *transfer knowledge*; bagaimana guru mampu mengembangkan kemampuan *critical and creative thinking* peserta didik; bagaimana guru mampu menjadikan peserta didik sebagai *problem solver*.

Desain Program PKP ini mendekatkan bagaimana konten atau substansi materi dapat dibelajarkan kepada peserta didik dengan tepat dan baik. Titik berat pelatihan adalah unit pembelajaran yang disusun berdasarkan analisis Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian dan analisis hasil UN/USBN/US. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK menyiapkan 244 judul unit pembelajaran. Sementara itu, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Ditjen GTK menyiapkan 315 judul unit pembelajar untuk jenjang SMA dan SMK, khusus mata pelajaran yang ada pada Ujian Nasional, serta untuk guru PLB. Serta Unit Pembelajaran yang dikembangkan oleh satker di lingkungan Ditjen GTK, dengan total keseluruhan adalah 273 judul unit pembelajaran.

Pelatihan PKP menggunakan pendekatan IN-ON-IN yang dilaksanakan kurang lebih

selama satu bulan. Pelaksanaan IN (*in service learning*), yakni IN-1 sampai dengan IN-5, dilakukan di kelompok kerja dalam zonasi. Setiap pelaksanaan ON (*on the job learning*), yakni ON-1 sampai dengan ON-3, dilakukan di sekolah selama lima hari, dengan asumsi 2 JP/hari. Dalam kurun waktu 82 JP tersebut, guru akan mempelajari dan menguasai dua unit pembelajaran.

Pada kegiatan IN, peserta dan guru inti melakukan pertemuan tatap muka di sekolah inti atau tempat lain yang telah ditetapkan. Selama kegiatan ini, partisipasi dan sikap peserta dinilai oleh guru inti sebagai salah satu unsur penilaian kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan IN disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik.

Peserta ON adalah guru yang telah mengikuti kegiatan IN-1 dan IN-2. Setiap kegiatan ON dilakukan di sekolah masing-masing peserta selama lebih kurang satu minggu. Selama kegiatan ON, peserta mendapatkan supervisi dari pengawas sekolah. Hasil yang diharapkan selama kegiatan ON disesuaikan dengan praktik yang harus dilakukan peserta, serta tagihan yang harus dikerjakan selama kegiatan sebagaimana dijelaskan pada pedoman Program PKP.

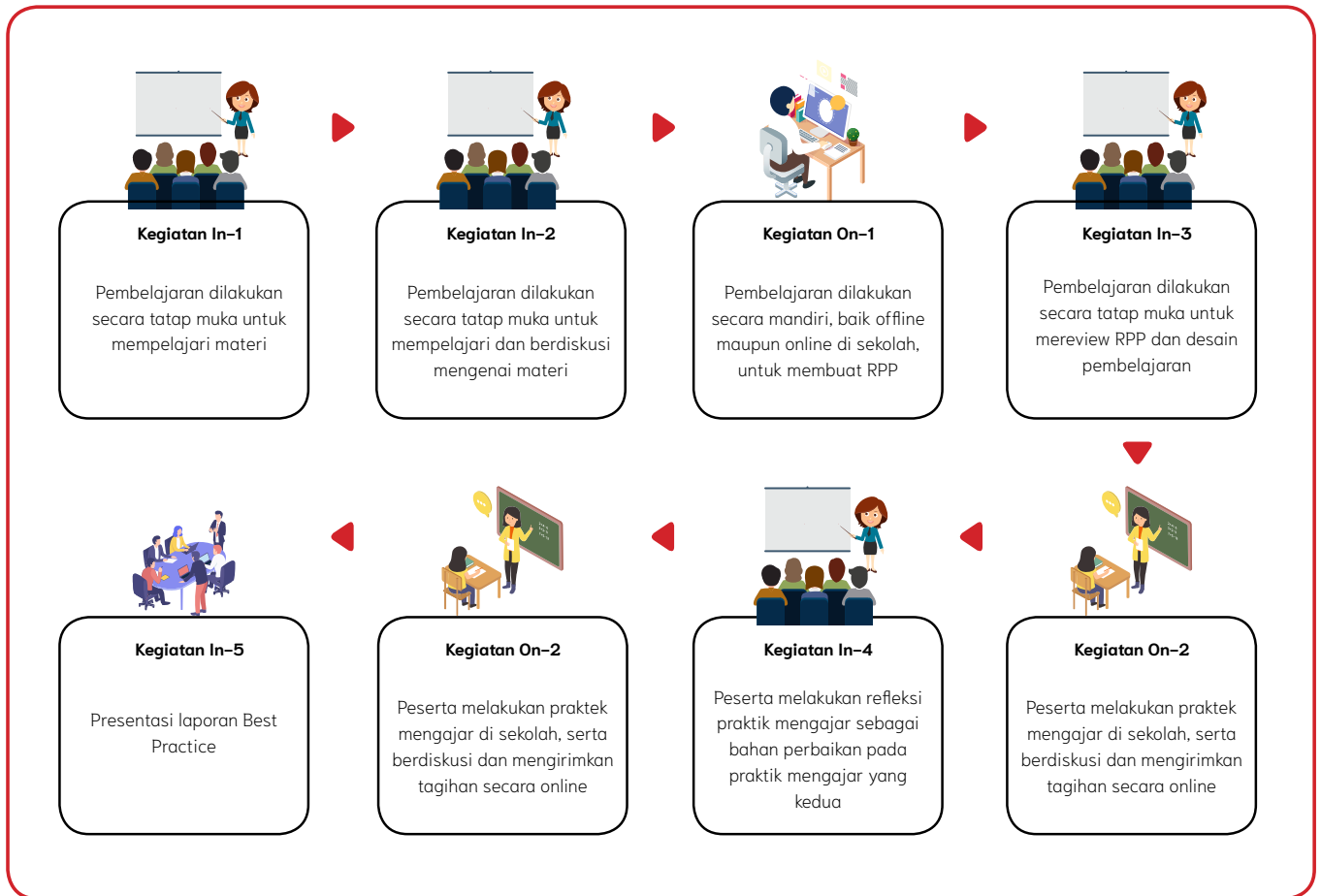
Selama pelatihan PKP, ada pendampingan oleh fasilitator (NS/IK) dan guru inti. Proses pendampingan dilakukan oleh fasilitator kepada guru inti dan peserta secara *full online*, dan fasilitasi dari guru inti ke peserta

secara *blended* (kegiatan tatap muka pada IN dan kegiatan daring (*online*) pada ON). Proses pendampingan difasilitasi dengan kelas *online* di *Learning Management System* (LMS) yang terintegritasi dengan rumah belajar kemendikbud yang dapat diakses selama pembelajaran berlangsung. Pada kelas ini, guru inti dan peserta dapat melakukan proses pembelajaran secara daring melalui konten pembelajaran yang sudah dikembangkan secara terstruktur, serta mengirimkan semua laporan administratif dan akademisnya melalui *tools* yang sudah disediakan.

Meskipun banyak kelebihan pada model pelatihan ini, terdapat beberapa kendala, antara lain, keterbatasan SDM, seperti kualitas instruktur, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Selain itu, juga terdapat kendala demografi Indonesia yang sangat beragam, baik sosio-kultur dan geografis alam. Akses jalan yang sulit di pelosok merupakan tantangan berat bagi guru untuk berkumpul meskipun mereka berada dalam satu zona zonasi. Model pelatihan berbasis zonasi dengan fokus pada unit pembelajaran juga membutuhkan anggaran biaya besar.

Anggaran besar dapat ditekan dengan model *blended learning*, yang memadukan tatap muka dengan daring. Pelatihan memadukan daring dan tatap muka ini dapat dilakukan di sekolah perkotaan yang mudah akses internetnya. Selain itu, untuk mata pelajaran khusus yang jumlah guru sasarannya sangat sedikit, serta guru-guru lintas zona atau pengembangan zonasi

Alur pelaksanaan IN–ON–IN Program PKP



sekitar. Pertemuan dilakukan di IN-1 kemudian IN-2 sampai dengan IN-4 dilaksanakan secara daring, kemudian IN-5 bertemu kembali di kelompok kerja dalam zonasi. Bagi guru mapel

yang sangat sedikit atau berjauhan, dapat menggunakan pendekatan pendampingan *full online* oleh narasumber, guru inti ke pada guru sasaran.

Mengembangkan SDM Unggul Melalui Akreditasi PAUD dan PNF

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.



Kunjungan Ibu Negara ke PAUD

Namanya memang belum sepopuler Dapodik. Sispena, kependekan dari Sistem Penilaian Akreditasi, adalah piranti daring (*online*) sebagai basis data penilaian akreditasi yang

terpadu dengan Dapodik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi akreditasi lembaga pendidikan secara cepat dan akurat serta mudah diakses oleh para

pemangku kepentingan. Pada tahun 2019, telah dikembangkan Sispena versi 2.0.

Penggunaan Sispena berbasis web ini menjadi suatu kebutuhan. Pasalnya, jumlah kuota akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF) tahun 2019 ini ialah sebanyak 35.750 satuan pendidikan. Sampai dengan Agustus 2019 sudah ada 4.320 sekolah yang sudah diakreditasi. Jumlah akreditasi PAUD dan PNF tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan kuota akreditasi tahun 2018 sebanyak 30.275 satuan PAUD dan PNF dengan realisasi 32.420 PAUD dan PNF. Peningkatan jumlah kuota akreditasi tentu membutuhkan strategi yang tepat agar terlaksana dengan baik.

Sispena versi 2.0 telah disosialisasikan kepada dinas pendidikan, pusat pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (PP PAUD Dikmas), Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF di tingkat provinsi, asesi, asesor, dan organisasi mitra (ormit). Wahana sosialisasi itu, ialah melalui kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAN PAUD dan PNF di Surabaya, pada tanggal 15–17 Maret 2019. Rakornas menjadi ajang sosialisasi kebijakan dan mekanisme BAN PAUD dan PNF di tingkat provinsi, termasuk pergantian instrumen akreditasi

Akreditasi sendiri merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan, baik dasar, menengah, maupun satuan PAUD dan PNF, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu



pendidikan.

Keberadaan BAN merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah atas mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan adanya akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF, akan dapat dilihat peta mutu pendidikan PAUD dan PNF. Pemerintah dapat mengembangkan satuan pendidikan melalui program-program



Aktivitas Anak PAUD di Luar Kelas

pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Sejumlah manfaat keberadaan akreditasi satuan pendidikan, di antaranya, adalah sebagai berikut:

1. membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, dan bahkan internasional;
2. mendorong satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program PAUD dan PNF;
3. memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang andal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF;

4. mendorong terciptanya peta mutu pendidikan di satu wilayah dan secara nasional; dan
5. mempermudah akses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat.

Dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 ditegaskan bahwa BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN PAUD dan PNF melaksanakan akreditasi pada satuan PAUD, meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis (SPS). Selain itu, satuan PNF dalam bentuk lembaga kursus dan pelatihan (LKP), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan satuan PNF sejenis/sanggar kegiatan belajar (SKB), serta Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 juga mengamanatkan bahwa akreditasi satuan PAUD dan PNF begitu juga sekolah/madrasah dilaksanakan secara terpusat dan merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan akreditasi menjadi wewenang pemerintah pusat. Secara kelembagaan, BAN PAUD dan PNF begitu juga BAN S/M mengalami proses transformasi. Pertama, dari aspek anggaran, wewenang untuk mengalokasikan anggaran akreditasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab

pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tetap dapat memberikan kontribusi pada program praakreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi.

Pada tahun 2019 BAN PAUD dan PNF mengenalkan mekanisme akreditasi dengan tahapan Evaluasi Diri Satuan Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA). EDS-PA merupakan instrumen prasyarat akreditasi untuk menilai pemenuhan kebutuhan (*compliance*). Sementara itu, IPA berfungsi untuk menilai performa (*performance*) satuan PAUD dan PNF. IPA digunakan pada saat visitasi yang dilakukan oleh asesor.

Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 juga mengubah substansi kelembagaan BAN sehingga memiliki wewenang untuk membentuk dan menetapkan anggota BAN di tingkat provinsi, yang sebelumnya menjadi wewenang gubernur. Sebelum penetapan wewenang tersebut berlaku, ada Badan Akreditasi Provinsi (BAP) yang ditetapkan oleh gubernur.

Namun, saat ini nomenklatur nya juga berubah menjadi BAN PAUD dan PNF provinsi. BAN PAUD dan PNF provinsi pun menjadi kepanjangan tangan BAN PAUD dan PNF. Saat ini sudah dibentuk BAN PAUD dan PNF provinsi di 34 provinsi.

Akreditasi PAUD dan PNF dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan berdasarkan permendikbud yang terkait dengan setiap sasaran dan umumnya ditetapkan oleh



Kegiatan Pembelajaran di PAUD

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Instrumen akreditasi beserta kelengkapan operasionalnya disusun oleh BAN PAUD dan PNF. Instrumen akreditasi untuk penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF digunakan untuk evaluasi diri, setidaknya untuk mengukur standar kelayakan minimal.

Hasil akreditasi ini merupakan acuan bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan. Kerja keras satuan PAUD dan PNF menggapai akreditasi yang baik turut

mendukung upaya pemerintah yang tengah menggenjot lahirnya SDM unggul. Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi akan terus berupaya memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), satu di antaranya adalah terpenuhinya standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk itu, diperlukan komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk turut menyiapkan satuan pendidikan yang siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus. Harapannya adalah keberhasilan akreditasi akan diikuti dengan peningkatan kualitas satuan pendidikan.



Masyarakat Berprestasi Dijaring Sampai ke Seluruh Pelosok Indonesia

Menjaring Masyarakat Berprestasi hingga Daerah 3T

Program Beasiswa Unggulan ini merupakan wujud tanggung jawab Kemendikbud untuk menjamin masyarakat berprestasi yang tidak memiliki cukup biaya agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi.

Kebahagiaan itu seakan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata oleh Fakhri Putra Tanoto, Penerima Beasiswa Unggulan 2018. “Saya memberi kabar kepada orang tua bahwa saya lulus menjadi penerima Beasiswa Unggulan. Alhamdulillah orang tua saya senang sekali sampai meneteskan air mata. Itulah cita-cita saya membuat orang tua menangis karena keberhasilan saya, bukan karena kegagalan saya.”

Program Beasiswa Unggulan Kemendikbud diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN), Sekretariat

Jenderal Kemendikbud, dengan memberikan beasiswa untuk kategori pegawai Kemendikbud serta masyarakat daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

Program Beasiswa Unggulan ini merupakan wujud tanggung jawab Kemendikbud untuk menjamin masyarakat berprestasi yang tidak memiliki cukup biaya agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Pilihan kuliah diberikan, mulai dari jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktor (S3), baik di perguruan tinggi dalam negeri (akreditasi minimal B) maupun luar negeri.



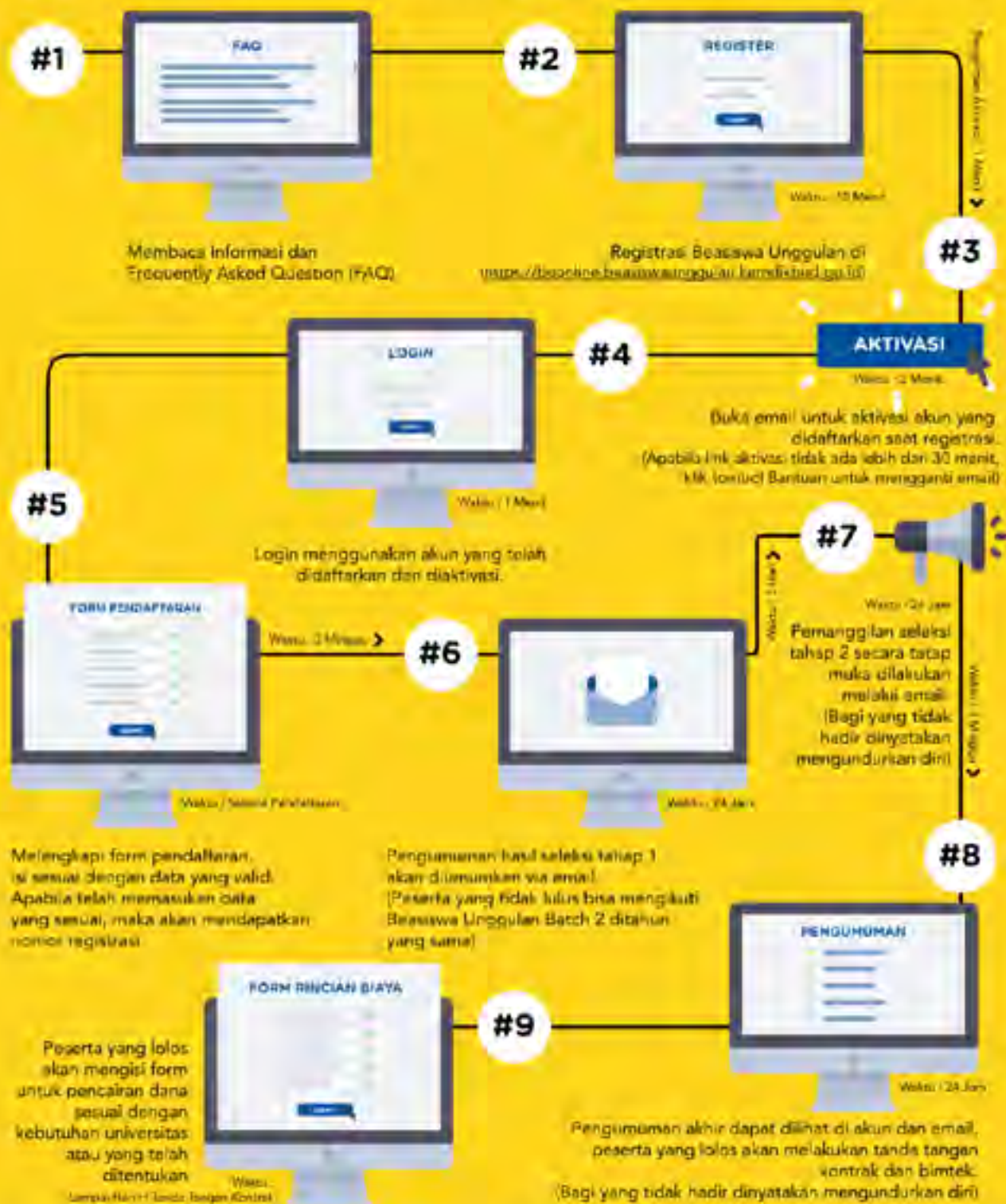
PRIORITAS BIDANG KEILMUAN YANG DIBIAYAI DENGAN BEASISWA UNGGULAN

- Pendidikan (Pendidikan PAUD dan Pendidikan PGSD)
- Kurikulum dan Pedagogi
- Manajemen dan Kebijakan Pendidikan
- Perfilman
- Seni Pertunjukan
- Seni Musik
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arkeologi (Permuseuman)
- Teknologi Informasi
- Kebijakan Publik
- Pariwisata
- Industri Kreatif
- Teknologi Pangan
- MIPA
- Maritim
- Pertanian
- Energi
- Humaniora
- Teknik

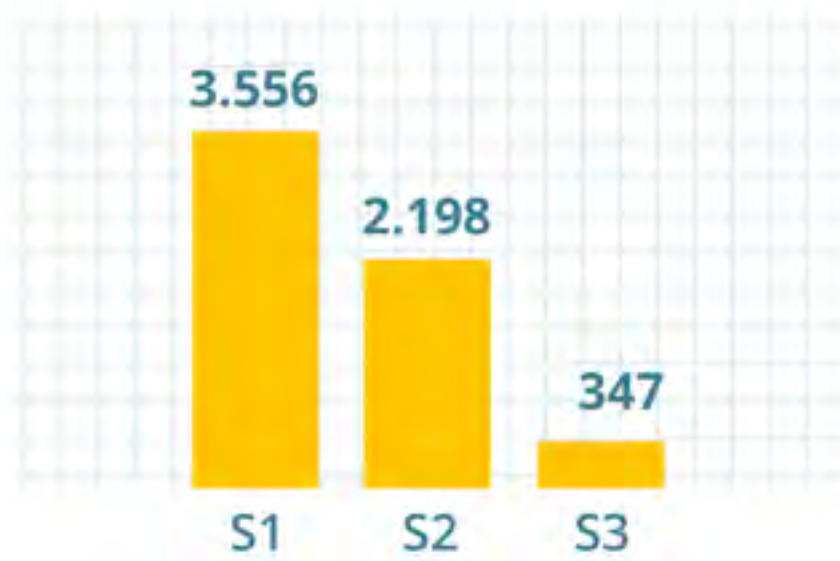




TATA CARA PENDAFTARAN BEASISWA UNGGULAN



Total Penerima Beasiswa Per Jenjang Tahun 2019



“Program Beasiswa Unggulan ini untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan bantuan pendidikan dan pelatihan, baik melalui jalur gelar maupun nongelar. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, program ini diutamakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan sehingga pembiayaan diutamakan untuk bidang-bidang yang relevan dengan pengembangan pendidikan dan kebudayaan,” kata Suharti, Kepala Biro PKLN, Sekretariat Jenderal Kemendikbud.

Upaya Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas SDM melalui bantuan pendidikan dan pelatihan ini sejalan dengan Butir Kelima Nawacita, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Program Beasiswa Unggulan juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkecil kesenjangan kinerja pendidikan antarkelompok masyarakat sehingga program ini juga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat miskin dan/atau yang tinggal di daerah tertinggal.

Penerima manfaat Beasiswa Unggulan memang bukanlah sembarang orang. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan, penerima beasiswa adalah putra-putri terbaik negeri ini dengan kriteria sebagai berikut:

1. peraih medali/penghargaan olimpiade/ kompetisi internasional di bidang sains, penelitian ilmiah, keterampilan, seni, olahraga, dan bahasa yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Kemendikbud dan/atau



Penerima Beasiswa Unggulan

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

2. pegawai negeri sipil di lingkungan Kemendikbud, guru, tenaga kependidikan, serta pelaku seni/budaya yang mampu berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa; dan
3. masyarakat berprestasi tingkat nasional, internasional, atau masyarakat yang mampu berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa di segala bidang, tetapi tidak diprioritaskan bagi dosen.

Meski sudah dilaksanakan sejak tahun 2006, Beasiswa Unggulan belum populer di kalangan masyarakat sebagaimana Bidik Misi yang sangat dibanjiri peminat, terutama mahasiswa baru. Sosialisasi dan penyebaran informasi memang hanya dilakukan melalui situs web Kemendikbud. Pada tahun 2018—2019

memang ada lonjakan besar pendaftar apabila dibandingkan dengan pada tahun 2016. Dari 21.982 pendaftar (2016) menjadi 49.969 (2017) dan 45.920 (2018).

Selama kurun tahun 2016—2018 penerima Beasiswa Unggulan adalah sebanyak 6.811 orang. Jumlah tersebut memang tidak banyak karena keterbatasan anggaran Biro PKLN. Beberapa keterbatasan lainnya meliputi peniadaan beasiswa ke perguruan tinggi di luar negeri untuk masyarakat umum mulai tahun 2016, komponen biaya hidup per bulan masih di bawah standar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan belum adanya ikatan alumni penerima beasiswa unggulan. Ke depan, pengelolaan Beasiswa Unggulan diharapkan dapat menyediakan kuota dan meningkatkan dana beasiswa. Selain itu, Ikatan Alumni Beasiswa Unggulan juga diharapkan dapat segera dibentuk.

UNBK Upaya Peningkatan Integritas

Pemerintah menargetkan pada tahun 2020, setidaknya peserta UNBK mendekati angka 100%.

Pemerintah terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Salah satu di antaranya adalah melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Ujian Nasional (UN) dilaksanakan untuk mengukur kompetensi siswa dan menjadi salah satu dasar untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, selain untuk melakukan pemetaan capaian pendidikan secara nasional.

Pada tahun 2019, sebanyak 91% peserta UN menggunakan moda UNBK. Hal itu berarti terjadi kenaikan signifikan dari peserta UNBK 2018 sekitar 78%. Pelaksanaan UNBK berhasil meningkatkan integritas peserta didik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan UNBK mampu mengurangi praktik kecurangan hingga 99 persen. "Dan yang paling penting menurut saya saat ini adalah bisa dihapus hampir 99 persen praktik curang, praktik ketidakjujuran, yang dulu sangat sistemik, terstruktur. Sekarang bisa kita hilangkan dengan sistem dan platform yang baru ini," kata Muhadjir di Yogyakarta, Senin (25/3/2019).

Namun demikian, UNBK menghadapi masalah khususnya di wilayah yang tidak memiliki koneksi jaringan internet. Pemerintah menargetkan pada tahun 2020, setidaknya peserta UNBK mendekati angka 100% dan pelaksanaan UN diharapkan semakin berintegritas.

Perkembangan UN

Sejak tahun 2015, selain mengukur pencapaian akademik, UN juga untuk mengetahui tingkat kejujuran ujian dengan hasil Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) untuk setiap sekolah. Salah satu temuan yang menarik dari hasil evaluasi pelaksanaan UN 2015 yang lalu adalah tingkat kecurangan pada pelaksanaan UNBK adalah nol, sementara tingkat kecurangan yang bervariasi ditemukan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Pensil dan Kertas (UNPK).

Hal itu sejalan dengan gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2015 Kemendikbud memperkenalkan IIUN yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku jujur dan berintegritas bagi para pelaku ujian nasional.



Peserta Didik Melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Selain itu, UNBK terbukti memiliki beberapa manfaat, antara lain, minimnya kemungkinan soal yang terlambat datang, tertukar dan ketidakjelasan hasil cetak soal, proses pengumpulan dan penilaian jauh lebih mudah,

hasil ujian nasional dapat diumumkan jauh lebih cepat, serta mendorong terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan UN.



Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia

Hasil UN 2019 menunjukkan peningkatan nilai, baik di jenjang SMA, SMK maupun SMP.

Ujian Nasional (UN) adalah sistem evaluasi pencapaian standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan secara nasional. UN 2019 kembali menorehkan sejarah dengan peralihan masif dari ujian berbasis kertas dan pensil menjadi ujian berbasis komputer. Kemendikbud melayani 7,5 juta peserta didik yang tersebar di 89.643 satuan pendidikan menyelenggarakan UN berbasis komputer.

Hasil UN 2019 menunjukkan peningkatan nilai, baik di jenjang SMA, SMK maupun SMP. Pada jenjang SMK, kenaikan hasil UN terlihat pada seluruh mata pelajaran yang diujikan (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kejuruan). Peningkatan hasil UN ini tak hanya pada UNBK, tetapi juga pada UNKP. Sementara pada jenjang SMA, meski ada penurunan hasil UN pada mata pelajaran Kimia (jenjang SMA IPA), terdapat kenaikan pada seluruh mata



UNBK pada kejar Paket C

pelajaran lain. Kenaikan nilai di jenjang SMP juga terjadi di seluruh mata pelajaran, terutama pada sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan UNBK sejak tahun 2017/2018.

Terobosan

Hal lain yang menjadi terobosan pelaksanaan UN 2019 adalah dijangungnya informasi nonkognitif siswa melalui angket UN. Angket UN disajikan setelah UN hari terakhir selesai diselenggarakan. Responden angket UN adalah peserta UNBK dan mengisi secara sukarela. Terdapat lima jenis angket siswa UN. Setiap angket siswa diawali dengan pertanyaan umum yang mengukur kondisi sosial ekonomi, cita-cita dan aspirasi karir, serta persepsi mengenai potensi diri. Lima jenis angket siswa tersebut masing-masing menjangung informasi mengenai

tingkat *familiarity* dan literasi teknologi informasi digital, kesadaran bermasyarakat global, dukungan orang tua dan guru, literasi keuangan, serta persepsi kebahagiaan (*well being*). Jumlah responden angket UN 2019 terdiri dari 512.500 siswa dari 8.549 SMA/MA dan SMK serta 682.603 siswa dari 14.796 SMP/MTs.

Hasil analisis terhadap angket UN diharapkan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai aspirasi siswa serta mengetahui faktor determinan yang dapat meningkatkan capaian hasil belajar siswa.



Pelaksanaan UNBK

Pengawas: Pengawal Ujian Nasional Yang Berintegritas

Validitas dan reliabilitas hasil ujian adalah hal yang utama—apa pun tujuan dari ujian tersebut. Ujian seleksi yang terkontaminasi menyebabkan ketidaklayakan hasil pemilihan peserta. Ujian untuk perbaikan mutu yang diwarnai tindakan tidak berintegritas akan menciptakan peta mutu yang sesat.

Masih ingatkah Anda ketika menimbang berat badan di klinik atau rumah sakit dengan pengawasan perawat atau suster? Bagi Anda

yang sudah dewasa, barangkali perawat tidak perlu memberikan banyak informasi dan menyampaikan peringatan. Namun, ketika

anak kita yang masih balita perlu menimbang berat badannya, perawat akan mengingatkan anak kita untuk memosisikan kedua kaki tepat di tengah timbangan.

Perawat akan meminta kita melepaskan alas kaki, melarang tangan untuk bersangga di tembok, melarang banyak bergerak saat proses penimbangan, dan melarang hal lainnya. Begitu pun ketika kita menimbang bayi. Penggunaan popok dan baju akan menjadi dasar koreksi hasil timbangan. Mengapa semua itu dilakukan oleh perawat? Alasan utamanya adalah agar diperoleh hasil pengukuran berat badan yang akurat

Dari perspektif tujuan, Ujian Nasional (UN) tidak berbeda dengan proses pengukuran berat badan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengharapkan hasil ujian merupakan ukuran yang presisi dari kemampuan hasil belajar siswa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tata cara dan prosedur pengukuran harus dilakukan secara terstandar. Hal itu mungkin menyebabkan peserta merasa cemas saat menjalani ujian, tetapi peran pengawas yang baik adalah dapat memberikan rasa nyaman dan percaya serta tetap menghormati hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam ujian.

Fungsi pengawas ujian (Plake, 2002) ialah meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pengawas ujian memenuhi persyaratan dan menaati tata tertib yang berlaku. Sebagai contoh, prosedur operasional

standar (POS) UN mensyaratkan pengawas UN adalah guru yang memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan: memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. Sementara itu, dalam tata tertib penyelenggaraan UN, pengawas UN harus memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur. Selain itu, selama ujian berlangsung, pengawas ruang ujian wajib memberikan peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan.

Kedua, pengawas ujian menciptakan iklim ujian yang kondusif. Untuk keperluan itu, pengawas harus memberikan perhatian lebih terhadap ruangan, peralatan, prasarana, serta suasana. Kenyamanan ruangan meliputi aspek intensitas cahaya, suhu ruangan, ventilasi, jarak antarpeserta, dan ketenangan suasana ruang ujian. Pengawas berhak untuk tidak mengizinkan siapa pun (termasuk pejabat yang memonitor pelaksanaan UN) untuk masuk ke ruangan karena dapat mengganggu ketenangan suasana ujian.

Ketiga, pengawas ujian menutup peluang terjadinya penyontekan dan kecurangan. Pengawas ujian harus menutup peluang terjadinya penyontekan dan praktik kecurangan karena dia adalah sosok yang paling mengetahui kejadian yang berlangsung di ruang ujian. Pengawas harus memastikan kesesuaian peserta yang hadir dengan daftar peserta dan kesesuaian posisi duduk dengan kursi yang sudah dialokasikan untuk



Ujian Nasional Berbasis Komputer

peserta, mengawasi gerak-gerik peserta tes selama ujian berlangsung, serta memastikan kelengkapan hasil pekerjaan peserta. Pengawas harus berkeliling ruangan selama tes untuk mengetahui secara langsung apakah peserta tes mengerjakan tes secara mandiri ataukah secara curang.

Keempat, pengawas ujian menjaga keamanan bahan tes dan kerahasiaan peserta tes. Untuk menjaga keamanan bahan tes dan kerahasiaan peserta tes, pengawas harus memahami bahwa soal-soal UN adalah dokumen negara yang harus dijaga kerahasiaannya. Pengawas menandatangani pakta integritas sebagai kesanggupan menjaga kerahasiaan. Semua jawaban setiap peserta juga merupakan kerahasiaan dan hanya berhak dilihat oleh pihak yang berwenang. Oleh sebab itu, fungsi pengawas adalah memastikan semua hasil pekerjaan peserta tes dikumpulkan. Peralatan tes, terutama ketika ujian berbasis komputer, harus dipastikan berfungsi optimal. Jika ada peserta berkebutuhan khusus, pengawas perlu memahami kondisi khusus yang diperlukan serta mekanisme perlakuan serta prasarana yang dibutuhkan peserta tersebut. Aspek kerahasiaan hanya untuk diketahui petugas

yang berwenang tanpa mengalami modifikasi atau intervensi.

Kelima, pengawas ujian melaporkan kejadian-kejadian khusus selama tes berlangsung. Sebagaimana dinyatakan dalam POS UN, pengawas ujian harus melaporkan semua kejadian, termasuk kejadian khusus yang berlangsung saat ujian dan ketidaksesuaian tata cara serta prosedur yang ditetapkan. Tindak kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dibuat dalam bentuk berita acara.

Validitas dan reliabilitas hasil ujian adalah hal yang utama—apa pun tujuan dari ujian tersebut. Ujian seleksi yang terkontaminasi akan menyebabkan ketidaklayakan hasil pemilihan peserta. Ujian untuk perbaikan mutu yang diwarnai tindakan tidak berintegritas akan menciptakan peta mutu yang sesat.

Ikhtiar Kemendikbud untuk menggunakan hasil UN sebagai salah satu instrumen peningkatan dan perbaikan mutu pembelajaran akan terkendala manakala pengawas ujian tidak menjalankan fungsi kepengawasannya dengan baik. Hal itu terindikasi dari masih terjadinya praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta saat ujian berlangsung.

Menjangkau yang Tak Terjangkau



Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Nawacita poin ketiga

Di antara megahnya Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan, tersimpan kekayaan yang begitu melimpah, dari sumber daya manusia (SDM), energi, flora dan fauna hingga keragaman bahasa, budaya, dan adat istiadat.

Di balik itu semua, tersimpan beragam permasalahan yang kompleks. Harus diakui, derap pembangunan sejak Indonesia merdeka masih berdenyut kencang di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di perkotaan. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah pinggiran atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Nadi pembangunan di daerah tersebut berdenyut sangat lambat. Sementara itu, keberadaan mereka menjadi benteng terdepan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika tidak segera ditangani dengan tepat, bukan tidak mungkin mereka menjelma menjadi “virus” berbahaya bagi kedaulatan NKRI. Hingga saat ini, banyak wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terjangkau dan tersentuh pembangunan. Hal itu menyebabkan masyarakat setempat mengalami kendala dalam sarana dan prasarannya, baik transportasi maupun komunikasi. Infrastruktur di daerah pinggiran belum tersedia secara layak, termasuk infrastruktur pendidikan.

Di daerah pinggiran, tidak sulit menemukan gedung sekolah yang reyot; gurunya hanya ada beberapa orang saja; buku pelajarannya sudah usang; sejumlah kecil murid yang bersepatu; seragam serba kumal dan lusuh; dan masih banyak anak yang dirundung *stunting* akibat kurang gizi. Tingkat kehadiran guru dan siswa di sekolah masih tergolong rendah. Tak ada budaya prestasi dan api semangat membakar jiwa mereka untuk menjadi SDM yang unggul dan berdaya saing.

Di tengah arus globalisasi yang sudah memasuki era digital, Indonesia benar-benar berjibaku menggapai mimpi agar bisa bersanding dengan negara-negara maju lainnya di belahan dunia lain. Namun, sangat tidak elok melakukan pembiaran dan meninggalkan masyarakat pinggiran sebagai penonton saja. Langkah yang bijaksana adalah merangkul mereka, bergandengan

tangan menyapa indahnya dunia, serta berjuang bersama dalam balutan keutuhan NKRI.

Indonesia sangat diuntungkan dengan pemerintahan Joko Widodo yang sejak era kepemimpinannya dengan tegas menginginkan pembangunan daerah pinggiran. Hal tersebut tertuang dalam poin ketiga dari sembilan poin program prioritas pemerintahan Joko Widodo yang disebut Nawa Cita. Poin ketiga tersebut berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Kemendikbud yang bertanggung jawab dalam pembangunan bidang pendidikan, menindaklanjutinya dengan berbagai terobosan, di antaranya memprioritaskan pembangunan pendidikan bagi masyarakat di wilayah 3T. Terobosan-terobosan tersebut, di antaranya, Kemendikbud menindaklanjuti Nawa Cita khususnya poin ketiga dengan melakukan berbagai terobosan, di antaranya Sarjana Mengajar di Daerah 3T (SM3T), afirmasi pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah 3T, pemberian tunjangan khusus bagi guru yang ditugaskan di daerah 3T, hingga program Guru Garis Depan (GGD).

Terobosan terbaru adalah pembangunan sekolah berasrama dan afirmasi pendidikan menengah (ADEM) bagi putra-putri Papua dan Papua Barat, pemberdayaan prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di wilayah perbatasan di daerah 3T untuk menjadi guru bagi anak-anak sekolah di sana. Selain itu, digulirkan kebijakan penggunaan akses internet *Universal Service Obligation* (USO) bagi sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, dan memperkuat pemanfaatan *smartphone* untuk pembelajaran masa kini.

Pemberian bantuan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) kepada sekolah dan gawai atau tablet kepada siswa secara besar-besaran dimulai dari wilayah pinggiran dan peluncurannya di kabupaten Natuna pada September 2019. Kemendikbud juga telah memberikan bantuan kepada korban bencana gempa di Maluku dan kerusakan di Papua guna memulihkan pendidikan di Maluku dan Papua.



DAFTAR ARTIKEL BAB 5

Sekolah Berasrama dan ADEM	184
Berdayakan TNI untuk Pendidikan di Perbatasan	186
Berkilau di Perbatasan dengan Akses Internet	189
Menyongsong Pembelajaran Masa Kini	194
Program Digitalisasi Sekolah: Percepatan Akses Pelayanan	198
Pendidikan di Wilayah 3T	
Penanganan Gempa di Maluku dan Kerusuhan di Nduga Papua	202

Sekolah Berasrama dan ADEM

"Program sekolah berasrama ini bertujuan agar mencegah tingkat putus sekolah yang angkanya masih cukup tinggi di Papua."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Jumlah Sekolah Berasrama di Papua dan Papua barat

Jenjang	Papua Barat	Papua
SD	1	14
SMP	36	75
SMA	15	35
SMK	9	17

Sekolah Berasrama

Kemendikbud berupaya menyediakan sekolah berasrama di Papua dan Papua Barat disebabkan banyak warga sekolah tersebar di wilayah pegunungan. "Rencana kami, anak-anak yang berada di pedalaman lebih baik turun ke pinggiran kota atau daerah terjangkau dan akan disiapkan asrama. Seperti di Merauke ada SMK Pertanian, bahkan anak-anak dari Papua Nugini (PNG) di sekitar daerah itu ikut bergabung," jelas Mendikbud Muhadjir Effendy. "Program sekolah berasrama ini bertujuan agar mencegah tingkat putus sekolah yang angkanya masih cukup tinggi di Papua," lanjutnya. Program sekolah berasrama merupakan hasil kerja sama antara *Indonesia-American Society of Academics*

(IASA), Kemendikbud, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilaksanakan di SMAN 3 Jayapura dan SMK YPPK Adiluhur.

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), yang digulirkan sejak tahun 2014, merupakan upaya Kemendikbud dalam pemerataan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua dan Papua Barat serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) lainnya. Mereka dipersiapkan agar memiliki kemampuan belajar yang setara dengan sebagian besar anak-anak di Pulau Jawa dan Bali.



Anak-Anak Papua dan Papua Barat yang mengikuti Program ADEM

"Program yang telah berjalan selama lima tahun ini diharapkan nantinya bisa menyetarakan kualitas pendidikan antara pelajar di Papua dan Papua Barat dengan pendidikan terutama di Pulau Jawa yang memang selama ini menjadi barometer utama pendidikan di Indonesia," ucap Muhadjir Effendy.

Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua dan Papua Barat serta wilayah 3T lainnya, juga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Karena peserta didik program ini bisa menyatu dan melihat keragaman selama di perantauan. Ini merupakan semangat bineka tunggal ika yang harus dijaga sebagai kekayaan bangsa," lanjutnya.

Program ADEM setiap tahun telah mengirimkan 500 anak lulusan SMP dari Tanah Papua dan Papua Barat untuk bersekolah di luar Papua, yaitu di Jawa dan Bali. Sebanyak 2.960 anak Papua dan Papua Barat telah terlibat dalam program ini sejak tahun 2013. Program ini sangat efektif guna mengembangkan wawasan kebangsaan dan keberagaman serta perubahan sikap dan mental anak Papua dari subsistem menuju ke mental pekerja keras dan produktif. Lulusan ADEM yang telah melanjutkan ke perguruan tinggi sejak lulusan pertama tahun 2016 hingga 2018 berjumlah 963 (78%). Hingga akhir tahun 2019 sebanyak 500 peserta didik dari Papua dan Papua Barat telah dikirim untuk mengikuti program ADEM.



Anggota TNI di perbatasan turut membantu proses pembelajaran

Berdayakan TNI untuk Pendidikan di Perbatasan

"TNI tetap sebagai TNI, bukan untuk menjadi guru dan menggantikan peran serta posisi seorang guru. Mereka hanya membantu tugas guru-guru di daerah 3T dan wilayah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pengajar di daerah 3T akan terbantu oleh para prajurit."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sekolah-sekolah di kawasan pinggiran masih dirundung permasalahan, salah satunya kurang tersedianya guru. Minat guru untuk ditugaskan dan mengabdikan di daerah 3T sangatlah rendah. Penyebabnya adalah tidak adanya infrastruktur dasar, mulai dari jalan, listrik, air, sinyal, transportasi, dan tempat tinggal. Penyebab lainnya adalah keamanan yang rawan, timbulnya bencana alam, serta binatang buas. Selain itu, jarak tempuh menuju sekolah di daerah 3T cukup jauh sehingga berakibat pada mahalnya biaya yang harus ditanggung oleh guru.

Kemendikbud bertindak menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menghadirkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) yang bertugas menjaga batas teritorial.

Pemberdayaan prajurit TNI AD untuk mengajar dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kehadiran prajurit TNI AD itu juga diharapkan dapat memperkuat penyebaran

nasionalisme secara masif kepada generasi bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TNI TIDAK MENGGESER POSISI GURU

Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan bahwa penempatan personel TNI AD tersebut tidak untuk menggantikan peran dan posisi seorang guru. Kemampuan utama yang diajarkan terkait dengan pembinaan karakter, bela negara, baca tulis hitung, kecakapan hidup, dan kependuan. "TNI tetap sebagai TNI, bukan untuk menjadi guru dan menggantikan peran serta posisi seorang guru. Mereka hanya membantu tugas guru-guru di daerah 3T dan wilayah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pengajar di daerah 3T akan terbantu oleh para prajurit," kata Mendikbud.

Prajurit TNI AD tersebut dibekali modal melalui bimbingan teknis penguatan kompetensi. Materi yang diperoleh di antaranya adalah keterampilan mengajar, materi ajar, pengetahuan tentang keguruan, dan metode-metode mengajar sesuai dengan kebutuhan agar lebih terarah dan optimal.

Pemberdayaan TNI AD ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan pada Februari 2019. Kemendikbud diwakili oleh Dirjen GTK, Supriano, dan pihak TNI diwakili oleh Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjar. Acara itu berlangsung di kantor Kemendikbud.





TESTIMONI

Prajurit TNI AD yang telah mengikuti bimbingan teknis mengatakan telah mendapatkan bekal kemampuan mengajar dengan sangat baik. Beberapa di antaranya, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:



Vinsensus Sinaga,
Yonif Raider 303.

“Banyak yang kami telah dapatkan dari tim pengajar kami seperti dasar membaca, menulis, dan menghitung. Terutama membaca, dasar-dasar yang telah dipahami. Bagaimana mengajari dari pada anak TK, SD, berikut SMP, berbagai jenjang kemudian dasar-dasar yang diberikan mereka sangat menarik dan dapat dipedomani yang nantinya kami bawa ke tempat penugasan. Dan menulis, dasar-dasar menulis seperti bagaimana cara memegang pena. Kemudian menghitung, metode tersebut sangat memudahkan nantinya untuk mengajarkan di daerah pedalaman dan daerah perbatasan,”



Mayjen Bhakti Agus Fajari,
Asisten Teritorial Kasad.

“Dengan kegiatan ini mudah-mudahan prajurit-prajurit menerima pembekalan dengan baik, mereka memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan nanti di daerah perbatasan sehingga masyarakat yang di sana bisa menerima ilmu yang dibekalkan ini. Mereka akan bertugas dan apabila diperlukan di wilayah mereka bisa mengajar di sekolah-sekolah kami berharap dengan latihan ini mereka menambah kemampuannya, kemudian bersemangat selama menerima pembekalan sehingga manfaat sebesar-besarnya” kata Mayjen Bhakti Agus Fajari, Asisten Teritorial Kasad.





Akses Internet menjangkau Anak-anak di perbatasan

Berkilau di Perbatasan dengan Akses Internet

"Guru tidak boleh berhenti untuk belajar, harus terus-menerus belajar. Kalau tidak bisa, nanti disalip oleh anak didik kita yang sekarang keingintahuan peserta didik semakin tinggi sekali."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Akses internet di era revolusi digital 4.0 telah menjadi kebutuhan dasar bidang pendidikan. Sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sekolah impian yang memungkinkan terjadinya proses e-pembelajaran dan e-administrasi. Dibutuhkan fasilitas utama untuk mewujudkannya, antara lain sumber daya listrik, akses internet, dan infrastruktur TIK. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan dengan membolehkan penggunaan dana BOS. Kebijakan bagus ini sayangnya hanya bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah di perkotaan, berbeda dengan sekolah-sekolah di daerah 3T dengan jumlah siswa segelintir. Pada sekolah seperti itu, dana BOS hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar saja.

Khusus untuk daerah 3T, Kemendikbud menggulirkan program akses internet *Universal Service Obligation* (USO). Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemendikbud melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemendikbud bertekad membangun pendidikan di sekolah daerah 3T melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis daring, pemberian perangkat TIK, dan pemberian pelatihan bagi guru di sana.

Tahun 2019 pemerintah menargetkan sebanyak 4.000 sekolah telah terpapar jaringan internet untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mendikbud berharap, melalui perangkat TIK, sekolah memanfaatkannya untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Program internet USO bertujuan untuk pemeratakan akses data dan informasi bagi sekolah dan masyarakat di daerah 3T, meningkatkan partisipasi sekolah/satuan pendidikan dalam pemanfaatan TIK untuk e-administrasi dan e-pembelajaran, serta mendorong partisipasi instansi terkait, baik pusat maupun daerah, dalam penentuan kebijakan TIK untuk sekolah di daerah 3T.

CAPAIAN

Per Mei 2019, jumlah sekolah penerima akses internet USO adalah 2.151 sekolah. Hasil evaluasi Badan Aksesibilitas dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo menyatakan 95% sekolah telah menggunakan dengan baik (*uptime*>30%). Hasil ini memungkinkan Kemendikbud untuk mendapatkan tambahan titik dan *upgrade bandwidth*. Jika masih ada sekolah yang penggunaan internetnya masih rendah (*uptime*<30%) diberikan solusi

dengan melakukan pengurangan lokasi usulan, *downgrade bandwidth* sampai dengan relokasi.

Layanan internet USO digunakan optimal untuk pendataan Dapodik, Sertifikasi Guru, Uji Kompetensi Guru, dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hasil *monitoring* dan evaluasi (monev) Pustekkom juga menunjukkan bahwa kompetensi TIK guru paling banyak adalah kemampuan administrasi umum.

Model pembelajaran program sekolah inovatif oleh Pustekkom dilakukan melalui pemanfaatan portal pembelajaran Rumah Belajar dan juga pemberian Pendidikan dan Pelatihan (diklat) *online* untuk meningkatkan kompetensi TIK guru melalui aplikasi PKB Rumah Belajar yang telah dirintis tahun 2017 melalui laman <http://diklat.belajar.kemdikbud.go.id>.

Sementara itu, untuk program peningkatan SDM, pada tahun 2019 terdapat empat guru 3T pemanfaat internet USO mengikuti kegiatan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri yang diadakan di *University of Queensland*, Australia. Mereka adalah Kalpin Ranto Sihol Berutu (Aceh), Makbul Muavi (Jawa Timur), Lalu Supriyadi (NTB), dan Amaranta Lestoin (Papua).

Manfaat internet USO juga dirasakan oleh Amaranta Lestoin, guru di SD Inpres Syuru, Distrik Asgats, Kabupaten Asmat, Papua. Ia menceritakan keadaan sekolahnya yang kini menjadi sekolah rujukan dari sekolah lain. Oleh karena itu, ia begitu bersemangat melakukan kegiatan pelatihan di Negeri Kanguru dan selanjutnya pengalamannya itu akan dibagikannya saat sudah berada di Papua.

“Semangat ini saya dedikasikan untuk anak didik saya yang berjumlah sekitar 504 siswa dan 27 orang rekan guru yang ada di Papua. Apalagi sekolah kami saat ini telah menjadi sekolah rujukan. Semua ini berkat bantuan Program Internet USO dari Pustekkom, BAKTI Kominfo, dan pihak PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai vendor,” kata Anta. Karena itulah, kesempatan mengikuti pelatihan di *University of Queensland*, Australia ia jadikan sebagai tempat mengasah kemampuan dirinya agar dapat menularkan ilmu yang didapat bagi anak didiknya, rekan kerja, dan tentunya tanah air tercinta. Salah satu hal yang diamati oleh Anta adalah kurikulum *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika atau STEM) yang digunakan di Negeri Kanguru.



RAGAM KATA PEMANFAAT INTERNET USO

Respon positif penerima manfaat internet USO telah didokumentasikan dalam buku berjudul “Inspirasi Pendidik di Perbatasan”. Buku ini disusun berdasarkan hasil interview langsung kepada guru pemanfaat internet USO dan wawancara Tim Pengelola Internet USO.

Buku berisi Testimoni Guru 3T Sekolah Penerima Manfaat Internet USO



inspirasipendidik.USO
Sponsored



20.451 views

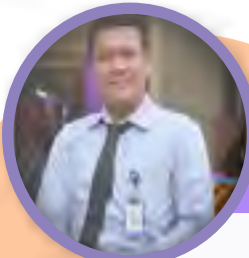
inspirasipendidik.USO “Dulu sebelum adanya bantuan USO ini, operator sekolah maupun operator dinas pendidikan harus menempuh perjalanan darat sekitar 205 km ke Kota Sorong hanya untuk sinkron data Dapodik.”

– Fransiskus Tenau, salah seorang guru 3T di Papua Barat.

[View all 178 comments](#)

2 DAYS AGO

Testimoni guru pemanfaat internet USO di pedalaman Papua



Muksin Apandi, Guru SMPN 4 Jampangkulon

“Sangat membantu sekali, dalam pengembangan dunia pendidikan terutama di daerah terpencil seperti sekolah kami, terutama dalam masalah pelaporan berbasis online, pembelajaran, sumber belajar sekarang lebih dimudahkan berkat adanya Program Internet USO dari Kemenkominfo dan Pustekkom Kemdikbud.”



Nefi Tanta, Guru SMPN 5 Warmare Papua

“Program Internet USO menurut saya sangat bagus dan sangat membantu sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar serta administrasi sekolah.”

Menyongsong Pembelajaran Masa Kini

"Kini siapapun butuh Internet, termasuk bagi para pendidik dan peserta didik. Itulah sebabnya, salah satu ikhtiar mengajar dinamika teknologi itu adalah dengan berinovasi dalam media pembelajaran berbasis internet."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Melihat tren yang ada, sebagian besar informasi dan aplikasi berbasis internet diakses oleh masyarakat melalui *smartphone*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengukuran Analitik Internasional, Comscore terhadap 9 Pasar Global, termasuk Indonesia, terlihat bahwa tren waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet melalui perangkat *mobile* di Indonesia mencapai 90% dibandingkan dengan desktop yang hanya berkisar 10%. Dengan adanya tuntutan ini, sudah menjadi kewajiban untuk mengembangkan suatu aplikasi ke dalam bentuk *mobile*, tidak terkecuali e-pembelajaran.

Pustekkom mengembangkan e-pembelajaran berbasis *mobile apps*, seperti Rumah Belajar, TV Edukasi, dan M-Edukasi. Pembelajaran masa kini ada kecenderungan akan memanfaatkan peran tersebut.

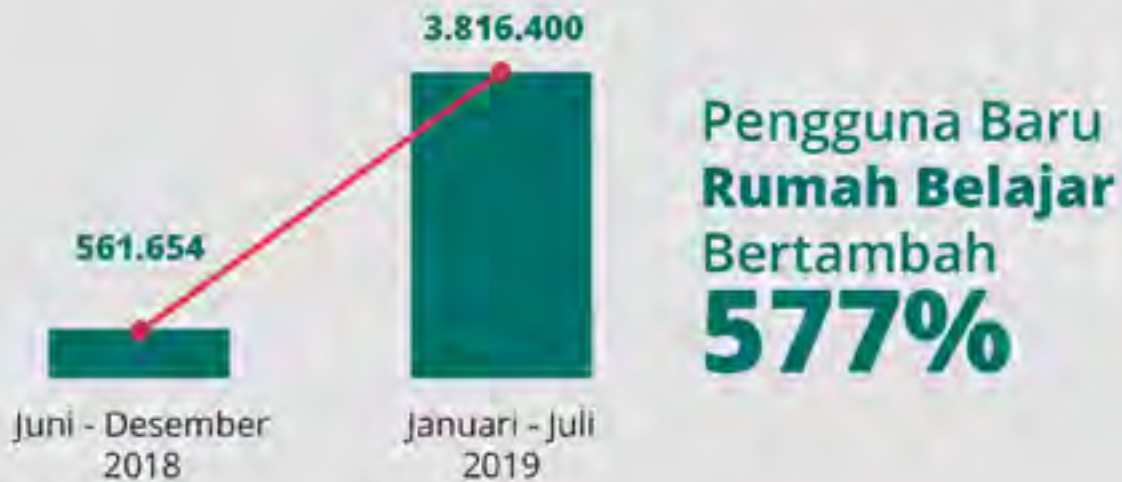
Aplikasi Rumah Belajar sendiri telah ada sejak tahun 2011 dan berkembang pesat pada tahun 2019. Hingga bulan Juli terdapat penambahan pengguna baru sebanyak 577% atau sekitar 3,8



Guru dan Siswa menggunakan Rumah Belajar melalui Telepon Pintar



<https://belajar.kemdikbud.go.id/>



Sebagian Besar (**87,7%**) pengguna Rumah Belajar mengakses melalui perangkat **mobile**



Sebagian besar pengguna berusia **18 - 34 Tahun** (Sebagai catatan analisa ini menggunakan *google analytics*, dimana pengguna di bawah 18 tahun dihitung sebagai kelompok 18 - 24 tahun)



Sebanyak **57%** pengguna berjenis kelamin **Lelaki**



Program unggulan TV Edukasi "PASTI BISA" yang bertujuan untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian.

juta orang. Dalam rentang waktu yang sama, Rumah Belajar sudah dikunjungi sebanyak 35,8 juta kali, dengan mayoritas pengguna menggunakan ponsel (87,7%), komputer (11,0%), atau tablet (1,3%). Perkembangan Rumah Belajar ini terjadi bersamaan dengan makin populernya pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi momentum sekaligus tantangan bagi Kemendikbud ke depannya.

Pustekkom juga mengembangkan layanan melalui aplikasi TV Edukasi *Mobile App* untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kebebasan akses yang lebih fleksibel. Aplikasi *mobile* TV Edukasi diharapkan menjadi alternatif yang dapat digunakan guru dan siswa.



Program unggulan TV Edukasi "PASTI"



Program Digitalisasi Sekolah: Percepatan Akses Pelayanan Pendidikan di Wilayah 3T

"Kita ingin menjadikan pulau terdepan jadi beranda Indonesia, bukan lagi sekadar halaman belakang."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

"Program digitalisasi sekolah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan sumber daya manusia menyongsong revolusi industri 4.0. Saya yakin dengan digitalisasi ini semua hambatan akibat kesenjangan struktural dan spasial akan bisa diselesaikan dengan digitalisasi ini" (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah meluangkan waktu untuk meninjau proses pembangunan pendidikan di daerah kami. Melalui kunjungan kerja kali ini, Bapak sudah berkenan meluncurkan beberapa program seperti penyerahan Kartu Indonesia Pintar, penerapan sekolah digital dan beberapa program lainnya. Semoga segala perhatian yang diberikan bagi kami dapat memberikan pengaruh positif bagi kami dalam menyelenggarakan program kerja di bidang pendidikan yang pada gilirannya akan membawa putra dan putri daerah menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing" Abdul Hamid Rizal, Bupati Kabupaten Natuna

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program digitalisasi sekolah di salah satu pulau terluar Indonesia, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada Rabu (18/9). Peluncuran program ini ditandai dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada sekolah dan gawai atau tablet kepada siswa.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) program digitalisasi sekolah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan sumber daya manusia menyongsong revolusi industri 4.0. Dalam arahan, kata Mendikbud, Presiden meminta semua Menteri, termasuk Mendikbud untuk

memberikan perhatian terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar mendapatkan fasilitas-fasilitas pembangunan termasuk di bidang pendidikan.

“Dua tahun yang lalu, Bapak Presiden Jokowi memberikan arahan supaya segera merealisasikan penggunaan TIK untuk mempercepat akses pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah pinggiran. Sejak itulah, kita mulai merevitalisasi jaringan atau portal yang dimiliki Kemendikbud atau jaringan cyber terutama untuk portal bahan ajar yang sekarang disebut Rumah Belajar. Setelah 1,5 tahun lebih didandani, hari ini lah kita menyatakan siap untuk mulai merealisasikan program penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara besar-besaran yang dimulai dari wilayah pinggiran dan launchingnya di Kabupaten Natuna,” terang Mendikbud pada peluncuran program tersebut.

Mendikbud berharap Kabupaten Natuna yang menjadi perdana peluncuran Program Digitalisasi Sekolah dapat menjadi contoh yang baik bagi sekolah-sekolah di kabupaten dan provinsi lainnya.” Mulai sekarang saya mohon kepada guru untuk mulai mempelajari dan menguasai materi yang tersedia di portal Kemendikbud, khususnya yang ada di dalam platform digital yaitu Rumah Belajar. Itu gratis tidak perlu membayar. Kita harapkan platform ini tidak sekedar untuk menyediakan bahan belajar, tetapi bisa jadi tempat berinteraksi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa bahkan jika bisa dengan

pihak yang lain, seperti Pak Bupati juga bisa terlibat disitu, Kapolres dan yang lainnya bisa memanfaatkan Rumah Belajar ini untuk berinteraksi dengan para siswa,” ungkap Mendikbud.

Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan bantuan sarana pembelajaran TIK dan tablet melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja kepada 5.987 sekolah dan 692.101 siswa. Sedangkan melalui BOS Afirmasi untuk 31.387 sekolah dan 1.049.433 siswa. Di Kabupaten Natuna sendiri, Kemendikbud membagikan tablet kepada 1.142 siswa yang terdiri dari 508 siswa kelas 6 SD, 303 siswa kelas 7 SMP, 331 siswa kelas 10 (228 siswa SMA dan 103 siswa SMK).

Selain itu, sarana pembelajaran TIK berupa PC-Server, laptop, LCD, router dan eksternal hardisk akan diberikan kepada 38 unit sekolah di Kabupaten Natuna, yang terdiri dari 25 SD, 9 SMP, 3 SMA dan 1 SMK. “Sekarang baru sekitar 1,7 juta siswa dan 37 ribu sekolah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan kebutuhan yang berlipat, sehingga saya harapkan dua sampai tiga tahun ke depan sekolah-sekolah kita, betul-betul sudah menggunakan platform digital untuk proses belajar mengajar dan mendukung proses belajar yang konvensional. Sekali lagi dengan digulirkannya platform digital ini bukan berarti proses belajar konvensional tidak berlaku tetapi tetap penting. Karena tatap muka antara siswa dengan guru masih menjadi cara yang paling baik. Cara yang paling tepat

untuk mendidik anak terutama dalam rangka membentuk karakter siswa,” kata Mendikbud.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan Program Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan TIK untuk mempermudah proses belajar mengajar. “Guru dan siswa makin mudah mengakses bahan ajar. Guru, siswa kepala sekolah dan unsur pendidikan juga bisa mengaksesnya. Selain itu, komunitas guru bisa bekerja sama membuat materi bahan ajar digital, membuat tes ujian harian secara bersama-sama dalam jaringan

offline maupun online,” pungkas Didik Suhardi.

Ke depan program digitalisasi sekolah akan terus diperluas di 34 provinsi yang sekolahnya berada di desa tertinggal dan sangat tertinggal (afirmasi) serta sekolah yang memiliki rapor mutu dan nilai ujian nasional serta indeks kinerja daerahnya mengalami pertumbuhan atau peningkatan selama 2 tahun terakhir.

Semoga program digitalisasi sekolah dengan penggunaan dan pemanfaatan TIK dapat mempercepat akses pelayanan pendidikan khususnya di wilayah-wilayah pinggiran.

No	Jenjang	Jumlah		
		Sekolah	Siswa	Anggaran (dalam ribuan)
1	SD	27,398	620,057	1,879,386,000
2	SMP	6,432	524,209	1,197,501,000
3	SMA	2,091	329,816	706,906,000
4	SMK	1,308	263,828	556,193,000
5	SLB	145	3,614	10,103,000
Total		37,374	1,741,524	4,350,089,000



Penanganan Gempa di Maluku dan Kerusakan di Nduga Papua

Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kunjungan dan memberikan bantuan ke daerah yang terkena dampak gempa dan kerusakan guna memulihkan pendidikan yang ada di Maluku dan Papua

Indonesia yang posisinya berada di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi) rentan menghadapi gempa bumi. Gempa bumi menjadi salah satu ancaman bencana alam terbesar di Indonesia karena bisa terjadi tiba – tiba dan bisa menyerang wilayah padat penduduk. 26 September 2019 gempa bumi berkekuatan 6.5 Skala Richter (SR) terjadi di Provinsi Maluku. Pusat Gempa berada terjadi pada 42 kilometer arah timur laut Kota Ambon dengan kedalaman 10 KM. Guncangan gempa bumi dapat dirasakan di seluruh wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat. Hasil analisis mekanisme sumber oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan gempa itu dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan dari struktur sesar mendatar (strike slip fault).

Gempa yang terjadi di Maluku juga berdampak pada dunia pendidikan, mulai dari sarana prasarana, peserta didik beserta orang tuanya, hingga guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan data yang dikompilasi Kemendikbud melalui Lembaga Penjamin

Mutu Pendidikan (LPMP), terdapat 24 sekolah yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.

Guna memulihkan pendidikan yang ada di Maluku, Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kunjungan ke daerah yang terkena dampak gempa dengan memberikan bantuan:

- 100 paket schoolkits dari Direktorat SD
- 100 paket schoolkits dari Direktorat SMP
- 150 paket schoolkits dari Direktorat SMA
- Tunjangan khusus untuk guru di Maluku
- Percepatan KIP

Selain gempa, kerusakan di Papua juga terjadi pada bulan September 2019 yang menyebabkan proses pembelajaran terganggu, siswa beserta orang tua mengungsi. Akhir bulan September 2019 Mendikbud bertolak ke Papua dengan agenda di 3 kabupaten yaitu kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nduga. Tujuannya adalah



Pemberian Bantuan kepada Korban Gempa Maluku

melihat secara langsung kondisi di Nduga.

Berdasarkan data yang telah dikompilasi Kemendikbud, kerusakan yang terjadi

menyebabkan siswa beserta orang tua mengungsi begitu pula guru yang mengajar di sekolah.

INFORMASI ANAK YANG MENGUNGSI KABUPATEN NDUGA



646 anak dari 12 Distrik terdampak konflik mengungsi ke Wamena, Lanny Jaya, dan Mimika



**JUMLAH
SISWA**
SD 1.901
SMP 360
SMA 36

**JUMLAH SISWA
MENGUNGSI**
SD 377
SMP 233
SMA 36

SISWA YANG LAIN BELUM DIKETAHUI KEBERADAANNYA

- Dibutuhkan bantuan seragam sekolah, alat tulis dan sepatu sekolah



KEBUTUHAN PENGUNGSI KABUPATEN NDUGA



Keadaan guru :

Total jumlah Guru ASN di Kabupaten Nduga berjumlah 169 orang.
Dengan rincian sebagai berikut :

SD	: 92 orang
SMP	: 56 orang
SMA	: 18 orang
SMK	: 3 orang

- Pemerintah Kabupaten Nduga telah merekrut tenaga kontrak sebanyak 120 guru yang disebar ke 4 TK, 29 SD, 7 SMP, 2 SMA, dan 2 SMTK.



Kemendikbud juga membagi tablet secara simbolis untuk penerapan digitalisasi sekolah, selain itu juga Mendikbud memberikan bantuan 1500 seragam sekolah bagi pengungsi di Kabupaten Nduga di distrik Kenyam dan Mbua. Juga pemberian 5 unit laptop dari Direktorat

PAUD kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya. Guna mempercepat penguatan akses dan mutu pendidikan di Papua dan Papua Barat, Kemendikbud juga melaksanakan peresmian Sekretaris percepatan pendidikan Papua dan Papua Barat.



6

Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Perbukuan



Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) Kemendikbud

“Tantangan terhadap kebudayaan nasional ini hanya dapat dijawab apabila kebudayaan ditempatkan sebagai hulu nya pembangunan. Kebudayaan mesti mewarnai setiap lini pembangunan,”
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sungguh kaya Indonesia dari sisi budaya. Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik menyebutkan Indonesia memiliki 1.331 kelompok suku. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Sementara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud telah memetakan dan memverifikasi 668 bahasa daerah. Kekayaan budaya itu menjadi modal berharga bagi pembangunan Indonesia.

Ketika menghadiri acara Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) di Kemendikbud 9 Desember 2018 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan di era perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti saat ini, masyarakat diminta aktif menjaga kebudayaan. "Kita harus selalu ingat untuk terus aktif, nguri-uri kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara dan sekaligus menguatkan dan mengembangkannya dalam menghadapi perkembangan zaman," kata Jokowi.

KKI 2018 bertujuan untuk menyukseskan Nawacita butir 8, yakni "melakukan revolusi karakter bangsa". Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbentuk agenda-agenda pokok dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kebudayaan selama 20 tahun ke depan.

Kemendikbud telah melaksanakan berbagai program di bidang kebudayaan yang kreatif yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, antara lain, program Belajar Bersama Maestro (BBM) dalam rangka mengisi liburan sekolah yang diisi dengan belajar bersama ahlinya atau nyantrik. Dengan cara ini, peserta didik bisa langsung berinteraksi bersama tokoh seni di Indonesia. Kegiatan lain, misalnya Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) untuk menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya.

Kemendikbud juga memberi bantuan berbagai peralatan di bidang seni kepada sekolah-sekolah, antara lain, bantuan alat musik dan peralatan produksi film sebagai sarana praktik peserta didik. Ada pula kegiatan nonton bareng film bermutu, selain gelar karya film pelajar.

Di bidang bahasa, Kemendikbud melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang benar, antara lain berupa program Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI), yakni tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing.

Sebagai negara yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, Bangsa Indonesia harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan Bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Hingga saat ini bahasa Indonesia telah diajarkan kepada orang asing, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri tercatat tidak kurang dari 75 lembaga penyelenggara program BIPA, baik di perguruan tinggi maupun lembaga kursus. Sedangkan di luar negeri, pengajaran BIPA dilakukan di sekitar 41 negara melibatkan 355 lembaga yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat kebudayaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan lembaga-lembaga kursus.

Kemendikbud juga melaksanakan program pengembangan istilah dan kosakata yang diwujudkan dalam pembuatan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima. Jumlah lema dan makna bertambah hingga mencapai 127.036. Pengerjaan KBBI Edisi Kelima mulai menggunakan aplikasi penyusunan kamus yang diberi nama KBBI Daring. Aplikasi ini selain dirancang sebagai mesin pencarian yang diperuntukkan bagi pengguna juga terintegrasi dengan pekerjaan menyusun dan menyunting kamus yang diperuntukkan bagi tim penyusun. Selain itu, dalam aplikasi ini tersedia pula fitur interaktif yang memungkinkan pengguna menyumbangkan kata baru, mengomentari entri kamus, dan bahkan mengoreksi entri tersebut.

Di bidang perbukuan, Kemendikbud melakukan pengendalian mutu buku melalui penilaian buku secara daring dengan penggunaan aplikasi. Pengembangan terhadap buku teks pelajaran juga dilakukan dalam bentuk cetak dan elektronik.

Masih banyak program lain di bidang kebudayaan, bahasa, dan perbukuan yang dilaksanakan dengan berbagai pihak, seperti seniman, budayawan, pakar, pemerintah daerah, dan masyarakat pada umumnya untuk mengangkat budaya Indonesia agar semakin berjaya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter budaya, maka Indonesia akan siap menghadapi era Industri 4.0 yang penuh tantangan dan peluang sekaligus.



DAFTAR ARTIKEL BAB 6

Mengembangkan Budaya Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian	211
Platform Indonesiana	216
Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Sebagai Warisan	220
Budaya Dunia	
Sinergi Seniman dan Peserta Didik Majukan Budaya Milik Negeri	224
Karavan Budaya <i>Go International</i>	227
Bantuan Sarana Kesenian	230
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Film Indonesia melalui	233
Nonton Bareng	
Gelar Karya Film Pelajar	236
Dialog Selesaikan Masalah Sensor Film	238
<i>Workshop</i> Perfilman Dalam Rangka Kompetensi Keahlian Produksi	240
Film	
Pemajuan Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Bantuan Perfilman	242
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	248
Angkat Martabat Bangsa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia bagi	250
Penutur Asing	
Pengembangan Istilah dan Kosakata	253
Pembinaan Cinta Bahasa dan Sastra	255
Mitra Komunitas Lindungi Bahasa Daerah	259
Pengembangan dan Penilaian Buku Pendidikan Berkualitas	262
Satukan Penelitian Arkeologi dan Rumah Peradaban	266



Permainan Tradisional Batok Kelapa

Mengembangkan Budaya Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

"Kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi karena inti dari kebudayaan adalah kebahagiaan."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Indonesia begitu kaya dari sisi keanekaragaman budaya dengan 1.331 kelompok suku yang dimiliki. Tidak hanya itu, dari segi bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah

memetakan dan memverifikasi 668 bahasa daerah yang berbeda.

Kekayaan budaya itu menjadi modal berharga bagi pembangunan Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun strategi kebudayaan dengan mengacu pada Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hal itu disampaikan Presiden pada 31 Agustus 2016.

Kongres Kebudayaan Indonesia

Kongres Kebudayaan Indonesia yang berlangsung 5-9 Desember 2018 dirancang sebagai forum perumusan strategi kebudayaan tingkat nasional dengan masa berlaku 20 tahun. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kongres telah menunaikan amanat itu dengan menghasilkan dokumen Strategi Kebudayaan yang didasarkan atas pembacaan yang teliti atas seluruh dokumen pokok pikiran kebudayaan Daerah kabupaten/kota (339 dokumen) dan provinsi (34 dokumen). Tak hanya itu, Strategi Kebudayaan juga disusun atas dasar masukan dari forum-forum prakongres yang dijalankan di setiap sektor kebudayaan, baik atas inisiatif pemerintah maupun masyarakat.

Strategi Kebudayaan memuat 7 agenda strategis pemajuan kebudayaan:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;

3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Sebagai rekomendasi, Kongres Kebudayaan Indonesia yang akan dilangsungkan lima tahun mendatang diharapkan dapat menjawab masalah kurangnya partisipasi akibat belum tuntasnya penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di berbagai kabupaten/kota. Penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia mendatang haruslah mengupayakan penyelesaian penulisan atau pembaruan (bagi yang dulu sudah menyusun) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah secara tuntas sebelum penyelenggaraan Kongres sehingga suara dari setiap daerah dapat terwadahi dengan baik.

Pekan Kebudayaan Nasional

Dalam rangka menjaga dan mengembangkan kekayaan bangsa tersebut, Kemendikbud mengadakan Pekan Kebudayaan Nasional



Kemah Kebangsaan untuk melestarikan Permainan Rakyat sebagai Kekayaan Budaya Bangsa

(PKN) di tingkat pusat pada 7-13 Oktober 2019 dengan tema "Indonesia Bahagia". Acara ini diselenggarakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK). Pekan kebudayaan juga dilakukan di daerah pada periode April-September 2019.

Setidaknya ada lima kegiatan utama dalam Pekan Kebudayaan Nasional, yaitu kompetisi daerah, kompetisi nasional, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, dan pertunjukan karya budaya bangsa. "Harapan kami, kegiatan berjenjang dari desa hingga pusat yang terdiri atas kompetisi daerah, kompetisi nasional, konferensi pemajuan kebudayaan, ekshibisi, dan pertunjukan karya budaya, bisa melestarikan budaya Indonesia,"

kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, Sabtu (2/3/2019).

Pekan Kebudayaan Indonesia 2019 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Seperti yang berlangsung di Tulungagung, Jawa Timur. Ratusan pemuda dan warga antusias menggelar Kemah Kebangsaan. Kompetisi yang wajib dilaksanakan oleh daerah meliputi 4 permainan rakyat, yakni Gobak Sodor/Hadang, Terompa Panjang, Egrang dan Lari Balok.

PKN juga dilengkapi dengan diskusi, seminar, kuliah umum, pidato, *talkshow*, *workshop*, dan diskusi terpumpun tentang pemajuan kebudayaan di daerah. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan inisiatif

ekosistem budaya mulai dari lini terkecil dengan menghadirkan ajang kompetisi yang menarik. PKN juga bisa mewadahi ruang dialog untuk melahirkan pengetahuan baru yang bersifat visioner bagi pemajuan budaya.

PKN diselenggarakan untuk mewujudkan Nawacita Butir 9, yakni “Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia”. Untuk memastikan hal tersebut, PKN dicirikan oleh dua hal. Pertama, PKN dirancang sebagai puncak dari rangkaian Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) sehingga menghidupkan suasana silaturahmi antarkelompok budaya daerah yang pada akhirnya akan menggulirkan restorasi sosial Indonesia. Kedua, PKN dirancang sebagai

parade kekayaan budaya yang menonjolkan aspek kebinekaan Indonesia.

Untuk mengatasi kendala ketersambungan antara PKD dan PKN, perlu diupayakan forum-forum pendahuluan yang melibatkan pejabat daerah dan pelaku budaya di daerah. Adanya forum-forum semacam itu diperlukan untuk mengikat komitmen bersama dalam menghadirkan aneka perhelatan budaya di daerah sebagai PKD yang berada dalam satu rangkaian besar yang akan memuncak pada PKN.

Kemah Budaya

Untuk memperkenalkan budaya kepada generasi penerus, Kemendikbud



menyelenggarakan Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM). Acara tersebut diselenggarakan di Bumi Perkemahan Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 21-25 Juli 2019. Sebanyak 133 kelompok lolos seleksi dengan total peserta 589 orang. Satu kelompok terdiri dari 3-5 peserta. Seluruh kelompok dibimbing tim fasilitator yang bertugas mendorong diskusi agar kelompok berhasil menyusun proposal, memberi inspirasi dan perspektif baru dalam upaya pemecahan tantangan pemajuan kebudayaan melalui bentuk-bentuk purwarupa/aktivasi inisiatif sosial tertentu.

Melalui proses bimbingan ini, diharapkan setiap kelompok berhasil menyusun proposal yang berisi rincian gagasan. Kemudian, gagasan yang telah dipertajam lewat bimbingan ini dipresentasikan dihadapan juri pada waktu kemah, 23-24 Juli 2019.

Salah seorang peserta, Indah Nur Zahra merasakan manfaat Kemah Budaya Kaum Muda. Selama ini ia berpikir bagaimana cara untuk mengembangkan budaya bersama tim. "Ide kami dinilai pihak fasilitator terlalu idealis. Nah di sini kami diajari bagaimana caranya budaya itu bisa menghasilkan uang. Seru!" kata Indah.

KBKM diharapkan menjadi program rutin Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dapat berjalan setiap tahun. Hal ini penting karena melalui kegiatan ini, terjadi audiensi antara Kemendikbud dengan kaum muda yang berwawasan teknologi dan budaya kekinian.





Seni Teater dalam Indonesiana

Platform Indonesiana

"Platform Indonesiana sangat mendukung kami dalam upaya terciptanya penyelenggaraan Festival Seni Multatuli yang berhasil. Tercatat pelonjakan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara yang drastis selama pelaksanaan kegiatan festival. Hal ini sangat berdampak baik bagi Lebak, bukan hanya terkait publikasi semata namun juga dari sisi ekonomi." (Iti Octavia, Bupati Lebak)

Tata kelola kebudayaan menjadi poin penting bagi Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Para pemangku kepentingan bidang kebudayaan berkewajiban memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola kebudayaan, baik dari sisi kualitas, manajemen, maupun

tindakan. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan membentuk sebuah platform yang diberi nama Indonesiana.

Platform Indonesiana adalah suatu mekanisme pengelolaan terpadu atas festival atau kegiatan budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan didukung oleh Pemerintah Pusat, serta dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah kerja bersama. Indonesiana merupakan platform gotong royong kebudayaan, mulai dari festival kesenian, simposium ilmiah, dan juga kegiatan lain yang mengonsolidasi penggunaan sumber daya pembangunan kebudayaan secara strategis. Indonesiana tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan festival atau kegiatan budaya di Indonesia, melainkan meningkatkan kualitas dan mengamplifikasi dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan yang terhimpun di dalamnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan kebudayaan yang berpijak pada platform Indonesiana memiliki tugas menciptakan dampak dalam memperkuat ekosistem kebudayaan. Pada 2019, Indonesiana digelar di 19 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlahnya dua kali lipat lebih banyak daripada rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam platform Indonesiana 2018.

Indonesiana diselenggarakan untuk mewujudkan Nawacita butir 3, yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dengan adanya Indonesiana, diharapkan terwujud pengembangan ekosistem budaya di berbagai daerah yang akhirnya akan mendorong tumbuhnya industri budaya lokal sebagai tulang punggung pembangunan dari pinggiran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dituntut bukan hanya untuk menghidupkan budaya tradisi tetapi juga membuat budaya tradisi itu untuk menghidupkan kesejahteraan masyarakat. Terkadang sesuatu hanya bisa dilestarikan kalau sesuatu itu bermanfaat dalam menjawab kebutuhan konkret. Tanpa kemungkinan pemanfaatan, masyarakat akan kehilangan alasan untuk melestarikannya. karena pelestarian berarti penggunaan terus-menerus, pelestarian mensyaratkan peningkatan kemungkinan pemanfaatan. “Pertanyaan yang semestinya kita ajukan adalah bagaimana membuat budaya tradisi kita tetap relevan dalam menjawab kebutuhan konkret, tetap bermanfaat dalam mengatasi tantangan hidup sehari-hari?” kata Menteri Muhadjir.

Festival Multatuli

Salah satu kegiatan rangkaian Indonesiana yaitu Festival Multatuli di Kabupaten Lebak, Banten pada 9-15 September 2019. Festival ini merupakan bagian dari ikhtiar mengenalkan Multatuli dan Museum Multatuli kepada masyarakat secara gotong royong. Multatuli sendiri adalah pengarang yang membunuh kolonialisme, meminjam pernyataan dari Pramoedya Ananta Toer.

Platform Indonesiana ke depan diharapkan akan lebih mengutamakan agenda pembangunan kapasitas SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di daerah. Pemerintah pusat diharapkan lebih fokus pada

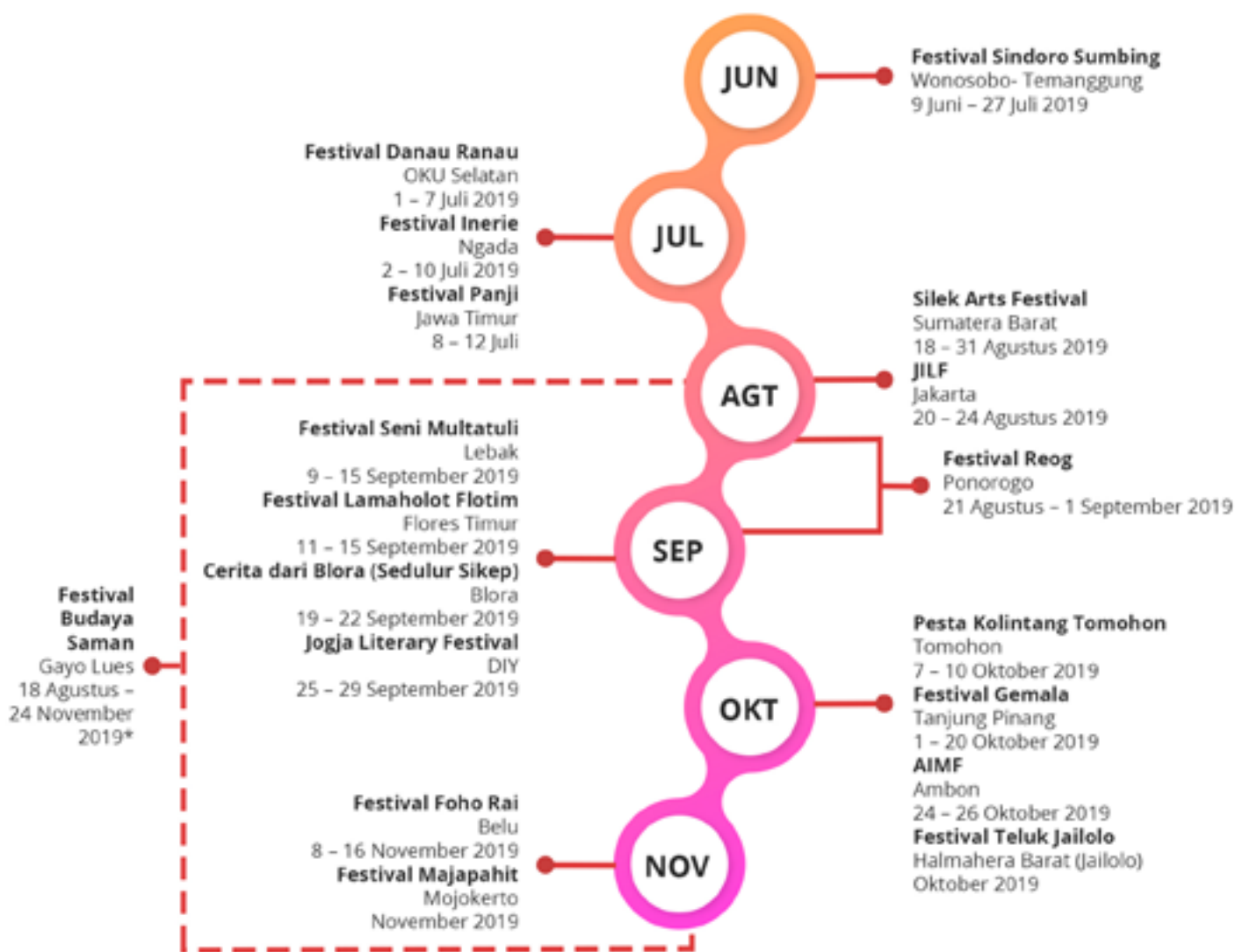
Pertunjukan Seni Bela
Diri dalam Festival
Indonesiana



peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya, melalui: lokakarya, pembinaan SDM kebudayaan dan penguatan tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan ketimbang sekadar menjadi penyelenggara festival di daerah. Harapannya, dengan cara itu, ekosistem

budaya betul-betul dapat berkembang melalui sinergi dalam memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan lintas kategori pemangku kepentingan sehingga ekosistem tersebut menjadi lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

Rangkaian Kegiatan Indonesiana





Kondisi di Dalam Tambang Batu Bara Sawahlunto Zaman Dahulu

Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Sebagai Warisan Budaya Dunia

Kebudayaan Indonesia tahun ini meraih prestasi gemilang di kancah internasional yaitu berhasil menjadikan tambang batu bara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan budaya dunia.

Berbicara mengenai Kota Sawahlunto, maka tidak terlepas dari peninggalan tambang batu bara, yang kemunculannya berhubungan dengan revolusi industri di Eropa pada abad ke-18. Negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk menguasai sumberdaya yang dapat memenuhi kebutuhan industri, salah satunya adalah sumberdaya batu bara.

Seiring dengan penjajahan Belanda di

Indonesia, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda memerintahkan untuk melakukan penelitian mengenai kandungan batu bara di Sawahlunto. Penelitian pertama dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858 dan kedua dilakukan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1868. Hasil penelitiannya mencengangkan, bahwa kandungan batu bara di sekitar aliran Batang Ombilin mencapai tidak kurang dari dua ratus juta ton. Tak ayal,

penemuan ini mengejutkan Pemerintah Hindia Belanda karena mereka melihat potensi dan nilai keuntungan yang sangat besar dari sumber batu bara tersebut.

Untuk memastikan infrastruktur distribusi batu bara berjalan dengan baik, Belanda merancang proyek pembangunan infrastruktur terintegrasi yang disebut “Tiga Serangkai”, dengan fokus pada

1. Tambang terbuka dan jaringan tambang dalam disokong dengan fasilitas pengolahan batu bara dan berbagai fasilitas kota tambang yang lengkap di Sawahlunto (*Sawahlunto mining site and company town*);
2. Pembangunan jaringan kereta api dengan teknik tingkat tinggi yang terdiri dari rel gigi, jembatan dan terowongan, yang menghubungkan lokasi tambang hingga pelabuhan, membentang sepanjang 155 kilometer di medan pegunungan yang sulit (*railway facilities and engineering structures*);
3. Fasilitas penyimpanan batu bara di Pelabuhan Emmahaven. Tempat batu bara dimuat untuk dikapalkan ke seluruh wilayah Belanda (*Netherlands East Indies*) dan wilayah Eropa lainnya (*coal storage facilities at Emmahaven Port*).

Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto merupakan tambang tertua di Asia Tenggara sekaligus perusahaan pertama yang menerapkan teknik tambang dalam. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan Batu Bara

dengan kualitas terbaik. Untuk melakukan penambangan ini diperlukan teknologi tinggi terutama ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi lingkungan yang menantang.

Ombilin Sawahlunto masuk Daftar Sementara Warisan Dunia kategori budaya pada tahun 2015 dengan nama Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto. Lalu terjadi proses pengumpulan data, penyusunan dokumen pendukung, dan diskusi panjang para ahli serta akademisi dari dalam dan luar negeri yang makin intensif. Sejak itu juga muncul usulan perluasan tema nominasi yang lebih bernarasi global dan memperkuat Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value*) bila dibandingkan hanya mengusulkan bangunan-bangunan tua di kota Sawahlunto. Implikasi perluasan wilayah nominasi adalah dengan menggabungkan beberapa kota atau kabupaten, yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat ke dalam satu wilayah nominasi. Nilai Universal Luar Biasa berisikan makna penting dari segi budaya yang sangat luar biasa sehingga melampaui batas nasional dan memiliki arti penting bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Untuk Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WTBBOS), nilai universal itu tercipta atas inovasi teknologi pertambangan yang diikuti oleh negara lain. Terjadi penggabungan teknik pertambangan bangsa Eropa dengan kearifan lokal, praktik tradisional, dan nilai

budaya dalam kegiatan penambangan yang dimiliki masyarakat Sumatera Barat. Warisan budaya ini menunjukkan adanya pertukaran informasi dan teknologi lokal dengan teknologi Eropa terkait dengan eksploitasi Batu Bara di masa akhir abad ke-19 sampai dengan masa awal abad ke-20 di dunia, khususnya di Asia Tenggara.

Sebagai Warisan Dunia, Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto memenuhi dua kriteria dari sepuluh kriteria, sesuai yang dijelaskan dalam Pedoman Warisan Dunia UNESCO, yaitu kriteria ii dan kriteria iv sebagai berikut.

Kriteria ii Menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu rentang

waktu atau dalam suatu wilayah budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lanskap. Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto berkontribusi bagi dunia pertambangan batu bara yaitu pengembangan pengetahuan teknologi tambang dalam, khususnya untuk karakter iklim tropis

Kriteria iv Merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. WBTBBOS merupakan bukti luar biasa dan menjadi contoh dunia mengenai rancang teknologi, untuk penambangan batu bara yang memiliki karakter khas pada tahap akhir industrialisasi global. Wujud teknologi ini



diwujudkan dalam bentuk sistem penambangan terintegrasi dan efisien, yaitu pembangunan kota tambang, teknologi tambang dalam, pengolahan batu bara, sistem transportasi dan pengapalan.

Upaya perlindungan Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto didasarkan pada instrumen hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di Indonesia, di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk pengendalian rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 345/M/2014 tahun 2014 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.
4. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya.

Untuk selanjutnya, diperlukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat untuk merumuskan bentuk pengelolaan, pelestarian

sampai perlindungan Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto sebagai Warisan Dunia. Diharapkan kedepan akan ada keterkaitan koordinasi pengelolaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk manajemen pengelolaan di Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto.

Tahun 2019 Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* di Sumatera Barat ditetapkan sebagai Warisan Dunia, yaitu pada tanggal 6 Juli 2019 pada Sidang ke-43 Komite Warisan Dunia yang berlangsung di Baku, Azerbaijan.

Melalui pengakuan internasional ini, maka menjadi momentum bagi *multistakeholder* pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan identifikasi, perlindungan, konservasi, dan transmisi nilai-nilai luhur warisan bangsa dapat terjadi dan berkelanjutan dari generasi ke generasi. Selain perlindungan dan edukasi ini, status warisan dunia sudah seyogyanya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi. Hal ini berarti, yang perlu disadari semua pihak, bahwa banyak hal pekerjaan rumah yang mesti dilakukan ke depan.



Pertunjukan Seni oleh Pelajar

Sinergi Seniman dan Peserta Didik Majukan Budaya Milik Negeri

"Seni dan budaya harus menjadi arus utama dalam pendidikan, sehingga memperlihatkan pentingnya peran kesenian dan kebudayaan." (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Dalam menjaga keanekaragaman tersebut, peran serta dari berbagai pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menginisiasi salah satu program yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, dinas, seniman, generasi muda dan juga satuan

pendidikan sebagai media pembelajaran kesenian Indonesia.

Kegiatan tersebut antara lain Belajar Bersama Maestro (BBM) dan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS). Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menggerakkan berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem kebudayaan.



Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Belajar Bersama Maestro

Program Belajar Bersama Maestro (BBM) yang dilaksanakan pada 2019 menekankan kepada penguatan karakter, toleransi, kebinekaan, dan kreativitas. Secara keseluruhan, BBM 2019 melibatkan 20 maestro dan 300 peserta hasil seleksi dari 2.663 pendaftar yang berasal dari 34 provinsi. Sedangkan maestro yang berpartisipasi berasal dari 8 provinsi. Perbedaan BBM pada 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya terletak pada bobot penggunaan gawai bagi para peserta didik. Diharapkan dengan menitikberatkan pada penulisan esai dan penggunaan teknologi media (website dan sosial media), peserta didik dapat

menggunakan teknologi secara bijak, termasuk dalam menggunakan media sosial.

Adrianus Chandra, peserta dari Waingapu, Nusa Tenggara Timur menilai program BBM sangat bermanfaat. "Saya banyak menemukan hal-hal baru tentang pemaknaan dan pemanfaatan kesenian bagi kehidupan," katanya.

Sedangkan Abdul Aziz dari Wakatobi yang belajar kepada maestro Iman Soleh menyatakan bahwa pembelajaran BBM banyak mengajarkan hal-hal mengenai kekayaan Indonesia melalui kebudayaan. Ia diajarkan bagaimana seorang maestro berkeseharian dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Lingkungan tinggal

Iman Soleh yang berada di wilayah terminal dan padat penduduk menjadikan Sang Maestro bersinggungan dengan persoalan budaya dan masyarakat.

Iman Soleh yang membimbing 15 siswa dari 12 provinsi menyatakan pembelajaran BBM yang sesungguhnya adalah menciptakan karakter manusia Indonesia ke depan. Bukan hanya pada saat tinggal, melainkan bisa membekas dalam kehidupan anak. Hal tersebut ia temui dari beberapa siswa yang pernah terlibat pada BBM 2017. “Ada siswa yang berkuliah di Turki mengambil sastra yang sebenarnya pada awalnya sangat tidak menyukai menulis,” katanya.

Kendala yang dihadapi proses pelaksanaan BBM lebih banyak terkait dengan waktu. Jadwal liburan sekolah siswa SMA/SMK tidak berbarengan dari seluruh Indonesia, maupun jadwal maestro yang padat. Diharapkan ke depan kegiatan belajar bersama maestro tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi dilakukan juga oleh pemerintah daerah dengan mengedepankan konten kearifan lokal.

Seniman Masuk Sekolah

Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk menumbuhkan minat bakat peserta didik di bidang seni budaya, menjalin kerja sama dan sinergi antara sekolah dan seniman, serta menciptakan budaya sekolah yang sehat, menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan dan menguatkan.

Pada 2019, GSMS melibatkan 64 dinas pendidikan yang terdiri dari 13 dinas pendidikan tingkat provinsi dan 51 dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini melibatkan 21 seniman di masing-masing dinas.

GSMS meliputi pembelajaran/pelatihan di satuan pendidikan sebanyak 27 kali pertemuan. Pelatihan ini menjadi bahan diskusi atau praktik pembelajaran kesenian bagi peserta didik. Selain itu, kegiatan ini diharapkan ikut melestarikan kesenian tradisional. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan kreativitas/ilmu kesenian yang telah didapatkan sebelumnya melalui kegiatan pementasan akhir. Kegiatan ini merupakan wadah menghadirkan kegiatan berkesenian oleh peserta didik sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas.

Peserta didik yang mengikuti program tersebut merasa senang. Hal ini terungkap dari salah satu peserta Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Nazwa Yuliana, siswa SMP Negeri 1 Rangkasbitung, Banten. “Acara ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang seni,” katanya.

Dalam penyelenggaraan GSMS selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu lebih memprioritaskan pelibatan dinas-dinas yang belum pernah dijangkau kegiatan GSMS sehingga diharapkan ke depannya seluruh dinas, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki akses terhadap kegiatan GSMS dan juga dapat melaksanakan kegiatan tersebut melalui APBD masing-masing.

Karavan Budaya *Go International*

*"DNA bangsa Indonesia adalah seni dan budaya,"
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)*

Salah satu dari tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Indonesia pada 5-9 Desember 2018 adalah kekayaan budaya dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Hal inilah yang mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meluncurkan program baru Karavan Budaya. Program ini berupa kegiatan seni budaya yang bersifat interaktif, dengan cara berkeliling ke berbagai kota kecil atau pedesaan di suatu negara, khususnya yang belum banyak terjangkau oleh kegiatan-kegiatan diplomasi budaya Indonesia sebelumnya. Karavan Budaya bertujuan untuk meningkatkan kehadiran Indonesia melalui seni budaya di luar negeri. Di samping itu Karavan Budaya juga diharapkan mampu menjadi ruang bagi terciptanya pemahaman lintas budaya melalui interaksi langsung antarpelaku seni budaya.

Pada 2019, tahun pertama pelaksanaan Karavan Budaya, Jerman dipilih sebagai lokasi kegiatan. Karavan Budaya berlangsung bersamaan dengan pentas keliling wayang orang "Kresna Duta". Pemilihan Jerman sebagai lokasi

penyelenggaraan dilandasi oleh adanya jaringan diaspora Indonesia yang kuat di beberapa kota di negara tersebut. Sementara itu, pentas wayang orang dipilih dengan pertimbangan bahwa seni pertunjukan ini merupakan paket lengkap untuk memperkenalkan berbagai elemen budaya yang berisi tarian, musik, wastra, dan kandungan nilai-nilai filosofis di dalamnya.

Prasti Pomarius selaku diaspora Indonesia di Kiel, Jerman mengapresiasi pelaksanaan Karavan Budaya di Kiel, "Kehadiran program Karavan Budaya Indonesia di Jerman terutama di kota-kota kecil seperti Kiel, Gottingen, dan Rotenberg telah membuka mata masyarakat Jerman tentang nilai-nilai budaya Indonesia yang luhur yang terkandung pada cerita pertunjukan wayang orang. Sebagai diaspora Indonesia yang tinggal di Jerman, kami turut bangga ketika Indonesia bisa lebih dikenal di Jerman. Selain itu, kami juga bisa memperkenalkan anak-anak kami pada budaya Indonesia agar mereka selalu teringat pada identitasnya sebagai orang Indonesia meskipun sudah tinggal bertahun-tahun di luar negeri atau bahkan sejak lahir belum pernah



Budaya Indonesia Go International

datang ke Indonesia,” ujarnya.

Pada tahun-tahun berikutnya, Karavan Budaya akan diperluas untuk menjangkau kawasan lain di dunia dengan target minimal dua kawasan per tahun. Di setiap kawasan, rangkaian kegiatan bisa berlangsung di 2-3 negara yang lokasinya berdekatan. Di samping itu, elemen budaya Indonesia yang akan ditampilkan pun akan dinamis sesuai dengan karakter budaya setempat. Semua elemen budaya dari Sabang hingga Merauke akan ditampilkan pada gilirannya.

Dengan demikian, program Karavan Budaya ini akan mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam menjadikan kebudayaan sebagai lokomotif pembangunan bangsa.

Indonesia merupakan bangsa yang unggul dan bahkan acapkali dijuluki sebagai negara adidaya budaya karena keberagamannya. Keunggulan bangsa Indonesia di bidang kebudayaan ini juga pada akhirnya diharapkan mampu membawa manfaat lanjutan bagi sektor-sektor lain, seperti ekonomi dan politik.

Karavan Budaya

Berlangsung di beberapa tempat:

HAMBURG

20-21 Agustus 2019

Workshop pengenalan musik gamelan Jawa untuk murid-murid dari berbagai sekolah. Diadakan pula pentas tari fragmen "Kresna Duta", sebagai bagian dari acara Family Day yang diselenggarakan oleh pemerintah kota di Balai Kota Hamburg.

GONTTINGEN

22 Agustus 2019

Workshop gamelan Jawa dan tari Jawa untuk mahasiswa internasional di Universitas Gottingen

ROTERNBURG

23-24 Agustus 2019

Workshop pengenalan musik gamelan Jawa untuk ansambel dari sekolah musik Kreis Musikschule Rotenburg, dilanjutkan dengan main musik bersama. Pentas ditangkai dengan tari fragmen "Kresna Duta"

HANNOVER

25 Agustus 2019

Pentas tari fragmen "Kresna Duta" dan seminar interaktif seputar budaya wayang orang.

BREMEN

28-29 Agustus 2019

Workshop pengenalan musik gamelan Jawa untuk ansambel dari kelompok musik Arco Bremen, dilanjutkan dengan main musik bersama.

KIEL

30 Agustus 2019

Pentas tari fragmen "Kresna Duta" dan seminar interaktif seputar budaya wayang orang.





Fasilitasi Alat Kesenian Gamelan untuk Satuan Pendidikan

Bantuan Sarana Kesenian

“Melalui pemberian bantuan sarana kesenian pada satuan pendidikan, sekolah dapat mengenalkan kesenian kepada siswa, dan menumbuhkan sikap apresiasi siswa terhadap kesenian tradisional.” (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Generasi muda saat ini cenderung meninggalkan kesenian tradisional Indonesia. Kondisi tersebut diperburuk oleh makin membanjirnya budaya luar seperti K-Pop dan J-Pop. Apabila hal ini berlangsung terus menerus maka kesenian tradisional Indonesia suatu saat akan tergerus.

Salah satu cara untuk melestarikan dan

mengembangkan kesenian tradisional adalah dengan menyinergikan nilai-nilai kesenian dalam dunia pendidikan, khususnya peserta didik. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan meluncurkan program Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan. Kegiatan ini merupakan pemberian sarana kesenian

seperti alat kesenian pada satuan pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah.

Sejak pertama kali digulirkan, kegiatan ini telah menjangkau ribuan satuan pendidikan. Dalam kurun waktu 2015-2018, penerima sarana kesenian mencapai 1.455 satuan pendidikan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah satuan pendidikan yang mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia. Melihat kondisi tersebut, tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan kegiatan Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdapat 2.653 bantuan alat kesenian melalui DAK Fisik Hal ini bertujuan agar kegiatan tersebut dapat bersifat masif dan menjangkau makin banyak jumlah satuan pendidikan.

Pada 2019, satuan pendidikan yang menerima sarana kesenian berjumlah 2.438. Sarana kesenian tersebut bisa dimanfaatkan untuk praktik pengenalan langsung seni tradisional. Peserta didik diharapkan akan makin mengenal kesenian tradisional. Berkat pengenalan langsung terhadap seni tradisional tersebut, peserta didik diharapkan makin termotivasi dalam berkesenian tradisional.

Agar kesenian tradisional tidak hanya menjadi kenangan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang, diperlukan ekosistem yang berkesinambungan antara berbagai pihak, yaitu pemerintah, peserta didik sebagai agen kesenian, satuan pendidikan sebagai ruang ekspresi kesenian dan juga pengrajin kesenian sebagai penghasil sarana kesenian tradisional.







Nonton Bareng Film Indonesia Sarat akan Nilai Pembelajaran

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Film Indonesia melalui Nonton Bareng

“Dengan dilaksanakannya Nonton Bareng dengan masyarakat di Kota Baubau, masyarakat sangat senang karena selama ini kurang mendapat hiburan. Film yang diputar juga sangat sarat dengan nilai-nilai pembelajaran dalam kehidupan masyarakat. Melalui acara Nobar ini, sebelum pemutaran film pemerintah Kota Baubau dapat menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat.” (Abdul Karim, S.Pd., M.Si, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara)

Film merupakan produk budaya yang sarat dengan pesan di dalamnya. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Kementerian yang turut bertanggung jawab atas perkembangan perfilman nasional, melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm), mengadakan program kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Film Indonesia, bersama satuan pendidikan dan bersama masyarakat. Program kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Film Indonesia dilakukan berupa pemutaran film atau nonton bareng, yang kadang-kadang dibarengi juga dengan diskusi atau dialog perfilman, yang menghadirkan artis, aktor, sutradara atau produser dari film yang diputar.

JUMLAH PEMUTARAN FILM PER JULI TAHUN 2019

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP FILM INDONESIA		JUMLAH LOKASI	JUMLAH PENONTON
BERSAMA MASYARAKAT	BIOSKOP	1	200
	Ruang terbuka/tertutup	28	8909
	WILAYAH 3T	5	2150
BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN	SEKOLAH	5	1550
	UNIVERSITAS	2	600
	BIOSKOP	2	415
	Ruang terbuka/tertutup	9	3100
TOTAL		52	16924

Maksud dan tujuan kegiatan peningkatan akses masyarakat terhadap film Indonesia melalui nonton bareng dan diskusi merupakan upaya peningkatan kecintaan masyarakat terhadap film Indonesia, sebagai bentuk apresiasi bagi perfilman Indonesia di samping memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pegiat film dan pencinta film Indonesia. Dengan nonton bareng ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses film Indonesia walau tidak melalui bioskop, khususnya melalui bantuan yang diberikan oleh Kemendikbud melalui satuan kerja Pusbangfilm berupa alat pemutar film dan mobil bioskop keliling baik di wilayah kabupaten, kecamatan atau wilayah yang masuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dengan demikian masyarakat peduli dan ikut berperan serta dalam perkembangan perfilman di Indonesia.

Sebagai contoh, nobar berlangsung di Papua. Film yang diputar di sana antara lain Molulo dan Mentari di Ufuk Timur, karya Irham Acho

Bahtiar, sutradara kelahiran Merauke. Ia telah banyak membuat film yang mengangkat isu Papua, sehingga kehadirannya sebagai pembicara dalam diskusi film, ikut memberi semangat bagi peserta yang hadir.

Sutradara Irham Acho Bahtiar berharap agar ke depannya film dari daerah tidak lagi dibedakan statusnya. Ia menginginkan film daerah diberi porsi yang sama asal memiliki kualitas teknis yang bagus. "Pemerintah harus membantu membuat regulasi yang kuat kepada pihak terkait, guna memberi kesempatan tayang lebih luas di bioskop nasional khusus untuk film yang berasal dari daerah," katanya. Ia yakin industri perfilman Indonesia bisa seperti di India. Di berbagai daerah, seperti Telugu, Malayalam dan lainnya, mampu memproduksi film sendiri, bukan hanya Bollywood. Semuanya diberi kesempatan hak tayang yang sama secara nasional.

"Perfilman Indonesia saat ini makin mencerminkan budaya bangsa. Saya menilai



Kegiatan Nonton Bareng Film Indonesia

perfilman Indonesia telah banyak mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai dan tenggang rasa, juga memunculkan budaya Indonesia yang beragam tidak hanya budaya tertentu saja. Film Indonesia yang merupakan media literasi dan media inspiratif, juga menjadi pembelajaran yang efektif bagi masyarakat untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan pembangunan karakter bangsa. Di samping mengalami perkembangan yang makin pesat, baik dari segi jumlah produksi film, jumlah layar hingga jumlah penonton tiap tahunnya, perfilman Indonesia juga memegang peranan penting untuk mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan, bahkan

turut mendukung pertumbuhan sosial dan perekonomian Indonesia.” (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pemerintah perlu membantu membuatkan regulasi yang kuat kepada pihak terkait, guna memberi kesempatan tayang lebih luas di bioskop nasional khusus untuk film-film yang berasal dari daerah sehingga tak akan ada lagi anggapan bahwa sebuah film bisa disebut film nasional apabila syutingnya hanya di Pulau Jawa dan hanya dimainkan oleh artis/bintang yang besar saja.



Proses Pembuatan Film oleh Pelajar

Gelar Karya Film Pelajar

"Mari dukung dan apresiasi karya film anak bangsa dengan menonton film di bioskop-bioskop yang ada di sekitar kita. Film Indonesia Keren!" (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Saat ini, film tidak hanya diproduksi oleh kalangan profesional. Kalangan pemula, termasuk pelajar juga tertarik membuat film. Sebagai wujud dukungan dan apresiasi kepada generasi muda yang ingin memproduksi film, Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Gelar Karya Film Pelajar (GKFP). Program

ini berbentuk lomba membuat film pendek dokumenter dan fiksi.

Tahun 2019, GKFP kembali hadir dengan mengusung tema "Semangat Kebinekaan Generasi Milenial". Tema ini diambil mengingat pentingnya meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat keberagaman

di kalangan milenial, khususnya pelajar. Kali ini, pelaksanaan GKFP menghadirkan Reza Rahadian sebagai Direktur Festival dan Angga Aldi Yunanda sebagai Ikon Festival. GKFP 2019 juga menghadirkan tim ahli dan tim juri yang akan menyeleksi dan menilai karya-karya para pendaftar. Kedua tim terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang film. Anggota tim ahli adalah Titien Wattimena (penulis skenario), Pritagita Arianegara (sutradara), Gritte Agatha (produser/*Youtuber*), Wicaksono Wisnu Legowo (sutradara), dan Gita Fara (produser). Sementara tim juri terdiri atas Garin Nugroho (sutradara), Sheila Timothy (produser), dan Yudi Datau (*director of photographer*).

Malam Penghargaan GKFP 2019 dilaksanakan di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta pada 28 Oktober sebagai wujud turut memeriahkan hari Sumpah Pemuda. dalam malam penghargaan diumumkan peraih tiga kategori yaitu, film terpilih, sutradara terpilih, dan penulis skenario terpilih untuk masing-masing genre film yang dilombakan, yakni film pendek fiksi dan film pendek dokumenter. Ada pula penghargaan khusus dari dewan juri. Selain mendapat hadiah berupa uang pembinaan, peraih penghargaan juga akan dilibatkan secara langsung dalam perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2019 sebagai pembaca nominasi. Hal ini menurut Reza Rahadian (Direktur Festival) perlu dilakukan agar penerima penghargaan dapat merasakan secara langsung atmosfer festival dan tentunya akan menambah kebanggaan

tersendiri.

“Saya ingin mereka merasakan suasana festival. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus. Jadi saya harap keterlibatan mereka secara langsung di FFI nanti akan menambah kepercayaan diri. Karena orang-orang akan melihat mereka benar-benar dilibatkan dalam industri ini,” jelas Reza Rahadian.

Terus Berbenah

Memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, GKFP terus berbenah. Pelaksanaan sebuah acara tentu tidak semulus yang direncanakan. Akan ada berbagai evaluasi yang menjadi bahan perbaikan untuk acara selanjutnya. Publikasi dan sosialisasi acara menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan GKFP. Karena diperuntukkan bagi siswa/i SMA/SMK/Sederajat seluruh Indonesia, tentu publikasi dan sosialisasi acara harus dilakukan dengan maksimal dan menyeluruh agar informasi dapat disalurkan dengan baik, bahkan hingga ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Rangkaian acara GKFP dan pemutaran film menjadi bentuk nyata dukungan dan apresiasi karya film anak bangsa. Sebagai tindak lanjut bagi kegiatan GKFP, diharapkan ke depannya para nominasi terbaik mendapat pelatihan berupa *workshop* dan atau kesempatan memperoleh beasiswa dari pemerintah, pada perguruan tinggi di daerahnya, yang memiliki jurusan perfilman.

Dialog Selesaikan Masalah Sensor Film

"Film nasional merupakan pengejawantahan dari realitas kehidupan kita. Kalau filmnya maju berarti masyarakat, bangsa, dan kita juga maju. Karena itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk memajukan film nasional kita."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Salah satu hasil karya cipta manusia berbasis teknologi komunikasi dan informasi adalah film. Melalui film, pesan-pesan dikemas semenarik mungkin untuk memikat penonton. Namun, kadang film tersusupi konten negatif yang dapat merusak moral penonton. Hal ini sangat berbahaya jika penonton film tidak memiliki pertahanan diri yang kuat. Untuk itu, proses penyensoran sangat penting agar tayangan film memberi nilai positif buat penonton.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, pada pasal 57 telah mewajibkan agar setiap film dan iklan film yang ditayangkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Surat ini diterbitkan setelah dilakukan penyensoran melalui beberapa proses penilaian.

Dalam menghadapi permasalahan, Lembaga Sensor Film (LSF) mengedepankan dialog dengan pihak-pihak yang keberatan atas proses penyensoran. Ketua LSF, Ahmad Yani Basuki, menyatakan paradigma baru dalam proses sensor, "kami mengedepankan dialog,

Jika di masa lalu nggak perlu dialog, kami potong, sekarang tidak. Walaupun direvisi, tapi kami kembalikan ke mereka (pemilik film) untuk ditata kembali," katanya. Kalau mereka merasa keberatan maka dialog adalah cara terbaik yang harus ditempuh.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 60 ayat 2 menyatakan bahwa Lembaga Sensor Film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah.

Yang dimaksud dengan prinsip dialog adalah mengundang pemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor.



Dialog Sensor Film

Dialog penyensoran dilaksanakan dengan dua model. Pertama, apabila terdapat peninjauan kembali atas film yang telah disensor LSF sehingga pemilik film ingin mengajukan dialog atas keputusan hasil sensor tersebut, baik dari segi revisi/pembetulan adegan yang dianggap dampaknya berpengaruh negatif terhadap penonton maupun mengenai hasil keputusan klasifikasi usia yang telah ditetapkan. Kedua, mengundang narasumber pakar ke LSF untuk dapat berbagi ilmu/memberikan masukan kepada LSF mengenai hal-hal baru yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan saat proses penyensoran.

Selama Januari - Agustus 2019, telah dilaksanakan 10 kali dialog. Dialog terakhir membahas film berjudul "Bumi Manusia". Film tersebut awalnya mendapatkan *rating* 17 tahun ke atas dari LSF. Pihak pemilik film keberatan dengan penggolongan tersebut. Produser meminta dialog dengan LSF. Akhirnya LSF mengundang pemilik film untuk berdialog. Setelah dilaksanakan dialog, kedua belah pihak setuju dengan keputusan akhir bahwa film tersebut tetap dengan penggolongan usia 17 tahun ke atas.

Workshop Perfilman Dalam Rangka Kompetensi Keahlian Produksi Film

"Saya melihat para pelaku perfilman kita, baik itu yang bertindak sebagai sutradara maupun sebagai penyusun naskah, kemudian juga para teknisi sudah semakin menyadari bahwa sudah dengan Amanat Undang-Undang tujuan perfilman kita adalah mengangkat martabat dan citra bangsa kita. "

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Bidang Keahlian Seni dan Industri Kreatif, program Keahlian Seni, *Broadcasting* dan Film serta Kompetensi Keahlian Produksi Film menjadi dasar untuk dibukanya SMK Kompetensi Keahlian Produksi Film. Pada Tahun Ajaran 2018/2019 dilakukan visitasi ke dua puluh sekolah yang membuka *broadcasting* dan multimedia untuk dijadikan sekolah *pilot project* pembukaan jurusan Kompetensi Keahlian Film.

Pada tahun 2019, Pusat Pengembangan Perfilman kembali mengadakan *Workshop* Perfilman bagi Guru SMK Kompetensi Keahlian Produksi Film mata pelajaran C3 untuk memasuki tahun ajaran baru 2019/2020. Tenaga Pendidik yang ada perlu ditingkatkan kompetensinya melalui *workshop*, khususnya untuk mata pelajaran kelompok C3. Kemudian, faktor pendorong lain adalah potensi tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten di

bidang perfilman saat ini masih kurang. Tujuan *workshop* ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru/pendidik di kompetensi keahlian produksi film mata pelajaran C3 dan untuk menyusun perangkat pembelajaran.

Mata pelajaran C3 dalam kompetensi keahlian produksi film ini terdiri atas Tata Artistik, Tata Suara, *Editing* Film, Tata Kamera, Visual Efek, Animasi, dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Dalam *workshop* inilah, guru/pendidik akan dilatih dan menyusun silabus, rencana pembelajaran (RPP), serta bahan ajar.

Workshop Perfilman bagi Guru dilaksanakan pada 9–15 April 2019 di Pusdiklat Kemendikbud. Diikuti oleh 119 orang guru dari 20 sekolah yang membuka kompetensi keahlian produksi film.

Kemendikbud akan selalu memberikan dorongan kepada para pegiat film untuk berkarya, menghasilkan film-film bernilai tinggi yang layak ditonton. Dorongan tersebut di



Dunia Perfilman

antaranya program peningkatan kompetensi insan perfilman, fasilitasi produksi, penayangan film, dan penyewaan hak tayang film. Dari waktu ke waktu itu terjadi perubahan persepsi tentang fungsi kedudukan film. Misalnya, film ini pernah menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan sebagai alat propaganda. Ketika menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan sebagai bagian dari alat pertahanan nasional. Kemudian menjadi bagian dari Kementerian Penerangan sebagai alat propaganda. Kemudian menjadi bagian dari Pariwisata waktu itu. Kemudian film bisa menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Budaya waktu itu. Dan sejak tahun 2009, dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman nasional, secara pelan namun pasti, sekarang film itu menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu artinya bahwa film sekarang adalah menjadi bagian dari instrumen pendidikan dalam rangka kita untuk memperkuat pendidikan melalui berbagai macam saluran informasi hiburan termasuk dunia perfilman. Apalagi dengan diperkuatnya undang-undang, munculnya Undang-Undang kemajuan kebudayaan No.7 Tahun 2017 maka kedudukan

perfilman nasional kita menjadi bagian dari instrumen pendidikan itu menjadi sangat kokoh.

“Terkait dengan kegiatan *workshop* perfilman yang diselenggarakan oleh Pusbangfilm, bagi kami para guru sangatlah bermanfaat, selain kami di bekali dengan banyak ilmu tentang perfilman, tentunya melalui kegiatan tersebut dapat menumbuhkembangkan kepedulian berbagai pihak dalam mendukung dan membina karya-karya siswa dengan ide dan gagasan mereka, apalagi mentor-mentor yang memberikan materi tersebut kebanyakan berasal dari kalangan profesional, yang sudah tentu banyak sekali pengalaman mereka terkait industri perfilman, semoga dengan ilmu yang kami dapatkan pada kegiatan *workshop* tersebut, dapat kami tularkan kepada mereka sineas-sineas muda yang duduk di bangku SMK jurusan Perfilman untuk megembangkan karya-karya yang dapat membanggakan kita, Majulah Industri Perfilman Indonesia, Cerdaskan anak bangsa melalui Film.” (Abdul Latif Fakaubun-SMKN 7 Ambon)

Pemajuan Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Bantuan Perfilman

“Yang paling penting saya sangat mendukung untuk segera diadakan revisi terhadap UUD no 3 Tahun 2009 tentang perfilman nasional kita, karena setelah sepuluh tahun berlalunya ini, UUD itu semakin ada bagian-bagian yang tidak terakomodasi terutama dalam rangka melindungi dan menjamin. Melindungi produksi film nasional kita, dan menjamin bahwa produksi film nasional kita berada dalam rel-rel yang sesuai dengan cita-cita kita dan tujuan pembangunan perfilman nasional kita.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Perkembangan perfilman Indonesia yang makin menggeliat telah merangsang peningkatan apresiasi film Indonesia dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman. Film juga sebagai media komunikasi massa, merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi. Film juga dalam era globalisasi dapat menjadi

alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.

UU Nomor 33 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa dalam era globalisasi film juga dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat Indonesia, Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) memberikan bantuan berupa alat produksi, alat pemutar film dan mobil bioskop keliling.

Film merupakan salah satu pilihan hiburan yang digemari masyarakat Indonesia. Terbukti, dengan makin banyak masyarakat Indonesia yang menonton film, khususnya ke bioskop. Pada tahun 2019, penonton film bioskop Indonesia sampai menembus 5.253.411 penonton (film *Dilan* 1991). Hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk menonton film di bioskop cukup tinggi. Meski begitu, sebaran bioskop di Indonesia masih belum merata. Saat ini layar bioskop di Indonesia sudah mencapai 1.861 berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GBPI), tetapi jumlah itu belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Masih banyak daerah maupun kota di Indonesia yang belum memiliki akses bioskop.

Tidak meratanya sebaran bioskop di Indonesia akan memberikan dampak pada film itu sendiri. Memang, film bisa mendapatkan penonton yang banyak dari kota-kota besar. Namun apakah kenyataan itu berarti kota-kota kecil atau daerah tidak terjangkau tidak bisa menikmati film Indonesia?. Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berusaha menjawab pertanyaan itu, lewat program Bantuan Pemerintah. Pusbangfilm menjadikan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sebagai penerima bantuan ini. Bentuk bantuan yang diberikan berupa Bantuan Peralatan Pemutar Film, Bantuan Peralatan Produksi Film, dan Bantuan Bioskop Keliling.

Program Bantuan Pemerintah, khususnya

Bantuan Peralatan Produksi Film, diberikan dengan berlandaskan pada Undang-undang 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2). Program Bantuan Pemerintah bertujuan untuk memberikan akses bioskop dan film kepada masyarakat di daerah 3T. Selain itu, program ini juga ingin meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film Indonesia. Jika masyarakat sudah memiliki akses dan diberi pemahaman akan pentingnya apresiasi film, tingkat apresiasi film Indonesia dapat meningkat. Program ini juga bertujuan untuk memberikan penanaman nilai moral dan pengembangan karakter.

Program Bantuan Peralatan Pemutar Film merupakan bentuk bantuan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak memiliki akses bioskop. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan lembaga atau organisasi masyarakat, khususnya yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, menjadi jembatan bagi Pusbangfilm dan daerah yang dituju. Tujuan dari program ini adalah untuk memberi masyarakat di daerah 3T tontonan yang mendidik dan berkualitas. Program ini juga memberikan masyarakat akses untuk menonton film dan memperluas media putar untuk film fasilitasi Pusbangfilm.

Dalam hal yang terkait dengan pendidikan, disediakan bantuan peralatan produksi film. Memproduksi film merupakan salah satu cara masyarakat untuk mengakses film. Bantuan ini ditujukan kepada SMA/SMK yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler perfilman atau yang



Pemberian Bantuan Alat Produksi, Alat Pemutar Film, dan Mobil Bioskop Keliling

sudah memiliki Laboratorium Seni Budaya dan Film (LBSF). Sekolah menjadi tujuan program ini karena sekolah dapat memanfaatkan film sebagai media ajar. Selain itu, sekolah bisa memaksimalkan potensi siswa-siswi dalam bidang perfilman sehingga nantinya dapat

meningkatkan sumber daya manusia di bidang perfilman.

Selain itu, Pusbangfilm juga memberikan bantuan bioskop keliling kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan. Bantuan ini



dapat berbentuk pemutaran dan diskusi film Indonesia. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap film Indonesia melalui bioskop di wilayah 3T. Pemutaran dan diskusi film Indonesia menghadirkan film-film bertema lokal yang

disesuaikan dengan daerah yang dituju, agar masyarakat mengetahui film-film Indonesia yang mengangkat kearifan lokal.

Program Bantuan Pemerintah merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam memajukan perfilman Indonesia. Seperti diketahui, perfilman Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan yang cukup baik. Meningkatnya jumlah penonton dan produksi film menjadi tanda bangkitnya sinema Indonesia. Namun yang menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya Pusbangfilm adalah belum meratanya distribusi film dan bioskop di seluruh Indonesia. Maka dari itu, program Bantuan Pemerintah hadir memberikan kesempatan bagi daerah 3T untuk menikmati film Indonesia.

Alat Produksi Film

Alat produksi film menjadi wadah bagi generasi muda khususnya SMA dan SMK untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam bidang perfilman. Seiring perkembangan zaman, seiring pula dengan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Pemberian alat produksi film yang dikhususkan bagi SMK Perfilman bidang produksi, SMA yang mempunyai kegiatan ekstrakurikuler perfilman dan SMA yang memiliki Laboratorium Seni Budaya dan Film (LSBF) ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan literasi pelajar terhadap nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni budaya dan film yang dilaksanakan di sekolah.

Fungsi dan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi anak bangsa dipilih menjadi sasaran guna menghasilkan karya-karya film Indonesia. Sekolah sebagai suatu ekosistem dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa juga diharapkan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya khususnya melalui perfilman Indonesia. Selain itu, program ini memberikan kesempatan yang efektif bagi siswa dan siswi

yang memiliki potensi dalam menghasilkan sumber daya yang terampil dan berkualitas sesuai dengan nilai, budaya, budi pekerti dan moril bangsa Indonesia.

Pada tahun 2019, Pusbangfilm menyalurkan alat produksi film juga akan disalurkan ke 50 sekolah yang tersebar juga ke seluruh sekolah di Indonesia.

Testimoni:

"Bagi saya proses pembuatan film sangat menyenangkan, saya bisa mengetahui dan mengenal banyak hal dalam dunia perfilman. Terima kasih kepada Pusbangfilm yang sudah memberikan bantuan berupa peralatan kepada kami. Karena bantuan tersebut kami dapat menghasilkan karya yang jauh lebih baik." kata Siti Nurul Bajillah

(Siswi SMK Negeri 1 Anjatan kelas XII jurusan Seni Broadcasting & Film).

"Dengan adanya bantuan peralatan produksi film dari pusbangfilm sangat membantu kami, terlebih siswa bisa langsung praktik untuk meningkatkan kompetensinya baik guru dan siswa. Dengan jumlah siswa peminat di jurusan film bertambah tentunya kami harapkan ada bantuan lagi yang bisa kami ajukan kembali agar memaksimalkan penggunaan peralatan merata dan siswa bisa lebih semangat," kata Imam Maulana (Guru Perfilman dari SMKN 1 Anjatan).

Alat Pemutar Film

Dalam rangka peningkatan penguatan pendidikan karakter melalui media inspiratif, Pusbangfilm juga menyalurkan bantuan berupa

alat pemutar film untuk daerah 3T dan daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan bioskop. Penyaluran alat pemutar film khususnya di ruang terbuka bertujuan untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan tontonan yang

mendidik dan berkualitas serta membangun kualitas masyarakat yang cerdas berkarakter melalui film. Hal ini juga sebagai proses peningkatan minat masyarakat untuk lebih banyak menonton film Indonesia khususnya daerah yang tidak terjangkau dan tidak terdapat bioskop.

Selain mengedepankan aspek penguatan karakter untuk mencerminkan citra bangsa Indonesia, penyaluran alat pemutar film ini juga sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film Indonesia terutama di daerah 3T dan mendapatkan tontonan yang mendidik dan berkualitas. Selama tiga tahun, Kemendikbud tetap konsisten untuk menyalurkan alat pemutar film ke 20 kabupaten/kota. Tahun 2019, Pusbangfilm kembali menyalurkan alat pemutar film sebanyak 10 unit ke kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, tahun 2018 kami mendapatkan bantuan alat pemutar film dari Pusbang Film, baik LCD *projector*, *amplifier*, dan *screen* hingga generator dengan kualitas yang sangat baik. Alat-alat ini kami gunakan untuk memutar baik film dari Pusbangfilm maupun memutar film-film komunitas yang mulai berkembang di kota Tegal sekaligus menjadikan ajang diskusi. Dari alat ini pula, kami percaya diri mengadakan festival film, yang rencananya akan kami adakan rutin tahunan. Kami hanya bisa memberikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan ini. Semoga kedepannya, program-program Pusbangfilm bisa menyentuh ke dalam komunitas-komunitas yang ada di daerah, baik

itu berupa bantuan alat pembuat film, maupun bimbingan teknis seperti *workshop*,” kata Prasetyo BM (Komite Film, Dewan Kesenian Kota Tegal).

Mobil Bioskop Keliling

Perkembangan perfilman dari sisi teknologi juga merangsang kebutuhan sarana dan prasarana bidang perfilman serta kebutuhan masyarakat akan media inspiratif dan edukatif. Kemendikbud dalam tugas tanggung jawabnya menyediakan wadah untuk mengembangkan perfilman Indonesia ke seluruh Indonesia, bahkan yang tidak terjangkau oleh jaringan bioskop sekalipun. Terkait demikian, Kemendikbud menyalurkan mobil bioskop keliling ke pemerintah daerah dan perguruan tinggi yang tersebar ke seluruh Indonesia. Mobil bioskop keliling bertujuan agar semua masyarakat Indonesia dapat menikmati film Indonesia yang berkualitas melalui media yang baik juga. Sebelumnya, penyebaran mobil bioskop keliling dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak tahun 2012 dan dilanjutkan oleh Pusbangfilm mulai tahun 2017.

Selama tiga tahun, Pusbangfilm telah menyalurkan sebanyak 27 unit mobil bioskop keliling (*boiling*) yang tersebar pada UPT dan SKPD seluruh Indonesia. Penyebaran *boiling* meliputi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Museum Provinsi, Taman Budaya, SKPD/Dinas, P4TK, LPMP, Balai Arkeologi (Balar).



Proses UKBI

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

“Guru perlu memiliki kecakapan dalam mentransfer pengetahuannya kepada siswa. Salah satu kecakapan yang dibutuhkan guru adalah kemahiran dalam menggunakan bahasa. Kemampuan berbahasa menggambarkan keadaan alam pikiran, maka guru harus berbahasa yang runtut dan indah.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Penggunaan bahasa Indonesia secara benar merupakan sebuah keharusan demi menjadi bangsa yang bermartabat. Untuk itulah, Badan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa

modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Pada tahun 2019, telah diadakan UKBI bagi 500 guru se-DKI Jakarta di Aula Sasadu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Jakarta, pada tanggal 10-15 Mei 2019.

Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Dadang Sunendar, mengungkapkan bahwa pengembangan UKBI sebagai alat uji diiringi dengan fungsinya bertujuan untuk mengukur kemahiran penutur bahasa Indonesia, baik penutur yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“UKBI mengukur keterampilan aktif reseptif peserta uji dalam kegiatan mendengarkan dan membaca. Kemudian, mengukur keterampilan aktif produktif peserta uji dalam kegiatan berbicara dan menulis,” ungkap Dadang.

Secara teknis pengujian UKBI dilakukan melalui tiga bentuk layanan uji, yaitu pengujian berbasis kertas, pengujian berbasis luring (luar jejaring), dan pengujian berbasis daring (dalam jejaring). Informasi layanan pengujian dapat diakses melalui ukbi.kemdikbud.go.id.

UKBI Penutur Asing

Indonesia yang saat ini sedang terus membangun sektor infrastruktur dan peningkatan investor asing tentu memerlukan tenaga kerja asing (TKA) yang profesional dan ahli untuk membantu pembangunan. Sesuai dengan PP No. 57/2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, peningkatan fungsi bahasa Indonesia, TKA diharuskan memiliki kemahiran berbahasa Indonesia. Hal ini diperkuat dengan

perpres No. 20/2018 tentang penggunaan TKA. Disebutkan bahwa pengguna TKA wajib memfasilitasi pelatihan Bahasa Indonesia.

Standar kemahiran berbahasa Indonesia sudah diatur dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Bahkan, Keputusan Menteri ESDM No. 1827 Tahun 2018 pada halaman 24 menyebutkan, “bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai Pengawas Operasional atau Pengawas Teknis maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan”.

Adanya UKBI disambut positif peserta. “Pengalaman bagus dan unik, tapi sedikit sulit, banyak kata yang belum tahu, tapi masih mengerti, hanya tingkat dasar, mungkin bila saya belajar lagi, saya akan mencoba lagi mungkin lebih baik,” kata Alana, peserta tes UKBI, pada 17 Januari 2019.

Karakteristik peserta UKBI yang mengikuti pengujian di 32 tempat uji kemahiran berbahasa Indonesia (TUKBI) meliputi peserta uji dosen, karyawan, guru, mahasiswa, pelajar, penerjemah, peneliti, dan warga negara asing.

Untuk kegiatan UKBI di masa mendatang diharapkan semakin berkembang dengan pemakaian sistem daring sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, pemutakhiran sistem tersebut harus terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa depan.

Angkat Martabat Bangsa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

“Diintegrasikannya kelas Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ke dalam kurikulum di University of Vienna pada periode semester musim dingin ini merupakan langkah maju dan lebih cepat dari target yang diharapkan,”

(Dr. Darmansjah Djumala, Dubes RI untuk Austria)

Seiring dengan kemajuan zaman, bahasa Indonesia telah dipandang sebagai salah satu bahasa yang penting di dunia. Hal ini terjadi berkat peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kuat. Kenyataan seperti itu telah menyebabkan banyak orang asing tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan, baik tujuan politik, bisnis, wisata, maupun pendidikan. Dengan banyaknya warga asing yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia, program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) pun berkembang.

Hingga saat ini bahasa Indonesia telah diajarkan kepada orang asing, baik di dalam maupun di

luar negeri. Di dalam negeri tercatat tidak kurang dari 75 lembaga penyelenggara program BIPA, baik di perguruan tinggi maupun lembaga kursus. Sementara itu, di luar negeri pengajaran BIPA telah dilakukan di sekitar 41 negara yang melibatkan sekitar 355 lembaga yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat kebudayaan, KBRI, dan lembaga-lembaga kursus.

Pada 2019, kegiatan Pengiriman Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri memiliki target capaian yang dikelompokkan ke dalam tiga kawasan negara. Ketiga kawasan tersebut adalah ASEAN, Amerika Serikat dan Eropa (Amerop), dan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf).

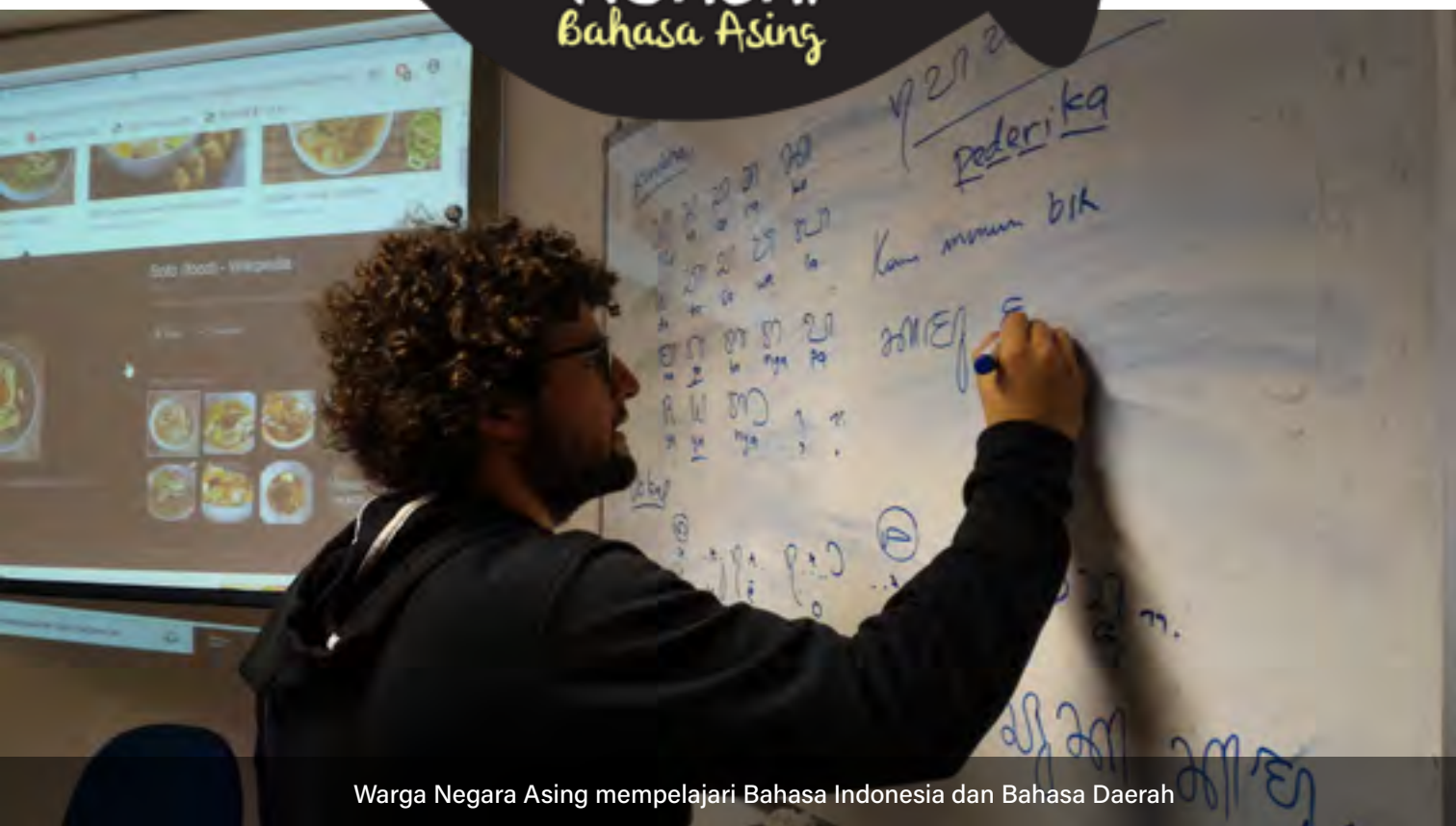
Tabel capaian program pengiriman tenaga pengajar BIPA tahun 2019.

No	Wilayah	Negara	Jumlah Penugasan
1.	ASEAN	Thailand	13
		Kamboja	5
		Laos	5
		Malaysia	1
		Vietnam	6
		Filipina	12
		Timor Leste	56
2.	ASPASAF	India	3
		Cina	5
		Australia	11
		Papua Nugini	6
		Mesir	30
		Tunisia	2
			4
3.	AMEROP	Inggris	4
		Rusia	2
		Finlandia	1
		Jerman	4
		Austria	4
		Bulgaria	3
		Italia	2
		Prancis	5
		Uzbekistan	9
		Amerika Serikat	31
Jumlah Penugasan			220

Masyarakat menyambut baik adanya program BIPA. "Bahasa Indonesia tata bahasanya tidaklah sulit, dan mempelajari bahasa Indonesia membuat saya cinta dengan negara Indonesia, dan ingin hidup lama di Indonesia" kata Mona Fawzy, mahasiswa BIPA asal Mesir yang mengikuti program Beasiswa Darmasiswa RI, Senin 8 Juli 2019.

Pada tahun-tahun mendatang, BIPA diharapkan akan makin berkembang. Upaya yang dapat dilakukan, antara lain, dengan menjajaki kerja sama dengan berbagai universitas di luar negeri untuk program mata kuliah Bahasa Indonesia. Upaya lain adalah dengan menjalin kerja sama dalam rangka mengirim guru BIPA ke sekolah/ lembaga penerjemahan.

UTAMAKAN
Bahasa Indonesia
LESTARIKAN
Bahasa Daerah
KUASAI
Bahasa Asing



Warga Negara Asing mempelajari Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

Pengembangan Istilah dan Kosakata

"Aku orangnya sangat memperhatikan sama hal-hal seperti ini, terutama soal tulisan. Ada huruf kapital nggak bener aku nggak betah. Aku perhatian sekali pada tanda baca, kapital, ejaan yang salah. Aku cek KBBI."

(Gita Gutawa, Penyanyi)

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam segala hal, termasuk pengembangan kosakata dan istilah melalui inventarisasi kosakata yang meliputi tahap pengumpulan, pemilihan, validasi, dan penyuntingan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing.

Pengembangan istilah dan kosakata yang diwujudkan dalam pembuatan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima telah mengalami perbaikan dan perkembangan dari edisi sebelumnya. Selain jumlah lema dan makna yang bertambah sehingga mencapai 127.036, pengerjaan KBBI Edisi Kelima mulai menggunakan aplikasi penyusunan kamus yang diberi nama KBBI Daring. Penggunaan aplikasi dalam edisi kelima ini memungkinkan penyusunan kamus menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, cepatnya perkembangan kosakata dan istilah diimbangi dengan cara pemutakhiran data KBBI Daring dua kali setahun, yaitu setiap bulan April dan Oktober.

Target capaian program pengembangan kosakata pada tahun 2019 adalah 2.000 lema. Penambahan lema baru dilakukan dengan

memasukkan kata-kata budaya, nama tokoh, nama geografis, nama peristiwa penting, dan singkatan yang sudah lazim. Selain itu, penambahan lema juga berasal dari ungkapan bahasa daerah dan bahasa asing yang sudah lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari.

Selain penambahan entri, pada tahun 2019 juga ada penambahan pengguna KBBI. Pada tahun ini pengguna meningkat 30% menjadi 38.928 pengguna (per 30 April 2019).

Program pengembangan kosakata dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan. Mendikbud, Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasi berdasarkan data pengguna KBBI. "Angka pencarian per hari mencapai lebih dari 45.000 pencarian dengan jumlah pengguna yang terdaftar lebih dari 50.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di luar negeri."

Dr. Sukardi Gau, Kepala Kantor Bahasa Gorontalo menilai program tersebut ikut membangun persatuan dalam kebinekaan. "Ini yang sedang kita upayakan, sebab kami menilai, wujud dari kebinekaan itu terdapat



Seorang Pelajar Membaca KBBI di perpustakaan

dalam kamus bahasa Indonesia. Semua bahasa daerah harus dimasukkan dalam KBBI itu,” katanya usai penyuluhan bahasa kepada para jurnalis Gorontalo dikutip dari hulondalo.id.

Muhammad Syarif Bando, Direktur Perpustnas berterima kasih kepada Badan Bahasa yang telah mengundangnya untuk hadir dalam acara serah terima KBBI V Braille di Ruang Gaura, Badan Bahasa, Rawamangun, Jakarta, Selasa, (29/1/2019). “Tugas kita adalah sama, yaitu sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Melalui sinergi inilah kita dapat mewujudkan itu

semua”, ujar Muhammad Syarif.

Dalam rencana pengembangan produk kebahasaan selanjutnya, diharapkan tersedia aplikasi yang dapat mengintegrasikan KBBI Daring dengan produk kebahasaan lain, seperti tesaurus, glosarium, korpus, tata bahasa, pedoman ejaan, dan pedoman pembentukan istilah. Integrasi tersebut tidak hanya berupa tautan seperti yang selama ini ada di laman Badan Bahasa, tetapi berupa integrasi data yang memungkinkan pengguna dapat memperoleh informasi lengkap dalam satu platform.



Literasi Membaca Karya Sastra Indonesia

Pembinaan Cinta Bahasa dan Sastra

“Bahasa Indonesia ialah bahasa perhubungan yang berabad abad tumbuh perlahan-lahan di kalangan penduduk Asia Selatan dan yang setelah bangkitnya pergerakan kebangunan rakyat Indonesia pada permulaan abad kedua puluh dengan insaf diangkat dan dijunjung sebagai bahasa persatuan.”

(Sutan Taksir Alisyahbana, Penulis Legendaris Indonesia).



Penyuluhan Cinta Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia berkembang di tengah dinamika peradaban dunia. Terbukanya arus globalisasi membuka peluang masuknya pengaruh bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sikap positif terhadap bahasa Indonesia diperlukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Agar masyarakat Indonesia makin mencintai bahasanya sendiri, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menyelenggarakan program pembinaan bahasa dan sastra yang memiliki beberapa

tujuan. Pertama, peserta dapat meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedua, peserta dapat menambah wawasan terhadap permasalahan kaidah-kaidah kebahasaan. Ketiga, peserta dapat meningkatkan penerapan dan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan. Keempat, peserta mendukung pelaksanaan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Salah satu program pembinaan bahasa adalah kegiatan Peningkatan Keterampilan Berbahasa



Indonesia yang diadakan di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 1.500 media massa tanah air.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat melahirkan insan media yang mampu menjaga kedaulatan bahasa Indonesia, terutama di ruang publik, memiliki kemampuan untuk menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang cermat, apik, dan santun di media massa. Mereka juga diharapkan ikut menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat.

Kegiatan lain diadakan oleh Balai Bahasa Riau

(BBR), yaitu berupa Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Guru SD dan SMP se-Kabupaten Rokan Hilir, di Bagan Batu, Selasa, 9 April 2019. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Kuswantoro mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ragam formal merupakan hal yang penting bagi guru agar bisa diikuti para siswa. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang benar akan mempermudah anak dalam mencerna ilmu yang disampaikan.

Secara keseluruhan, pada 2019, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan telah melakukan pembinaan bahasa kepada berbagai pihak, antara lain, pembinaan bahasa kepada 102 satuan kerja pemerintah dan 25 lembaga pendidikan. Jumlah pendidik yang telah terbina dalam penggunaan bahasa sebanyak 1.600 orang. Pendidik teruji melalui UKBI dengan predikat unggul mencapai 240 orang, sedangkan jumlah generasi muda yang telah mengikuti pembinaan penggunaan bahasa dan sastra mencapai 3.839 orang.

Pada masa mendatang peningkatan mutu berbahasa melalui inovasi pembelajaran diharapkan terus ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Diperlukan sistem manajemen yang tersertifikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Selain melalui program penyuluhan, upaya pembinaan bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan situasi tertib berbahasa Indonesia

dilakukan melalui kegiatan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Penggunaan bahasa di ruang publik merupakan cerminan sikap atas kompetensi penggunanya. Oleh karena itu, sikap positif, yaitu sikap tertib berbahasa diperlukan agar penggunaan bahasa di ruang publik sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaan.

Meskipun pemertabatan bahasa Indonesia telah diupayakan, tidak jarang posisi bahasa resmi di NKRI ini di ruang publik dijumpai dalam keadaan terdesak.

Jika dibandingkan dengan bahasa asing, tulisan bahasa Indonesia pun kurang taat asas, cenderung ditulis dengan huruf yang lebih kecil, dan tidak mencolok di lokasi-lokasi yang strategis. Akibatnya, ketertiban umum dalam berbahasa terganggu, terancam, atau terhambat pembinaannya. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengendalikan penggunaan bahasa asing guna menguatkan bahasa negara di ruang publik.

Pengutamaan bahasa negara di ruang publik dilaksanakan melalui empat tonggak, yaitu (1) pemantauan penggunaan bahasa berbasis wilayah kabupaten/kota; (2) sosialisasi bahan pengutamaan bahasa negara; (3) aksi dan pendampingan pengutamaan bahasa negara pada lembaga; (4) partisipasi masyarakat dalam pengutamaan bahasa negara. Kegiatan Badan Bahasa tersebut memberikan dampak pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan

swasta, serta masyarakat umum.

Pada tahun 2019, pemantauan penggunaan bahasa Indonesia dilakukan terhadap 91 kabupaten/kota yang meliputi 364 lembaga pendidikan, 364 lembaga swasta berbadan hukum, 182 lembaga/instansi pemerintah, dan melibatkan 300 orang masyarakat dalam kegiatan Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Pengutamaan bahasa negara di ruang publik mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Hingga saat ini belum ada lembaga yang bisa mengawasi dan menegakkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal ini menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tidak terkontrol sehingga menggerus identitas dan eksistensi bahasa Indonesia. "Ini karena kita punya aturan, tapi tidak ada penegakan hukum dan lembaga hukum yang ditunjuk," ujarnya (Indopos.co.id, Rabu, 7 Agustus 2019).

Direktur TMII Tanribali Lamo mengatakan bahwa dengan jumlah pengunjung lebih dari 7 juta orang dalam satu tahun, TMII berupaya memberikan layanan secara baik. TMII memberikan layanan informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. "Seluruh pengumuman tidak menggunakan bahasa asing, tapi menggunakan Bahasa Indonesia," ujarnya (Indopos.co.id, Rabu, 7 Agustus 2019).

Mitra Komunitas Lindungi Bahasa Daerah

“Kegiatan revitalisasi Bahasa Adang yang diselenggarakan di sekolah dasar menjadi momentum yang sangat baik bagi masyarakat untuk memperhatikan kembali bahasa dan budaya daerah yang mereka miliki. Kegiatan ini seperti membangunkan kembali yang sudah lama tidur.”

(Selfius Maro, Pelaksana Tugas UPT Pendidikan Kecamatan Alor Barat Laut pada kegiatan Revitalisasi Bahasa Adang di Kabupaten Alor, 20 Juli 2019).

Aneka bahasa dan sastra adalah pilar keberagaman budaya. Oleh karena itu, kepunahan yang terjadi pada suatu bahasa/sastra pada suatu daerah berarti juga hilangnya kekayaan budaya. Untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah tersebut, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki dua program utama, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa. Konservasi merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh penuturnya. Dalam konservasi, ada upaya pencegahan atau perbaikan aspek bahasa yang rusak untuk menjamin kelangsungan bahasa itu sendiri.

Untuk menyelamatkan bahasa/sastra daerah yang terancam punah, diperlukan revitalisasi dan konservasi bahasa dan sastra. Salah

satunya melalui Mitra Komunitas Perlindungan (Bahasa dan Sastra). Tujuannya adalah agar hasil perlindungan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mitra Komunitas Perlindungan merupakan para pemangku kepentingan yang terlibat langsung (penutur bahasa, maestro sastra, pelaku sastra) dan para pengambil kebijakan (tokoh adat, pemda, dan sebagainya). Dalam hal ini, Komunitas Perlindungan adalah “mitra kerja” sekaligus pelaku utama perlindungan bahasa dan sastra.

Berikut adalah kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra yang dilaksanakan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan yang bekerja sama dengan pemda setempat pada tahun 2019.

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap bahasa daerah. Pada Hari Bahasa Ibu Internasional, 21 Februari 2019, Presiden menyapa hadirin dengan bahasa daerah. "Saudara-saudara di Sabang, *'Assalamualaikum, Krue Semangat'*. Yang di Merauke, *Namek-Namuk, Izakod Bekai Izakod Kai*. Yang di Miangas, *Tabea, Sansiote Sang Pate Pate Salam*. Juga untuk yang ada di Rote: *Ita Esa!*," kata Jokowi.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan penyerapan bahasa terjadi tidak hanya secara alami, tetapi harus ada desain. Di Indonesia Timur sangat banyak bahasa lokal, yang kalau tidak dirancang usaha perlindungan secara sungguh-sungguh maka dikhawatirkan punah," ujarnya.

Berbagai program untuk mempertahankan bahasa daerah ini mendapat dukungan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Alaang, Obed Djaha, S.Pd.pada kegiatan Revitalisasi Bahasa Adang di Kabupaten Alor, 20 Juli 2019. "kegiatan ini tidak pernah terpikir sebelumnya.

Anak-anak pun senang mengikuti proses latihan selama ini. Mereka ingin belajar bahasa Adang dengan baik. Selain itu, kegiatan pentas revitalisasi ini menjadi pemicu bagi para guru untuk membelajarkan kembali bahasa Adang di sekolah," katanya.

Pada masa mendatang diharapkan makin banyak seni bahasa dan sastra ditampilkan pada kegiatan budaya daerah, seperti peringatan HUT daerah atau kegiatan budaya daerah lainnya. Bahasa dan sastra daerah perlu juga diperkenalkan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui materi muatan lokal.



Revitalisasi Sastra Berbasis
Komunitas di NTT



Pengembangan dan Penilaian Buku Pendidikan Berkualitas

"Dengan ilmu kita menuju kemuliaan."

(Ki Hajar Dewantara)

Kualitas buku pendidikan di Indonesia menjadi salah satu perhatian pemerintah. Melihat beberapa kasus buku-buku pendidikan yang tersusupi konten negatif terkait SARA, ujaran kebencian, bias gender, kekerasan, ideologi komunis dan sebagainya, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Sistem Perbukuan merupakan tata kelola perbukuan. Dengan tata kelola perbukuan diharapkan buku pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang baik dari aspek isi, penyajian, bahasa, dan grafika serta meminimalkan kasus-kasus tentang buku atau tidak akan ada lagi kasus-kasus tentang buku. Adanya Sistem Perbukuan juga merupakan jaminan terhadap tersedianya buku 3M (Mutu, Murah, Merata).

Penilaian Buku Pendidikan

Kegiatan pengendalian mutu buku melalui penilaian buku pendidikan telah dilakukan oleh Pusat Perbukuan Kemendikbud sejak tahun 2005. Secara bertahap buku-buku berkualitas yang dihasilkan melalui kegiatan penilaian buku pendidikan muncul.

Sebelumnya, penilaian dilakukan dengan menggunakan cara manual, tetapi saat ini penilaian buku dilakukan secara *online* dan aplikasi. Pendaftaran buku yang akan dinilai dilakukan oleh penerbit melalui *website online* sehingga tidak ada pertemuan antara penilai dengan penerbit. Penilaian buku dilakukan menggunakan aplikasi oleh para penilai yang merupakan pakar/ahli di bidangnya sesuai dengan buku yang dinilai.

Hal-hal di atas termasuk dalam prinsip-prinsip melakukan penilaian buku agar kualitas hasil penilaian tetap terjaga. Terdapat 12 prinsip dalam penilaian, yaitu transparan, akuntabel, objektif, profesional, adil, *responsibel*, gradasi, *diversity in unity*, tidak ada diskriminasi, nonpartisan, impersonal, dan *zero error*.

Pengembangan Teks Pelajaran dalam Buku Cetak dan Elektronik

Pada 2019, Pusat Perbukuan melakukan pengembangan terhadap buku teks pelajaran dalam bentuk cetak dan elektronik. Pengembangan buku teks pelajaran dalam bentuk cetak yaitu buku program peminatan

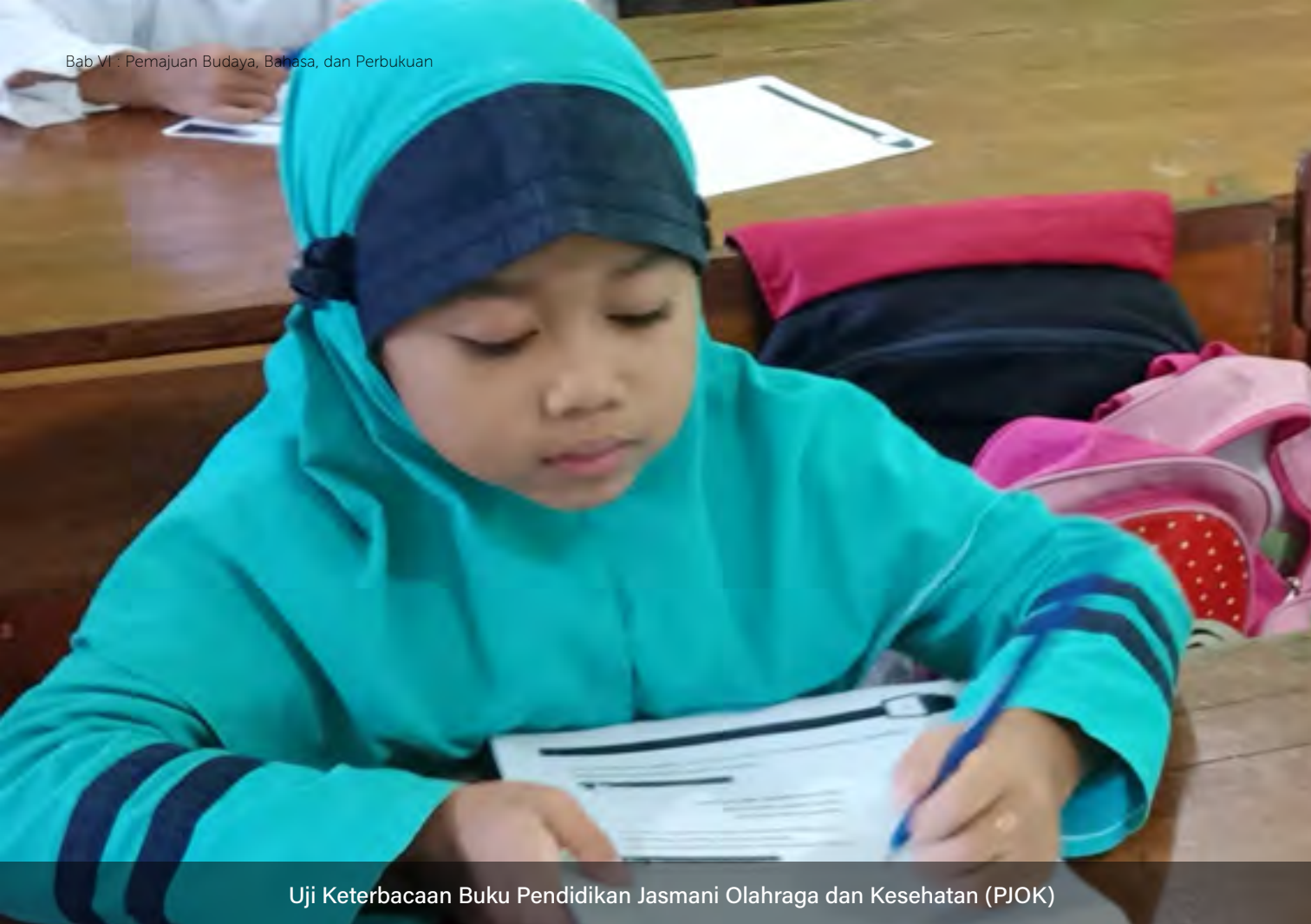


Gemar Membaca dan Berbagi Ilmu

SMA/MA sebanyak 11 Mata pelajaran dan program keahlian (C2) SMK/MAK sebanyak 22 Mata pelajaran. Dalam pengembangan buku teks pelajaran dalam bentuk cetak terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan buku yang berkualitas. Salah satu tahapan yang paling penting adalah tahap uji keterbacaan pada pengguna yaitu guru dan siswa. Hasil uji keterbacaan inilah yang menjadi gerbang revisi terakhir untuk menjaga kualitas dari pengembangan buku teks pelajaran. (Testimoni uji keterbacaan)

Pengembangan Buku elektronik terdapat

beberapa jenis, yaitu versi PDF, buku elektronik generasi ke-4, dan *audiobook*. Buku elektronik jenis PDF telah diunggah dan dapat diunduh pada laman buku.kemdikbud.go.id secara gratis. Pengembangan Buku elektronik generasi ke 4 sebanyak 18 buku dan model *audiobook* sebanyak 5 buku. Buku elektronik generasi ke-4 akan dipublikasikan dalam 3 versi yaitu *offline*, *online* android, dan *online website*. Buku generasi ke-4 ini telah dilengkapi dengan multimedia sebagai bahan pendalaman materi pada setiap buku. Multimedia tersebut terdiri dari audio, video, animasi, *motion graphic*, simulasi, dan *augmented reality*, serta fitur-fitur



Uji Keterbacaan Buku Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)

interaktif untuk pengguna, baik guru maupun siswa.

Pengembangan ini dinilai bermanfaat oleh Martono selaku Guru SMPN Kepung, Pare, Kediri. "Buku-buku pendidikan, baik buku teks pelajaran maupun buku nonteks pelajaran, yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat untuk peserta didik dalam rangka peningkatan budaya baca dan tulis", tuturnya.

Secara kontinu dan masif, Pemerintah perlu menyelenggarakan bimbingan teknis dan

pelatihan untuk para pelaku perbukuan (seperti penulis, penyunting, ilustrator, penerjemah, dan lain-lain) terutama terhadap buku-buku teks pelajaran dan buku-buku nonteks pelajaran, mulai jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Penulis yang berkualitas akan menghasilkan buku-buku yang berkualitas dari aspek materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan.



Buku Pendidikan Yang Berkualitas

Pengembangan



Buku Cetak



Elektronik
PDF



Audio
Book



Elektronik
Generasi 4

Penilaian

Pada penilaian terdapat penerbit yang mendaftarkan buku pada Website Online, lalu terdapat pakar/ahli yang melakukan penilaian dengan menggunakan aplikasi sambil melihat buku yang dinilai

Satuan Penelitian Arkeologi dan Rumah Peradaban

"Hasil positif yang sudah dicapai di masa yang lampau jangan dibuang begitu saja. Sebab, kemajuan yang kita miliki sekarang adalah akumulasi daripada hasil-hasil perjuangan di masa lampau, yaitu hasil-hasil macam-macam perjuangan dari generasi nenek moyang kita sampai kepada generasi yang sekarang ini."

(Ir. Soekarno)

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), yang merupakan institusi di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai dua program unggulan, yaitu Penelitian Arkeologi dan Rumah Peradaban. Program tersebut bukan hanya untuk menghasilkan temuan-temuan baru, melainkan dilakukan pula untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penelitian Arkeologi

Penelitian arkeologi merupakan kegiatan investigasi atau kajian terhadap situs-situs arkeologi yang dinilai memiliki potensi akademis dan praktis, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, maupun global. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data yang dilakukan secara

sistematis dan objektif guna memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis yang dapat dikembangkan.

Tahun 2019 merupakan pertama kali Puslit Arkenas beserta Balai Arkeologi (Balar) menerapkan sistem penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK). Sub Keluaran Penelitian (SKP) yang secara umum mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Penelitian yang semula bersifat swakelola dengan target berupa laporan penelitian dan laporan kebijakan, kini berorientasi terhadap target keluaran hasil penelitian yang tidak hanya sebatas laporan penelitian dan laporan kebijakan, tetapi juga dapat dikembangkan ke dalam berbagai publikasi ilmiah lainnya.



kunjungan siswa dalam situs penelitian arkelologi

Setiap penelitian harus mengacu kepada penelitian kebinekaan, penelitian kemaritiman, dan penelitian wilayah perbatasan. Penelitian kebinekaan berupaya memahami hakikat dan makna kebinekaan, sekaligus memberikan kontribusi dalam mengisi, memperkaya ideologi bangsa, serta memecahkan isu aktual kebangsaan. Penelitian kemaritiman berupaya memahami peranan perairan Nusantara sebagai penghubung pelayaran dan perniagaan dalam tataran lingkup lokal, regional, bahkan global. Sedangkan penelitian wilayah perbatasan bertujuan untuk menggali potensi nilai budaya yang terdapat di garis-garis terdepan wilayah Indonesia.

Target Penelitian Arkeologi 2019 telah ditetapkan sebanyak 118 penelitian yang dibagi

sebagai berikut: Puslit Arkenas (16 penelitian), Balar Sumatera Utara (11), Balar Sumatera Selatan (9), Balar Jawa Barat (13), Balar Yogyakarta (12), Balar Bali (12), Balar Kalimantan Selatan (10), Balar Sulawesi Selatan (9), Balar Sulawesi Utara (6), Balar Maluku (11), dan Balar Papua (9).

Menurut salah satu peneliti arkeologi, Shinnatria Adhityatama, penelitian arkeologi penting untuk dilakukan. "Penelitian arkeologi sangat penting karena ilmu ini salah satu cara kita mengakses masa lalu untuk mengetahui identitas dan karakter bangsa. Tinggalan budaya di Indonesia memiliki nilai sejarah kelas dunia, baik yang berada di darat maupun di bawah air, oleh karena itu penelitian arkeologi harus lebih digiatkan agar kita dapat merekonstruksi



Proses penelitian Peninggalan Sejarah

sejarah bangsa secara utuh,” katanya.

Selain penelitian atau riset di lapangan dengan metode *survey*, observasi, dan ekskavasi, metode lainnya yang dapat dikembangkan ke depannya adalah eksperimen. Pengetahuan mengenai teknologi yang berkembang pada masa lalu dapat didalami dengan melakukan eksperimen arkeologi. Hasil-hasil eksperimen akan dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman pemanfaatan teknologi pada

masa lalu dan kemungkinan pemanfaatannya pada masa kini.

Rumah Peradaban

Rumah Peradaban lahir atas dasar keinginan kuat untuk membumikan hasil-hasil penelitian arkeologi di tengah masyarakat. Selama ini, hasil penelitian arkeologi lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan akademisi. Padahal informasi yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat



bagi masyarakat umum, khususnya siswa yang duduk di bangku sekolah. Rumah Peradaban menjadi media untuk mempertemukan masyarakat dengan sejarah dan budaya masa lampaunya, serta memahami nilai-nilai kandungannya.

Untuk tahun 2019, Puslit Arkenas menargetkan pelaksanaan Rumah Peradaban di berbagai lokasi, yakni Rumah Peradaban Gua Harimau (Maret 2019), Rumah Peradaban Lambanapu

(April 2019), Rumah Peradaban Sriwijaya (Juni 2019), Rumah Peradaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Juli 2019), Rumah Peradaban Badung (19-23 Agustus), Rumah Peradaban Nuat Bkai (September 2019), Rumah Peradaban Kalinyamat (September 2019), Rumah Peradaban Lembata (September 2019), Rumah Peradaban Pekalongan (Oktober 2019), dan Rumah Peradaban Trinil (Oktober 2019).

Penelitian Arkeologi Bawah Laut



Rumah Peradaban dimaksudkan untuk mendukung program Nawacita pemerintah, khususnya cita ke-8 (pembangunan karakter bangsa) dan cita ke-9 (memperkuat pendidikan kebinekaan) dengan menyebarkan nilai-nilai penting yang terkandung dalam tinggalan arkeologi.

Adanya Rumah Peradaban mendapat sambutan positif dari masyarakat. "Program Rumah Peradaban sangat bermanfaat, karena dengan adanya program ini kita dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjaga dan melestarikan tinggalan arkeologi," kata Kezia Christina Ludji Do, siswa SMA Negeri 1 Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

"Program Rumah Peradaban sangat membantu memberi pengetahuan dan menumbuhkan semangat untuk menjaga dan melestarikan peninggalan budaya masa lalu," kata Thomas Ronsen, guru SMKN 1 Penual, Kabupaten Pali.

Dalam upaya mewujudkan tercapainya cita-cita yang diharapkan dari kegiatan Rumah Peradaban diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih matang dan komprehensif. Peningkatan kerja sama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi jadwal dan teknis kegiatan

Tata Kelola Menuju Pemerintahan Kelas Dunia



"Untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya butuh perubahan karakter, mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. Justru yang utama butuh reformasi sistem dan pola kerja. Terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system,"

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Ciri pemerintahan kelas dunia adalah bersih, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Indonesia sudah lama membangun mimpi memiliki pemerintahan seperti itu. Jargon pemerintahan seperti pemerintahan kelas dunia juga kerap didengungkan dari masa ke masa. Jargon itu terlihat sangat gagah di atas kertas, namun lembek pada implementasi. Sementara, roda dunia terus berputar hingga Indonesia dihadapkan pada era digital, era yang segala sesuatunya bisa terjadi begitu cepat. Siap ataupun tidak, inilah kenyataan yang harus dihadapi.

Di tengah gemerlapnya era digital saat ini, Presiden Joko Widodo kerap menegaskan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju jika memiliki birokrasi yang tangguh dengan didukung tenaga birokrasi yang mau bekerja keras, berani berinovasi, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan lain. Era Jokowi telah melakukan tata kelola birokrasi melalui penguatan sistem *e-government*, *merit system*, manajemen talenta, manajemen perubahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya telah dituangkan Joko Widodo ke dalam program Nawacita yang kini menjadi dasar dari visi misi pemerintahan Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif melalui komitmen *Open Government Indonesia* (OGI).

Melalui OGI diharapkan akan lahir ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional. Utamanya, di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada keberadaan birokrasi yang sehat. Birokrasi ibarat pisau bermata dua. Satu sisi berfungsi sebagai alat pengendali yang memastikan bahwa semua kebijakan manajemen terlaksana sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kalau terjadi kondisi "*overdosis*"

dalam pelaksanaan birokrasi, akan menyebabkan tersendatnya roda organisasi. Bahkan bisa menimbulkan kemacetan yang berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup organisasi tersebut.

Sejatinya, birokrasi berfungsi memberi pelayanan terhadap pelanggan atau *user*. Artinya, pelaksanaan birokrasi harus benar-benar menghayati bahwa mereka menjadi bagian dari sebuah proses bisnis. Birokrasi juga menjadi alat kontrol, bertugas menjaga lalu lintas manajemen agar berjalan sesuai rambu-rambu serta prosedur.

Birokrasi harus menjamin seluruh peraturan yang telah ditetapkan manajemen berjalan sesuai prosedur. Namun, banyak fakta menunjukkan birokrasi di Indonesia masih sangat lemah dan belum tertata dengan baik. Kerap dijumpai masyarakat tersandung dan menyerah lantaran tak tuntas dalam urusan birokrasi.

Panjangnya birokrasi mulai dipangkas. Penerapan sistem elektronik dalam birokrasi banyak digulirkan. Langkah ini terbilang cukup bijak sehingga mampu memangkas jalan panjang, praktik-praktik korupsi, dan pungutan liar.

Joko Widodo juga sering menyinggung perlunya reformasi birokrasi. Ia mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu isu krusial dari pemberantasan korupsi.

Di lingkungan Kemendikbud, permasalahan birokrasi hanya bermuara pada dua hal, yaitu gemuknya struktur dan pelayanan panjang yang berbelit. Ternyata dari dua hal tersebut merebak dan memicu masalah yang kian kompleks.

Reformasi birokrasi di internal Kemendikbud diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, serta mewujudkan Kemendikbud menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk melihat lebih dekat berbagai kebijakan dalam reformasi birokrasi di internal Kemendikbud, bisa dibaca dalam penjelasan berikut ini.



DAFTAR ARTIKEL BAB 7

Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud	276
Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi	281
Darmasiswa Menuju Indonesia Unggul	284
Mendikbud RI Menjadi Presiden SEAMEO Council	288
SiRenBaja	300
Layanan Elektronik Pendidikan	303
Katalog Sektoral	306
SIPLah: Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah	310
Unit Layanan Terpadu : Birokrasi Yang Melayani	314
Repositori Institusi	317
Pengadaan CPNS yang Transparan, Kompetitif, dan Bebas KKN	321
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kemendikbud	323
Manajemen Talenta Mencetak PNS Berkualitas	328
Penilaian Kinerja Pegawai	331
Peningkatan Kinerja Melalui e-Kehadiran	334
Program Magang Menciptakan Pelayan Birokrasi di Era Industri 4.0	337
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	339
<i>Tour of Duty</i> dan <i>Tour of Area</i>	342
Kemendikbud Kembangkan Perizinan Terintegrasi Secara <i>Online</i>	344
Bekerjasama Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	346
Reformasi Digital dengan SIANJAB	349
Menata Organisasi dengan SIEVO	351
Pelatihan Dasar Agenda Sikap Perilaku Bela Negara bangun ASN yang berintegritas	353
Melatih Birokrat yang Berjiwa Pemimpin Nasional	355
Pengembangan Program Pelatihan Moda Kombinasi (<i>Blended Learning</i>)	358
SIMREFA: Reservasi Gedung dan Asrama secara Daring	360
Satu Data Pendidikan, Kebudayaan dan Bahasa	363
Neraca Pendidikan Daerah sebagai Potret Mutu dan Komitmen Daerah	367

Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud



Temu awal Menpan RB dengan Itjen

Kemendikbud berinisiatif melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai yang digariskan Kementerian PAN dan RB. Kemajuan yang dicapai dapat diukur dan diketahui peningkatan kualitasnya khususnya di bidang layanan publik. Namun masih memerlukan peningkatan demi terwujudnya tata kelola yang baik

PEMERINTAH KELAS DUNIA



Sumber: Lampiran Perpres RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025

Kementerian PAN dan RB telah menyusun Grand Design RB 2010-2025 sebagai rujukan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap instansi. Kemendikbud berinisiatif melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai yang digariskan Kementerian PAN dan RB. Kemajuan yang dicapai dapat diukur dan diketahui peningkatan kualitasnya, khususnya di bidang layanan publik. Namun, masih memerlukan peningkatan demi terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*).

Terdapat delapan area sasaran yang menjadi target capaian reformasi birokrasi lima tahun

kedua (2015-2019), meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, dan penguatan sistem manajemen aparatur SDM, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari delapan target tersebut terdapat tiga komponen utama yang ditargetkan, meliputi kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan kualitas pelayanan publik.

Kemendikbud mendukung sepenuhnya delapan

target capaian reformasi birokrasi tersebut dan menuangkannya dalam peta jalan (*road map*) strategi pelaksanaan reformasi birokrasi melalui program-program yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented program*). Program-program tersebut, antara lain pemantauan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara) dan LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara), pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, pakta integritas, penilaian kematangan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kemendikbud, auditor bersertifikat auditor dan sertifikat keahlian khusus.

PEMANTAUAN LHKPN DAN LHKASN

Untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud bertindak melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala di lingkungan Kemendikbud terhadap kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN. Selain itu, Itjen juga melakukan verifikasi kewajaran atas laporan harta kekayaan tersebut.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI CEGAH KORUPSI

Praktik memberi dan menerima hadiah atau istilahnya gratifikasi sesungguhnya hal yang wajar dalam kemasyarakatan. Bagi instansi pemerintah, pemberian dan penerimaan hadiah ini disinyalir mengandung modus tertentu sehingga perlu dikendalikan dengan baik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Itjen menjalankan pengendalian gratifikasi

dengan prinsip-prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum kemanfaatan, kepentingan umum, independensi, dan perlindungan bagi pelapor.

Beberapa program pengendalian terhadap gratifikasi oleh Itjen, antara lain internalisasi pencegahan korupsi yang materinya terkait tentang gratifikasi. Selain itu, setiap Satker Kemendikbud membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang berfungsi untuk mengumpulkan bentuk gratifikasi kemudian melaporkannya kepada KPK

PAKTA INTEGRITAS

Dokumen pakta integritas merupakan dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kesanggupan untuk tidak melakukan KKN.

Tujuan ditandatanganinya dokumen tersebut untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dapat mencapai tujuan reformasi birokrasi.

PENILAIAN KEMATANGAN SPIP KEMENDIKBUD

Sistem Pengendalian Intern tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Penilaian

Tabel Penilaian Kematangan SPIP Kemendikbud

Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
Unsur Lingkungan Pengendalian	30	2.887	0.866
Penilaian Risiko	20	2.000	0.400
Unsur Kegiatan Pengendalian	25	2.900	0.725
Unsur Informasi dan Komunikasi	10	3.500	0.350
Unsur Pemantauan	15	3.000	0.450
Total	100		2.791

SPIP dilakukan untuk melihat kemampuan organisasi melakukan pengendalian internal.

AUDITOR BERSERTIFIKAT

Itjen Kemendikbud juga cukup aktif mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat/workshop bersertifikat dalam rangka penguatan pengawasan. Nama diklat, penyelenggara dan jumlah pegawai Itjen yang mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar di samping.

Beberapa cara lain untuk menjaga kualitas audit internal diantaranya melalui telaah seawat, *internal audit capability* model (IACM), audit rutin tahunan, *whistle blowing system* (WBS), pengaduan masyarakat, dan evaluasi reformasi birokrasi.

INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi unit audit internal bernaung, dan lingkungan sektor publik di suatu negara/pemerintahan.

Diklat/Workshop yang dilaksanakan Itjen



Internal audit terdiri atas audit kinerja, audit program prioritas, audit atas program strategis lainnya, dan audit tujuan tertentu.

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Whistle Blowing System (WBS) merupakan sistem pelaporan bagi pejabat, pegawai, dan pensiunan Kemendikbud untuk membuka

informasi tentang perbuatan berindikasi pelanggaran dalam organisasi untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

WBS yang telah dikembangkan oleh Itjen Kemendikbud merupakan bentuk pelaksanaan tugas Itjen sebagai pengawas internal.

Pengembangan WBS ini selaras dengan pendekatan pengawasan internal untuk memastikan manajemen risiko yang efektif dan untuk mempromosikan prosedur-prosedur tata kelola yang baik di dalam organisasi. Pendekatan ini meliputi internalisasi *whistle blowing system* terhadap tindakan-tindakan yang keliru (*wrongdoing*)

AUDIT RUTIN TAHUNAN

Audit dilakukan selain untuk menjaga akuntabilitas serta 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas), juga untuk menjaga kualitas

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja Kemendikbud.

Audit rutin yang dilaksanakan, antara lain adalah audit unit utama, audit dana dekonsentrasi, audit bantuan pemerintah, audit dini, audit UPT.

PENGADUAN MASYARAKAT

Terdapat beberapa kanal yang dimiliki oleh Kemendikbud dalam menerima pengaduan masyarakat, yaitu melalui media tulis, elektronik, datang ke kantor Itjen Kemendikbud dan Unit Layanan Terpadu (ULT), dan pengaduan langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terhadap suatu kasus/permasalahan atas adanya dugaan penyimpangan di lingkungan Kemendikbud. Berikut merupakan rekapitulasi pengaduan masyarakat yang masuk ke Kemendikbud pada Tahun 2019.



Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi



Penerapan program WBK ini diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit (enabler) yang akan berimplikasi terhadap terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Sebagai bentuk dukungan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kemendikbud berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kemen-PANRB telah menggariskan enam area perubahan dan diterapkan di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

“Enam area perubahan menjadi tujuan WBK meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” (Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi)

Kemen-PANRB pernah menegaskan bahwa zona integritas sendiri adalah miniatur reformasi birokrasi.

Penerapan program ZI WBK ini diharapkan

dapat menjadi faktor pengungkit (enabler) yang akan berimplikasi terhadap terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berkeadilan, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Itjen Kemendikbud telah menjalankan tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK melalui serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan metodologis. Kegiatan evaluasi ZI WBK telah berhasil memperoleh gambaran kondisi objektif tentang penerapan ZI WBK di lingkungan Kemendikbud.

Dari 56 usulan satker ZI WBK/WBBM Kemendikbud tahun 2019 setelah dilakukan evaluasi oleh Itjen, yang lulus penilaian sebanyak 30 satker ZI WBK dan 3 satker WBBM untuk diajukan pengesahannya ke Kemen-PANRB. Hasil capaian kinerja tersebut akan diumumkan pada bulan Desember 2019.



Darmasiswa Menuju Indonesia Unggul



Para Peserta Darmasiswa

"Program Darmasiswa juga telah menjadi hubungan timbal balik (resiprokal) pemberian beasiswa antara Indonesia dengan negara mitra, dan telah menjadi program soft diplomacy or people to people contact dalam bidang pendidikan dan kebudayaan."

(Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud)



peserta Darmasiswa menunjukkan Karya Batik

Darmasiswa adalah pemberian kesempatan bagi mahasiswa asing dari berbagai negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar dalam bidang bahasa, seni dan budaya di Indonesia yang bersifat non-gelar. Calon darmasiswa dapat memilih satu dari beberapa pilihan universitas yang berlokasi di kota-kota yang tersebar di Indonesia. Program darmasiswa dimulai pada tahun 1974 sebagai bagian inisiatif dari ASEAN (*Association of South East Asian Nations*).

Tujuan utama dari program Darmasiswa adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan daya tarik mahasiswa asing terhadap bahasa, seni dan budaya Indonesia. Program Darmasiswa melibatkan perguruan tinggi di Indonesia. Darmasiswa didukung oleh 64 lembaga pendidikan di Indonesia dengan target peserta sebanyak 650 orang dari 102 negara. Darmasiswa juga dikembangkan di berbagai negara hingga mencapai lebih dari 126 negara.



APA KATA PESERTA DARMASISWA



Guangbing Yu, China.

*Universitas Syiah Kuala, Bidang Studi Bahasa Indonesia,
Durasi Program 12 Bulan*

“Indonesia adalah anggota penting ASEAN. Meskipun saat ini siswa asing kami di Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika dalam hal jumlah dan skala, dengan beberapa tahun terakhir, hubungan kami dengan Indonesia semakin dekat. Permintaan untuk komunikasi semakin meluas. Jumlah siswa internasional di kedua negara juga meningkat, pentingnya pertukaran pendidikan dan kerja sama antara kedua negara juga semakin menonjol. Jadi saya berharap Indonesia dan program darmasiswa menjadi lebih baik. Pada saat bersamaan, semoga kerjasama pembangunan antar kedua negara Indonesia dan China selalu berjalan baik dan tentunya saling menguntungkan di kedua belah pihak”



Lucio Assuncao Lay, Timor Leste.

Bidang Studi Visual Art, Institut Seni Indonesia Denpasar

“Selama mengikuti program darmasiswa di ISI Denpasar saya memiliki pelajaran favorit yaitu membuat batik, saya sangat menyukai mata kuliah ini karena saya bebas berekspresi membuat batik ditambah lagi asisten dosen yang sangat membantu saya untuk belajar, dan saya bersyukur saya bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Itu memudahkan saya untuk berinteraksi dengan orang-orang Bali setempat”



Chihiro Morishita, Jepang.

“Saya, belajar tari Bali dan Gamelan Bali di Bali, Indonesia. Karena cita cita saya, setelah pulang ke Jepang, saya mau mengajar seni Bali di kota tempat hidup saya, sambil saya melakukan pementasan sebagai penari dan penabuh”



Habibuddeen Luebaeteh, Thailand.

*Universitas Brawijaya, Bidang Studi Bahasa Indonesia
Penutur Asing (BIPA), Durasi Program 12 Bulan*

“Harapan saya terhadap program darmasiswa adalah melanjutkan program sejenis ini lagi pada masa yang akan datang. Semoga lebih banyak lagi orang asing yang ingin mengetahui dan mengunjungi Indonesia. Saya juga berharap beberapa tahun lagi diadakan pertemuan bagi mahasiswa asing yang telah melakukan program darmasiswa untuk berbagi pengalaman apa yang telah dilakukan di negaranya masing-masing untuk mempromosikan negara Indonesia”

peserta Darmasiswa
menunjukkan Hasil Karya
Batik



Mendikbud RI Menjadi Presiden SEAMEO Council



Mendikbud Sebagai Presiden SEAMEO

Komitmen Mendikbud untuk terus melanjutkan capaian-capaian SEAMEO serta terus berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, sains, dan budaya di kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan.

SEAMEO (*Southeast Asian Minister of Education Organization*) adalah organisasi menteri pendidikan negara-negara ASEAN. SEAMEO didirikan pada tanggal 30 November 1965 atas dasar inisiatif Menteri Pendidikan dari lima negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Laos, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Indonesia bergabung sebagai negara anggota SEAMEO pada tahun 1968.

Pendirian SEAMEO bertujuan mendorong kerja sama pada sektor pendidikan, sains, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Keanggotaan SEAMEO terdiri atas 10 negara anggota ASEAN.

Pada tanggal 24-27 Juli 2017, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan 49th SEAMEO Council Conference yang diselenggarakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. SEAMEO Council dilaksanakan 2 tahun sekali untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan berbagai program serta kegiatan pendidikan SEAMEO. 49th SEAMEO Council Conference menjadi sejarah kepemimpinan Indonesia pada SEAMEO dengan terpilihnya Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy sebagai Presiden SEAMEO Council untuk periode 2017-2019. Serah terima jabatan Presiden SEAMEO Council dilakukan dengan penyerahan plakat oleh Dr. Teerakiat Jareonsettasin, Menteri Pendidikan Kerajaan Thailand (Presiden SEAMEO Council periode 2015-2017). Sebagai Presiden SEAMEO Council periode 2017-2019, Mendikbud berkomitmen untuk terus melanjutkan capaian-capaian SEAMEO serta terus berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan, sains, dan budaya

di kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan. *"Let me take this opportunity to express our deep appreciation and gratitude to His Excellency Dr Teerakiat Jareonsettasin, Minister of Education of Thailand and the 48th SEAMEO Council President for his excellent leadership in SEAMEO for the past two years. SEAMEO has been so far successful in implementing projects and activities beneficial to educational development in the Southeast Asia region.*

I am committed to do my best to continue the successful leadership of the outgoing President of SEAMEO Council. Hence, to significantly contribute to the development of education, science and culture in the region and beyond," ujar Prof. Muhadjir Effendy, Mendikbud RI.

Lebih lanjut, Mendikbud juga mengharapkan dapat berbagi praktik terbaik Indonesia dalam dunia pendidikan yang dapat menjadi contoh pembelajaran serta memungkinkan untuk diterapkan di negara lainnya. *"We are very pleased to share the lesson learned from what we have done in Indonesia. What work here might also work in other SEAMEO's member countries".*

Mengakhiri masa jabatan Mendikbud sebagai Presiden SEAMEO Council periode 2017-2019, serah terima Presiden SEAMEO Council dilaksanakan pada saat pertemuan 50th SEAMEO Council Conference tanggal 22-25

Juli 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Upacara serah terima ditandai dengan pemberian plakat dari Prof. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada

Dr. Maszlee Malik, Menteri Pendidikan Malaysia sebagai Presiden *SEAMEO Council* periode 2019-2021.

DARI 26 SEAMEO CENTRES, 7 BERADA DI INDONESIA



BOGOR

SEAMEO Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP) bidang Biologi Tropis



JAKARTA

SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Language (SEAMEO QITEP in Language), bidang Bahasa



JAKARTA

SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC), bidang Pendidikan Jarak Jauh



BANDUNG

SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) bidang PAUD dan Parenting



BANDUNG

SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Science (SEAMEO QITEP in Science), bidang Sains



JAKARTA

SEAMEO Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO REFCON), bidang Nutrisi



YOGYAKARTA

SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Mathematics (SEAMEO QITEP in Mathematics) bidang Matematika



Peta sebaran SEAMEO Regional Centres



Tujuh SEAMEO Centres yang ada di Indonesia sebagai berikut



SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC).

SEAMOLEC berfokus pada Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ) dengan ruang lingkup layanan di wilayah regional Asia Tenggara.

Pada Tahun 2019, SEAMOLEC melakukan inovasi dengan mengembangkan 2 purwarupa (*prototipe*) kecerdasan buatan/ *Artificial Intelligence* (AI) untuk pendidikan yaitu "*Southeast Asia Information*" dan "*Fruit Nutrition Detection*".

Capaian di tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pelatihan

- Melaksanakan 40 pelatihan tatap muka yang diikuti sebanyak total 4.615 peserta
- Melaksanakan 5 pelatihan daring dengan peserta sejumlah 2.500 orang
- 90% peserta pelatihan adalah guru.
- Platform pelatihan daring yang digunakan adalah *Massive Open Online Course* (MOOC).
- Topik pelatihan terkait dengan Revolusi Industri 4.0, seperti: *Internet of Things* (IoT), Visualisasi 3D, *Augmented Reality* (AR), *Virtual Reality* (VR)

2. Penelitian

- Memberikan 30 hibah penelitian untuk para guru dan dosen dengan tema "Pendidikan 4.0" sebagai fokus penelitian.
- Menerbitkan Jurnal Asia Tenggara tentang Pendidikan Terbuka Jarak Jauh (PTJJ).
- Melaksanakan Studi Kelayakan tentang PTJJ di bidang Pariwisata pada 6 negara Asia Tenggara; Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, dan Timor Leste.

3. Konsultasi

- Memberikan pelayanan konsultasi terkait PTJJ kepada unit-unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, Kementerian Pendidikan Kamboja, beberapa universitas di dalam dan luar negeri,

4. Penyebaran Informasi

- Mengoptimalkan penggunaan laman (*website*), media sosial, dan media publikasi cetak
- Mengikuti 8 pameran nasional
- Menerima 405 orang tamu kunjungan dari 12 institusi



SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP)

SEAMEO CECCEP merupakan SEAMEO *Centre* yang bertugas untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga (parenting) melalui penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas, dan advokasi.

Pada tahun 2019, dokumentasi regional mengenai mekanisme dan kerja sama pembiayaan inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini telah melibatkan 15 negara.

Capaian di tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penelitian dan pengembangan

- Survei pada pendidik PAUD (*Survey on Teachers in Pre-Primary/STEPP*) melibatkan 2.000 responden dan 400 lembaga.
- Evaluasi efektivitas program parenting dalam mendukung kesiapan anak bersekolah melibatkan 720 responden.
- Hibah penelitian kepada 12 orang peneliti

2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas

- Penyusunan 8 (delapan) model pembelajaran dan bahan ajar
- Peserta pelatihan lokal: 1.090 orang
- Peserta pelatihan internasional: 96 orang

3. Advokasi dan Kerja Sama

- Kerja sama dengan 9 universitas lokal

a. 9 perguruan tinggi lokal

b. 3 pemerintah daerah

c. 2 universitas internasional

d. 3 *Non Government Organization* (NGO) lokal

e. 3 NGO internasional

- Peresmian gedung SEAMEO CECCEP oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Kerja sama penelitian *Action against Stunting Hub*



SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel (QITEP) in Science

SEAMEO QITEP *in Science* memberikan layanan dan program yang relevan dan berkualitas dalam pengembangan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) melalui peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan, dan kolaborasi.

Pada tahun 2019, SEAMEO QITEP *in Science* mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis *Science, Technology, Engineering and Mathematics* (STEM) yang mendukung implementasi kurikulum 2013 dengan mengoptimalkan potensi lokal. Unit-unit pembelajaran berbasis STEM direalisasikan dalam berbagai kegiatan kerjasama dengan

berbagai instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri. SEAMEO QITEP in Science juga melakukan piloting implementasi STEM untuk pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil, serta memulai program SEAMEO School 4.0 kerjasama dengan tiga SMK di kota Bandung dan Indonesia SEAMEO Centres Coordinator.

Capaian tahun 2019.

1. Pelatihan/Workshop

- Melaksanakan 27 pelatihan tatap muka, yang terdiri dari pelatihan reguler, non-reguler, dan *in-country* yang diikuti sebanyak total 2487 peserta, yang berasal dari negara-negara anggota SEAMEO
- Peserta pelatihan adalah pendidik dan tenaga kependidikan IPA baik nasional maupun regional
- Topik pelatihan terkait dengan pembelajaran abad 21, seperti: Integrasi STEM dalam Implementasi Kurikulum 2013, *Office of Climate Change, Earth and Space Science "Mission to Mars"*

2. Penelitian

- Memberikan 30 hibah penelitian untuk para guru dan dosen dengan tema "Pembelajaran dengan Pendekatan STEM dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0" sebagai fokus penelitian.
- Melakukan 4 penelitian lembaga, dengan tema pembelajaran dengan pendekatan

STEM pada sub tema *agriculture STEM, Cyber STEM, Marine STEM, dan Green STEM.*

3. Penyebaran Informasi

- Mengoptimalkan penggunaan laman, media sosial, dan media publikasi cetak
- Mengikuti 3 pameran nasional
- Menerima kunjungan instansi pemerintah seperti kampus/dinas pendidikan untuk menjalin kerjasama dan penandatanganan MoU



SEAMEO Regional Center for QITEP in Mathematics (SEAQIM)

SEAQIM adalah sebuah pusat SEAMEO yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan akan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan Matematika di wilayah regional Asia Tenggara. Tugas utama dari SEAQIM ada 5, yakni: pelatihan, penelitian, magang, seminar/simposium/konferensi, dan beasiswa.

Pada tahun 2019, SEAQIM melaksanakan *South East Asia Mathematics Teaching and Learning (SEA-MTLM)* yang merupakan pengembangan model-model pembelajaran matematika di kawasan Asia Tenggara, kampung STEM, kemah STEM.

Capaian di tahun 2019:

1. Pelatihan/Regular Course/In-Country Course/Customised Course

- Melaksanakan 5 *regular course* dengan peserta adalah guru SD, SMP dan SMA/SMK yang berasal dari 10 negara anggota SEAMEO (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste dan Vietnam) dengan jumlah peserta 150 orang
- Melaksanakan program *In-Country Course* dengan sistem *sharing budget* di Vietnam dan Filipina, Sorong, Waingapu dan Palangkaraya dengan jumlah peserta 120 orang
- Melaksanakan program *customized course* di Semarang dengan peserta guru SD dengan sistem pembiayaan sepenuhnya oleh pihak pengundang berjumlah 200 orang peserta

2. Penelitian

- Melakukan penelitian di kawasan regional dengan sasaran siswa kelas 5,7 dan 10 di kawasan negara anggota SEAMEO. Penelitian tersebut dinamakan *Mathematics Regional Wide Assessment* (MaRWA) dimana bertujuan untuk mengetahui kesiapan siswa dalam menghadapi persoalan matematika.

3. Penyebaran Informasi

- Mengoptimalkan penggunaan laman, media sosial.
- Mengikuti 3 pameran nasional
- Menerima bimbingan teknis dari universitas

di Indonesia (jurusan pendidikan matematika).

- Menerima kunjungan instansi pemerintah seperti kampus/dinas pendidikan untuk menjalin *Memorandum of Understanding* (MoU).
- Melakukan penandatanganan MoU dengan UHAMKA, SAMPOERNA *University* dan CASIO



SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL)

SEAQIL memiliki tugas untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa

dan tenaga kependidikan di wilayah Asia Tenggara

Pada tahun 2019, SEAQIL telah membuat 10 video pembelajaran bahasa jenjang SMA yang menggunakan metode pembelajaran berbasis teks, berbasis proyek, dan penyingkapan. Serta membuat modul pembelajaran tematik integratif sebagai panduan mandiri untuk guru SD dan membuat modul pengajaran bahasa sebagai panduan mandiri untuk guru SMP.

Capaian di tahun 2019:

1. Pelatihan

- Melaksanakan 5 pelatihan tatap muka yang diikuti sebanyak total 415 peserta
- Melaksanakan 3 pelatihan daring dengan peserta sejumlah 132 orang. Peserta

pelatihan berasal dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina

- Topik pelatihan terkait konsep dan ilustrasi tiga model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis teks, dan model pembelajaran penyingkapan

2. Penelitian

- Menerbitkan *Proceeding 9th AISOFOLL* dengan tema *Bringing Multiliteracies to Language Teaching*

3. Penyebaran Informasi

- Mengoptimalkan penggunaan laman, media sosial, dan media publikasi cetak
- Mengikuti 2 pameran nasional dan 1 pameran internasional
- Melakukan penandatanganan MOU dengan Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara



**SEAMEO Regional
Centre for Tropical
Biology (BIOTROP)**

SEAMEO BIOTROP merupakan salah satu pusat SEAMEO yang melaksanakan program dan kegiatan dalam skala nasional, regional Asia Tenggara dan internasional, dalam bentuk penelitian, peningkatan kapasitas SDM serta diseminasi informasi di bidang biologi tropis.

Pada tahun 2019, SEAMEO BIOTROP telah melakukan beberapa inovasi berikut:

1. Penelitian mengenai pengembangan budidaya rumput laut kotoni (*Kappaphycus alvarezii* Doty) menggunakan teknik kultur jaringan untuk pengembangan industri rumput laut di Indonesia. Budidaya rumput laut kotoni dengan teknik kultur jaringan oleh Laboratorium Kultur Jaringan BIOTROP merupakan yang pertama kali dilakukan dan berhasil, di kawasan Asia Tenggara.
2. Program Sekolah Mandiri Produksi Sayuran dan Buah Edukasi (SMARTS-BE) yang melibatkan 30 SMK di Indonesia
3. Program *SCHOOL GARDEN*. Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas guru dan siswa dalam hal literasi, nutrisi dan kewirausahaan.

Capaian di tahun 2019:

1. Penelitian

- Menyediakan dana untuk 26 penelitian dalam bidang restorasi ekologi, perlindungan dan konservasi ekologi serta peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekologi.
- Penelitian dilakukan oleh peneliti afiliasi BIOTROP serta peneliti lain dari perguruan tinggi di Indonesia.
- Salah satu penelitian merupakan kerjasama penelitian antara peneliti Indonesia dengan Malaysia dengan judul penelitian Restorasi Bakau berbasis Sains Efektif.

2. Peningkatan Kapasitas SDM:

- Melaksanakan total 32 kegiatan yang meliputi : satu pelatihan *in-country*, satu pelatihan regional, 14 pelatihan nasional, empat seminar, dua FGD, empat lokakarya, satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan empat pelatihan daring.
- Kegiatan peningkatan kapasitas SDM diikuti oleh total 2,433 peserta yang berasal dari institusi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, pusat penelitian, dan instansi swasta.
- Pelatihan *in-country* dilaksanakan di Vietnam dengan tema pertanian urban dan diikuti oleh guru-guru sekolah menengah dan PAUD dan pelatihan regional dilaksanakan di BIOTROP dengan tema *Family Farming* diikuti oleh guru-guru dari Kamboja.
- Salah satu kegiatan lokakarya merupakan lokakarya pengembangan industri rumput laut di Sulawesi Tengah khususnya untuk membantu para petani rumput laut bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan diikuti oleh peneliti, praktisi, pemangku kepentingan dalam bidang sumberdaya maritim.
- Salah satu kegiatan seminar adalah Seminar mengenai reklamasi lahan bekas tambang yang diikuti oleh peserta yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan pertambangan di Indonesia, peneliti dan dosen.

3. Konsultasi

Total 13 peneliti dan staf BIOTROP dengan keahlian masing-masing, hadir sebagai narasumber dalam 31 kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM lainnya dalam bidang kehutanan, pertanian, perikanan, biologi (kultur jaringan, herbarium, pengelolaan hama gudang, pengelolaan hama dan penyakit tanaman serta produk alami), Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, instansi swasta, institusi akademik serta organisasi mandiri kemasyarakatan.

4. Penyebaran Informasi

- Penerbitan 3 edisi Jurnal Ilmiah BIOTROPIA yang telah terindex SCOPUS
- Penerbitan Buku Budidaya Rumput Laut Kotoni dan Prosiding Seminar Internasional Biologi Tropis
- Produksi empat Video Edukasi : SMARTS-BE, Tabulampot, Budidaya Jamur Tiram dan Budidaya Tanaman dengan Teknik Kultur Jaringan
- Produksi Modul Pelatihan Online : Budidaya tanaman dengan teknik hidroponik dan kultur jaringan

5. Penerimaan Peserta Magang

BIOTROP menerima 303 orang peserta magang yang berasal dari sekolah kejuruan di Indonesia, perguruan tinggi serta instansi pemerintah. 22 diantaranya merupakan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.

6. Penerimaan Kunjungan

- BIOTROP menerima 5,431 orang pengunjung yang sebagian besar berasal dari institusi akademik khususnya sekolah
- Kunjungan ke BIOTROP dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengenal dan mempelajari materi-materi yang dapat diadopsi dalam proses belajar mengajar di sekolah

7. Kerjasama

- BIOTROP menandatangani 53 MoU dengan instansi pendidikan, pemerintah dan swasta dalam bidang transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, penelitian dan penyebaran informasi.
- Implementasi MoU dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, penelitian, penerbitan publikasi serta program magang.
- Dalam kegiatan kerjasama tersebut, BIOTROP berperan dalam penyediaan tenaga ahli dan narasumber serta fasilitas kegiatan.



**SEAMEO Regional
Centre for Food and
Nutrition (RECFON)**

SEAMEO REC FON

didirikan dengan visi untuk menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan dan gizi di Asia Tenggara. SEAMEO REC FON mempunyai misi untuk melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas, penelitian,

dan penyebaran informasi tentang pangan dan gizi melalui kemitraan untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Pada tahun 2019, SEAMEO REC FON melakukan inovasi dengan mengembangkan Model PAUD Tanggap Bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Model ini dikembangkan dengan melakukan praktik baik, dengan mengembangkan Modul Gizi untuk Bencana berbasis PAUD (*Nutrition in Emergency/ NiE*) dan dievaluasi sebelum dan sesudah intervensi. SEAMEO REC FON juga mengembangkan Model PAUD untuk Pencegahan Stunting dengan mengembangkan rekomendasi berbasis pangan lokal. Selain itu, Program Anakku Sehat dan Cerdas juga mengembangkan model PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) bekerjasama dengan SEAMEO Centre yang lain, menghasilkan modul yang akan menjadi panduan pelatihan untuk Guru PAUD dan pelatih Guru PAUD pada tahun selanjutnya bekerjasama dengan GTK PAUD.

Capaian di tahun 2019

- Melaksanakan pelatihan dalam jaringan untuk guru pada Program Gizi untuk Prestasi sebanyak 3 angkatan, dengan peserta guru 1784 orang.
- Melaksanakan dan membentuk Kelompok Kerja (PokJa) Promosi Gizi berbasis Sekolah tingkat Asia Tenggara dengan peserta 36 orang dari 6 negara di Kawasan Asia Tenggara.
- Melaksanakan 6 penelitian kontraktual.



Pembiasaan Sarapan Pagi Sehat SEAMEO RECFON

- Pembuatan 2 Modul Program Gizi untuk Prestasi, yaitu Modul Kantin Sehat dan Modul Kebun Sekolah sebagai Bahan Ajar Guru mengimplementasi program di sekolah.
- Memberikan 39 beasiswa kepada masyarakat di negara-negara Asia Tenggara untuk mengikuti Pelatihan Gizi yang diadakan SEAMEO RECFON.
- Mengadakan lebih dari 20 jenis pelatihan Gizi (*Regional Training* dan *In-country Training*)

SiRenBaja



SiRenBaja adalah sistem informasi mengawal proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara bertahap dari proses identifikasi kebutuhan hingga pengumuman.

Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres 16/2018



SiRenBaja adalah sistem informasi mengawal proses penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara bertahap dari proses identifikasi kebutuhan hingga pengumuman. Aplikasi SiRenBaja diresmikan Oktober 2018 yang memberi ruang pada kementerian melakukan pengawasan atas progres penyusunan RUP.

Penerbitan SiRenBaja menjadi terjemahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terutama pada pasal 18, perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) setelah penetapan Pagu Indikatif.

Dengan menggunakan SiRenBaja ini, diharapkan seluruh RUP Barang/ Jasa beserta nilai dan jenis/nama paketnya di lingkungan Kemendikbud dapat dipetakan sejak dini sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.

SiRenBaja juga menghasilkan implementasi sebagai berikut: Kemendikbud telah memiliki kluster item belanja yang baku yaitu *One Gate Policy* dalam penyusunan RUP yang akan diumumkan ke SiRUP LKPP; Terintegrasinya SiRenBaja dengan aplikasi *e-Planning* di Kemendikbud; Tersedianya data RUP pada tahun perencanaan T-1; dan tersedianya sistem *monitoring* RUP.

Pada tahun 2019 sedang dikembangkan untuk *Monitoring* dan Evaluasi di SiRenBaja agar dapat

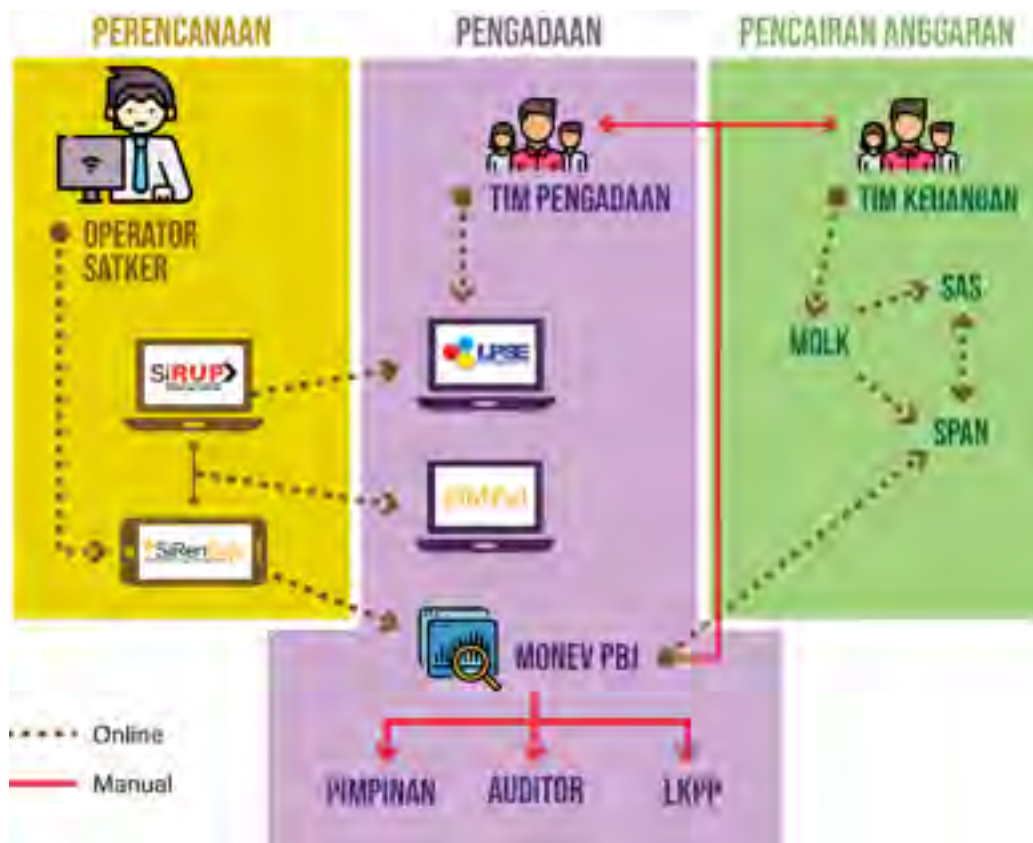
Tampilan Aplikasi SiRenBaja



dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh paket pengadaan yang telah direncanakan. Paket ini kemudian diumumkan di SIRUP LKPP dan yang telah dilaksanakan baik

melalui Sistem Informasi Pengadaan Langsung (SimPel), e-Purchasing (e-katalog LKPP), dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Alur Pengadaan Barang dan Jasa



Layanan Elektronik Pendidikan

SPBE adalah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, merupakan amanat presiden yang tertuang dalam Perpres No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

SPBE adalah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, merupakan amanat presiden yang tertuang dalam Perpres No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Tujuan diterbitkannya peraturan tersebut untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Di lingkungan Kemendikbud SPBE dikembangkan menjadi Layanan Publik Berbasis Elektronik (LPBE) dan merupakan portal layanan publik yang terintegrasi untuk memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah, mengintegrasikan proses bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian layanan SPBE, dan penerapan keamanan SPBE.

Kehadiran SPBE mengintegrasikan lima strategi, yaitu penguatan kebijakan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas, penetapan *quick wins* penerapan *e-government*, dan

pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh Kemendikbud.

Saat ini Kemendikbud memiliki beberapa layanan elektronik pendidikan, seperti:

- » Dirjen Dikdasmen memiliki 12 Layanan e-pendidikan,
- » Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (PSD) mempunyai 2 layanan e-pendidikan,
- » Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) memiliki 2 layanan e-pendidikan,
- » Dirjen PAUD Dikmas mempunyai 6 layanan e-pendidikan
- » Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) mempunyai 5 layanan e-pendidikan.
- » Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki 6 layanan e-pendidikan.
- » Biro Umum mempunyai 1 layanan e-pendidikan

Tampilan Aplikasi SPBE



Dalam pembuatan portal layanan publik yang terintegrasi dipilih beberapa layanan utama, yaitu Peta Zonasi Sekolah dari PDSPK, Layanan Simrasio dan Pemetaan Guru dari Dirjen GTK, Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah dari Dirjen Dikdasmen, Data Pokok Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Layanan Infrastruktur dan Keamanan Sistem

Aplikasi dari Pustekkom, dan Layanan Anggaran dari Pusat Analisis dan Sinronisasi Kebijakan (Paska). Saat ini, Layanan Elektronik Pendidikan tersebut dapat diakses pada laman : <https://zonasi.kemdikbud.go.id>



Katalog Sektoral

Katalog sektoral adalah buah dari nota kesepahaman antara Kemendikbud dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan implementasi dari Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020.

Proses jual beli barang, khususnya buku nonteks yang bertujuan untuk memenuhi kelangsungan pembelajaran di sekolah cukup tinggi. Selama ini jual beli kebutuhan tersebut dilakukan secara konvensional. Tiap kabupaten/kota bergerak melakukan tender dengan perusahaan-perusahaan penyedia. Rantai jual beli ini cukup panjang dan berliku sehingga kuat dugaan akan menimbulkan “kong kalikong” dan tidak ada standar harga yang tetap.

Kemendikbud melakukan langkah penghematan dengan cara pembelian secara elektronik menggunakan metode *e-purchasing* melalui katalog elektronik. Cara ini dilakukan

sejak Juni 2019 untuk menekan biaya tinggi sehingga lebih efektif dan efisien. Katalog sektoral ini buah dari nota kesepahaman antara Kemendikbud dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan implementasi dari Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020.

Jual beli buku nonteks secara elektronik ini bersandar pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Di dalamnya mengamanahkan untuk

Linimasa Perkembangan Katalog Sektoral



memprioritaskan pembelian buku nonteks yang menggunakan anggaran DAK fisik melalui katalog elektronik. Selain buku nonteks, metode *e-purchasing* ini bisa dilakukan untuk komoditas lain yang berpotensi masuk katalog sektoral, seperti alat peraga pendidikan dan alat permainan edukatif. Untuk melakukannya bisa langsung berkunjung ke laman <https://e-katalog.lkpp.go.id> pada menu “Komoditas Sektoral”- “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan”- “Buku Non-Teks”.

Melalui katalog sektoral tidak ada yang dirugikan, sebaliknya sekolah, pemerintah daerah dan masyarakat sangat diuntungkan dengan memperoleh harga buku yang lebih murah 40-60% dibandingkan harga ritel. Penghitungan harga yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan dibantu oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia), yang menjadi dasar acuan negosiasi harga buku. Perhitungan harga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harga fisik buku, royalti untuk penulis, serta keuntungan bagi penerbit dan toko buku.

Jika aplikasi *e-purchasing* mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* dilakukan secara *offline* (manual) sesuai surat jawaban Kepala LKPP No 117/KA/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Solusi Atas Kendala Dalam Katalog Elektronik Sektor

Kemendikbud.

Bentuk transparansi terhadap transaksi pembelian barang/jasa yang dilakukan secara manual, kepala dinas provinsi/kabupaten/ kota menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diteruskan kepada LKPP



PP : Pejabat Pengadaan

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen



TESTIMONI PEMANFAAT

Beragam sambutan positif disampaikan oleh kalangan dinas pendidikan di daerah maupun penyedia buku nonteks. di antaranya adalah sebagai berikut:

Sakti Nugroho, Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. “Kami menyambut baik pembelian buku secara elektronik ini, ke depan saya berharap dengan sistem yang baik ini bisa mengakomodir seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga sekolah-sekolah memiliki keragaman alat peraga pendidikan,”

Sa’dun, M.Pd., Kasi Sarpras Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati, Jawa Tengah. “Katalog Sektoral sangat diperlukan karena menyangkut kebutuhan Nasional, sehingga kabupaten/kota tidak perlu mengadakan tender dan hanya tinggal melaksanakan pemesanan ke penyedia yang sudah melaksanakan kontrak payung. Tetapi perlu dicermati komitmen penyedia untuk melayani kabupaten/kota, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Hal ini perlu dijaga komitmennya karena sebagian besar penyedia berada di Jawa, kemudian LKPP tentunya harus memperhitungkan kapasitas server dan traffic data ketika aplikasi katalog dijalankan,”

Siswanto, Direktur Marketing PT Tiga Serangkai. “Dengan Katalog Sektoral transparansi lebih terjaga dan transaksi menjadi jauh lebih cepat dan pastinya lebih aman. Sebagai masukan agar ada standardisasi dokumen dan ongkos kirim akan lebih baik dan aman (3 transaksi online, 184 offline),”

Melvi, Asisten Manager PT Gramedia Pustaka Utama. “Apabila ada template akan sangat terbantu sehingga tidak menyita waktu. Standardisasi ongkos kirim juga akan mempercepat keseluruhan proses (23 offline dan 1 online),”

SIPLah: Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah



SIPLah adalah Sistem elektronik yang dapat digunakan oleh sekolah untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara daring yang dananya dari BOS.

Setiap tahun pemerintah memberikan dana BOS reguler bagi sekolah yang disalurkan melalui Pemerintah Daerah. Dana BOS ini bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari DAK nonfisik. Tahun 2019 ini pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tahun 2019, atau sebesar Rp 487,9 triliun.

Anggaran tersebut di antaranya difokuskan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk mendanai operasional sekolah dengan prioritas kegiatan operasional sekolah nonpersonalia, antara lain untuk pengelolaan sekolah, penerimaan peserta didik baru, kegiatan dan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan perpustakaan, pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah, pembayaran honor, penyelenggaraan kegiatan

uji dan sertifikasi kompetensi, penyelenggaraan bursa kerja, dan praktik kerja.

Namun, laporan BOS online tidak optimal dan tidak pernah sampai 60%, bahkan cenderung menurun. Kementerian Keuangan meragukan efisiensi penggunaan dana BOS ini. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Sistem Informasi Pengadaan Di Sekolah (SIPLah).

SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan oleh sekolah untuk proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) secara daring yang dananya dari BOS. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (*online marketplace*) yang dioperasikan oleh pihak ketiga.

Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud. Kehadiran SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan dana BOS.

4 layanan SIPLah meliputi



SSO : Single Sign On

RKAS : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

INTEGRASI PENGELOLAAN BOS

Integrasi pengelolaan dana BOS ini dilakukan dalam proses perencanaan untuk belanja, baik dalam bentuk pengadaan, maupun nonpengadaan yang menggunakan RKAS (Dikdasmen). Proses realisasi untuk pembayaran tunai, dicatat melalui RKAS, sedangkan untuk pembayaran secara nontunai

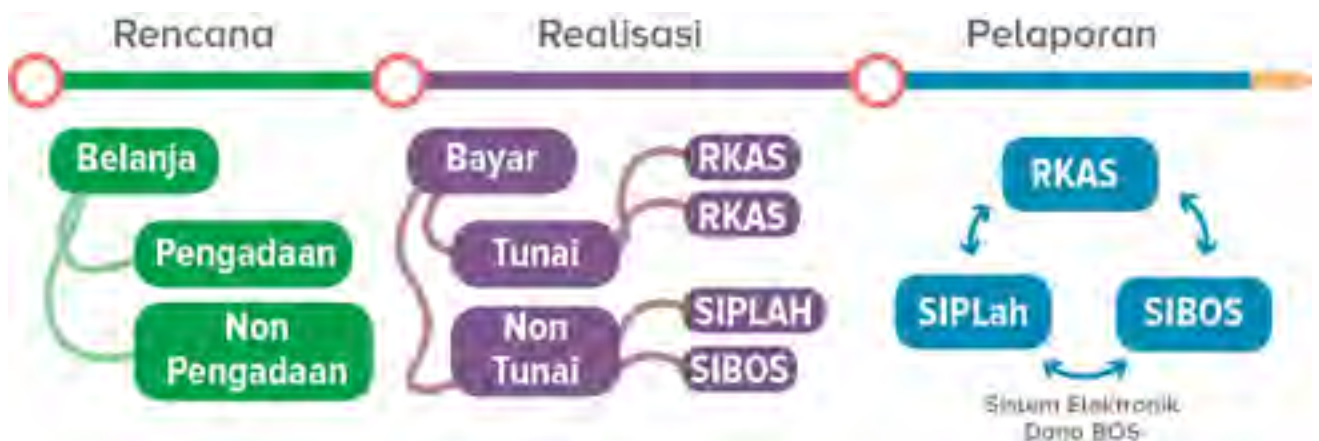
pencatatannya melalui SIPLah. Pembayaran nonpengadaan nontunai pencatatannya melalui si BOS. Sampai pada tahap pelaporan, baik perencanaan, maupun realisasi, ketiga tahap ini saling berintegrasi.

SIPLah sudah dapat diakses melalui laman <https://siplah.kemdikbud.go.id/>.

Alur Pengelolaan SIPLah



Alur Pengadaan pada Satuan Pendidikan





TESTIMONI PEMANFAAT SIPLah

Jemy Confido, CEO BLANJA.com. “Program SIPLah adalah bentuk pemanfaatan digitalisasi yang masuk ke dalam dunia pendidikan. Kami, Belanja.com, merasa bangga dapat bekerja sama dengan Kemendikbud sebagai pasar daring untuk bertransaksi dalam pemanfaatan Dana BOS sehingga lebih efektif, transparan, dan *accountable*. Ini adalah satu langkah positif yang bisa ditiru atau bisa diaplikasikan tidak hanya dalam sektor pendidikan namun juga ke semua sektor.”

PT Pesona Edukasi. “PesonaEdu sangat mendukung program seperti SIPLah untuk mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas dalam mengawal penggunaan dana BOS. Memang diperlukan kemauan untuk belajar dan mengubah kebiasaan bertransaksi, baik di sekolah maupun penyedia barang, namun perlu dan sudah waktunya untuk menghadirkan transaksi yang bersih, utamanya di bidang pendidikan,”

Unit Layanan Terpadu : Birokrasi Yang Melayani



Pelayanan ULT Kemendikbud

Keberadaan Unit Layanan Terpadu (ULT) secara nyata menjadi program pendukung manajemen yang bertujuan untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat; meningkatkan efektivitas birokrasi dan tata kelola Kemendikbud yang bersih dan terpercaya; serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Layanan publik saat ini menjadi suatu keniscayaan yang amat penting. Begitu pentingnya nilai sebuah layanan di mata publik, mendorong berbagai instansi publik berlomba meningkatkan serta mengevaluasi layanan secara berkala, merujuk pada indikator yang memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan perundang-undangan.

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan prima mendorong pemerintah untuk memperhatikan produk layanannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang berwenang dalam membuat kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan. Menyadari pentingnya melayani publik dengan rasa bangga dan sepenuh hati. Karena itu, Kemendikbud berkomitmen untuk terus berinovasi guna meningkatkan layanan publik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemendikbud turut memacu diri untuk menciptakan layanan yang efektif dan efisien, dengan mengoperasikan Unit Layanan Terpadu (ULT). Jika sebelumnya masyarakat yang ingin memperoleh layanan di Kemendikbud harus datang langsung ke Jakarta dan pergi ke berbagai gedung, sejak beroperasinya ULT, mereka cukup datang ke ULT di Gd. C Lt. 1. Angka pengunjung ULT dari awal berdirinya terus meningkat. Untuk tahun ini saja, sampai Juni lalu tercatat 14.987 pengunjung. Berdasarkan sifatnya, layanan di ULT terbagi menjadi dua, yaitu layanan langsung dan

layanan tidak langsung. Sementara untuk jenis layanannya, ULT menyelenggarakan layanan informasi dan pengaduan.

LPMP sebagai Koordinator ULT

Meskipun masyarakat puas dengan layanan yang diberikan, Kemendikbud tidak berhenti memetakan, mengevaluasi, dan mencari terobosan dalam pelayanan. Kemendikbud ingin menjangkau para pemangku kebijakan (stakeholders) di daerah. Berkeadilan telah melahirkan gagasan baru dengan mengoptimalkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di 34 provinsi sebagai Koordinator Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Tindak lanjutnya, BKLM melakukan pembinaan layanan ke ULT LPMP demi membantu percepatan pembangunan layanan publik yang memiliki keseragaman standar pelayanan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan layanan publik yang sama baiknya dengan ULT pusat. Gagasan ini diyakini pula dapat menjadikan peran LPMP semakin terlihat untuk mendukung implementasi kebijakan Kemendikbud di berbagai daerah.

Dalam rangka peningkatan pembinaan layanan ULT di daerah, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) melakukan pendampingan terhadap 34 ULT di LPMP. Kegiatan ini berhasil merampungkan penilaian atas 34 ULT UPT dari total sejak akhir tahun 2018 hingga Agustus 2019.

Komitmen UPT dalam bersinergi meningkatkan

layanan publik tidak hanya BKLM saja yang berkunjung ke ULT daerah. Tercatat ada 19 LPMP yang sudah magang di ULT Kemendikbud. Ini merupakan bukti konkret bahwa budaya organisasi di Kemendikbud telah mengarah pada kesadaran bersama untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dorongan perubahan tersebut tidak hanya berasal dari pusat, melainkan juga berangkat dari komitmen pimpinan untuk memberikan kesempatan kepada stafnya belajar di ULT Kemendikbud tentang bagaimana caranya melayani masyarakat yang ingin mengurus tunjangan profesi pendidik, NUPTK, Dapodik, serta layanan informasi dan pengaduan.

Upaya Kemendikbud dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Keberadaan ULT merupakan tolok ukur atas komitmen Kemendikbud dalam memberikan layanan yang berpihak pada pemangku kebijakan. Berdasarkan sifatnya, layanan di ULT terbagi menjadi dua, yaitu layanan langsung dan layanan tidak langsung. Sementara untuk jenis layanannya, ULT menyelenggarakan layanan informasi dan pengaduan.

Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan ULT menjadi semangat bagi Kemendikbud untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi layanan. Harapannya, ULT dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang prima.

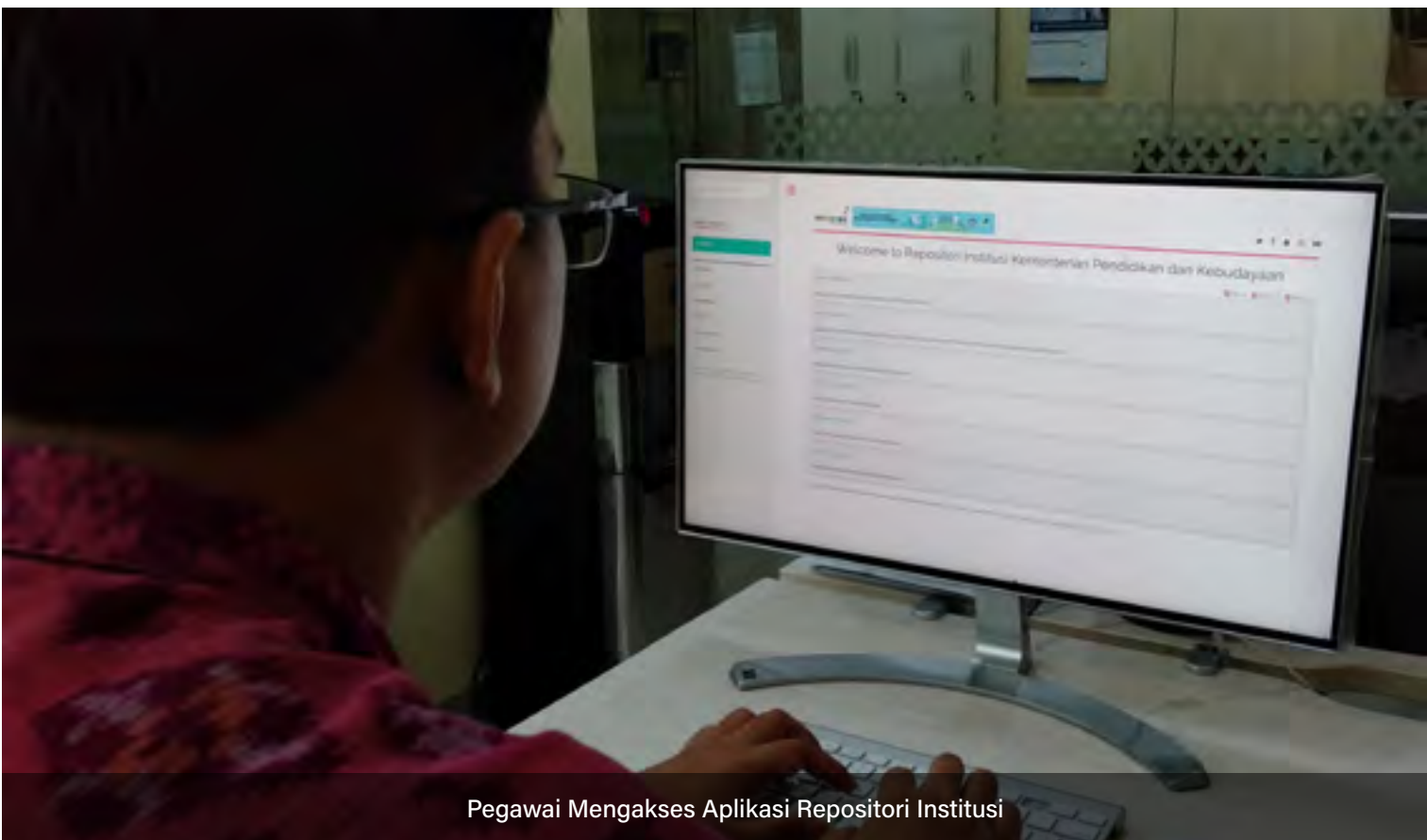


RAGAM PENDAPAT PEMANFAAT

Puji Yulianti (Guru SMP), “ULT sampai saat ini menjadi solusi bagi kami yang datang ke kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena pelayanannya cepat dan dilayani seperti nasabah bank menggunakan antrian. kiranya pelayanan disana tetap dipertahankan.”

Hendri Winarto (Operator Sekolah), “Kami sangat berterima kasih atas tersedianya layanan terpadu. Segala urusan jadi mudah, aman dan nyaman, kendala dapat terlelasi dengan cepat.”

Repositori Institusi



Pegawai Mengakses Aplikasi Repositori Institusi

Repositori institusi bertujuan untuk menyimpan, mengelola, melestarikan dan menyebarkan (diseminasi) publikasi/terbitan internal lembaga, dokumen publik lembaga serta karya intelektual, dan penelitian yang dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) internal dan lembaga dalam bentuk elektronik.

Repositori Institusi Kemendikbud adalah sebuah layanan informasi digital yang

diselenggarakan oleh Subbagian Perpustakaan, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat. Layanan ini bertujuan untuk menyediakan akses terbuka (*open access*) dan daring (*online*) kepada publik terkait dengan berbagai informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam berbagai format.

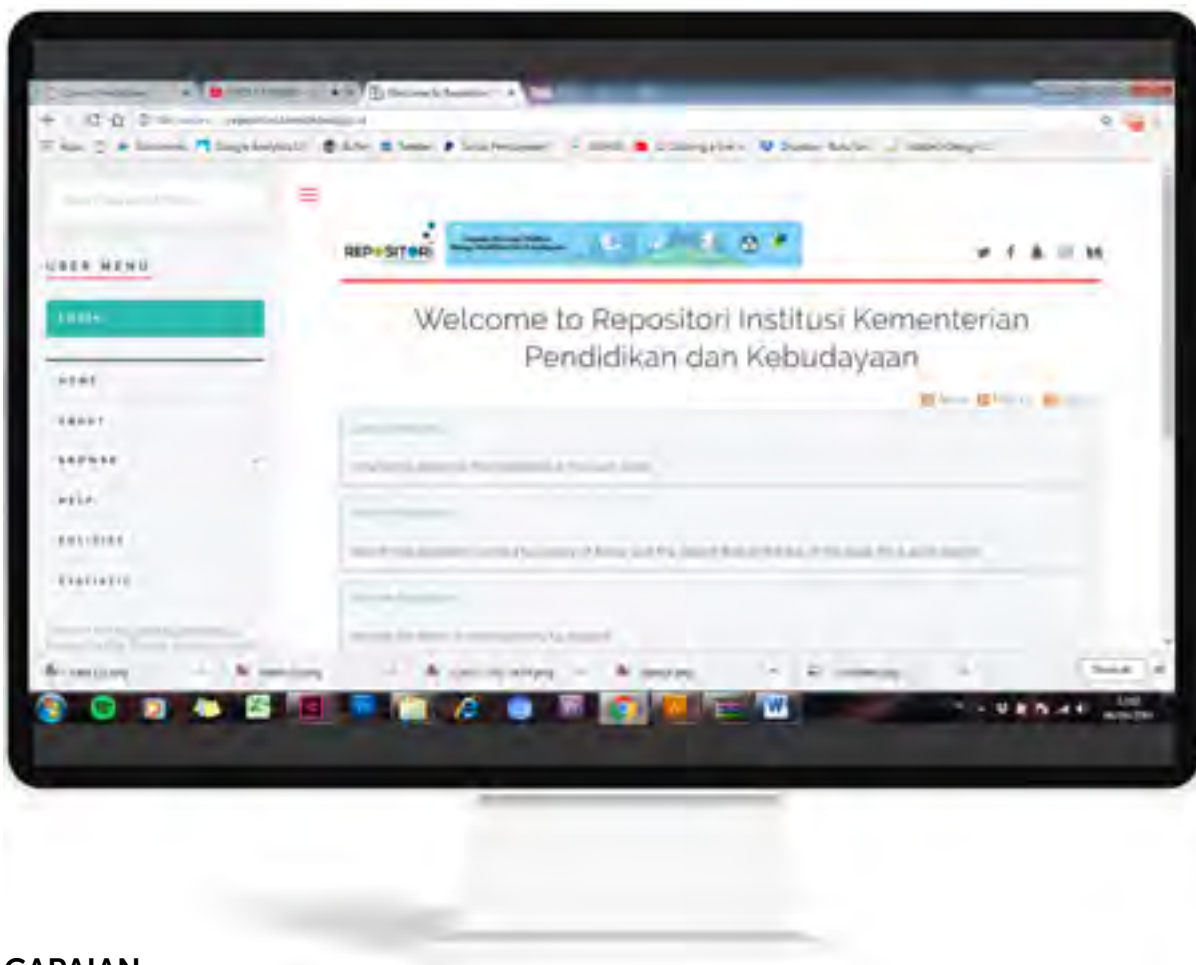
Saat ini perpustakaan mengintegrasikan layanan seluruh perpustakaan di lingkungan Kemendikbud dalam satu pencarian melalui katalog induk (katalog.kemdikbud.go.id) dengan menggunakan sistem UCS (*Union Cataloging System*). Fenomena ini menjadikan layanan Perpustakaan Kemendikbud semakin luas. Repositori institusi bertujuan untuk menyimpan, mengelola, melestarikan dan menyebarkan (diseminasi) publikasi/terbitan internal lembaga, dokumen publik lembaga serta karya intelektual dan penelitian yang dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) internal dan lembaga dalam bentuk elektronik.

Pemanfaatan Repositori Institusi secara daring (*online*) diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu juga dapat meningkatkan visibilitas dan dampak positif serta menjadi pusat informasi digital secara menyeluruh. Repositori ini juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur kinerja institusi yang dapat terlihat oleh publik.

5 Tahapan Pembangunan Repositori Institusi



Tampilan Aplikasi Repositori Kemendikbud



CAPAIAN

Setiap Perpustakaan di lingkungan Kemendikbud wajib menyerahkan 2 eksemplar hasil publikasi/ terbitan instansinya ke perpustakaan dalam rangka fungsi deposit. Berikut grafik perolehan hasil Karya Cetak Karya Rekam (KCKR) unit di lingkungan Kemendikbud tahun 2019.



koleksi dan unduh repositori tahun 2018-2019



RAGAM PENDAPAT

Ivan Lanin (Pemerhati Bahasa Indoensia), “Situs web repositori Kemendikbud yang dikelola Perpustakaan Kemendikbud ini memuat banyak rujukan berharga.”

Mailillah (Mahasiswa UIN Jakarta), “Repositori Kemendikbud ini sangat bermanfaat, soalnya *open access* juga gampang digunain kapan aja dimana aja, bahkan menyarankan ke temen aku yang lagi ngerjain skripsi tentang BIPA, yang mana perpustakaan yang punya koleksi yang ngebahas tentang BIPA tuh jarang, dan yang ada hanya di repositori perpustakaan Kemendikbud.”

Pengadaan CPNS yang transparan, kompetitif dan bebas KKN



Wawancara secara Daring dilakukan Kemendikbud sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Transaparansi dalam Pengadaan CPNS

Dalam pelaksanaan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kemendikbud senantiasa mengedepankan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya apa pun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah karena SDM merupakan kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Salah satunya adalah melalui proses seleksi yang ketat, transparan, dan akuntabel agar dapat menghasilkan calon ASN yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan di bidangnya. Proses seleksi seperti inilah yang diterapkan dan terus dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memenuhi kebutuhan akan sumber

daya manusia (SDM).

Selain itu, untuk menghadapi perubahan dunia, termasuk di dalamnya Revolusi Industri 4.0, pemerintah berupaya mewujudkan SMART ASN, yaitu ASN yang berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami teknologi informasi (information technology, IT) dan bahasa asing, memiliki jiwa melayani (*hospitality*), mampu membangun jejaring kerja (*networking*), dan *entrepreneurship*.

Untuk mewujudkan hal ini, tentu saja harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perekrutan CPNS. Nah, dalam pelaksanaan penerimaan CPNS, Kemendikbud senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan CPNS, yaitu transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak

Alur Seleksi CPNS Kemendikbud 2018



Alokasi CPNS Kemendikbud 2018



dipungut biaya apapun. Demikian pula, sistem rekrutmen CPNS berbasis *information and communication technology* (ICT) menjadi upaya yang terus dilaksanakan dan dipertahankan oleh Kemendikbud sejak tahun 2010.

Untuk menjamin transparansi pelaksanaan SKD, tahun 2018 pelaksanaan Standar Kompetensi Dasar (SKD) untuk seleksi pengadaan CPNS di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemda, termasuk Kemendikbud dikoordinasikan oleh BKN, dan menggunakan fasilitas serta aplikasi CAT BKN. Dengan aplikasi CAT, peserta akan langsung mengetahui nilai yang diperolehnya

begitu menyelesaikan soal. Dengan demikian, tidak ada celah untuk memanipulasi nilai SKD seseorang.

Untuk dapat menjangkau potensi pelamar sesuai dengan yang dipersyaratkan jabatan, Kemendikbud menerapkan Standar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang juga dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi CATBKN.

Selanjutnya, proses wawancara dan tes unjuk kerja juga dilaksanakan secara daring oleh Kemendikbud atau Kementerian/lembaga/Pemda lain sampai dengan tahap penilaian.

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kemendikbud

Asesmen bertujuan menjangkang data profil kompetensi individu, mengukur kesenjangan (gap) kompetensi individu, memotret tingkat kesesuaian individu dalam jabatan, serta menggali informasi kebutuhan pengembangan kompetensi individu.



Tak bisa disangkal, pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pembangunan SDM, mulai tahun 2019 Indonesia mengembangkan secara besar-besaran sumber daya manusia melalui pendidikan. Untuk mendukung program tersebut, tentu dibutuhkan SDM yang unggul di semua lini.

Salah satu upaya memunculkan potensi-potensi SDM bertalenta adalah dengan pembentukan Kelompok Rencana Suksesi (*talent pool*), sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemendikbud termasuk salah satu kementerian yang sangat peduli dengan program ini, sebagai salah satu wujud nyata penerapan meritokrasi dalam pengelolaan SDM di lingkungannya.

Sistem Meritokrasi adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Implementasi sistem meritokrasi berimplikasi, antara lain pada tuntutan tersedianya data profil kompetensi per individu bagi seluruh pegawai yang dapat diperoleh melalui proses asesmen terhadap pegawai. Asesmen diperlukan untuk mengetahui kemampuan dan kekurangan individu, juga penting untuk membangun

kultur *good government*, khususnya di lingkungan Kemendikbud. Sementara itu, dengan adanya sistem meritokrasi ini, individu juga harus tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuannya.

Asesmen dilaksanakan dengan tujuan untuk menjangkau data profil kompetensi individu, mengukur kesenjangan (*gap*) kompetensi individu, memotret tingkat kesesuaian individu dalam jabatan, serta menggali informasi kebutuhan pengembangan kompetensi individu.

Hasil asesmen selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan basis data pengembangan *talent pool* (Kelompok Rencana Suksesi) yang dapat dijadikan informasi dasar dan merupakan modal untuk melakukan pengelolaan SDM, terutama dalam waktu mempersiapkan SDM bertalenta untuk menjamin ketersediaan pemimpin di masa mendatang.

Biro Sumber Daya Manusia telah melaksanakan asesmen potensi pegawai sejak tahun 2019, pada tahun 2019 jumlah peserta yang mengikuti asesmen sebanyak 4.745 orang

Dari asesmen tersebut, diantaranya menyangkut area kekuatan dan area pengembangan, secara umum dapat disimpulkan bahwa aspek yang menjadi area kekuatan pada mayoritas pegawai meliputi Kerja sama, Pelayanan Publik, dan Perekat Bangsa. Hal ini berarti bahwa peserta memiliki keunggulan pada aspek yang berkaitan dengan kemampuan untuk menjalin



Alur Asesment dan Merit Kemendikbud

relasi dengan pihak lain.

Adapun aspek yang menjadi area pengembangan pada mayoritas pegawai meliputi komunikasi dan pengambilan keputusan, yang berarti bahwa dorongan peserta untuk menyampaikan ide dan gagasan, serta melakukan analisis mendalam guna menghasilkan keputusan yang tepat bagi suatu permasalahan masih perlu ditingkatkan.

Sebagai wujud nyata komitmen Kemendikbud dalam pelaksanaan sistem meritokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy pada tanggal 26 Februari 2019 meresmikan Pusat Asesmen Pegawai Kemendikbud.

Pusat asesmen ini didukung ketersediaan ruang-ruang dan teknologi yang memadai. Untuk mendukung ketersediaan SDM, telah dilaksanakan seleksi terhadap 21 orang calon asesor, yang akan ditindaklanjuti dengan proses pelatihan calon asesor, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur.

Untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan asesmen, saat ini telah dibangun aplikasi *Assessment Center*, yang berfungsi untuk mengelola seluruh data pelaksanaan asesmen pegawai Kemendikbud. Aplikasi ini telah terhubung dengan database pegawai Kemendikbud sehingga seluruh data



yang dikelola akan selaras dengan *database* kepegawaian Kemendikbud.

Indikator pelaksanaan sistem merit adalah sebagai berikut:

1. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan
2. Perencanaan pegawai sesuai dengan beban kerja
3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka
4. Memiliki manajemen karir, yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta
5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan
6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja
8. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang
9. Memiliki system informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN

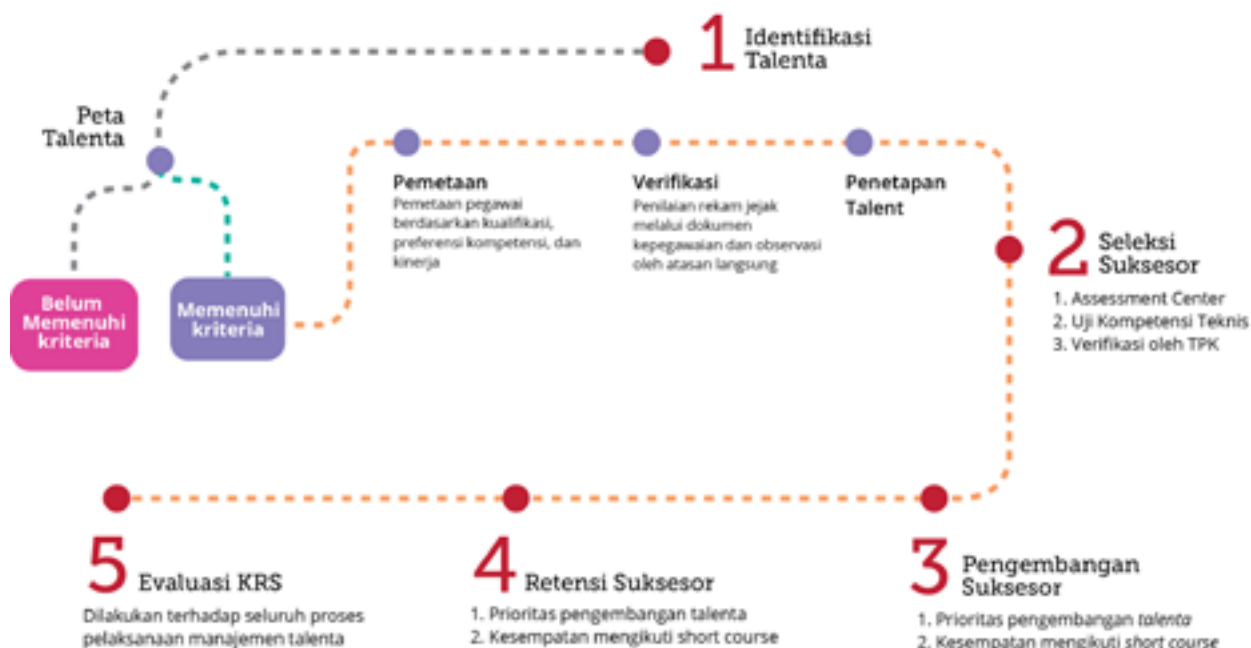
Manajemen Talenta Mencetak PNS Berkualitas



Kegiatan Manajemen Talenta

Melalui sistem manajemen talenta, PNS yang memiliki beragam potensi dan talenta diharapkan dapat terwadahi dengan baik dan mengembangkan talenta mereka.

Alur dan Tahapan Manajemen Talenta Kemendikbud



Kualitas kepemimpinan, termasuk kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan, kini menjadi salah satu isu nasional yang hangat dibicarakan. Pemimpin berkualitas, yang memiliki inovasi tinggi diharapkan akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya kepada tujuan yang ingin dicapai. Nah, berbicara kepemimpinan tentu tidak terlepas dari peningkatan kualitas SDM yang akan menjadi pemimpin, dan perlunya persiapan yang matang terkait dengan penyiapan SDM yang berkualitas dan bertalenta serta memiliki potensi yang tinggi.

Pengelolaan SDM bertalenta yang ditujukan bagi pembangunan generasi pemimpin yang potensial bagi pemerintahan, mendapatkan porsi cukup tinggi dan menjadi program prioritas di lingkungan Kemendikbud, antara

lain dengan diusulkannya penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Manajemen Talenta.

Manajemen talenta merupakan pengelolaan PNS bertalenta untuk memperoleh kelompok rencana suksesi. Tujuan manajemen talenta antara lain menyiapkan pegawai negeri sipil yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja terbaik untuk menduduki jabatan pengawas, jabatan administrator, dan jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendikbud.

Manajemen talenta di lingkungan Kemendikbud dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme, objektif, dan berkelanjutan sehingga seluruh pegawai dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam tahapan manajemen talenta.

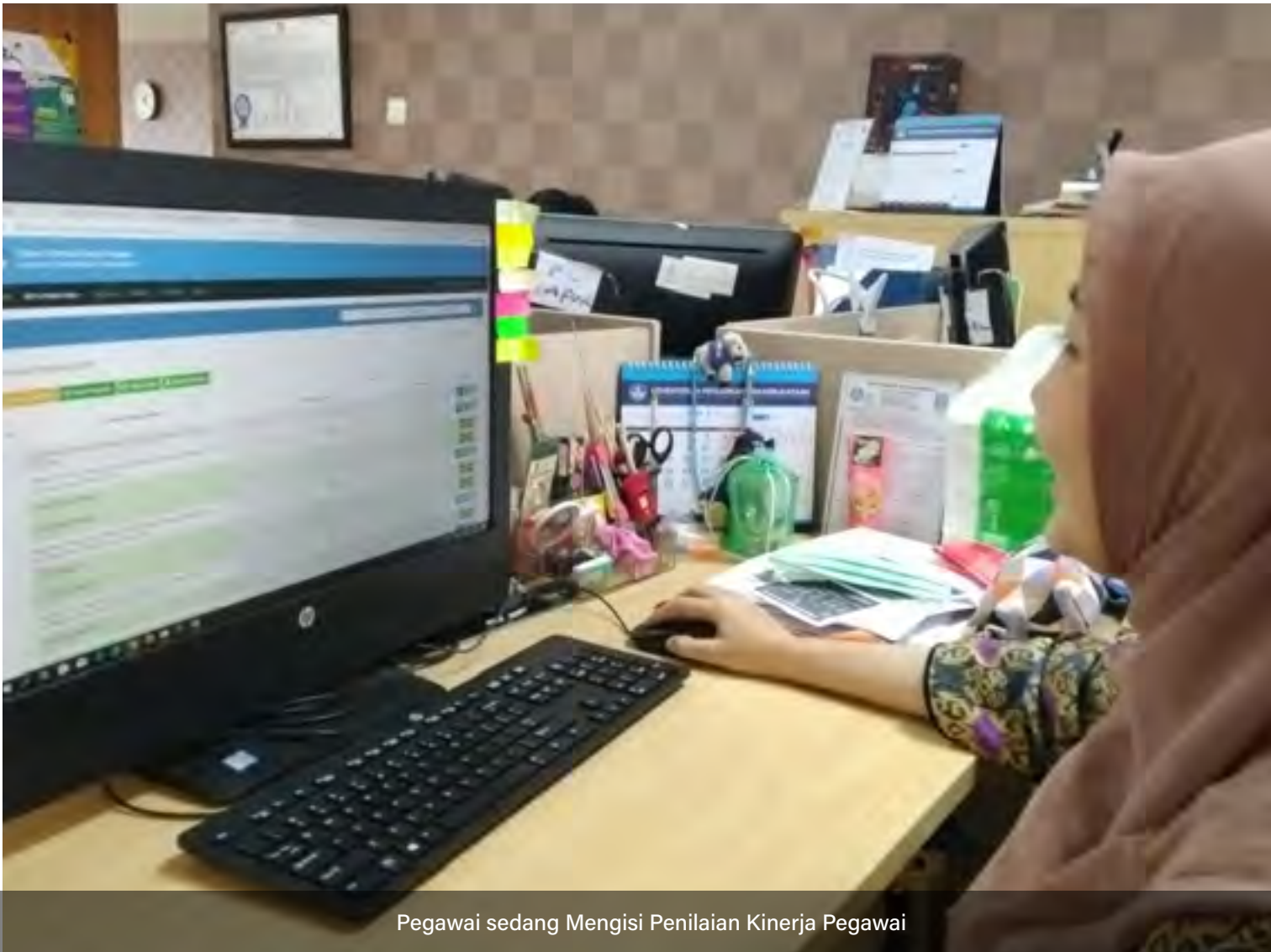
Terhadap konsep manajemen talenta tersebut, saat ini telah selesai dilakukan proses uji publik di lingkungan Kemendikbud. Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh melalui proses uji publik tersebut, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Manajemen Talenta.

“Manajemen talenta akan menjadi gerbang perubahan terhadap pemenuhan calon-calon pejabat atau pimpinan di lingkungan Kemendikbud, tentu saja dengan mengutamakan segi kualitas yang terjamin dan kompetensi yang matang,” demikian disampaikan Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kemendikbud dalam rapat Penyusunan Manajemen Talenta, Februari 2019.

Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, yang menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi bonus demografi pada tahun 2045, Indonesia harus

mempersiapkan banyak hal agar negeri ini merasakan dampak positif dari bonus demografi tersebut. Salah satunya adalah merancang sistem Manajemen Talenta Nasional, yang meliputi aktivitas merekrut dan menyeleksi talenta, mengembangkan, memobilisasi, dan mempertahankan talenta-talenta unggul nasional di berbagai bidang yang akan memengaruhi dan berkontribusi pada keberhasilan sosial dan ekonomi. Melalui sistem ini putra-putri Indonesia yang memiliki beragam potensi dan talenta diharapkan dapat terwadahi dengan baik dan mengembangkan talenta mereka.

Penilaian Kinerja Pegawai



Pegawai sedang Mengisi Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian Kinerja Pegawai bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Terbitnya PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang kuat dalam rangka menyambut era Industri 4.0. Presiden Joko Widodo dalam penjelasan peraturan itu menyatakan langkah tersebut dibuat demi mewujudkan PNS yang profesional, kompeten, dan kompetitif.

Ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah sejak lama dimanfaatkan Kemendikbud dalam penilaian kinerja pegawainya. Kemendikbud menciptakan laman untuk penilaian kinerja secara elektronik yang diimplementasikan penggunaannya secara bertahap serta wajib bagi seluruh pegawai Kemendikbud sejak tahun 2017. Setiap tahun aplikasi ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari pegawai.

Melalui aplikasi e-SKP, pegawai dapat menyusun rencana Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara lebih terinci dengan memasukkan target per bulan sampai menjadi sebuah target tahunan. Selanjutnya, rencana SKP akan dicek dan diberikan persetujuan oleh pejabat penilai melalui aplikasi.

Pegawai juga dapat mengajukan nilai realisasi setiap bulan melalui aplikasi berdasarkan catatan log harian yang diisi oleh pegawai setiap hari. Penilaian realisasi per bulan dilakukan atasan langsung setiap awal bulan berikutnya dengan mempertimbangkan catatan log harian yang diisi oleh pegawai.

Pada tahun 2019, pengembangan aplikasi e-SKP difokuskan untuk memberikan penilaian kinerja yang lebih objektif dengan pemanfaatan fitur log harian. Saat ini log harian belum



terkait langsung dalam penilaian realisasi kinerja, hanya menjadi bahan pertimbangan. Dengan melakukan pengisian log harian, atasan langsung dapat menilai kinerja pegawai bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Atasan langsung juga dapat melihat tugas harian pegawai dalam rangka memenuhi target kerja bulanan, apakah sudah sesuai atau belum. Tidak terbatas hanya di komputer, aplikasi ini pun sudah dapat diakses melalui gawai (*smart phone*) berbasis android, yakni adanya aplikasi "*native*" yang dinamakan SIBANDRO.

Dengan penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif dan terukur dapat meningkatkan semangat pegawai dalam melaksanakan tugas dan menjadikan SDM di Kemendikbud lebih profesional dan unggul di bidangnya.

Dalam rangka peningkatan objektivitas penilaian kinerja pegawai diperlukan indikator pendukung dengan mengaitkan rencana kerja pegawai dengan renstra dan rencana kerja tahunan. Selain itu, perlu dikembangkan fitur unggah (*upload*) bukti kerja agar atasan dapat memberikan penilaian lebih objektif. Ada pun untuk peningkatan objektivitas penilaian perilaku, perlu dikembangkan fitur penilaian perilaku kerja dengan metode 360 derajat. Penilaian perilaku kerja tidak hanya didapatkan dari atasan langsung, tetapi juga dari rekan sejawat dan bawahan langsung dengan survei tertutup. Ke depan, aplikasi e-SKP diharapkan dapat dikembangkan lagi agar mampu memfasilitasi hal tersebut sehingga semakin memudahkan dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Kemendikbud.



Peningkatan Kinerja Melalui e-Kehadiran



Kegiatan Rekam Kehadiran oleh Pegawai

Sistem e-Kehadiran ini telah diterapkan di seluruh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud dalam rangka meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan informasi kehadiran pegawai.

SANKSI DISIPLIN

(PP Nomor 53 tahun 2010)

1	Disiplin Ringan	01-05 hari	: Teguran lisan
		06-10 hari	: Teguran tertulis
		11-15 hari	: Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	Disiplin Sedang	16-20 hari	: Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
		21-25 hari	: Penundaan kenaikan pangkat
		26-30 hari	: Penurunan pangkat selama satu tahun
3	Disiplin Berat	31-35 hari	: Penurunan pangkat selama tiga tahun
		36-40 hari	: Penurunan jabatan
		41-45 hari	: Pembebasan jabatan
		≥45 hari	: Pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat

Aparat negara yang berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera merupakan target dalam reformasi manajemen pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Salah satu indikator profesionalisme ASN adalah disiplin. Namun sayangnya, pelanggaran disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) masih didominasi kasus ketidakhadiran. Oleh karena itu, Kemendikbud membangun sistem terintegrasi kehadiran pegawai. Dengan terintegrasinya data kehadiran pegawai di Kemendikbud diharapkan pimpinan unit kerja dapat melakukan monitoring dan pembinaan disiplin pegawai. Pimpinan juga dapat melakukan *input* ketidakhadiran pegawai jika pada saat jam

kerja pegawai berada di luar kantor dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketidakhadiran pegawai pada jam kerja ini akan diakumulasi dengan jam keterlambatan dan pulang cepat, jika telah mencapai 7,5 jam maka pegawai dianggap tidak hadir 1 hari.

Pengembangan Sistem e-Kehadiran

Salah satu kendala integrasi kehadiran adalah letak geografis unit kerja atau unit layanan yang daerahnya jauh dari kantor sehingga pegawai sulit untuk melakukan absensi. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas internet menyebabkan penyampaian data status ketidakhadiran menjadi terlambat.

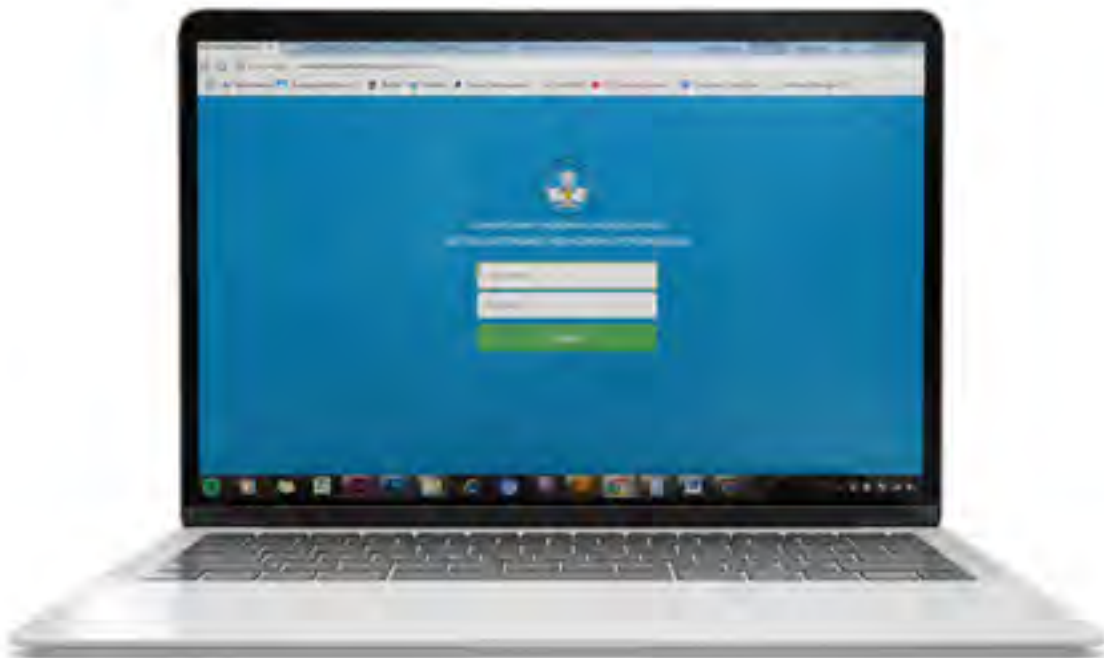
Biro SDM telah menerapkan sistem kehadiran elektronik (e-kehadiran) yang dapat mencatat kehadiran seluruh pegawai Kemendikbud

secara *real time* dan terintegrasi. Sistem ini telah diterapkan di seluruh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan informasi kehadiran pegawai. Bahkan e-kehadiran telah terintegrasi dengan aplikasi e-SKP sebagai dasar dalam pemberian tunjangan kinerja. Setelah terintegrasi langkah selanjutnya adalah melakukan pemantauan kehadiran pegawai di unit kerja. Biro SDM telah mengembangkan aplikasi dashboard kehadiran pegawai, melalui aplikasi ini setiap pimpinan unit kerja dapat memantau tingkat kehadiran pegawai. Pada *dashboard* kehadiran akan ditampilkan persentase dari masing-masing komponen kehadiran dari mulai level eselon tertinggi sampai dengan level staf.

Untuk meningkatkan validitas data kehadiran, aplikasi e-Kehadiran akan diintegrasikan dengan aplikasi cuti *online*. Selain itu, akan dikembangkan pula fitur notifikasi pelanggaran disiplin pegawai kepada pimpinan unit kerja dan pegawai yang bersangkutan sebagai *early warning* ketika sudah mencapai batas pelanggaran yang harus segera dilakukan pembinaan.

Melalui penerapan aplikasi e-Kehadiran ini, diharapkan tingkat kedisiplinan pegawai Kemendikbud dapat meningkat. Dengan demikian, diharapkan berimplikasi pula pada peningkatan profesionalisme pegawai Kemendikbud dalam memberikan pelayanan kepada seluruh *stakeholder*.

Tampilan Aplikasi e-Kehadiran



Program Magang Menciptakan Pelayan Birokrasi di Era Industri 4.0



Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ikut Berpartisipasi dalam Program Magang

Salah satu indikator penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen

Aparatur Sipil Negara, adalah dilaksanakannya pemberian kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja individu. Implementasinya, antara lain, dapat dilakukan melalui program peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran



Pelayanan Birokrasi

pegawai, *coaching*, *mentoring*, dan konseling.

Sebagai bentuk kepatuhan Kemendikbud dalam pengelolaan ASN berbasis sistem merit tersebut, sejak tahun 2018 Kemendikbud telah menyelenggarakan program *on the job training*, atau program magang PNS (*apprenticeships*) di luar negeri.

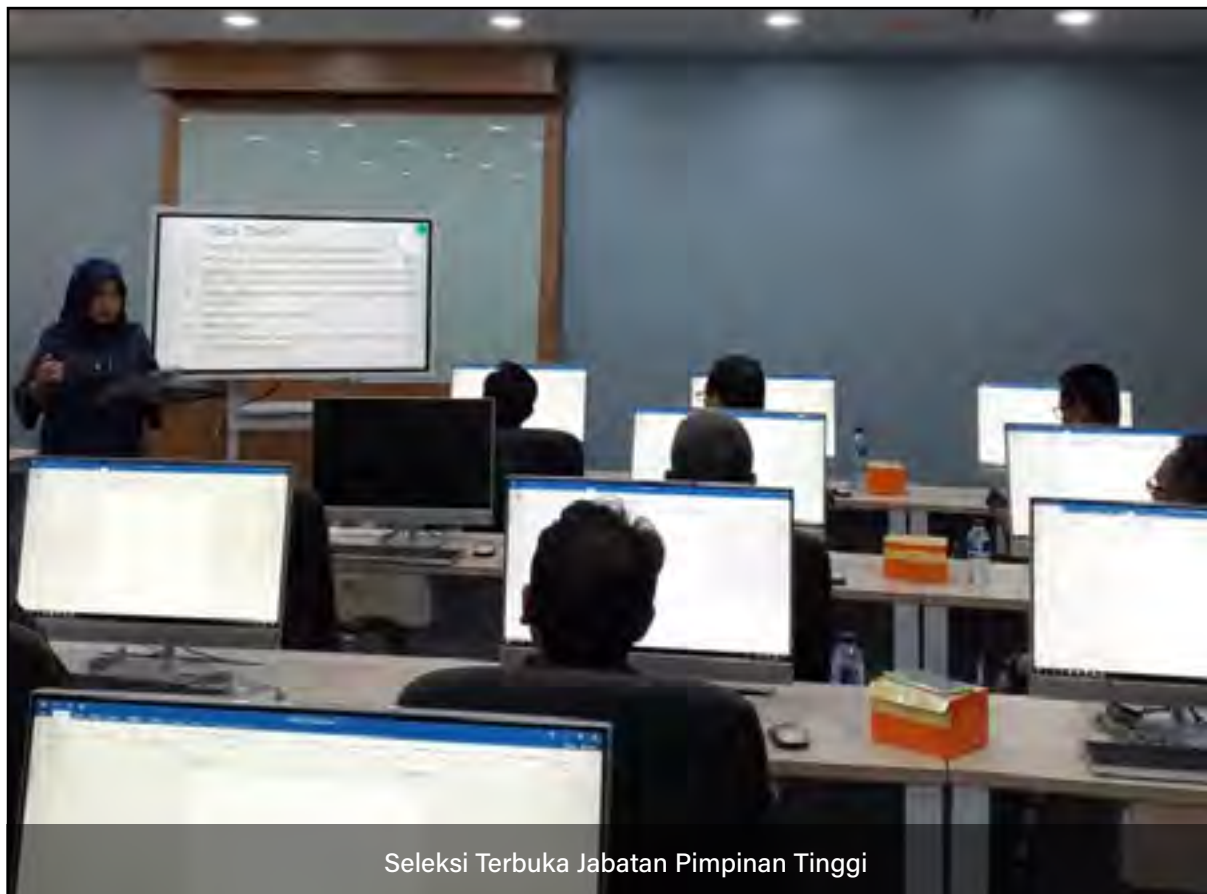
Program magang ini dilaksanakan atas kerja sama antara Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (Biro PKLN) Kemendikbud. Agar program magang ini memiliki nilai tambah dalam aspek teknis/pekerjaan maupun dalam aspek penguatan wawasan dan pengalaman internasional, pada tahun 2019 program ini dilaksanakan di kantor kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang memiliki atase pendidikan dan kebudayaan (atdikbud).

Program magang ini diikuti pegawai potensial Kemendikbud dengan kriteria: berstatus PNS,

usia maksimal 35 tahun, masa kerja minimal lima tahun, pendidikan minimal S1/D4, dan direkomendasikan oleh pimpinan satker, serta lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Mereka diberangkatkan ke beberapa negara dengan formasi dua pegawai untuk tiap negara. Negara yang menjadi tujuan adalah, antara lain, Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, Mesir, dan Tiongkok. Negara lainnya adalah Arab Saudi, Jepang, India, Filipina, Thailand, Malaysia, Timor Leste, dan Singapura. Untuk program magang tahun 2019, sudah diberangkatkan 26 pegawai ke 13 negara tujuan.

Dengan diberlakukannya program pengembangan kompetensi pegawai yang tepat, diharapkan kemampuan ASN meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan birokrasi pada era industri 4.0.

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi



Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur eksternal kementerian dan unsur internal kementerian dengan perbandingan jumlah unsur eksternal lebih banyak daripada unsur internal. Dengan demikian, proses seleksi akan lebih transparan dan terjamin objektivitasnya.

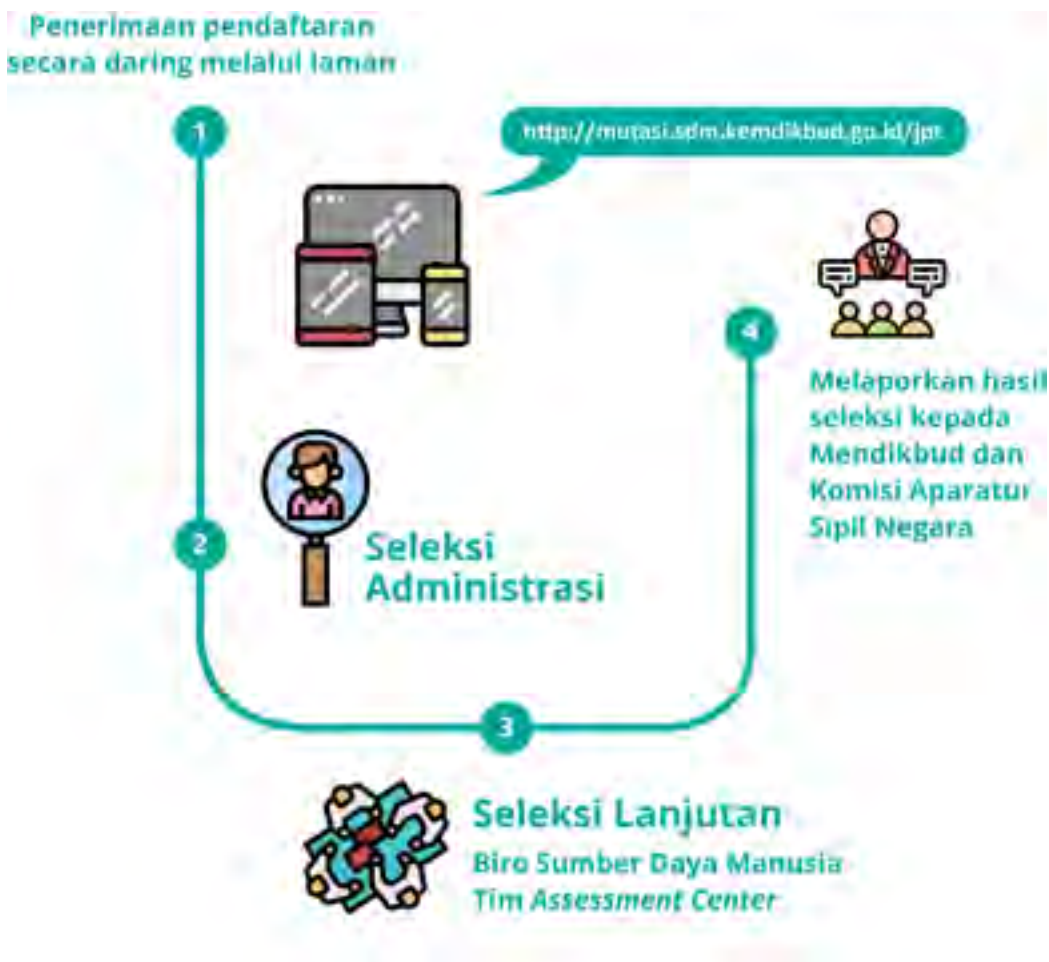
Pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) tidak boleh secara sembarangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tegas mengamanatkan bahwa pengisian JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dan dilakukan pada tingkat nasional dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan jabatan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengisian JPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur eksternal kementerian dan unsur internal kementerian dengan perbandingan jumlah unsur eksternal lebih banyak daripada unsur internal. Panitia seleksi dibantu oleh sekretariat panitia seleksi.

Alur Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi





Pada 2019, Kemendikbud melakukan seleksi terbuka JPT pratama sebanyak dua kali. Seleksi pertama pada bulan Januari sampai dengan April 2019 dilakukan untuk mengisi jabatan Kepala Pusat Perbukuan dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri. Seleksi kedua dilakukan untuk mengisi jabatan Inspektur II, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika,

Kepala Pusat Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Seni dan Budaya, dan Kepala Pusat Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata.

Seleksi terbuka JPT dapat menjadi sarana pemacu SDM di instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya agar dapat bersaing secara profesional dan bersemangat untuk belajar, mengembangkan diri, dan meningkatkan kinerja untuk menapaki karir yang lebih tinggi.

Tour of Duty dan Tour of Area

Kebijakan yang digulirkan Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy ini dapat menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan kader agar memiliki pengalaman tugas yang lebih luas.



Dasar hukum yang kuat, dikaitkan dengan kondisi lapangan, membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy menggulirkan kebijakan *tour of duty* dan *tour of area* di kalangan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan yang dimulai sejak tahun 2017 ini ditetapkan dalam rangka penyegaran organisasi, membentuk budaya organisasi yang baik, dan meningkatkan daya juang serta kompetisi di kalangan pejabat. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar pegawai tidak hanya menguasai bidang tugas tertentu, tetapi diharapkan mampu menguasai berbagai bidang tugas.

Salah satu landasan hukum kebijakan *tour of duty* dan *tour of area* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur bahwa PNS dapat dimutasi paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

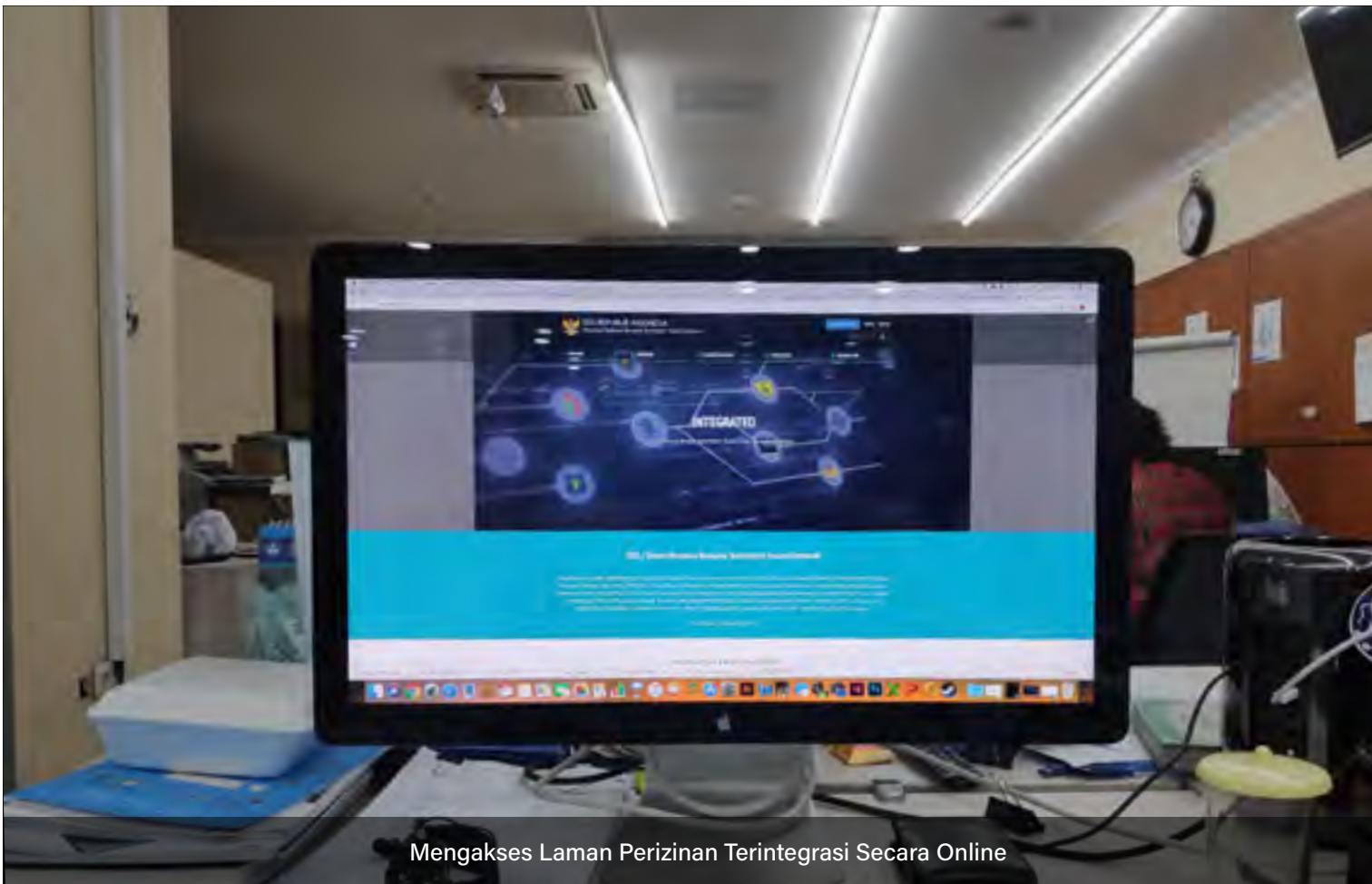
Tour of duty terhadap pejabat administrator dan pejabat pengawas pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan program kerja unit kerja. Bahkan pada tahun 2019, Mendikbud mengambil kebijakan untuk melakukan *tour of duty* dan

tour of area bagi tiga belas pejabat pimpinan tinggi pratama. Terlihat dalam beberapa acara pelantikan pejabat, selain promosi juga terdapat mutasi pejabat dalam rangka *tour of duty* dan *tour of area*. Tidak hanya bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, kebijakan *tour of duty* dan *tour of area* juga merambah ke jabatan pelaksana dan fungsional. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu langkah untuk menyiapkan kader agar memiliki pengalaman tugas yang lebih luas.

Kebijakan *tour of duty* dan *tour of area* merupakan salah satu upaya kementerian untuk melakukan reformasi birokrasi, khususnya di bidang manajemen SDM, yaitu melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap pola pikir (*mindset*) para pejabat bahwa jabatan tidak mutlak diduduki sampai pensiun, tetapi jabatan harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Pejabat harus siap untuk dirotasi/dimutasi guna penyegaran organisasi, pembentukan budaya kerja yang kondusif, dan peningkatan motivasi untuk selalu belajar dan berinovasi.

Untuk memperoleh hasil terbaik, *tour of duty* dan *tour of area* dilaksanakan berdasar potensi dan kompetensi setiap pegawai. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mempertimbangkan hasil asesmen terhadap pegawai.

Kemendikbud Kembangkan Perizinan Terintegrasi Secara Online



Mengakses Laman Perizinan Terintegrasi Secara Online

Untuk menjaga kestabilan dan kemajuan industri perfilman, Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur tata cara dalam menjalankan usaha perfilman bagi pihak-pihak terkait. Misalnya, pelayanan perizinan yang terintegrasi

dengan menggunakan aplikasi elektronik untuk melakukan proses pengurusan perizinan.

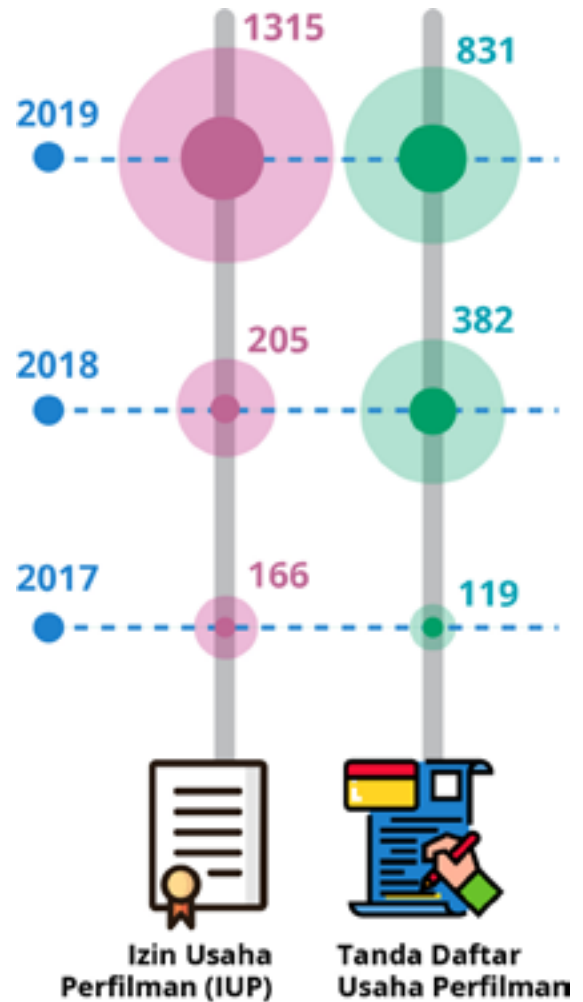
Sistem pelayanan perizinan yang dilakukan terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama

menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan yang bisa diurus adalah nomor izin berusaha (NIB) dan izin usaha perfilman menggunakan aplikasi dengan laman www.oos.go.id.

Sementara itu, untuk mendapatkan izin operasional/komersial perizinan perfilman, seperti tanda daftar usaha perfilman (TDUP), tanda pemberitahuan pembuatan film (TPPF), dan surat rekomendasi impor film (SRIF) dapat digunakan aplikasi pada laman <https://perizinan.pusbangfilm.kemdikbud.go.id>.

Hasil pelayanan perizinan yang sudah dilakukan Pusbangfilm dapat dilihat pada laman perizinan.pusbangfilm.kemdikbud.go.id.

Jumlah IUP dan TDUP Tahun 2017-2019



Bekerjasama Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan



Penyediaan Buku Teks di Pojok Baca Kelas

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan, yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



Negara wajib memenuhi dan melayani kebutuhan dasar warganya, salah satunya dalam bidang pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah, salah satunya penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Ketentuan teknis SPM bidang Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang berlaku sejak 1 Januari 2019 untuk memberi panduan bagi pemerintah daerah. Ruang lingkup Permendikbud tersebut adalah jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pemenuhan SPM pendidikan oleh pemerintah daerah, pelaporan penerapan, dan pencapaian SPM pendidikan.

Kendala dalam pemenuhan SPM pendidikan tahun 2019 adalah program dan anggaran daerah telah lebih dahulu ditetapkan pada Juli 2018. Akibatnya, pelaksanaan SPM pendidikan tahun 2019 belum maksimal sesuai dengan petunjuk teknis. Oleh karena itu, pada tahun 2019 hal itu digunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan pelaksanaan SPM pendidikan pada tahun 2020.

Kemendikbud telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial untuk mengumpulkan data dan menyusun peta jalan penerapan SPM pendidikan dengan mengintegrasikan dapodik, data dukcapil Kemendagri, Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos, dan data *Education Management Information System* (EMIS) Kemenag.

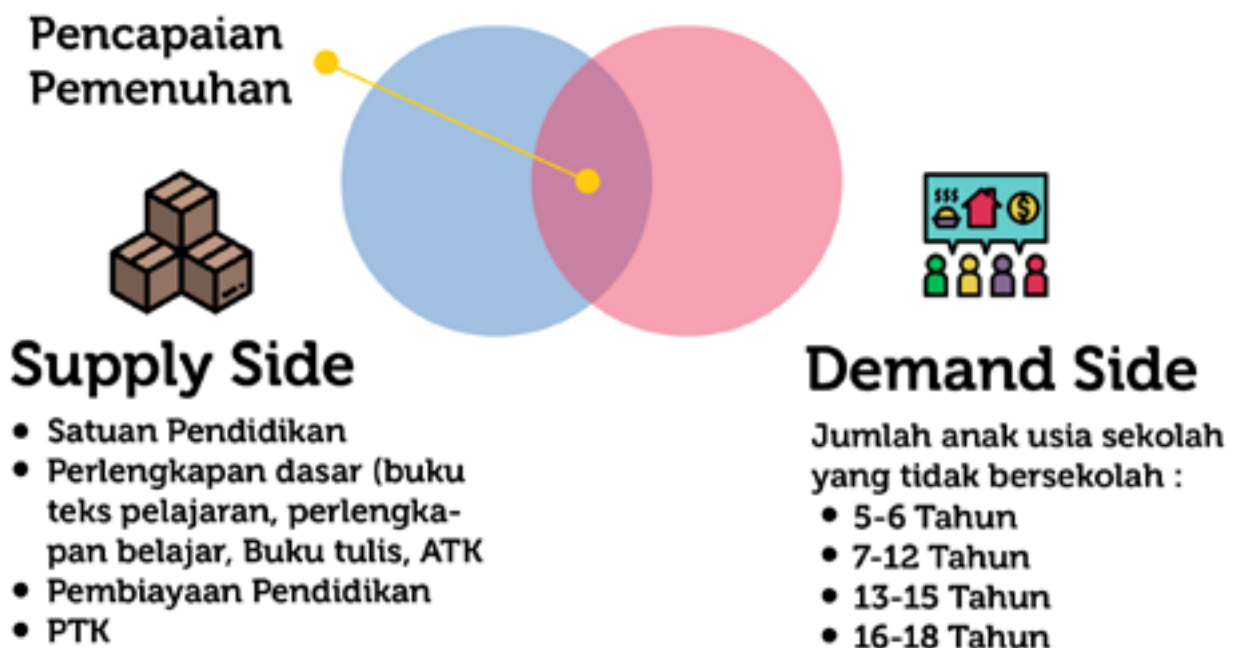
Instrumen akan dibuat dalam bentuk aplikasi berbasis *online* oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peta jalan sudah disosialisasikan dan diujicobakan dalam kegiatan bimbingan teknis pada bulan Mei-Juli 2019 dengan dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang terdiri atas unsur dinas pendidikan (subbagian program) dan Bappeda (pengelola *e-planning*). Tujuan penyelenggaraan bimbingan teknis penerapan SPM adalah untuk mempermudah daerah dalam mengumpulkan data, menghitung, menyusun rencana pemenuhan, dan melaksanakan pemenuhan SPM untuk penerapan tahun 2020 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah 2019.

Selain mempersiapkan penerapan SPM tahun 2020, Kemendikbud turut serta melakukan *monitoring* dan evaluasi terpadu SPM bersama

dengan Kemendagri dan Bappenas yang tergabung dalam Sekretariat Bersama SPM Pusat. *Monitoring* dan evaluasi terpadu ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan SPM tahun 2019 dan persiapan pelaksanaan SPM tahun 2020. Program tersebut dilaksanakan pada bulan Juli - September 2019 di 34 provinsi dan beberapa kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemenuhan SPM pendidikan membutuhkan kerja sama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk mengatasi berbagai persoalan, mulai kesulitan akses hingga masalah sosial lainnya yang harus dipecahkan bersama-sama. Oleh karena pembiayaannya cukup besar, pemerintah daerah bisa menggandeng pihak swasta untuk ikut memenuhi pelayanan dasar bagi warganya.



Reformasi Digital dengan SIANJAB

Dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud, penyampaian informasi harus dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan program reformasi berbasis teknologi digital dengan menyusun program aplikasi analisis jabatan yang disebut Sianjab.

Siklus Pelaksanaan Analisis Jabatan



Linimasa Pengembangan Aplikasi SIANJAB



Organisasi pemerintahan dituntut untuk mampu bersifat dinamis, efektif, dan efisien menghadapi berbagai perubahan, baik di dalam maupun di luar organisasinya. Organisasi pemerintahan diarahkan untuk melakukan penataan birokrasi (ketatalaksanaan) yang berbasis pada kompetensi dalam memberikan pelayanan. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi berdasarkan pada hasil analisa jabatan. Melalui analisa jabatan, tiap unit kerja diharapkan mendapatkan informasi tentang jabatan secara komprehensif sebagai bahan untuk menganalisis kebutuhan unit kerjanya secara tepat. Hasil analisis jabatan

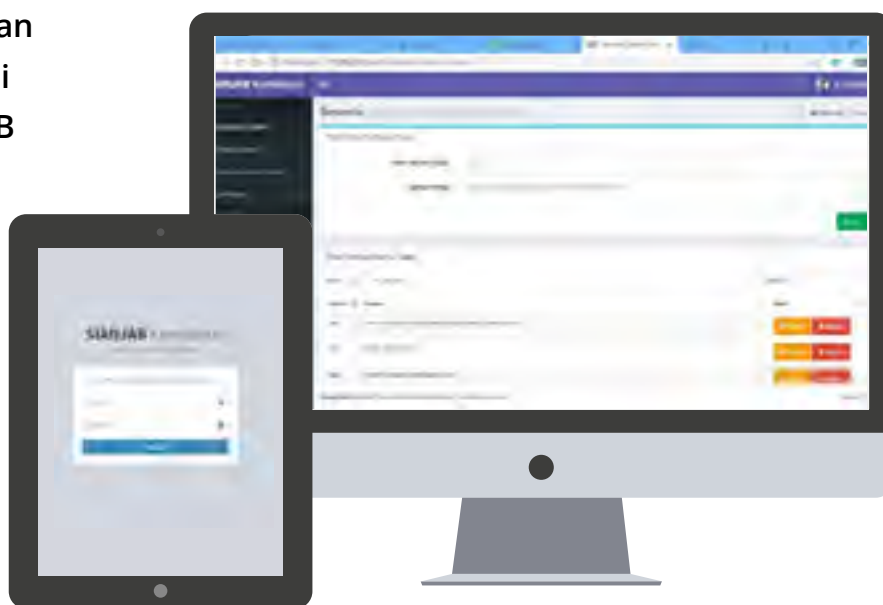
akan digunakan dalam penataan organisasi, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, dan pengawasan.

Merancang Sianjab

Dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Kemendikbud, penyampaian informasi harus dapat dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan program reformasi berbasis teknologi digital dengan menyusun program aplikasi analisis jabatan yang disebut Sianjab. Dalam proses pelaksanaan analisis data jabatan, baik data kepegawaian maupun masukan yang diberikan dari unit kerja dan *stakeholder* terhadap hasil evaluasi jabatan membutuhkan waktu yang lama.

Oleh karena itu, program Aplikasi Analisis Jabatan (Sianjab) merupakan sebuah solusi terbaik. Sianjab merupakan aplikasi tertutup berbasis web yang dapat diakses pengguna di mana saja melalui jaringan internet.

Tampilan Aplikasi SIANJAB



Menata Organisasi dengan SIEVO

Evaluasi Organisasi merupakan langkah awal penataan Organisasi. Evaluasi organisasi yang selama ini dilaksanakan dengan pengisian instrumen secara manual menyebabkan hasil evaluasi kurang maksimal. Oleh karena itu, ke depan evaluasi organisasi akan dilaksanakan berbasis daring melalui Sistem Informasi Evaluasi Organisasi (SIEVO) agar pelaksanaan evaluasi organisasi lebih efektif, dan efisien dan hasilnya lebih akurat.

Road Map Sistem Informasi dan Evaluasi (SIEVO) Kemendikbud



Evaluasi organisasi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara untuk mengetahui apakah suatu organisasi telah melaksanakan seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi yang telah dimandatkan dalam visi dan misi organisasi. Di samping

itu, evaluasi organisasi dilakukan dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan organisasi sesuai dengan kebutuhan lingkungan strategis yang sangat dinamis sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Evaluasi organisasi Kemendikbud mulai tahun



2019 akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 67 Tahun 2011 yang mencakup 2 dimensi yakni dimensi struktur organisasi yang terdiri dari 3 subdimensi yaitu subdimensi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi, dan dimensi proses organisasi terdiri dari 5 subdimensi yaitu subdimensi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko dan teknologi informasi.

Evaluasi organisasi akan dilaksanakan pada 2 (dua) tingkatan yakni tingkatan kementerian

dan tingkatan unit utama, UPT, dan Sekretariat LSF. Evaluasi organisasi tingkat unit utama, UPT, dan Sekretariat LSF dilakukan oleh tim responden pada masing-masing unit kerja dengan mengisi instrumen evaluasi organisasi melalui SIEVO. Laporan hasil analisis data evaluasi ini akan menjadi dasar pengisian instrumen evaluasi pada aplikasi Kementerian PAN dan RB untuk tingkat evaluasi organisasi kementerian yang dilakukan oleh pimpinan unit utama.

Hasil evaluasi organisasi akan menjadi bahan rekomendasi bagi penataan organisasi dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Reformasi Birokrasi bidang penguatan organisasi dalam mewujudkan Kementerian yang unggul dalam menuju Indonesia Unggul.

Pelatihan Dasar Agenda Sikap Perilaku Bela Negara bangun ASN yang berintegritas

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang besar dan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok PNS yang profesional yang, antara lain, dibentuk melalui pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS). CPNS wajib menjalani masa

percobaan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensinya.



Pelatihan dasar untuk CPNS harus diselenggarakan secara inovatif dan terintegrasi, yaitu pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Penyempurnaan konsep Pelatihan Dasar CPNS dilakukan dengan mengembangkan desain pelatihan terintegrasi, sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan.

Pelatihan dasar terintegrasi ini bertujuan untuk membentuk karakter PNS sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural. Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Agenda Sikap Perilaku Bela Negara terdiri atas dua mata pelatihan, yaitu: Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara dan Kesiapsiagaan Bela Negara. Materi ini membekali peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga negara terhadap lambang-lambang negara, menaati peraturan perundang-undangan, membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis

dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis, dan melakukan praktik peraturan baris-berbaris, tata upacara sipil, dan keprotokolan.

Adapun materi pokok mata pelatihan ini adalah 1) lambang-lambang negara, peraturan perundang-undangan; 2) konsepsi perubahan lingkungan strategis; 3) modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis; 4) isu-isu kritikal dan analisis isu-isu kritikal; 5) peraturan baris-berbaris; 6) keprotokolan; 7) kewaspadaan dini; 8) kesehatan jasmani dan mental; 9) kegiatan kesiapsiagaan; dan 10) refleksi.

Pelatihan Dasar Agenda Sikap Perilaku Bela Negara yang diikuti oleh 650 calon PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diselenggarakan melalui payung Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud dengan Resimen Induk Daerah Militer Jayakarta (Rindam Jaya) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Badan Diklat Kemhan).

Program berjalan sesuai rencana dengan sedikit penyesuaian pada materi Kesehatan Jasmani dan Mental karena di antara peserta terdapat ibu hamil, ibu menyusui, dan difabel (tunadaksa/tunanetra). Pelatihan ini akan terus ditingkatkan kualitasnya sehingga memenuhi target yang ingin dicapai, antara lain dengan melibatkan Lembaga Administrasi Negara RI sebagai regulator pelatihan ASN.

Melatih Birokrat yang Berjiwa Pemimpin Nasional



Birokrat Berjiwa Pemimpin Nasional

Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berpikiran terbuka dan mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Untuk menghasilkan sosok pemimpin ini, apalagi setelah diberlakukannya Undang-Undang ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) diharapkan mampu mengambil peran untuk merumuskan model terbaru dalam Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang saat ini sudah diubah menjadi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Artinya, kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi kepemimpinan yang strategis, yang secara nasional dijadikan pengungkit (*leverage*) guna mempercepat terwujudnya *world class*

bureaucracy.

Birokrasi kelas dunia ini merupakan tuntutan zaman yang akan dibangun dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II atau PKN Tingkat II. Para peserta pelatihan diharapkan mampu memimpin suatu perubahan melalui terobosan pemecahan masalah, dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang adaptif, dialogis, dan strategis, serta menjadi seorang pemimpin yang berjiwa *entrepreneur* dan pembelajar.

Pusdiklat Pegawai Kemendikbud adalah lembaga pelatihan pemerintah pusat

pertama yang menerapkan PKN Tingkat II dengan kurikulum dan strategi pembelajaran terbaru. PKN Tingkat II bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan berperan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Adapun sasarannya adalah terbangunnya seorang PNS yang memiliki kemampuan memimpin pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Kompetensi yang dibangun pada PKN Tingkat II adalah kompetensi kepemimpinan strategis yang meliputi: 1) tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi; 2) tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi; 3) terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai *outcome* organisasi.

PKN Tingkat II dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal (giat kampus), nonklasikal (*e-learning* atau di instansi tertentu), dan rehat kampus (di instansi peserta) dengan agenda pelatihan sebagai berikut.

1. Agenda Pembelajaran Mengelola Diri membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri (*self mastery*) untuk mengembangkan kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi perubahan. Mata pelatihan dalam agenda penguasaan

diri terdiri atas Energi Kepemimpinan (*Energy of Leadership*) dan Integritas Kepemimpinan.

2. Agenda Pembelajaran Kepemimpinan Strategis membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Mata pelatihan dalam agenda Kepemimpinan Strategis terdiri atas Organisasi Adaptif (*Adaptive Organisation*), Kepemimpinan Kewirausahaan (*Entrepreneurial*), dan Agenda Manajemen Strategis.

3. Agenda Pembelajaran Manajemen Strategis membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis/*diagnostic reading*, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran (*marketing*) sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Mata pelatihan dalam agenda ini adalah Dialog Strategis (*Strategic Dialog*), Isu Strategis (*Strategic Issues*), dan Pemasaran Sektor Publik (*Public Sector Marketing*).

4. Agenda Pembelajaran Aktualisasi Kepemimpinan membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman *best practices* dan/atau advokasi kepemimpinan dan aplikasinya

dalam proyek perubahan. Mata pelatihan dalam agenda Aktualisasi Kepemimpinan terdiri atas Visitasi Agenda Pembelajaran, Visitasi Kepemimpinan Nasional (tematik atau nontematik), dan Proyek Perubahan.

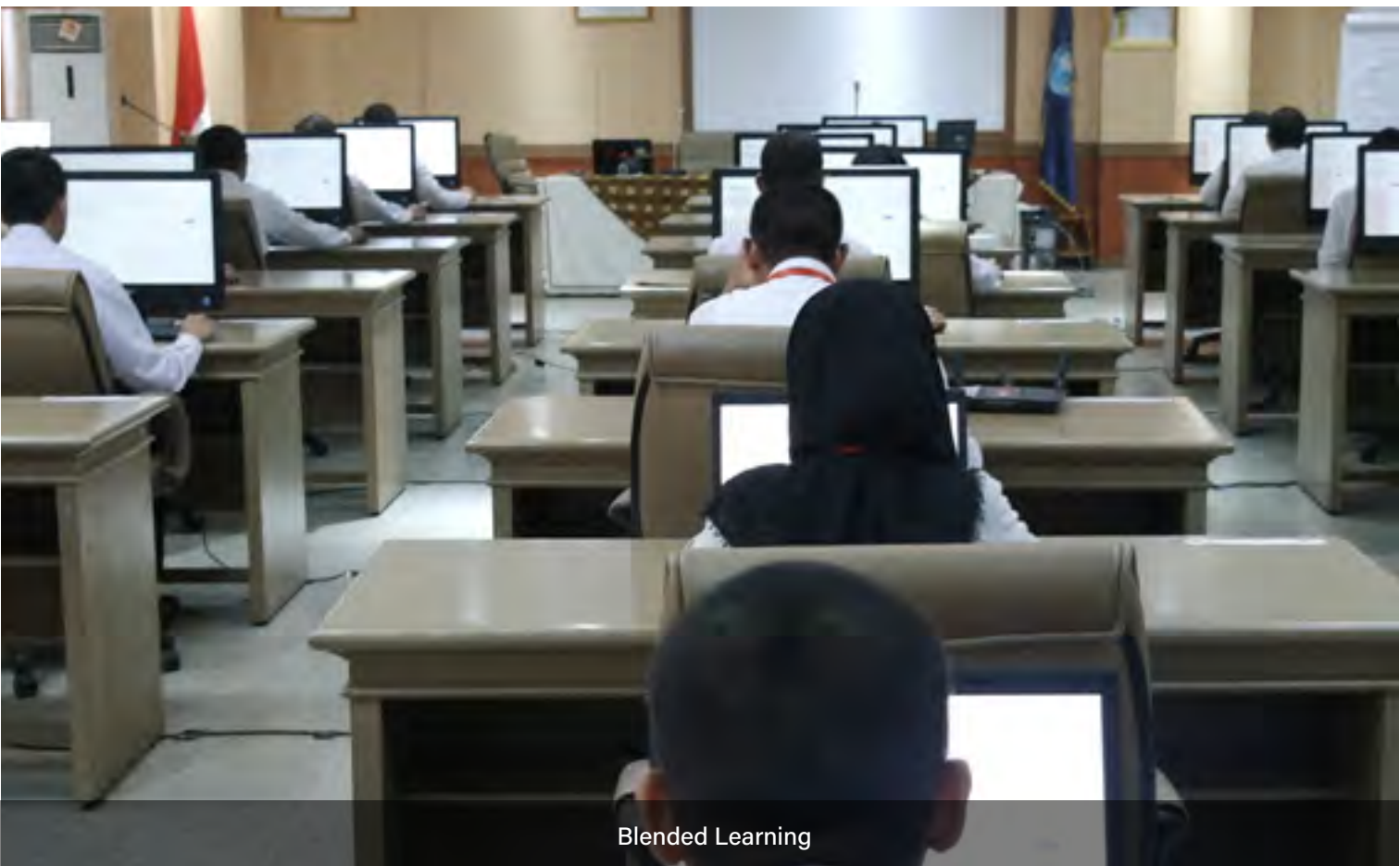
PKN Tingkat II diselenggarakan pertama kali di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud pada tahun 2019 dengan pendampingan langsung dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. PKN Tingkat II tahun 2019 diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Kemendikbud (30 orang), Kemenristek dan Dikti (11 orang), Kepolisian Negara RI (5 orang), Kementerian LHK (4 orang),

Kementerian PPN/Bappenas (2 orang), Pemda (2 orang), LAN RI (2 orang), Batan (1 orang), Kejaksaan Agung RI (1 orang), Kemenaker (1 orang), dan Mahkamah Agung RI (1 orang).

PKN Tingkat II akan diselenggarakan kembali pada tahun 2020 untuk memenuhi persyaratan akreditasi penyelenggara PKN Tingkat II. Apabila akreditasinya berhasil meraih nilai A, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud dapat menyelenggarakan PKN Tingkat II secara mandiri mulai tahun 2021 sampai dengan 2025.



Pengembangan Program Pelatihan Moda Kombinasi (*Blended Learning*)



Blended Learning

Dalam upaya memenuhi hak setiap PNS Kemendikbud untuk mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP (jam pelajaran) per tahun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 203 dan 204, Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah mengembangkan program pelatihan bermoda kombinasi atau perpaduan antara moda e-learning (non-klasikal) melalui laman (web) dan moda pelatihan/

tatap muka (klasikal) di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud. Pelatihan moda kombinasi ini terbukti dapat mengefisienkan waktu dan anggaran (perjalanan dinas) pelatihan sekaligus mengefektifkan pelatihan secara signifikan karena dapat diakses melalui komputer desktop/laptop, tablet atau pun ponsel.

Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Moda Kombinasi (*Blended Learning*) dikembangkan

melalui enam tahap, yaitu: 1) penyusunan kurikulum dan rancang bangun; 2) penyusunan bahan ajar dan soal; 3) finalisasi bahan ajar dan soal; 4) uji keterbacaan oleh pakar dan ahli bahasa; 5) pembuatan dan pengunggahan materi daring; dan 6) pelaksanaan satu angkatan pelatihan per moda kombinasi.

Pada tahap pembuatan dan pengunggahan materi daring ini, Pusdiklat Pegawai bekerja sama dengan Pustekkom Kemendikbud, khususnya dalam hal penggunaan *learning management system* (LMS) sebagai media pembelajaran daring. Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan 1) pembuatan materi moda daring; 2) pemilihan dan pemecahan materi untuk daring; 3) pengunggahan materi daring; dan 4) uji coba materi daring.

Program pelatihan moda kombinasi ini memerlukan pengelola, pengajar, dan penyelenggara yang mumpuni dalam tugasnya. Infrastruktur sistem manajemen pembelajaran akan dirintis mulai tahun 2020 dengan tujuan agar Pusdiklat Pegawai dapat melayani peserta atau kelas-kelas pelatihan dalam jumlah yang lebih banyak.



SIMREFA: Reservasi Gedung dan Asrama secara Daring



Reservasi Fasilitas Gedung/Asrama Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Reservasi gedung dan asrama di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud yang semula konvensional kini telah menjadi digital sehingga mudah diakses di mana pun dan kapan pun. Dahulu masyarakat yang ingin menyewa Gedung Garuda atau Merah Putih dan kamar-kamar asrama di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud sangat bergantung pada narahubung yang mengelola gedung/asrama tersebut. Calon penyewa tidak memiliki akses langsung untuk

melihat jadwal penggunaan gedung/asrama, apakah sudah disewa orang lain atau belum. Prosedur reservasi gedung/asrama yang tidak transparan itu rawan gratifikasi atau bahkan korupsi yang melibatkan penyewa/pelanggan dan narahubung/pengelola gedung/asrama.

Saat ini sudah terjadi perubahan perilaku pasar yang diikuti pula dengan berubahnya perilaku konsumen (*customer behavior*). Konsumen

kini semakin *mobile*, personal, dan interaktif. Mereka lebih terbiasa menggunakan teknologi digital dalam setiap transaksi. Untuk menjawab tuntutan konsumen tersebut, kini Pusdiklat Pegawai Kemendikbud telah memiliki aplikasi yang dinamakan Simrefa atau Sistem Informasi Manajemen Reservasi Fasilitas berbasis daring yang memungkinkan calon penyewa (pelanggan) lebih mudah dan nyaman memesan gedung/asrama di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kemendikbud.

Simrefa adalah aplikasi berbasis laman (web) yang dapat diakses melalui komputer desktop, laptop, tablet, atau pun ponsel. Pada tahap berikutnya aplikasi itu akan dikembangkan menjadi aplikasi ponsel berbasis Android maupun IOS. Simrefa merupakan media

informasi sekaligus reservasi maya antara publik calon pengguna dengan pengelola gedung/asrama Pusdiklat Pegawai. Konsumen gedung/asrama umumnya berasal dari kalangan: 1) keluarga penyelenggara resepsi pernikahan; 2) yayasan pendidikan/sekolah penyelenggara kegiatan wisuda; 3) organisasi profesi/massa penyelenggara konferensi, musyawarah nasional, atau seminar; dan 4) organisasi/yayasan keagamaan penyelenggara kegiatan peribadahan bersama.

Bagi pengelola gedung/asrama Pusdiklat Pegawai, Simrefa sangat membantu dalam menginformasikan fasilitas gedung/asrama serta kalender penggunaannya kepada publik sehingga publik dapat memilih dan menentukan sendiri gedung/asrama yang akan

Tampilan Aplikasi Reservasi Gedung dan Asrama Pusdiklat Kemendikbud



digunakan dan tanggal penggunaan sesuai dengan tanggal yang masih tersedia di Simrefa.

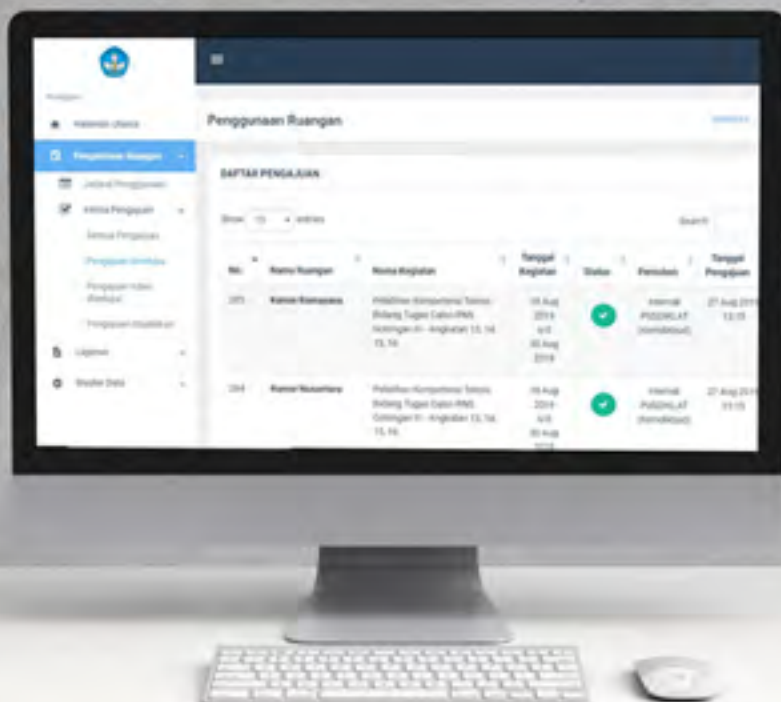
Aplikasi ini juga dapat memberikan pelayanan kepada publik, baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Simrefa secara efektif dioperasikan dan dipublikasikan mulai bulan Agustus 2019 kepada pemangku kepentingan, baik kepada pihak internal Kemendikbud sebagai pengguna prioritas/utama maupun kepada pihak eksternal.

Simrefa bisa diakses melalui laman yang beralamat di: <http://srf.kemdikbud.go.id> untuk melihat fasilitas gedung/asrama yang

ditawarkan dan mengajukan permohonan tanggal pemesanan penggunaannya. Pengguna akan mendapat notifikasi atau konfirmasi dari Simrefa perihal keputusan pengelola terhadap permohonan penggunaan fasilitas gedung/asrama.

Simrefa berbasis ponsel pintar ini, meskipun sudah dikembangkan dengan baik, tetapi layanannya masih terbatas pada reservasi dan notifikasi kepada pemesan/calon penyewa. Sistem layanannya akan diperluas sampai ke tahap transaksi sehingga seluruh proses akan terotomatisasi dan nontunai.

Jadwal Reservasi Gedung dan Kamar Pusdilat



Satu Data Pendidikan, Kebudayaan dan Bahasa



Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 12 Juni 2019. Peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kebijakan satu data Indonesia ini merupakan kebijakan tata kelola data oleh pemerintah untuk menghasilkan data

yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dapodik merupakan konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat *relational* dan longitudinal, yang dibuat agar program-program pembangunan pendidikan dapat terarah dan mempermudah dalam menyusun



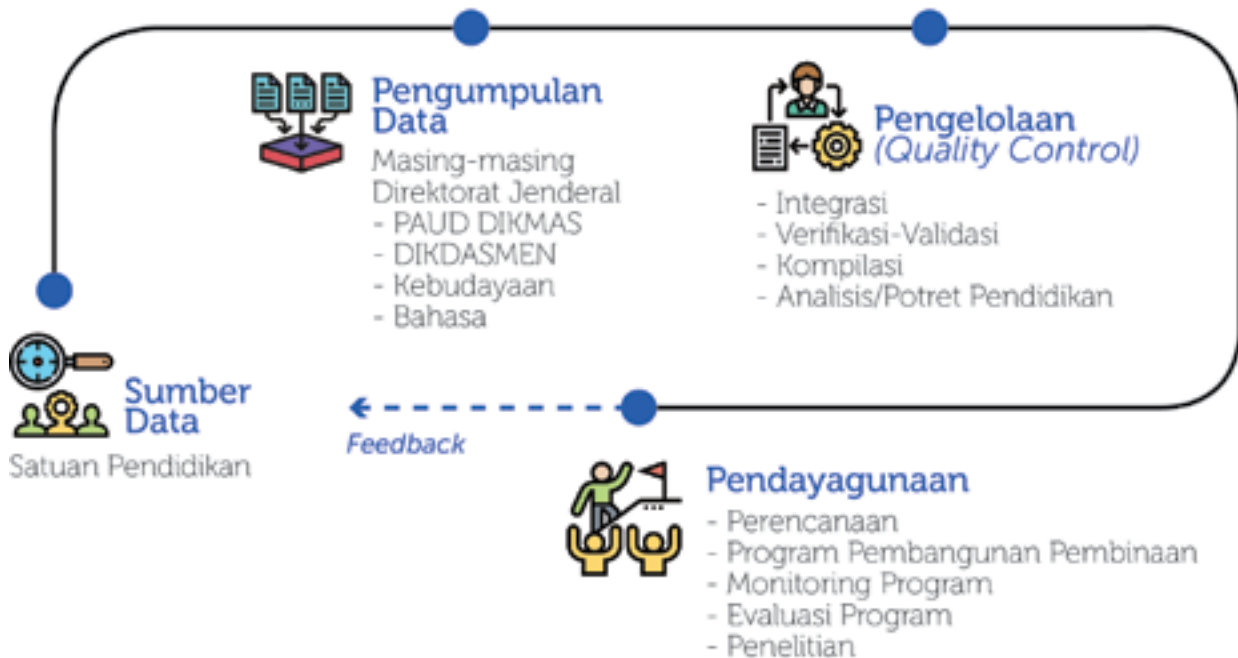
perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.

Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah bagian dari tata kelola untuk mengevaluasi apakah satuan pendidikan yang ada sudah memenuhi SPM dan SNP.

Di dalam alur data dan informasi, data dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal melalui sekretariat masing-masing, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Alur data dan informasi Kemendikbud terkait dengan mekanisme Pengelolaan

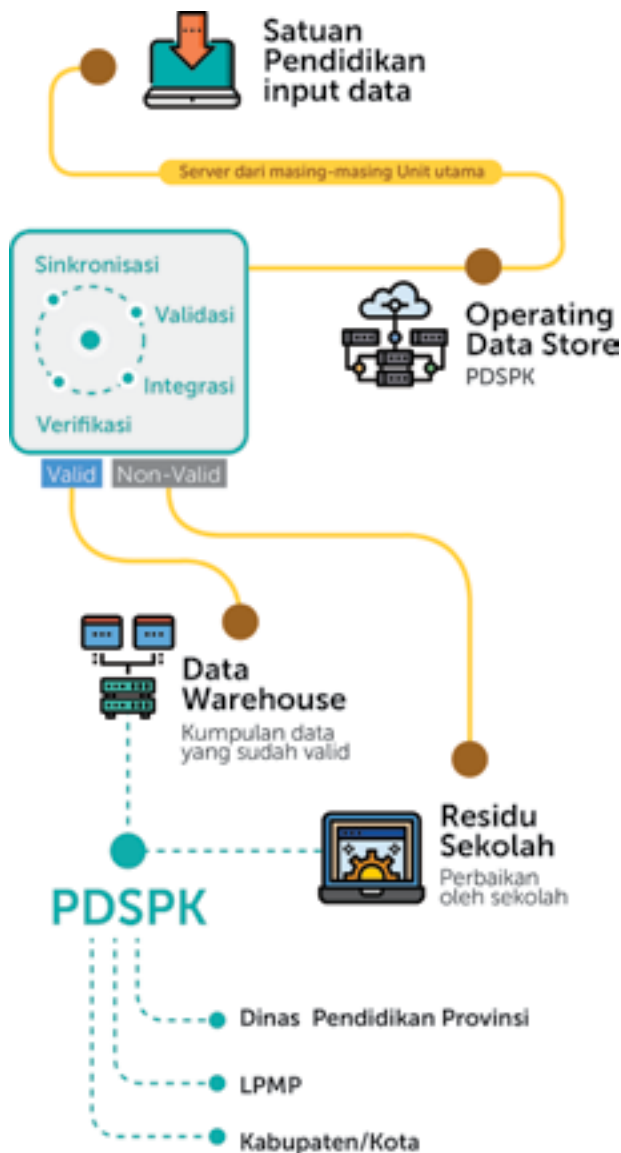


Menengah (Dapodik Dasmen), Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD Dikmas), Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dapobud), dan Sekretariat Badan Bahasa (Dapobas). Selanjutnya, hasil pendataan diintegrasikan dan diverifikasi-validasi oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) yang merupakan pengelola master referensi dasar dan operasional, dan selanjutnya digunakan oleh unit yang terkait dalam menyusun program-program pembinaan untuk pembangunan.

Secara umum, Data Pokok Pendidikan, Kebudayaan, dan Bahasa membangun pangkalan data yang mengintegrasikan data-data pendidikan dasar menengah, PAUD

Dikmas, kebudayaan, dan bahasa yang ada pada unit pengelola data agar dimanfaatkan bersama oleh semua unit kerja, instansi terkait, serta satuan kerja daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang membutuhkan data untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

Selain kepada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota, Kemendikbud memberikan layanan *webservice* kepada beberapa lembaga. Contohnya, sejak tahun 2015, Kemendikbud telah memberikan layanan *webservice* kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk penerimaan mahasiswa baru (SNMPTN) dan pendaftaran Bidikmisi. Selain itu, sejak tahun



2016, Kemendikbud telah memberikan layanan *webservice* kepada Kantor Staf Presiden (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pada tahun 2018 sampai saat ini mulai melakukan pemadanan Dapodik dengan Dukcapil berdasarkan NIK.

PDSPK saat ini sedang melakukan integrasi dengan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun kementerian/ lembaga lain. Sejak tahun 2018, PDSPK juga mengembangkan aplikasi zonasi pendidikan yang akan menjadi salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pemerataan mutu pendidikan yang berkeadilan.

Semoga hal ini bisa mendukung kebijakan Satu Data Indonesia agar berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses demi perbaikan tata kelola Indonesia.

Neraca Pendidikan Daerah sebagai Potret Mutu dan Komitmen Daerah



Diskusi kelompok terpumpun mencari solusi permasalahan pendidikan melalui Neraca Pendidikan Daerah

NPD merupakan ikhtiar Kemendikbud untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi dan capaian indikator pendidikan suatu provinsi/kabupaten/kota. NPD ini diterbitkan sebagai bahan masukan bagi daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Tugas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) diatur dalam Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019, yaitu melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Berdasarkan tugas tersebut, PASKA menjalankan lima fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kemendikbud.

Para pemangku kepentingan pendidikan di daerah membutuhkan suatu infografis yang menginformasikan *input*, proses, dan *output* tentang indikator pendidikan. Data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan sehingga bisa terjadi sinkronisasi kebijakan.

Oleh karena itu, Kemendikbud melalui PASKA menyusun Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang berisikan potret pendidikan pada suatu daerah, sebuah gambaran umum yang menjelaskan capaian indikator pendidikan dari semua jenjang pendidikan. NPD berisi anggaran pendidikan yang dialokasikan, indeks pembangunan manusia, data pokok pendidikan, dan indikator mutu yang menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah, antara lain kompetensi dan kualifikasi guru, kondisi ruang kelas, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, jumlah siswa putus sekolah dan mengulang, status akreditasi, capaian

Ujian Nasional (UN), dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN).

NPD pertama kali disusun pada tahun 2015, kemudian diluncurkan pada saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016.

Selain menampilkan data-data pendidikan, NPD 2018 menambah fitur praktik baik dan fitur rekomendasi kebijakan yang diusulkan dari daerah. Semua informasi ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis kebutuhan dan peta pengembangan mutu pendidikan. Tidak hanya itu, NPD 2018 juga menampilkan gambaran jumlah guru berdasarkan status pegawai, kelompok usia, dan kualifikasi. Dari data itu pula, diketahui berapa jumlah guru yang akan pensiun dalam lima tahun ke depan sebagai masukan untuk perencanaan kebutuhan guru di daerah.

NPD 2018 tidak hanya dibuat dalam versi cetak, tetapi juga telah dibuat dalam versi daring yang bisa diakses di alamat <https://npd.kemdikbud.go.id>. Dalam website ini, selain bisa mengunduh NPD 2018 versi cetak, pengguna dapat membandingkan indikator NPD antar-daerah dan antar-tahun, baik dalam provinsi maupun lintas provinsi, sehingga akan lebih mudah bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Pada tahun 2019, NPD telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi android, yang dilengkapi dengan Buku Panduan Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Pembangunan



Pendidikan Indonesia. Dengan NPD berbasis Android, masyarakat publik dan pemangku kepentingan pendidikan daerah dapat mengakses, mengunduh, melakukan perbandingan data, dan melihat rekomendasi kebijakan beserta contoh praktik baik dari *smartphone* yang berbasis Android. NPD versi terbaru ini diluncurkan pada saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019.

NPD akan terasa manfaatnya apabila semua pemangku kepentingan dapat membaca dan memahami data dan informasi dalam NPD. Karena itulah, PASKA melakukan diskusi kelompok terpusat (DKT) untuk mencari solusi atas permasalahan pendidikan melalui pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah, yang melibatkan DPRD, Bappeda, dinas pendidikan, dewan pendidikan, media, praktisi pendidikan,

perguruan tinggi, dan satuan pendidikan.

DKT yang digelar pada tahun 2019 ini lebih maju karena disiapkan bahan diskusi dengan analisis tren dua tahun terakhir, regulasi, dan perbandingan dengan DKT lainnya. Diskusi ini ditargetkan bisa dilaksanakan di dua belas provinsi. Hingga Agustus 2019 DKT telah dilaksanakan di enam provinsi, yaitu Lampung, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

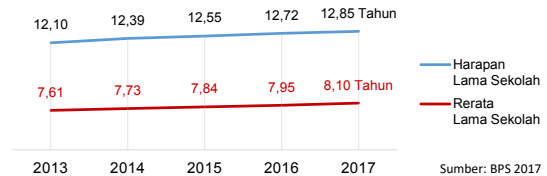
Kemudian, pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 telah diluncurkan Simulasi “Bagaimana Jika Anda Menjadi Kepala Daerah”. Simulasi dapat diakses melalui alamat <https://npd.kemdikbud.go.id/simulasi/>. Selain itu, PASKA juga telah memperbarui tampilan dan menambahkan fitur pada aplikasi NPD berbasis web, pada bulan Juni 2019.

NERACA PENDIDIKAN NASIONAL 2018



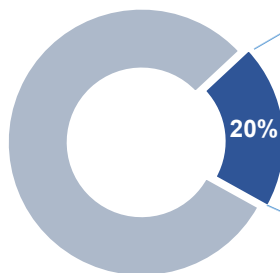
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

INDONESIA 2017 **70,81**



APBN 2018

TOTAL BELANJA NEGARA
Rp 2.220,1 T



Pengeluaran Pembiayaan
Rp 15,0 T atau 3,4 %



Kemendikbud
Rp 40,1 T atau 9,0 %
dari anggaran pendidikan

Kemenristekdikti
Rp 40,4 T atau 9,1 %
dari anggaran pendidikan

Kemenag
Rp 52,7 T atau 11,9 %
dari anggaran pendidikan

17 K/L Lainnya
Rp 16,5 T atau 3,7 %
dari anggaran pendidikan

Transfer Daerah
Rp 279,4 T atau 62,9 %

Sumber: UU APBN No. 15 Tahun 2017

Tren Alokasi Anggaran Pendidikan



REALISASI PROGRAM INDONESIA PINTAR

	SD	SMP	SMA	SMK
Anggaran (dalam jutaan rupiah)	2.532.772	1.910.892	836.934	1.243.924
Penerima (siswa)	6.212.724	3.121.120	1.013.005	1.509.352

Sumber: Ditjen. Dikdasmen, November 2018

KEBUDAYAAN

JENIS	JUMLAH
Cagar Budaya	1902
Desa Adat	146
Museum	346
Rumah Budaya Nusantara	142
Sanggar dan Komunitas	1305
Warisan Budaya Tak Benda	637

Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018

BAHASA DAERAH 668

Sumber: Badan Bahasa, September 2018

DATA PENDIDIKAN DAERAH

	Satuan Pendidikan	Pendidik	Peserta Didik	Ruang Kelas	Tendik	Rombel
Total	473.126	2.769.203	51.873.501	2.091.088	462.571	1.811.783
PAUD	254.180	252.488	6.509.452	317.040	Data belum ada	Data belum ada
SD	149.332	1.313.387	25.285.045	1.063.451	184.605	1.118.454
SMP	39.593	590.786	10.031.106	358.708	140.437	348.816
SMA	13.689	295.208	4.863.118	163.250	72.757	162.977
SMK	14.099	293.339	5.050.691	166.343	64.772	181.536
SLB	2.233	23.995	134.089	22.296	Data belum ada	Data belum ada

Sumber: Data verifikasi PDSPK, November 2018

RASIO PENDIDIKAN

Guru : Siswa

SD	SMP	SMA	SMK
1 : 19	1 : 17	1 : 16	1 : 17

Guru PNS : Siswa

SD	SMP	SMA	SMK
1 : 38	1 : 35	1 : 34	1 : 59

Rombel : Siswa

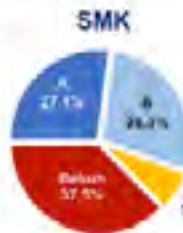
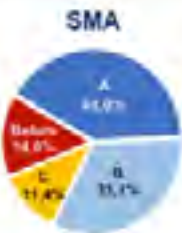
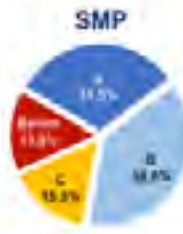
SD	SMP	SMA	SMK
1 : 23	1 : 29	1 : 30	1 : 28

Ruang kelas:Rombel

SD	SMP	SMA	SMK
1 : 1,1	1 : 1	1 : 1	1 : 1,1

Sumber: PDSPK, November 2018

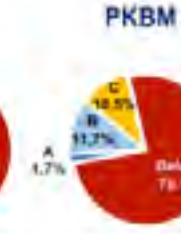
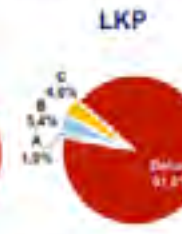
AKREDITASI SEKOLAH



Sumber: SAPS CAT, Desember 2018

Unit layanan SMK, sedang melaksanakan Program Kaitan

AKREDITASI PAUD DAN PNF

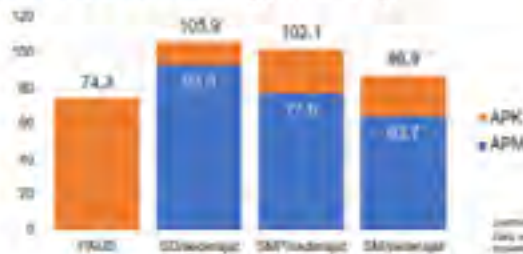


Sumber: SAPS/PAUD/PNF, Desember 2018

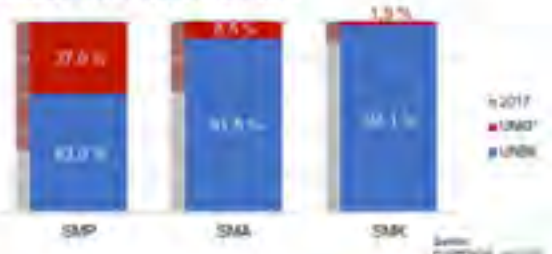
KONDISI RUANG KELAS



APK DAN APM 2017/2018 (persentase)



PELAKSANAAN UNBK

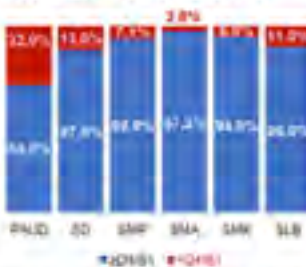


SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG

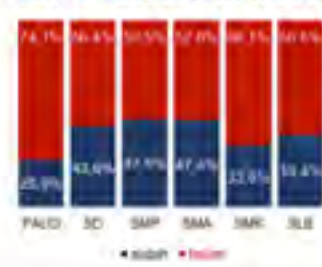
	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	54.364	57.710	35.908	75.000
MENGULANG	332.831	34.105	11.823	17.729

Sumber: Data Kemdikbud, Desember 2018

KUALIFIKASI GURU



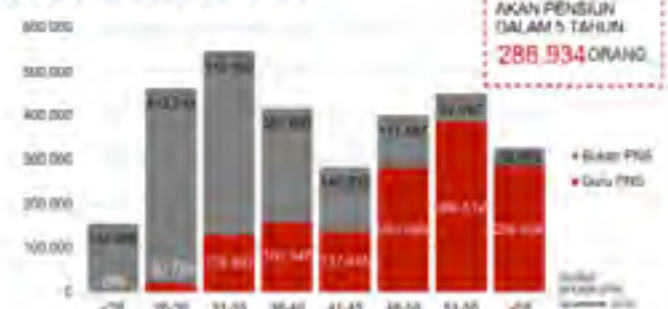
GURU TERSERTIFIKASI



HASIL UJIAN NASIONAL



GURU MENURUT USIA



GURU PNS YANG AKAN PENSUN DALAM 5 TAHUN: 286.934 ORANG.

INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL



Informasi dan Kontak: Kantor Pusat dan Kantor Wilayah
Jl. Sekeloa Selatan 1, Jakarta 10270, Telp. 021-5713141
Desember 2018



PENUTUP

Alhamdulillah, telah sampai akhir perjalanan Tahun 2019 ini. Semoga buku ini lebih dari sekedar wadah informasi dan refleksi atas perjalanan kita seTahun ini, namun juga menjadi inspirasi kita untuk memperbaiki kinerja diri demi kemajuan negeri. Terima kasih atas kerja bersama dalam menghadirkan buku ini. Atas segala kekurangan, kami berharap uluran tangan untuk perbaikan bersama.

Selamat melanjutkan ikhtiar untuk bangsa ini, terus bekerja, rajut lebih banyak prestasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami, PASKA, haturkan banyak terima kasih atas bantuan seluruh pihak, terutama kontributor dari semua unit utama di lingkungan Kemendikbud, para staf ahli dan staf khusus Mendikbud; tentunya buku ini dapat kita selesaikan karena kerja dan prestasi kita bersama. Buku ini tentunya juga merupakan cerminan dari

#SDMUnggulIndonesiaMaju.

Salam



DI BALIK LAYAR



